

DISERTASI

KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL GERAKAN PEREMPUAN DI MASA ORDE BARU: KELAHIRAN DAN DINAMIKA GERAKAN YASANTI



MACHYA ASTUTI DEWI

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2006**

**KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL
GERAKAN PEREMPUAN DI MASA ORDE BARU:
KELAHIRAN DAN DINAMIKA GERAKAN YASANTI**

DISERTASI

Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Sosial
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada Hari : Kamis
Tanggal : 31 Agustus 2008
Pukul 10.⁰⁰ WIB

Oleh :

**MACHYA ASTUTI DEWI
NIM : 090813185 D**

Lembar Pengesahan.

**DISERTASI INI TELAH DISETUIJI
PADA TANGGAL, 19 Oktober 2006**

Uch :



Promotor

Ko-Promotor


Prof. Ramlan Surbakti, M.A., Ph.D.


Prof. Dr. Natsuhun

**Telah Diuji pada Ujian Disertasi Tahap I
Tanggal 29 April 2006**

PANITIA PENGUJI DISERTASI

Ketua : Prof. Soetandyo Wignjosekbroto, M.P.A.

Anggota Prof. Raman Subaki, M.A. Ph.D.

Prof. Dr. J. Nasikun

Prof. Dr. Holman M. Suhaan

Prof. Dr. L. Dyson, M.A.

Prof. Dr. Wun Saedyatmika

Dr. F.X. Eko Armada Riyanto C.M.



**Ditetapkan dengan Surat Keputusan
Rektor Universitas Airlangga
No 3142/JO3/PP/2006
Tanggal 9 Mei 2006**

UCAPAN TERIMA KASIH

Perjalanan panjang selama tidak kurang, melelahkan, penuh cobaan dan penderitaan lahir batin. Beruntung ungkapan inilah yang paling tepat untuk menggambarkan perasaan penulis selama menyelesaikan disertasi. Namun syukur Alhamdulillah Allah SWT masih memberikan Lelahannya-Nya sehingga di tengah-tengah berbagai tantangan dan kesulitan disertasi ini bisa diselesaikan. Dengan mengiringi nama-Nya pula semua kepunyasannya yang sempat penulis alami selama menulis disertasi perlahan-lahan menghilang.

Kepada Promotor Prof. Ramdan Surbakti, M.A., Ph.D. yang di tengah-tengah kesibukannya beliau sebagai wakil ketua KPU telah menyempatkan diri membimbing penulis dengan sabar, membentulkan dan saran untuk perbaikan disertasi penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Dr. Dede Oesono sebagai Ko-Promotor 1 yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberi komentar dan masukan, serta menghubungkan penulis dengan beberapa pakar yang berkaitan dengan disertasi ini. Kepada Ko-Promotor 2 Prof. Dr. Nasitun penulis sangat berterima kasih atas kesediaan dan jernih payah membimbing penulis, meminjamkan literatur-literatur berharga, dan tidak henti selalu menginspirasi penulis untuk berpikir kritis.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Airlangga Prof. Dr. H. Faskih, Agi dan mantan Rektor Prof. Dr. Med. H. Purubito, dr. Sp.B. serta Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Prof. Dr. Muhammad Amin, dr. Sp.P yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menamatkan dan menyelesaikan Program Doktor di Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Kepada Asisten Direktur I Prof. Dr. Lela Hidayatun penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas ketulusan dan kebijaksanaan memberikan perpanjangan masa studi sehingga penulis dapat menyelesaikan program Doktor.

Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua dosen pengajar Program Studi Ilmu Sosial Universitas Airlangga yang

telah memberikan bekal pemahaman yang mendalam dalam teori-teori dan metodologi Ilmu Sosial. Kepada para pembuang jawab Mula Kuliah Perunggu Disertasi Prof. Dr. Nasukun, Prof. Dr. Herman Suharna, Dr. Dede Uetomo dan Dr. Purwo Santoso penulis sangat berterima kasih atas semua ilmu, bimbingan dan balaian-balaian tucaan yang berharga dalam mempersiapkan penulisan proposal disertasi.

Tentu saja penulis sampaikan pula kepada tim penguji proposal Prof. Ramlan Sutahuti, M.A., Ph.D., Dr. Dede Uetomo, Prof. Dr. Nasukun, Prof. Soetandyo Wijayaseburo, M.P.A., Prof. Dr. E. Dyson, Prof. Dr. Herman Suharna dan Dr. Iszer Kuncjara yang telah berkenan mengujikommentir kritik dan komentar pada naskah proposal disertasi.

Penulis juga sangat berterima kasih kepada tim penulis kelengkapan naskah disertasi Prof. Ramlan Sutahuti, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Nasukun, Prof. Soetandyo Wijayaseburo, M.P.A., Prof. Dr. Herman Suharna, Prof. Dr. E. Dyson, Dr. Partono, S.I. dan Prof. Dr. Wuri Suedjarmoko yang telah berkenan memberikan komentar dan masukan yang berharga untuk perbaikan naskah. Penulis sangat berterima kasih kepada tim Dr. Partono, S.I. yang telah dengan seksun membaca dan mengoreksi naskah disertasi halaman demi halaman. Ubed baik Beliau dalam membantu dan memberikan dukungan moral dengan penuh kerelabasan kepada penulis sebagai sesama perempuan sungguh tak akan pernah terlupakan. Tanpa dukungan Beliau penulis mungkin tak akan pernah sampai di akhir perjalanan studi S4 dengan keberhasilan.

Terakhir tentu saja penulis sampaikan kepada para penguji Ujian Akhir I (tertutup) Prof. Soetandyo Wijayaseburo, M.P.A., Prof. Ramlan Sutahuti, M.A., Ph.D., Prof. Dr. Nasukun, Prof. Dr. Herman Suharna, Prof. Dr. E. Dyson, Prof. Dr. Wuri Suedjarmoko dan Dr. I. X. Ika Armada Riyanto UM yang telah berkenan menguji, mengomentari dan menguji naskah.

Kepada pimpinan proyek L.K.Git. Digeni Diki, ketua Yayasan Aji Dharmo Hibakhi di Jakarta dan Redaksi LPN "Veteran" Yogyakarta yang telah memberikan dukungan beasiswa dan dana penelitian untuk menyelesaikan studi program doktor ini penulis mengucapkan rasa terung kasih yang sebesar-besarnya.

Kepada Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP UPN "Veteran" Yogyakarta penulis berterima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk melanjutkan studi dan memberi izin bebas mengajar untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada para penerjemah Yayasan Annisa Swasti: Dr. Sri Kusyaban, Prof. Dr. Siti Muliawati Widayanti, Drs. Noorjannah Djoharini dan Drs. Badi Walayuni, M.M yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai guna mendapatkan data. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Drs. Nabdroh Asaurinoh mantan direktur Yayasan dan mbak Amin Muhyamah yang sekarang menjabat direktur eksekutif Yayasan atas waktu dan segala kebaikannya telah memberikan semua informasi tentang aktivitas Yayasan dan pengalaman di lapangan selama menjadi eksekutif Yayasan. Penulis juga berterima kasih kepada para staf Yayasan mbak Nur Hardani, mbak Fitriyanti, mbak Umi Arah, mbak Mariana dan mbak Riana atas keakraban dan iklim persahabatan yang penulis dapatkan selama 2 tahun melakukan penelitian di Yayasan. Terutama kepada mbak Nur Hardani penulis berterima kasih atas kebaikannya dan kerelaannya membantu mengumpulkan dokumen-dokumen Yayasan tahun 1982 hingga 1998.

Kepada Drs. Habib Chirizil, M.A. penulis berterima kasih atas waktu yang diberikan untuk melakukan wawancara di tempat-tempah kesubukan beliau di Komnas HAM. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada ibu Idrayah, ibu Setyo, mbak Mariana dan ibu Ireni sebagai mantan anggota kelompok dampungin Yayasan yang telah bersedia diwawancarai.

Penelitian disertasi ini tidak lepas dari komentar-komentar dan masukan-masukan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada almurnya Prof. Herbert Feih, almurnya Dr. Marsour Fahih dan Dr. Saskia Wieringa atas komentar-komentar yang diberikan terutama pada tahap penyusunan proposal disertasi.

Kepada rekan-rekan Program Doktor Ilmu Sosial: Dr. Soetanto, M.Si., Prof. Dr. Thomas Santoso, Dr. Ferdjand Kesekunju, Dr. Ranyu Walayana, Dr.

Mestika, Dr. Nyoman Subanda, Dr. Andi Mappiare, Drs. A. Hamid, M.Si. dan Drs. Bistoro, M.Si. penulis ucapkan terima kasih atas perkenalannya, kekompatan dan motivasi yang selalu diberikan

Kepada rekan-rekan dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional UIN "Veteran" Yogyakarta penulis berterima kasih atas doa dan semangat yang diberikan selama penulis menyelesaikan studi. Terutama kepada sahabat-sehaji: Drs. Sapropo R. Ilhedar, M.Si. penulis mengucapkan terima kasih atas komentar-komentarnya, jenis penyahnya membantu penulis mengempulkan bahan-bahan penulisan disertasi. Kesediaannya mendengarkan keluh kesah penulis, serta dukungannya yang tidak henti bagi penulis. Demikian pula rasa terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada rekan Asep Saepudin, S.I.P., M.Si dan Aneswari Herawanto, S.I.P., M.Si. atas referensi dan-dok yang menentramkan dan menyemangatkan hati

Akhirnya penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda almarhum Drs. H. Sahadi, S.H. yang selama hidup belum tentu pernah membacakan putrinya agar berhasil mencapai gelar doktor. Semoga Allah memberikan tempat terbaik bagi ayah. Kepada ibunda Hj. Siti Zainab, ananda juga ingin mengucapkan terima kasih atas doa-doa ibu demi keberhasilan studi ananda. Untuk ayah mertua Drs. Sumarwan, M.Si dan almarhumah ibu mertua Sri Kajati penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas doa dan kebaikan ayah dan ibu mertua setiapnya dan mengasuh putri ananda selama ananda menamatkan studi. Ucapan terima kasih juga terdengar penulis ucapkan untuk suami tercinta Ir. Irwan Soejanto, M.T. yang telah membacakan, mendukung, berbagi peran dan sangat memahami kesulitan penulis selama menyelesaikan disertasi. Untuk bibi-bibi-bidadari kecikku tercinta: Tahiba Ardeta dan Elmira Farah Effa mama ingin memungkat maaf setulus-tulusnya karena telah menertawakan kalian. Selama menulis diserasa mama kurang memiliki waktu dan kasih sayang, serta kurang sabar dalam mengurus kalian. Terima kasih atas semua pengorbanan kalian untuk mama. Jadikan mama sebagai cermin agar kelak kalian menjadi perempuan-perempuan tangguh.

RINGKASAN

Konteks Global dan Nasional Gerakan Perempuan di Masa Orde Baru: Kelahiran dan Dinamika Gerakan Yasanti

Machya Astuti Dewi

Penelitian ini merupakan kajian tentang kelahiran dan dinamika gerakan Yasanti, sebagai sebuah organisasi non-pemerintah (ormp) perempuan yang lahir pada masa Orde Baru. Penelitian difokuskan pada pembahasan tentang bagaimana konteks global dan nasional mendorong dan mempengaruhi kelahiran dan dinamika gerakan Yasanti sebagai sebuah partai gerakan feminis di masa Orde Baru.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan studi kasus berperspektif feminis. Data dikumpulkan dari hasil wawancara dengan para pendiri Yasanti, aktivis Yasanti dan para perempuan dunnungan Yasanti, penelusuran dokumen-dokumen Yasanti (akte kelahiran, laporan tahunan, resolusi rapat) serta penelusuran berbagai artikel dari surat kabar, jurnal, majalah dan buku-buku tentang situasi politik Indonesia sejak akhir 1970-an hingga pertengahan 1990-an. Perspektif feminis digunakan selama proses wawancara, yaitu dengan memberikan kesempatan yang luas kepada subjek penelitian untuk menaukkan pengalaman-pengalaman mereka. Semua data kemudian disistematisasi dan dikategorisasi secara kronologis dan tematis dan kemudian dianalisis dengan mengaitkan faktor kesempatan politik, struktur mobilisasi dan pembangkitan dengan kelahiran dan dinamika gerakan yang dilakukan oleh Yasanti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelahiran dan dinamika gerakan Yasanti sepanjang masa Orde Baru sangat dipengaruhi oleh konteks nasional dan internasional dekade 1980-an hingga 1990-an. Fenomena marginalisasi perempuan dalam pembangunan yang terjadi di berbagai negara mengilhami kelahiran Yasanti ketika pada saat yang bersamaan konteks global dan nasional

memberi perhatian pada upaya pemberdayaan perempuan. Akan tetapi konteks sosial budaya masyarakat yang masih diwarnai oleh kuatnya ideologi gender yang memsubordinasikan perempuan (patriarki) menyebabkan Yayasan harus menggunakan taktik masuk melalui organisasi PKK sebagai organisasi perempuan yang diterima oleh negara dan masyarakat dalam melakukan pemberdayaan perempuan.

Konteks global dan nasional selanjutnya mempengaruhi dinamika gerakan Yayasan melalui proses pembangkitan wacana global yang mempengaruhi Yayasan dalam menentukan agenda gerakan. Dengan kata lain keragaman agenda gerakan Yayasan sejak dekade 1980-an hingga 1990-an merupakan cerminan pengaruh wacana yang sedang mengemuka di tingkat global, dimulai dari pemerkataan *Women in Development (WID)* pada tahun 1980-an hingga pendekatan *Gender and Development (GAD)*, dan isu kesehatan reproduksi pada tahun 1990-an. Perubahan agenda gerakan tidak saja diwarnai oleh pembangkitan isu global, namun juga didukung oleh peluang untuk mendapatkan dana dari lembaga lembaga donor. Peluang dana dari lembaga donor itu sendiri sangat terkait dengan isu global yang sedang mengemuka sebagai implikasi dari penyelenggaraan Konferensi Perempuan Sedunia sejak Nairobi tahun 1985 hingga Beijing pada tahun 1995, dan Konferensi Kependudukan di Kairo tahun 1994.

Penguatan isu hak asasi manusia (HAM) pada awal dekade 1990-an menjadi tonggak bagi Yayasan untuk melakukan pergeseran strategi gerakan dari strategi elumem (pada 1980-an) ke strategi politik dengan melakukan advokasi perubahan, antara lain dengan mengorganisir aksi mogok buruh ketika pergeseran strategi dilakukan. Yayasan diuntungkan oleh perubahan konteks politik nasional, yaitu terjadinya konflik elit nasional yang diiringi dengan kebangkitan gerakan oposisi dan penyebaran wacana HAM. Konteks nasional ini menjadi kesempatan politik bagi Yayasan untuk memobilisasi dukungan dari para aktivis mahasiswa dan aktivis urban sebagai bagian dari kelompok oposisi elite baru dalam melakukan pengorganisasian aksi mogok buruh. Namun demikian pergeseran strategi gerakan ke arah politik membawa implikasi pada keamanan dan kelangsungan gerakan Yayasan, yaitu memukulnya kemampuan aparat desa dan

aparatus keamanan yang dibayar oleh perusahaan pada aktivitas Yasanti. Oleh karenanya Yasanti kemudian sangat berhati-hati dalam memobilisasi aksi buruh dan melakukan kegiatan-kegiatan kuratifitas, seperti kursus menjahit, kursus mengetik, kursus Bahasa Inggris dan keterampilan agar tidak dianggap aparat Strategi *winning union* dengan jalan menghembuskan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mobilisasi aksi buruh dan menanti aktivisnya dari lapangan untuk sementara waktu pernah pada dibukukan ketika kondisi di lapangan tidak memungkinkan Yasanti melaksanakan kegiatan

Secara konseptual hasil penelitian ini mendukung sebagian argumen McAdams, McCarthy dan Zald tentang keterkaitan antara kesempatan politik, mobilisasi gerakan dan pembungkahan dengan kelahiran dan perkembangan gerakan sosial. Namun demikian disertasi ini juga memberi sumbangsih pada aspek-aspek mobilisasi dan pembungkahan kesempatan politik yang tidak dililik oleh McAdams dan kawan-kawan, yaitu penyebutan *ways* internasional sebagai pendukung kelahiran dan dinamika gerakan perempuan dan mobilisasi dukungan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat yang lahir berkat konteks politik yang berubah. Dua aspek ini tidak dilihat oleh McAdams dan kawan-kawan yang ketika memusekkan perhatian pada struktur politik dan dukungan elite politik sebagai elemen utama kesempatan politik bagi mobilisasi gerakan sosial

SUMMARY

The Global and National Context of Women's Movement in New Order Era: The Emergence and Dynamics of YASANTI

Machya Astuti Dewi

This research focuses on the analysis of emergence and dynamics of Yasanti's movement, the first woman Non-Governmental Organization (NGO) adopting feminist perspective in the Indonesian New Order era. This research tries to explore how global and national contexts influenced the emergence and activities of Yasanti's movement. This research is a qualitative feminist case study.

First of all, the researcher collected data on social and political situations in Indonesia during 1980's and 1990's from newspapers, books, journals and magazines. Next, the researcher examined Yasanti's documents (annual reports, meeting reports, newsletters and flyers), and interviewed some of Yasanti's activists. To get broader understanding of Yasanti's activists' experiences, the researcher adopted feminist perspective during the interview process. Then the researcher categorized and analyzed all raw materials. The analysis was focused on political opportunity, mobilizing resource and framing process on the emergence and activities of Yasanti's movement.

The result showed that the emergence and dynamics of Yasanti during New Order era were influenced by global and national context. Women marginalization in many developing countries encouraged the emergence of Yasanti. At the same time, the global and national context offered opportunity for Yasanti to emerge.

The global and national context influenced the dynamics of Yasanti through the framing of global issues in which inspired Yasanti in focusing its movement agenda. The multiplicity of Yasanti's agenda since 1980's to 1990's showed the influence of global issues, from Women in Development (WID) approach in 1980's to Gender and Development (GAD) approach and reproductive health issue in 1990's. The dynamics of movement agenda were not only shaped by global issue framing. The opportunity to get fund from funding agencies also enabled Yasanti to respond the global issue. The funding agencies itself linked their priority program with global woman issues as the implication of World Women Conferences from Nairobi in 1985 to Beijing in 1995, and Population Conference in Cairo 1994.

The 1990's Human Right issue became a frame for Yasanti to change its strategy from economic strategy in 1980's to political strategy in 1990's by organizing labour strikes and advocating labour cases. Since then Yasanti did not only organize woman labour, but also man labour. This condition endorsed Yasanti, as a woman organization to implement gender perspective on man labour community. At the same time Yasanti changed its strategy, the national political context i.e. national elite conflict followed by the emergence of mass opposition

movements and dispersion of human right discourse opened opportunity for Yasanti to mobilize support from student and NGO activists in mobilizing labour strikes.

After changing its strategy, Yasanti maintained some old programs for its survival. The New Order restricted and repressed any labour demonstration. To avoid state scrutiny and repression, some old activities like sewing course and *karawitan* were adopted by Yasanti to camouflage its main activities of labour discussions, mobilizations and advocacies. The implementation of this dangerous activities depended on national and local political situation. Like in the mid of 1996 some Yasanti's activities in Sukoharjo must be cancelled because the political situation was dangerous enough for Yasanti to arrange some labour discussions and gender training agenda for women labour.

Conceptually, these findings show two implications of political opportunity structure, mobilization structure and framing process theories that were not seen by McAdam, McCarthy and Zald. First, international discourses influence the emergence and dynamics of women's movement. Second, the resource mobilization from non-state actors that grow as the result of the change of political context.



ABSTRACT*The Global and National Context of Women's Movement in New Order Era: The Emergence and Dynamics of Yasanti*

Machya Astuti Dewi

There were few movements, especially women's movement that could survive under the New Order regime of Indonesia. The regime oppressed all movements and all non-governmental organizations except some that were developed by the regime. Yasanti, a women's movement based in Yogyakarta, was one of few that emerged at that time when the regime was so powerful. However, Yasanti remained to exert actively until nowadays. The research tries to explain how global and national context influenced Yasanti's emergence and decline.

To do so, the researcher collected data on social and political situations in Indonesia during 1990's and 1990's from newspapers, books, journals, magazines, Yasanti's documents (annual reports, meeting reports, newsletters and others) and interviewed some of Yasanti's activists. The data analysis was focused on political opportunity structure, mobilizing structure and framing process theories of McAdam, McCarthy and Zald.

This research finds some influences of global and national context as follows. First, women marginalization in many developing countries inspired some women activists in Yogyakarta to found Yasanti. Second, the global context influenced Yasanti in focusing its movement agenda. Yasanti get inspiration from global issues on women through framing process. Besides that, Yasanti was to adjust itself to donor's requirements. Third, issues on human rights in the 1990's became a frame for Yasanti to change its strategy from grassroots in the 1980's to political in the 1990's. Fourth, the national political context influenced on the ebb and flow of Yasanti's movement in the 1990's. On the one hand, conflict of New Order elites and the dispersion of human rights discourse enabled Yasanti to mobilize support from student and NGO activists. On the other hand, however, New Order oppression compelled Yasanti to camouflage its movement with other activities. These findings show two conceptual implications that were not seen by McAdam, McCarthy and Zald. First, international discourses influence the emergence and dynamics of women's movement. Second, the resource mobilization from non-state actors that grow as the result of the change of political context.

Keywords: women's movement, *gerakan perempuan*, global issues, Indonesian politics, political opportunity structure, mobilization structure, framing

DAFTAR ISI

	Hal	
LEMBAR PENGESAHAN	iii	
UCAPAN TERIMA KASIH	iv	
KINGKASAN	ix	
SIKAP	xii	
ABSTRAK	xiv	
DAFTAR ISI	xv	
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xviii	
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN	xx	
BAB I	PENDAHULUAN	
A	Latar Belakang Masalah	1
B	Perumusan Masalah	11
C	Tujuan Penelitian	14
D	Tinjauan Kepustakaan Tentang Gerakan Perempuan	14
E	Kerangka Konseptual	27
E 1	Struktur Kesempatan Politik	31
E 2	Struktur Mobilisasi	36
E 3	Peningkatan (<i>freewill</i>)	49
F	Metode Penelitian	
F 1	Identifikasi Sumber Informasi	44
F 1 1	Identifikasi Informan	45
F 1 2	Identifikasi Dokumen	46
F 2	Pengumpulan Data Lapangan	47
F 2 1	Wawancara	48
F 2 2	Kajian Dokumen	54
F 3	Analisis dan Interpretasi data	58
BAB II	PROFIL YAYASAN ADHISA SWASTI (YASANTI)	
A	Sejarah Kelahiran	60
B	Struktur Organisasi	62
C	Aktivitas dan Kelompok Dampingan	64
C 1	Perempuan Buruh Petani di Kebunrojo Kulonprogo	65
C 2	Buruh Perempuan di Ungarua	67
C 3	Pramuniaga di Yogyakarta	72
C 4	Buruh PT Smex Sukoharjo	74
C 5	Remaja Putri Putus Sekolah di Yogyakarta	78
C 6	Buruh Gendong (<i>Freelance/contracting</i>)	

	Pasar Bersejarah Yogyakarta	80
	D. Pendidikan	83
	E. Jaringan Kerjasama	86
BAB III	KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL KELAHIRAN YASANTI	
	A. Konsep Kesidhakadilan Global dan Nasional	89
	D. Gerakan-Gerakan Melalui Ketidakadilan	
	B.1 Gerakan Mahasiswa	95
	B.2 Kritik Organisasi Non-Pemerintah (Omop)	101
	B.3 Reaksi Aktivas Perempuan	109
	C. Kelahiran Yasanti	110
	C.1. Peluang Pertumbuhan Omop	111
	C.2 Peluang Global Perempuan Dunia pada Era Marginalisasi Perempuan	117
	C.3 Dorongan Aktivas Omop	121
BAB IV	DINAMIKA GERAKAN DARI PENDEKATAN <i>WOMEN IN DEVELOPMENT</i> KE ISU KESEHATAN REPRODUKSI	
	A. Wacana Keperempuanan Global	
	A.1 Penyebaran Pendekatan <i>Women in Development</i> (WID)	127
	A.2 Pergeseran ke Pendekatan <i>Gender and Development</i> (GAD)	131
	A.3 Penyebaran Isu Kesehatan Reproduksi	135
	B. Dinamika Agenda Gerakan Yasanti	
	B.1 Pengaruh Pendekatan WID	137
	B.1.1 Strategi Masuk Komunitas	138
	B.1.2 Agenda Tersebut	142
	B.1.3 Penolakan terhadap PKK	146
	B.1.4 Program Menjahit sebagai <i>Entry-Point</i>	149
	B.1.5 Mobilisasi Dukungan Aparat Desa	153
	B.1.6 Implikasi Konferensi Nairobi. Mobilisasi Dana dan Kerjasama Jaringan	155
	B.2 Pergeseran Yasanti ke Pendekatan GAD	159
	B.2.1 Peluang Dana dari Lembaga Donor	160
	B.2.2 Dari Agenda Tersebut ke Agenda Terbuka	163
	B.2.3 Mobilisasi Jaringan Aktivistik	168
	B.3 Pertanian Yasanti pada Era Kesehatan Reproduksi	174
	B.3.1 Mobilisasi Dana	176
	B.3.2 Mobilisasi Jaringan	178

BAB V	PERGESERAN STRATEGI GERAKAN	
	A Penguatan Isu Hak Asasi Manusia	181
	B Kebangkitan Kelompok Operasi dan Penyebaran Isu HAM di Indonesia	183
	C Pergeseran Strategi Gerakan Yasanti	
	C 1 Latar Belakang Pergeseran	189
	C 2 Deklarasi Pembukaan Membuka Kesadaran Buruh	192
	C 3 Mobilisasi Aksi Buruh	
	C 3 1 Mobilisasi Aksi Buruh PT Batamtex	194
	C 3 2 Aksi Mogok di PT Nisan Hoseni	199
	C 3 3 Aksi Mogok di PT Karya Puspa	202
	C 3 4 Tekanan Kesungguhan Perusahaan dan Aparat Militer	204
	C 3 5 Strategi Kelangsungan Gerakan	
	C 3 5 1 Pendekatan pada Aparat Desa	208
	C 3 5 2 Kegiatan Kampanye Politik	209
	C 4 Yasanti di Soeharto	
	C 4 1 Mobilisasi melalui SPK	212
	C 4 2 Gerakan-Gerakan Landungan	219
	C 4 3 Tekanan Aparat dan Strategi Yasanti	221
	D Terpinggirkannya Agenda Pemberdayaan Perempuan	225
	E Yasanti Pasca Soeharto: Peluang yang Lebih Terbuka	228
BAB VI	YASANTI DALAM PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL	
	A Pendukung Kelahiran Gerakan	232
	B Pembingkaihan dan Mobilisasi Gerakan	238
	C Kontak Politik dan Strategi Gerakan	243
	D Peluang Dana dan Kelangsungan Gerakan	244
	E Yasanti dalam Perspektif Gerakan Feminis	255
BAB VII	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN	
	A Kesimpulan	261
	B Implikasi Teoritik	263
	C Refleksi Kritis	270
	DAFTAR PUSTAKA	285
	DAFTAR LAMPIRAN	
	Lampiran Yasanti	
	Akte Notaris Kelahiran Yasanti	
	Rekapitulasi Kegiatan Yasanti Tahun 1987-1993	
	Contoh Surat Yasanti	

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Jumlah Kelompok dan Kegiatan Buruh Industri di Pagaran Tahun 1988-1998	71
Tabel 2.2	Jumlah Kelompok dan Kegiatan Prantemaja di Yogyakarta tahun 1987-1995	71
Tabel 2.3	Jumlah Kelompok dan Kegiatan Buruh Industri di Sukoharjo 1992-1995	77
Tabel 2.4	Jumlah Kelompok dan Kegiatan Kemaja Putra Patus Sekolah Tahun 1987-1995	79
Tabel 2.5	Jumlah Kelompok dan Kegiatan Buruh Gembong Di Pasar Heringhango Yogyakarta Tahun 1994-1998	81
Tabel 2.6	Kegiatan dan Status Kelompok Danjangan, Yasanri	82
Tabel 4.1	Perbedaan Pendidikan W/ED dan CIAID	133
Tabel 4.2	Jaringan Yasanri untuk Kampanye Kesetaraan Gender	169
Tabel 4.3	Perjanjian Wacana Global bagi Agenda Gerakan Yasanri	174
Tabel 4.4	Angka Kasus Pemogokan Buruh	187
Tabel 6.1	Kesempatan Politik Pendukung Kelahiran Yasanri	256
Tabel 6.2	Model Hubungan Ormas dan Negara	258
Tabel 6.3	Strategi Kesempatan Politik dan Mobilisasi Gerakan Yasanri	261

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Model Pengorganisasian Buruh di Linggajati	70
Gambar 2.2	Model Pengorganisasian Buruh di Sukoharjo	75



DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

APWSI	<i>Asia Pacific Women's Solidarity Link</i>
ACEFD	<i>Asian Cultural Forum on Development</i>
CAW	<i>Central Asia Women</i>
GAATW	<i>Global Alliance Against Traffic in Women</i>
UAD	<i>Gender and Development</i>
GAATPI	Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia
IIP	Hubungan Industri di Pancasila
HMJ	Himpunan Mahasiswa Islam
IME	<i>International Movement of Women</i>
INJID	<i>International Journal on Indonesian Development</i>
IPM	Dewan Pelajar Muhammadiyah
KAKIP	Komite Anti Kekerasan terhadap Perempuan
KEPMI	Kelompok Pekerja Merdeka Indonesia
Kowari	Kongres Wanita Indonesia
LEHC	Lembaga Bantuan Hukum
LDKW	Latihan Dasar Kelompok Wanita
LPKS	Lembaga Penelitian Pendidikan dan Pengembangan Masyarakat dan Sosial
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
LSP	Lembaga Studi Pembangunan
NFLS	<i>Network Forward Women's Movement</i> , dokumen hasil konferensi perempuan sedunia ketiga di Manila, Korea
NKK	Normalisasi Kehidupan Kampus
Organisasi Perseari	Organisasi Non-Pemerintah
PERK	Pesatuan Wanita Republik Indonesia
PII	Peraturan Hubungan Kerja
PII	Belajar Islam Indonesia
PKI	Partai Komunis Indonesia
PPH	Persatuan Perhimpunan Perempuan Indonesia
PQS	<i>Political Quarterly Structure</i>
PPBI	Pusat Perjuangan Buruh Indonesia
PRD	Partai Rakyat Demokratik
PWKI	Persatuan Wanita Kristen Indonesia
RST	<i>Rencana Atapbudhutan Street</i>
SHSI	Serikat Buruh Sejahtera Indonesia
SHIPY	Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta
SEARICE	<i>Southeast Asian Regional Institute for Community Education</i>
SMID	Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi
SMO	<i>Social Movement Organization</i>
SP	Solidaritas Perempuan
SIPK	Serikat Pekerja Seluruh Indonesia

<i>Siare Ahuaw</i>	Polisi Gender Ode Hari yang menempatkan perempuan sebagai pelawan suami, anak-anak, keluarga, masyarakat dan negara
UB	Tasala Bersama
WALHI	Wahana Lingkungan Hidup
WID	<i>Women in Development</i> , sebuah pendekatan untuk melibatkan peran perempuan dalam pembangunan
<i>Komisi Perempuan</i>	Kebijakan PBB untuk memajukan perempuan
WTO	World Trade Organization
YASAM	Yayasan Annisa Swasti
YKI	Yayasan Kesehatan Keluarga
YKKI	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
YKND	Yayasan Tjeret Nyi Dier



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak dekade 1980-an gerakan feminis untuk menentang sistem patriarki dan melakukan pembaharuan untuk *empowerment* atau pemberdayaan perempuan lintas-lasi maruk¹ di Indonesia. Perkembangan gerakan ini ditandai dengan banyaknya aktivis mendirikan serung perempuan yang peduli terhadap permasalahan perempuan akibat ketidakadilan gender. Selama dekade 1980-an berdiri 4 organisasi perempuan dalam bentuk organisasi non-pemerintah (unhnp) perempuan dan kelompok studi, dan 6 organisasi perempuan radikal dalam bentuk kelompok aksi dan kelompok kecil swadana yang kesemuanya menggunakan wacana feminis untuk menentang politik gender Orde Baru²:

¹ Istilah 'kembali maruk' sendiri digunakan untuk menunjukkan bahwa perempuan telah berkemah di kalangan aktivis perempuan sebelum masa Orde Baru. Mereka adalah tokoh-tokoh perempuan dan organisasi perempuan Isian Sedar, Anusjak, Perwan dan Kierwan yang sudah memelihara hak-hak kaum perempuan, terutama anumerik ditelungkupnya 101 Perempuan dan menentang poligami. Walau kaum feminis ini tidak lagi terdengar setelah reform Orde Baru memusatkan perhatian domeur daku perempuan keisu pemberdayaan Ekonomi Wanita dan PKK.

² Yanti Kijaji menjelaskan anumeri organisasi perempuan dan organisasi perempuan radikal. Organisasi perempuan yang terdiri dari satu orang hateratuk yanggi dan tiga kelompok studi adalah organisasi organisasi yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok-kelompok mahasiswa, namun bukan kelompok yang progresif. Kelompok ini memusatkan perhatian pada isu-isu perempuan yang diangkat oleh gerakan mahasiswa pada saat itu. Sementara itu organisasi perempuan radikal yang terdiri dari lima kelompok aksi dan satu kelompok kecil swadana memiliki hubungan yang dengan "kelompok studi progresif" yang maruk pada akhir 1980-an. Kelompok ini memfokus pada mahasiswa terlibat dalam gerakan dan membentuk kelompok perempuan sebagai upaya mobilisasi perempuan dalam petikun mahasiswa. Organisasi perempuan radikal cenderung melihat kesempatan gender berada di bawah kepemimpinan kelas. Lihat Yanti Kijaji, *The Emergence of the Women's Movement in the New Order State and Its Impact on Women*, Makalah dalam Konferensi WIPK (Indonesian Women and Class: Past and Present Opportunities and Threats) 9-12 Desember 2000, KIFLU, London, Hal 4.

Seiring dengan munculnya kelahiran organisasi-organisasi perempuan berpandangan feminis secara pribadi para aktivis¹ gerakan perempuan juga mengembangkan analisis persoalan-persoalan perempuan melalui perspektif feminis. Dan kesadaran hukum para aktivis perempuan menyurutkan produk hukum di Indonesia yang mendiskriminasi hak-hak perempuan untuk menyebut kritik terhadap UU Perkawinan di Indonesia yang menetapkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga. Mereka juga melancarkan kritik atas pengabaian hak-hak dasar perempuan oleh pemerintah. Di bidang ekonomi para aktivis banyak menyadari nasib yang menimpa pekerja perempuan, terutama dalam kaitannya dengan upah yang rendah, jaminan keselamatan kerja yang minim, dan pelecehan seksual. Dari kesadaran politik para aktivis mengkritik ideologi gender dan kebijakan-kebijakan rezim Orde Baru yang dipaksakan, antara lain program K4 dan pembenahan Dharma Wanita, Dharma Perwati dan PKK. Sementara itu, dari sudut religius beberapa aktivis melihat bahwa agama harus berperan sebagai praloka mengoptimalkan perempuan. Mereka berupaya menyebarkan ideologi perempuan untuk menyadarkan perempuan bahwa mereka adalah makhluk yang setara dengan laki-laki. Dalam kelompok Islam upaya ini dilakukan dengan menafsir ulang hadith dan memisalkanikannya sebagai bahan penyadaran.

Feminisme di Indonesia sebenarnya bukan baru berkembang sejak dekade 1980-an. Akar gerakan feminis telah tertanam sejak Kaatini menggagas arti penting sekolah bagi anak perempuan pada awal abad ke-19. Gerakan berlanjut

¹ Beberapa di antara aktivis perempuan yang aktif berorganisasi feminis ketika beribrahim adalah Nurul Huda, Teeti Heras, Supriyah Sidi, Nurwahana Karyaningrum, Tah Karyawati, Mardiyah Wardah Hafida, Sinta Nurwati, Rukma Lukman dan Linda Agilap.

dengan kelahiran organisasi-organisasi perempuan pada masa perjuangan kemerdekaan. Pada tahun 1912 berdiri organisasi perempuan yang pertama di Indonesia, yaitu Putri Mardika. Organisasi ini memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar berani tampil di depan umum, membuang rasa takut dan menanggalkan kebodukan perempuan agar sama dengan laki-laki.

Organisasi perempuan yang dikenal sangat radikal pada masa perjuangan kemerdekaan adalah Istari Sedar. Organisasi ini ikut menyebarkan kesadaran bagi perempuan Ketan Istari Sedar, yaitu Sunarni Pringgodigdo mengutip pendapat feminis Amerika Charlotte Perkins-Stetson dengan mengatakan bahwa perkawinan untuk rezeki hanya satu langkah jaraknya dari pelacuran. Dalam Kongres Persatuan Perhimpunan Istri Indonesia (PPI) ke-4 tahun 1933 secara berapi-api ia menentang poligami.

Laki-laki persis seperti ayam jago, di antara-mitulah itu naksatri betula...
Nika perempuan diajar bahwa perkawinan adalah tujuan mereka dan pekerjaan rumah tangga satu-satunya pekerjaan mereka, maka mereka tidak diajar agar pandai bekerja dengan otak dan badan mereka ...
(Wieringa, 1999: 133-136)

Mengenai poligami tokoh-tokoh dari organisasi perempuan Aisyiyah dan Perwari mengemukakan kebebasan serupa. Nyonya Adungpuspita, seorang anggota Aisyiyah mengatakan bahwa meskipun secara resmi golongan perempuan Muslim menerima poligami karena Al-Quran tidak melarangnya, namun secara pribadi sejumlah tokoh pimpinan Aisyiyah tidak menyetujuinya. Sementara itu tokoh-tokoh Perwari menentang poligami dengan menolak Keputusan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1932 yang mengatur tunjangan pensiun bagi janda pegawai

hubungan dekat dengan PKI¹ dan pembantaian telah membantu PKI menyiksa para jenderal dalam aksi pembunuhan itu. Sebagaimana orang-orang PKI para anggota tersebut akhirnya ditangkap, dinterupsi, disiksa dan dipenjarakan oleh rezim Soeharto.² Kampanye-kampanye anti Gierwani yang dilancarkan oleh rezim Soeharto menubuh ekspansi dan akhernya mati.³

Di bawah kepemimpinan Soeharto, Orde Baru menggunakan sistem politik yang didasarkan pada negara yang kuat dengan elit penguasa yang antara lain terdiri dari militer, burokrasi sipil, teknokrat dan kapitalis pemerintah. Para penguasa tersebut mempunyai kapasitas untuk melaksanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengontrol kebijaksanaan-kebijaksanaan serta program-program di bawah payung pejabat eksekutif yang berkuasa. Rezim Orde Baru menggunakan suatu format politik yang bertujuan untuk menjamin posisi dominasi negara, khususnya eksekutif dan melakukan depolitisasi masyarakat agar tetap berada di bawah kontrol eksekutif (Gibson, 1999: 76)

Sebagai bagian dari upaya depolitisasi negara rezim Soeharto mengambil kebijakan menempatkan pemerintahan di sektor domestik. Proses depolitisasi

¹ Mendapat memiliki hubungan dekat dengan PKI penelitian tentang Gierwani yang pernah dilakukan Sukma Widjaya menunjukkan bahwa Gierwani bukan organisasi PKI. Terlebih itu juga ditunjukkan oleh beberapa mantan anggota Gierwani yang sudah dalam dikawatir Sukma Widjaya tersebut di Yayasan Eyang Nya. Orde Soeharto tahun 2000

² Menurut pengakuan para anggota Gierwani dan saksi mata yang melihat langsung pembunuhan para pemimpin Gierwani bahwa di antara pemimpin dan anggota Gierwani mendapat sambutan sebagai sesama perampokan atau ketika berada di penjara antara lain ditanyainya di depan anggota PKI tidak ada di dalam kemahannya dipukul dan ditanyainya dalam keadaan telanjang. Dengan anggota PKI yang juga sudah ditanyainya diusuk kemahannya dengan siapa tidak adanya dan dipukul oleh aparat di penjara

³ Widjaya memberikan istilah "formisme yang merupakan gerakan pemuda" untuk menggambarkan pembunuhan Gierwani oleh rezim Orde Baru. Untuk penjelasan ini lihat Sukma Widjaya, "Aborted Revolution in Indonesia: A History of Indonesian Society's Permeation" dalam *Society and Politics in Indonesia and Southeast Asia* (Albany: Lewis, 1988)

terhadap perempuan dilakukan dengan membentuk organisasi perempuan Dharma Wanita sebagai organisasi isteri pegawai negeri sipil dan organisasi PKK. Dharma Wanita dijadikan untuk mengontrol aktivitas para isteri pegawai negeri dan pegawai negeri itu sendiri yang kerjanya dipengaruhi oleh kebijakan isteri mereka di Dharma Wanita.⁷ Sementara itu PKK digunakan sebagai saluran penyampaian program-program pemerintah bagi kaum perempuan terutama di pedesaan PKK menjadi bagian dari mesin negara untuk mengarahkan masyarakat dan mendukung kebijakan pemerintah

Orde Baru mengembangkan ideologi gender yang hidup di masyarakat sebagai alat untuk mengukuhkan posisi subordinat perempuan di hadapan laki-laki dan negara. Hal ini nampak dalam visi Puncak Dharma Wanita yang mengukuhkan eksistensi perempuan sebagai henku (1) wanita sebagai istri pendamping suami, (2) wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda, (3) wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga, (4) wanita sebagai pencari nafkah tambahan, (5) wanita sebagai anggota masyarakat, terutama organisasi wanita, badan-badan sosial dan sebagainya yang menyambungkan tenaga kepada masyarakat (Rahayu, 1996: 31-33).

Julia Suryakusuma (1991: 73) menggunakan istilah "state woman" dan "bureaucratism" terhadap proses konstruksi sosial kaum perempuan Indonesia yang dilakukan oleh Orde Baru. Istilah negara mencakup suatu konsep yang meliputi unsur-unsur ekonomis, politik dan kultural. Dalam struktur perempuan

⁷ Hal banyak istri-istri pemerintah pegawai negeri yang kerjanya tidak atau tidak dalam pemerintahan Dharma Wanita dibarengi dengan masuk pemerintahan kerubukan politik

banas melayani suami, anak-anak dan keluarga, masyarakat dan negara. Dalam *homosocialization* perempuan harus memberikan tenaga mereka secara cuma-cuma tanpa mengharapkan prestasi atau kekuasaan sebagai imbalan. Pemerintahan Orde Baru melegitimasi kekuasaan melalui konstruksi ideologi gender dan seksual yang mendefinisikan laki-laki dan perempuan dalam peran-peran yang sempit, terhalus dan stereotipis. Tujuannya bukan diskriminasi seksual semata-mata, namun lebih merupakan justifikasi pragmatis dan oportunisasi. Seperti halnya dalam kapitalisme, dalam pembangunan nasional dan proses modernisasi di era Orde Baru perempuan maupun laki-laki sebenarnya sama-sama dieksploitasi, namun unsur seks dan gender memberikan dimensi imbalan dengan menempatkan perempuan dalam posisi yang subordinan terhadap laki-laki (Suryakusuma, 1991: 83).

Kebijakan Orde Baru terhadap perempuan memberi dampak bagi keberadaan organisasi-organisasi perempuan yang telah terbentuk sebelum masa Orde Baru. Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) yang di masa Orde Lama pernah sangat aktif dalam menentang poligami yang dilakukan presiden Sukarno hingga menjadi organisasi yang beranggotakan ribuan pegawai negeri dengan kegiatan yang berfokus pada kesejahteraan keluarga kelas menengah atas. Selain melaksanakan Pancha Dharma Wanita organisasi ini juga diarahkan untuk mendukung program nasional yang berkaitan dengan perempuan, misalnya Keluarga Berencana (Rahayu, 1996: 31).

Kondisi yang sama dialami oleh organisasi Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) yang didirikan pada tahun 1946. Keanggotaan organisasi

perempuannya ini membuat drastis setelah terbentuk Diastana Wanita. Banyak perempuan Kristen tidak lagi melibatkan diri dalam PWKI. Dari karir suami mereka diundang menjadi anggota Diastana Wanita atau organisasi yang terkait dengan pekerjaan suami. Sementara itu perempuan Kristen yang bekerja sebagai pegawai negeri harus menjadi anggota KORPRI. Monotelevisitas ini mengakibatkan keterlibatan perempuan dalam gerakan wanita Kristen menurun (Purwandani, 1993: 115)

Kowani yang merupakan gabungan organisasi-organisasi perempuan di Indonesia memilih membuat kegiatan yang "antim" untuk menghadapi personalisasi-personalia perempuan yang sejalan dengan langkah politik Orde Baru.¹⁴ Dalam masalah kesetaraan gender misalnya, Kowani mengusulkan kesetaraan upah dan kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan kepada Menteri Tenaga Kerja. Namun demikian Kowani tidak mempersiapkan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) yang "harmonis" yang berakibat langsung pada nasib buruh perempuan.

Di tengah-tengah upaya penjinakkan gerakan perempuan oleh Orde Baru pada awal dekade 1980-an muncul fenomena yang menarik, yaitu kelahiran organisasi-organisasi perempuan berbentuk organisasi non-pemerintah (onop) yang menaruh perhatian pada upaya mengeliminir subordinasi terhadap perempuan. Dimulai di Yogyakarta, kebangkitan kembali gerakan perempuan

¹⁴ Bandingkan dengan Kowani pada tahun 1970-an yang gigih mendesak pemerintah agar mencanangkan UU Perkawinan dua agar sebanyak mungkin perempuan dapat dalam Rangka Kesetaraan Agama yang diberi ruang untuk mencanangkan UU Perkawinan agar perempuan diberi tempat di pengadilan agama (bertentangan dengan masalah perkawinan dan perceraian), penanaman jumlah anggota perempuan di Biro Tenaga Kerja Kementerian Perburuhan, penindakan tegas terhadap pembayar yang swasta serta mendorong agar perempuan memberikan suara dalam pemilihan umum.

kecenderungan global itu diikuti dengan maraknya kelahiran kelompok perempuan dan pelaksanaan program-program untuk perempuan oleh kalangan orang-orang sejak awal dekade 1980-an (Triwijanti, 1993: 355-356).

Berbeda dengan organisasi perempuan bertukan rezim Orde Baru yang terbayar oleh politik petak Orde Baru, organisasi perempuan di luar bertukan rezim yang berkembang sejak awal dekade 1980 dalam bentuk orang perempuan menggunakan wawasan feminis untuk menentang dan menuntahkan kebijakan negara.¹² Organisasi-organisasi itu tidak mau dikooptasi oleh Orde Baru. Mereka menunjukkan diri sebagai organisasi-organisasi perempuan independen yang memihak kelompok marginal, seperti perempuan, buruh, petani, sektor informal dan lain sebagainya. Orde Baru dipandang bersikap represif terhadap mereka yang justru dirugikan selama proses pembangunan. Organisasi-organisasi perempuan kemudian sempat mengkritik, mendampingi dan membela kaum perempuan agar mempunyai kekuatan menghadapi dengan elemen-orang yang mengeksploitasi tenaga dan tubuhnya, merampas kebebasan menemukan gagasan, maupun diskriminasi terhadap hak-haknya. Sikap mereka sebagai

¹² Menurut Wanda Halde orang perempuan menggunakan pendekatan feminisme sebagai metode untuk menentang kebijakan pemerintah perempuan. Mereka menentang ide-ide liberal radikal dan sosialis dari kaum feminis Amerika dan Eropa. Paling tidak hal ini berlaku dari era 1960-an ketika yang dipilih oleh para aktivis gerakan perempuan sejak dekade 1960, seperti masalah peran ganda, isu pertolongan aborsi, kekerasan dalam rumah tangga serta berbagai isu gender lainnya. Banyak organisasi perjuang di era Soekarno-Hatta. Namun demikian menurut Ruli Indiyah Hartono menjadi banyak orang perempuan mengadopsi pemikiran feminisme Barat mereka tidak menjadi peyakit yang patut dengan alasan bahwa kaum perempuan Indonesia memiliki kompleksitas persoalan yang tidak bisa diwakili oleh satu pandangan dalam feminisme. Feminisme lebih terlihat terus dalam sikap peyakit yang melihat persoalan-persoalan perempuan misalnya ketika menganalisis ketimpangan gender. Pendapat itu agak berbeda dengan Ulin yang mengutamakan persoalan seluruh aktivis menggunakan teori feminisme liberal Barat atau sosialis, karena feminis yang ditemukan di kalangan aktivis perempuan dan sebagian besar kalangan mahasiswa sejak 1980 lebih diilhami oleh negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara daripada negara-negara Barat.

"pembela dan pembawa suara" kaum perempuan yang tertindas dilakukan dengan beberapa cara: keras (memprotes), sedang (mengritik) atau lunak (mengingatkan). Peran yang dilakukan adalah membuat sesuatu lenyap, hantu, dan penyambung. Itulah kaum perempuan yang nasibnya tertindas (Rahayu, 1996: 17, 35).

Organisasi-organisasi perempuan tersebut memiliki konsentrasi kegiatan yang berbeda-beda. Kalyanansira misalnya, merupakan organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan informasi berpartisipatif perempuan untuk menuntun kehidupan masyarakat. Gerakan Kalyanansira berada di tingkat kabupaten dengan sasaran kelompok kelas menengah, baik laki-laki maupun perempuan. Sekretariat Bersama Perempuan Yogyakarta (SBPY) melakukan advokasi untuk membantu kelompok perempuan pembantu rumah tangga dan perempuan pekerja migran (Uhin, 1995: 122). Fokus kegiatan ini mirip dengan Solidaritas Perempuan di Jakarta yang melakukan program advokasi bagi pekerja perempuan yang bekerja sebagai pemantu rumah tangga di luar negeri. Konsentrasi pendampingan bagi perempuan pembantu rumah tangga juga dilakukan oleh Yayasan Tiset Njai Dien. Sementara itu Hilda Anggraeni membantu kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga.

Sebagaimana yang akan diungkapkan lebih jauh melalui kajian ini, Yayasan pada mulanya memfokuskan diri untuk melakukan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan kelas bawah yang meliputi petani perempuan, buruh perempuan, pramuniaga dan tenaga guru/pengajar sekolah sebagai kelompok yang paling terdampak oleh pembangunan Orde Baru. Di Kulonprogo, Yayasan

melakukan pemberdayaan ekonomi perempuan buruh perani melalui program peningkatan pendapatan perempuan dan latihan kepemimpinan. Di kawasan industri Ugeran para aktivis Yasanri membentangkan kursus ketrampilan dan penyadaran hak-hak buruh perempuan.

Dalam perkembangannya sejak awal dekade 1990-an Yasanri tidak lagi menggunakan pendekatan ekonomi untuk memberdayakan buruh perempuan tetapi lebih menitikberatkan pada aspek *strategy* dengan pendekatan yang lebih bersifat politik untuk memulautkan serikat buruh alternatif. Berkat perubahan pendekatan ini buruh yang didampingi Yasanri menjadi lebih berani, termasuk melakukan aksi mogok atau demonstrasi. Perubahan pendekatan ke arah politik juga menarik buruh laki-laki mengikuti kegiatan Yasanri, sehingga sejak awal 1990-an buruh perempuan Yasanri tidak lagi hanya terdiri dari buruh perempuan, tetapi juga buruh laki-laki (Yasanri, 1998: 68).

Berangkat dari fenomena tersebut, dalam keragaman konsep perempuan di Indonesia Yasanri akan dianggap sebagai fokus kajian¹¹ dengan beberapa pertimbangan. *Gerakan* sebagaimana telah disebutkan terdahulu, Yasanri adalah konsep perempuan peranti yang lahir pada masa Orde Baru, sehingga akan sangat menarik mempelajari Yasanri dengan melihat konteks global dan nasional yang mendukung kelahirannya. *Krisis*, organisasi ini telah mengubah fokus gerakan dan pendekatan ekonomi ke pendekatan politik pada awal dekade 1990-an

¹¹ Kajian tentang Yasanri merupakan penelitian studi kasus deskriptif yang memotivasi kecurigaan dan ketertarikan Yasanri sebagai sebuah organisasi perempuan ternama.

Perubahan ini merupakan kelinieran tentang mengapa dan bagaimana Yasanti melakukan pergerakan gerakan, serta implikasi apa yang harus dihadapi oleh Yasanti setelah melakukan pergerakan gerakan ke arah politik.

B. Perumusan Masalah

Fenomena kelinieran dan dimulainya gerakan Yasanti menarik untuk diteliti dari dua aspek. Pertama adalah aspek politik nasional, mengingat sebagai organisasi feminis, Yasanti lahir di tengah-tengah politik gender Orde Baru yang membatasi gerak organisasi perempuan. Pergeseran strategi gerakan Yasanti dari pendekatan ekonomi pada dekade 1980-an ke pendekatan politik pada dekade 1990-an menarik pula untuk dikaji dari dimensi politik. Kedua adalah wacana global, karena kelinieran Yasanti pada tahun 1982 bertepatan waktu dengan masuknya pendekatan *Women in Development* (WID) ke Indonesia. Beragam wacana yang berkembang di tingkat global, yaitu penyebaran wacana HAM pada awal dekade 1990-an, penguatan pendekatan *Gender and Development* (GAD) yang menggantikan pendekatan WID, serta munculnya isu kesehatan reproduksi pada pertengahan 1990-an juga menjadi daya tarik untuk melihat bagaimana keragaman isu global ini direpson oleh Yasanti. Arti penting permasalahan konteks global dan nasional dalam menguji kelinieran dan dimulainya gerakan Yasanti menimbulkan pertanyaan tentang:

“Bagaimana konteks global dan nasional mendorong kelinieran dan dimulainya gerakan Yasanti?”

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penyusutan tentang bagaimana konteks global dan nasional memengaruhi kelahiran dan mempengaruhi dinamika gerakan feminis di Indonesia dalam konteks politik negara merdeka sejak dekade 1980-an hingga 1990-an. Masa Orde Baru Negara lebih meneliti penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mendapatkan penyusutan tentang bagaimana aktor gerakan memengaruhi kesempatan politik di level nasional dan global sehingga melahirkan gerakan dan bagaimana gerakan yang sudah berjalan secara terus-menerus membentuk isu-isu yang berkembang di level nasional dan global sehingga mempengaruhi dinamika gerakan.

D. Tujuan Keputusakaan tentang Gerakan Perempuan

Gerakan perempuan sering dikaitkan dengan upaya untuk menyebabkan perubahan. Seperti Sylvia Chantler (1994: 76) mendefinisikan gerakan perempuan sebagai spektrum yang menyeluruh dari perbuatan dan kegiatan secara individual atau kolektif melalui kelompok dan organisasi, baik sadar atau tidak sadar yang menaruh perhatian pada upaya mempengaruhi berbagai aspek subordinasi gender yang biasanya berujung dengan pemudasan barisan (kelas, ras, etnis, umur dan seks). Definisi tersebut menyiratkan gerakan perempuan identik dengan gerakan feminis. Sandra L'argenti (1994: 45) bahkan secara tegas mengemukakan bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan sosial yang berkembang dari ideologi feminisme.

Miriam Molyneux (1983: 69) definisi yang mengidentikkan gerakan perempuan sebagai gerakan feminis telah menyatukan banyak kelompok konservatif, seperti *NWAF*, *Women of America Utara* atau *Women Who Want to be Women* di Australia yang lebih menekankan peran gender tradisional dan nilai keluarga, serta mendeklarasikan diri sebagai kelompok anti-feminis. Definisi semacam ini juga mengabaikan kelompok-kelompok hak asasi manusia feminis, seperti *Madres de la Plaza de Mayo* di Argentina yang mengorganisir *wacana mobilisasi* untuk menyuarakan pelanggaran hak-hak asasi manusia oleh regime militer, sementara tetap menegaskan diri bahwa mereka tidak mengikuti ideologi feminis atau agenda politik tertentu. Definisi ini juga mengabaikan mobilisasi perempuan Islam seperti yang terjadi di Iran selama Revolusi Iran (1978-1980) ketika ketudung menjadi simbol protes atas proyek modernisasi yang ditancapkan oleh negara.

Suatu definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Sheila Rowbotham. Rowbotham melihat gerakan perempuan sebagai "perempuan dalam gerakan", artinya gerakan perempuan bisa dilihat sebagai tempat bagi perempuan untuk bergerak bersama mencapai tujuan yang diinginkan, baik mereka feminis atau bukan. Definisi ini sejalan dengan konsep "aksi kolektif" yang diperkenalkan oleh Tilly (1978) yang mengandung pemahaman solidaritas untuk mencapai tujuan bersama. Istilah "perempuan dalam gerakan" dengan sendirinya mencakup berbagai bentuk mobilisasi perempuan yang mengiringi proses modernisasi, bukan saja oleh perempuan feminis, namun juga perempuan yang bukan feminis. (Kawati, 2000: 7)

Sebagian pengkaji gerakan perempuan melihat bahwa kelahiran gerakan perempuan feminis memiliki keterkaitan dengan perkembangan ekonomi dan pembangunan. Penelitian Rosenfeld dan Ward (1988: 1-3) menunjukkan bahwa di Amerika Serikat gerakan perempuan feminis lahir seiring dengan perkembangan ekonomi dan demografi pasca Perang Dunia II yang telah menyebabkan perpindahan peran perempuan dan meningkatkan kompetisi antara laki-laki dan perempuan dalam pasaran tenaga kerja. Peningkatan pendidikan dan kesempatan kerja meningkatkan kapabilitas dan ambisi perempuan, serta ketenarikan pada pada feminisme. Karena itulah feminisme diidentifikasi dengan perempuan-perempuan kelas menengah sebagai menjadi tulang punggung gerakan (Kava, 1995: 2).

Di negara-negara osmer ruang aksi terlihat jelas bagi kelahiran gerakan perempuan feminis ketika rezim otoriter melancarkan pembangunan yang dipimpin oleh negara, seperti yang terjadi di Huzita dan Peru pada akhir 1960 dan awal 1970. Pembangunan membuka lapangan pekerjaan bagi perempuan dan meningkatkan profesionalisme perempuan kelas menengah baru yang terpelajar, serta mendorong kelahiran gerakan feminis (Silva, 1999).

Gerakan feminis yang dimulai perempuan kelas menengah memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan negara ketika para aktivis perempuan berhasil masuk kepolitik dan mendewasakan pemerintah agar memberikan dukungan. Tapi isu-isu perempuan dengan mendirikan komite-komite dan dewan-dewan perempuan. Namun demikian kebangkitan gerakan feminis akan menginspirasi gerakan perempuan populer dalam lingkungannya.

politik. terutama pada masa transisi ketika kelas menengah menjadi aktor penting (Waylen, 1994: 203-204)

Di beberapa negara gerakan perempuan tidak hanya dilakukan oleh perempuan kelas menengah (yang feminis), tetapi juga oleh perempuan-perempuan miskin, seperti yang terjadi di Amerika Serikat (Wolf dan Tucker, 1995). Di India gerakan perempuan diwarnai oleh aktivisme perempuan-perempuan miskin yang menuntut lapangan pekerjaan dan upah yang lebih tinggi serta mengkritik kekerasan dalam rumah tangga (Kumar, 1993). Krisis ekonomi di Brazilia juga mendorong bangkitnya perempuan miskin kota. Mereka menuntut penyediaan satu kali makan setiap hari bagi masyarakat dan pelayanan kesehatan (Safa, 1990). Fenomena tersebut menggambarkan heterogenitas gerakan perempuan yang setidaknya bisa diabdikan menjadi empat tipe gerakan. Pertama adalah organisasi hak-hak asasi dan organisasi populer yang keanggotaannya didominasi oleh perempuan dan menelaah tuntutan-tuntutan sosial ekonomis. Kedua adalah gerakan populer urban yang terdiri dari perempuan kelas buruh dan perempuan miskin yang menyorotkan kepentingan kelompok mereka. Ketiga adalah organisasi yang terdiri dari perempuan, mengorganisir tuntutan-tuntutan perempuan berbasis gender. Kelompok ini terdiri dari para feminis, kebanyakan adalah perempuan profesional berlatar belakang kelas menengah sebagai pemimpin atau tokohnya. Keempat adalah feminisme populer atau feminisme grassroots yang tidak mengidentifikasikan diri dengan feminisme kelas menengah (Waylen, 1994: 203).

Meskipun aktor gerakan perempuan beragam, ada komunitas yang melatarbelakangi perempuan melakukan gerakan, yaitu pengetahuan hak dan kepentingan perempuan. Melalui konteks hubungan rakyat dan negara, pengetahuan hak-hak perempuan oleh negara menjadi pendukung kelahiran gerakan perempuan. Barrow (1991) mengemukakan bahwa pengetahuan kebutuhan perempuan dalam kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah menggugah kaum perempuan melakukan gerakan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Chachhi (1991) menunjukkan bagaimana fundamentalisme agama yang disponsori oleh negara telah banyak merugikan kaum perempuan. Laporan menyorotkan kualitas kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pembunuhan, kekerasan seksual dan perkosaan yang sering dilakukan oleh polisi atau semua kondisi ini menantangkan sejumlah aktivis dan organisasi perempuan melakukan kampanye dan agitasi serta menuntut pemerintah mengeluarkan undang-undang untuk menghentikan praktik-praktik kekerasan terhadap perempuan.

Derajat repressi serim yang tinggi juga memengaruhi pembentukan kelompok-kelompok hak asasi manusia di Chile dan Argentina. terutama terdiri dari para perempuan yang menuntut kembalinya anak-anak mereka yang hilang. Gerakan *Abuelas de la Plaza de Mayo* di Argentina bergerak untuk menemukan anak-anak mereka yang hilang setelah terjadi kudeta militer pada tahun 1976. Di tengah-tengah teror negara yang telah menambatkan hampir semua bentuk organisasi masyarakat sipil, gerakan Madres berhasil mempertahankan organisasi dan agenda politik lewat pengumpulan "bentuk-bentuk mobilisasi baru" seperti

berpawai di sebeliling plaza, menggunakan atribut-simbol (misalnya sapu tangan putih) dan berupaya untuk menguasai tempat-tempat publik (plaza). Demikianlah cara kaum perempuan mengorganisasikan diri dan mengungkapkan ekspresi politik atau kekhawatiran yang mereka rasakan. Aksi mereka menjadi awal proses proses politik secara terorganisasi melawan ketidakadilan.

Di negara-negara Asia Selatan, fundamentalisme agama dalam bentuk fundamentalisme atau revivalisme agama yang disponsori oleh negara telah berdampak merugikan perempuan. Undang-Undang Keluarga Islam di Pakistan mendiskriminasi perempuan dan meniadakan hak-hak yang semula dimiliki oleh perempuan Islam. *Law of Evidence* diberlakukan di Pakistan pada tahun 1984 menyatakan kesaksian seorang perempuan di pengadilan sama dengan kesaksian setengah laki-laki (Hensman, 1999: 433-436). Sementara itu praktik revivalisme Hindu di India menempatkan perempuan dalam posisi subordinat melalui penggunaan simbol-simbol tradisional untuk menegaskan bahwa perempuan tidak memiliki kebebasan. Fundamentalisme agama yang disponsori oleh negara berdampak merugikan kaum perempuan, karena menungkalikan kondisi kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk pembunuhan, kekerasan seksual dan perkosaan yang sering dilakukan oleh polisi atau tentara. Kekerasan ini bahkan berpadu dengan penindasan gender yang dilembagakan Kementerian, buta huruf, kondisi kesehatan yang sangat memprihatinkan, serta pemaksaan seksual. Kaum perempuan miskin di pedesaan India rawan menghadapi perlakuan kekerasan seksual dan polusi. Kondisi semacam itu menghancurkan sejumlah aktivis dan organisasi melakukan kampanye dari tingkat serta menuntut

pemerintah menyetujui undang-undang untuk menggariskan praktek-praktek kekerasan terhadap perempuan (Hatchhi, 1991)

Gerakan perempuan tidak saja menjadi sebagai reaksi atas eksistensinya negara yang telah men subordinasikan perempuan, tetapi juga juga lahir karena struktur politik yang berpeder. Kelahiran dan perkembangan gerakan nasional perempuan Palestina pada dekade 1990-an didukung oleh kesempatan politik yang berpeder itu. Dalam konteks lokal kondisi yang dialami perempuan Palestina telah memunculkan rasa ketidakpuasan terhadap fermahnya Intifada kelompok Islam yang memiliki pimpinan politik penting, dan keberadaan kelompok pemuda militer-seksi (gerakan militansi) yang berupaya melaksanakan kode perilaku moral tertentu. Perkembangan internasional dan regional pada akhir tahun 1980-an dan awal 1990-an seperti lahirnya Jaringan Ekstra Barat, Perestroika Glasnost dan Perang Teluk membuka kesempatan politik bagi perempuan Palestina untuk menentang gambaran keperempuanan yang telah dikonstruksi oleh negara. Konteks internasional, terutama jaringan yang dibentuk perempuan Palestina dengan kelompok-kelompok perempuan di negara lain pada pertemuan-pertemuan internasional menunjukkan kesediaan akan ketidakadilan yang mereka alami dan memberi them berbagai model aksi untuk menginterpretasikan dan memproses pengalaman hidup yang mereka alami. Perkembangan politik suatu perjanjian Israel dan PLO tanggal 13 September 1993 dan konflik antara Yasser Arafat di satu pihak dengan kapri sekuler lain dan kelompok Islam di pihak lain secara radikal telah mengubah konteks sosial politik. Pergerakan yang kompleks, multidimensi dan bersifat sosial politik

meningkatkan kontak-kontak tempat aktivis perempuan Pakistan melakukan protes untuk menentang sejumlah bank, melakukan negosiasi perus politik, menentang subordinasi yang mereka alami dan berpartisipasi dalam organisasi (Abdullahi, 1998: 63).

Di luar konteks hubungan rakyat dan negara terdapat juga gender, ras, kelas, etnis dan seksualitas yang terjadi di berbagai jaringan sosial informal, klub-klub maupun organisasi-organisasi formal juga menjadi sebab mengapa perempuan melakukan gerakan. Terpinggirkannya perempuan dalam posisi kepemimpinan gereja lokal antara menurut Robson (1997) menyebabkan perempuan berhimpun dalam gerakan hak sipil. Segregasi seks dalam kelompok-kelompok dan asosiasi-asosiasi menjadi alasan utama bagi lahirnya feminisme (Taylor, 1999: 17).

Dari konteks nilai keterlibatan perempuan dalam gerakan perempuan bisa dijelaskan sebagai manifestasi atas ketidakpercayaan, kekecewaan dan kemarahan. Para pakar menjelaskan keterlibatan perempuan dalam gerakan perempuan dari perspektif konstruktivis⁴³, yaitu melihat faktor ketidakpercayaan-ketidakpercayaan dan faktor-faktor psikologi sosial sebagai faktor penting dalam mengonstruksi identitas kolektif. Studi yang dilakukan Vera Taylor (1999) menyimpulkan bahwa keterlibatan perempuan dalam gerakan perempuan berasal dari faktor emosi (rasa malu, takut dan depresi) yang kemudian berubah menjadi kemarahan. Praktek-praktek sosial budaya yang tidak adil menjadi faktor

⁴³ Sejak dekade 1990 perspektif konstruktivis banyak digunakan oleh para pakar gerakan sosial politik untuk menjelaskan fenomena gerakan sosial politik dari konteks mikro. Sebelumnya gerakan sosial politik lebih banyak diawali dari atas organisasi dengan menggunakan teori kapitalisme Sumbelley.

pendorong lainnya kemarahan. Proses adanya operasi mobilisasi perempuan – sebagai kelompok yang terbuaihan hak-haknya di masyarakat- untuk melakukan aksi kolektif.

Sebagian besar pengkaji gerakan perempuan melihat bahwa kelangsungan gerakan perempuan sangat ditentukan oleh upaya aktivis gerakan melakukan mobilisasi sumberdaya (*Resource Mobilization*)¹⁶ Reese misalnya, menggunakan teori mobilisasi sumberdaya dipadu dengan model struktur kesempatan politik dan proses pembingkayaan untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan keberhasilan gerakan perempuan dalam kampanye pemeliharaan anak di California. Ia menyimpulkan bahwa keberhasilan gerakan disebabkan karena para aktivis gerakan pemeliharaan anak berhasil memobilisasi dukungan dari program pemeliharaan anak pada tingkat menengah para pekerja pemeliharaan anak untuk menjadi pemimpin kampanye, menghimpun dukungan dari berbagai kelompok yang memberi subsidi bagi pemeliharaan anak serta melibatkan jaringan komunikasi di antara mereka. Gerakan menjadi berhasil karena para aktivis dapat menggabungkan tujuan-tujuan mereka untuk mendapatkan dana dari negara bagi pemeliharaan anak dengan nilai-nilai materialis pejabat negara. Meskipun ada kelompok-kelompok yang berusaha menentang kampanye, upaya mereka tidak pernah berhasil karena

¹⁶ Sejak dekade 1970-an banyak pengkaji gerakan sosial menggunakan teori Mobilisasi Sumberdaya/*Resource Mobilization Theory* (RMT) untuk menjelaskan bagaimana organisasi gerakan sosial menelusuri dan memelihara sumberdaya dalam gerakan. Problema /isu-isu yang banyak diunggul oleh para pakar gerakan sosial baik dari teorinya ini. Penjelasan lebih lanjut mengenai teori ini lihat buku di McAnity dan Mayer N. Zald, "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory" dalam *American Journal of Sociology*, (Volume 32, Nomor 6, Mei 1977)

pada proses awal penciptang itu tidak pernah membuat gerakan landings yang terorganisasi karena menurut Reese dukungan yang menyeluruh dan kaum perempuan dan gerakan-gerakan sosial yang lain tidak cukup menjadi penentu keberhasilan gerakan perempuan, karena harus ada struktur politik yang memberi peluang untuk mendukung gerakan itu, yaitu surplus keuangan negara dan dukungan dari para pejabat negara. (Kilns, 1998: 170-171)

Keberhasilan gerakan perempuan juga ditentukan oleh kota yang dilakukan kaum feminis dengan para kandidat elektoral yang berespon dengan tuntutan mereka. Di Filipina dukungan yang diberikan gerakan perempuan Remy Corason Aquino sehingga terpilih menjadi presiden telah mengakibatkan hasil, yaitu peningkatan jumlah dan pengaruh perempuan di kantor-kantor pemerintah pada masa pemerintahan Aquino. Sementara itu di Amerika Serikat upaya Bill Clinton dalam melakukan reformasi pendidikan dan pemeliharaan kesehatan berhasil menyediakan dukungan dari kaum perempuan yang pada gilirannya membawa kesuksesan Clinton menduduki kursi presiden. Pada masa pemerintahan Clinton banyak perempuan ditunjuk untuk menduduki pos-pos penting. Sementara politisi perempuan yang duduk di Kongres juga lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (Ratu, 1995: 15).

Faktor politik berperan penting sebagai penentu kelangsungan gerakan perempuan karena gerakan perempuan bisa dilumpuhkan oleh upaya-upaya untuk meniadakan organisasi perempuan yang dapat dikontrol oleh negara. Pembubaran organisasi perempuan Gerakan di Indonesia merupakan salah satu contoh. Gerakan adalah organisasi massa perempuan terbesar pada masa Orde Lama yang

gait membela hak-hak perempuan, anak-anak dan buruh tani. Organisasi Gerwani mempunyai dasar ideologi gender perpaduan antara esensialisme dan kolektivisme yang disebut dengan istilah *ibu militan*. Dengan perpaduan dua ideologi gender tersebut anggota Gerwani menjalankan fungsi perempuan sebagai ibu yang baik dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga, namun sekaligus aktif tampil di kancah publik (terutama di bidang politik) membela kepentingan kaum tertindas. Perjuangan Gerwani tidak saja menghadapi tantangan yang keras dari Sukarno yang pelipat, tetapi bahkan ditentang oleh oleh rezim Soekarno sebagai bagian dari pembubaran Partai Komunis Indonesia dan organisasi-organisasi yang berafiliasi dengannya pada tahun 1963. Sementara Gerwani dibubarkan rezim Soekarno mengorganisasi perempuan kembali ke perantara domestik melalui pembentukan program PKK, organisasi perempuan Dharma Wanita dan Dharma Perwati (Wienega, 1999 dan Blackburn, 1994: 174).

Kelangsungan hidup organisasi perempuan di negara-negara nalar lain didukung oleh pandangan umum realiter bahwa upaya yang dilakukan oleh perempuan tersebut apolitik. Oleh karenanya ketika perempuan mengorganisir kampanye menentang kenaikan biaya hidup atau menuntut penghapusan hak-hak asasi manusia pemerintah cenderung lebih memberikan ruang kebebasan bagi kelompok-kelompok perempuan dibandingkan kelompok-kelompok lain yang militan, mahasiswa atau organisasi-organisasi buruh (Waylen, 1994: 204).

Dari dimensi organisasi gerakan, Thomas (1994: 112) mengemukakan bahwa kelangsungan gerakan perempuan disebabkan oleh faktor ideologi, karena

ketika kesempatan politik membuka peluang bagi suatu kelompok untuk melakukan mobilisasi gerakan, ada satu faktor lain yang tetap dibutuhkan, yaitu proses pembingkaihan kesempatan politik. Demikian pula untuk menentukan mobilisasi macam apa yang akan dilakukan aktivis gerakan melakukannya melalui proses pembingkaihan (McAdams, McCarthy dan Zald, 2004: 10-12).

Kajisan tentang organisasi non-pemerintah (onop) sebagai salah satu aktor gerakan sosial dapat dianalisis menggunakan kerangka pemikiran kesempatan politik, struktur mobilisasi dan pembingkaihan tersebut. Dimensi-dimensi kesempatan politik, terutama kerjasama atau konflik politik, akses dan akses akan mempengaruhi upaya-upaya pembingkaihan yang dilakukan onop, terutama untuk memantulkan bingkai massa yang akan dipilih dan menjadi sarana untuk mengorganisasi. Struktur kesempatan politik juga membuka peluang bagi onop dalam memobilisasi dukungan ketika hendak melakukan aksi. Akan tetapi tersedianya kesempatan politik semata-mata tidaklah cukup untuk memobilisasi dukungan. Onop perlu secara aktif memanfaatkan kesempatan politik dengan jalan melakukan jaringan untuk meraih keberhasilan. Struktur mobilisasi dalam bentuk jaringan onop merupakan sarana untuk menyebarkan aspirasi onop dan membangkitkan onop mengambil keuntungan dari perubahan-perubahan struktural dan intensional untuk mengkampanyekan isu-isu baru (Joachim, 2003: 252-253)

Untuk memahami ketahanan dan dinamika gerakan Yasantra kerangka pemikiran McAdams, McCarthy dan Zald tentang struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan pembingkaihan juga akan digunakan, terutama untuk

melihat peran gerakan Yasanti selama masa Orde Baru (1982-1998). Kelahiran gerakan perempuan pada umumnya dijabarkan oleh pengalaman hidup yang dialami perempuan yang melahirkan kesadaran bahwa perempuan telah diperlakukan tidak adil sehingga perempuan terdorong untuk memperjuangkan hak-haknya lewat gerakan perempuan. Namun konteks mikro semata-mata tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai bagaimana organisasi gerakan lahir dan berkembang. Analisis gerakan sosial politik berurusan dengan pemahaman atas konteks mikro (lingkungan sosial politik), konsep dan analisis tentang kelahiran dan dimulainya gerakan Yasanti sepanjang tahun 1982-1998 akan dilihat dari dimensi struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan proses pembungkaran. Ketiga kerangka pemikiran ini digunakan untuk memahami konteks global dan nasional ketika Yasanti lahir, agenda gerakan yang dilakukan dan bagaimana perubahan konteks global dan nasional mempengaruhi strategi gerakan.

Meskipun studi ini menggunakan rujukan teoritis konsep struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan pembungkaran, namun ciri-ciri umum gerakan sosial tetap akan diperhatikan sebagai acuan analisa kritis gerakan Yasanti. Ciri-ciri gerakan sosial tersebut yang pertama adalah proses yang terus-menerus berjalan, dan tahap "pembentukan", "menjadi", hingga "berkembang". Kedua, untuk mendukung eksistensi dan keberlanjutannya gerakan sosial harus didukung oleh jaringan organisasi sosial yang rapi mulai dari yang berskala kecil dan bersifat grassroot sampai dengan organisasi sosial yang berskala regional, nasional, bahkan internasional. Ketiga, gerakan sosial harus didukung dan

diperkoleh oleh identifikasi kelompok "kekitaan" yang kuat dengan sistem pembagian kerja yang terbuka di antara para pendukungnya. Keempat, para pemangku dan pendukung gerakan harus terus-menerus berorganisasi ke dalam jaringan organisasional yang terbuka melalui berbagai pertemuan dan pertukaran informasi. Kelima, gerakan sosial memiliki lambang-lambang, baik yang bersifat positif maupun negatif. Keenam, pada lingkungan ideologis gerakan sosial perlu merumuskan dengan jelas ideologi alternatif apa yang ingin ditawarkan untuk menggantikan ideologi yang dikritik oleh gerakan sosial.¹¹

F.1 Struktur Kesempunan Politik

Ketahanan dan perkembangan gerakan sosial berkait erat dengan struktur kesempunan politik yang dihadapi oleh gerakan. Struktur kesempunan politik (*Political Opportunity Structure* - POS) adalah seperangkat kesempatan atau hambatan politik yang dihadapi oleh gerakan sosial. Perubahan-perubahan dalam struktur kesempunan politik menurut McAdam, McCarthy dan Zald (1988: 299-341) akan menentukan pasang-surut aktivitas gerakan sosial.

Struktur kesempunan politik dapat diwujudkan dalam bentuk *benzene up* dan *crystallize*.¹² Dalam bentuk *benzene-up* kesempunan politik yang mendukung aktivitas gerakan sosial berwujud proses politik ekonomi dan demokratis yang mengilhami para aktivis untuk melahirkan atau

¹¹ Kenneth L. Anderson, gerakan sosial in Indonesia, dan tulisan Nurdin, "Peninggalan Kesuksesan Gerakan dalam Perspektif Gerakan Sosial" dalam *Aspek Baru Gerakan dan Masyarakat* (Yogyakarta: Nu, 11 Juni 2002).

melangsungkan gerakan. Dalam bentuk *top-down* kesempatan politik berkembang dari upaya-upaya politik yang dilakukan oleh elit, yaitu konteks politik yang memfasilitasi kelahiran gerakan, sistem politik yang mendukung gerakan atau simpul lembaga-lembaga politik pada gerakan (McAdam, McCourtly dan Zald, 1998: 700).

Dalam bentuk *top-down* McAdam (2004: 27-28) secara lebih rinci menggunakan empat dimensi kesempatan politik yang dapat mempengaruhi kelangsungan gerakan, yaitu (1) terbuka atau tertutupnya sistem politik, (2) stabilitas atau instabilitas elit, (3) ada atau tidaknya elit yang mendukung gerakan, (4) kapasitas dan kecenderungan negara untuk melakukan represi.¹¹ Menurut McAdam dimensi kesempatan politik yang ke-4, yaitu ada atau tidaknya represi negara berperan penting dalam menentukan kelangsungan hidup gerakan sosial. Ada atau tidaknya represi negara akan sangat menentukan derajat dan aktivitas gerakan di negara dengan sistem politik yang tertutup, perpecahan elit yang sebenarnya dapat mengumungkan gerakan (karena sebagian elit memberi dukungan pada gerakan) tidak akan banyak berarti jika negara masih secara ketat melakukan kontrol sosial dan politik sehingga gerakan tidak bisa berkembang.

Konsep struktur kesempatan politik sebagaimana dikemukakan oleh McAdam dan kawan-kawan tersebut di atas memiliki keterkaitan oleh para pengkaji gerakan perempuan. Menurut Jocelyn (2003) konsep struktur

¹¹ Konsep struktur kesempatan politik dari McAdam sejalan dengan argumen Sidney Tarrow (1994: 182) yang berpendapat bahwa gerakan sosial muncul dan tumbuh ketika kesempatan politik terbuka lebar sebagai hasil dari berbagai perkembangan seperti berubahnya akses menuju kekuasaan, pergeseran dalam elit kekuasaan dan terbentuknya aliansi di antara elit.

kesempitan politik dari McAdam dan kawan-kawan kurang bisa menjelaskan fenomena gerakan perempuan karena gerakan perempuan bukanlah kelompok tunggal dengan seorang atau beberapa elit yang mendukung gerakan mereka. Selain itu represi yang dilakukannya oleh negara memiliki implikasi peran gender yang tidak dijelaskan oleh model struktur kesempitan politik McAdam dan kawan-kawan juga tidak dapat menjelaskan diversitas tuntutan berbagai gerakan, padahal penemuan tentang bagaimana struktur dan institusi menibangkan cara kelompok atau individu dalam mempengaruhi negara amatlah penting untuk memahami bagaimana aktor politik perempuan mempengaruhi perubahan kebijakan.¹⁴

Menurut Abdulhadi, pengertian gerakan perempuan dari Palestina, definisi konvensional dari konsep struktur kesempitan politik sebagaimana dikemukakan McAdam dan kawan-kawan kurang memadai untuk menjelaskan kelahiran dan dinamika gerakan perempuan. Dinamika gender tidak bisa hanya dilihat secara sempit pada batas-batas suatu negara tertentu, namun juga harus dipertimbangkan bagaimana koedisi politik lokal, regional dan internasional ia mengindik bahwa konsep struktur kesempitan politik yang sempit cenderung mengabaikan kondisi-kondisi historis tempat gerakan perempuan lahir. Apa yang terlewatkan dalam analisis McAdam dan kawan-kawan adalah mengabaikan hubungan interaktif antara dinamika gender dan struktur kesempitan politik. Menurut Abdulhadi gerakan perempuan lahir

¹⁴ Litan Jocelyn, "Re-Visioning International Theories: Political Opportunity Structure" dalam <http://www.wright-journal.org/issue.html> hari:17k 17Julai 23 April 2008

bukan semata-mata karena struktur kesempatan politik dalam negeri yang memungkinkan kelahiran gerakan, namun karena ada kesadaran aktivis akan kondisi ketidakadilan yang mereka alami sebagai perempuan berpeda dengan masalahnya wacana internasional tentang feminisme dan demokratisasi, sehingga mendorong perempuan melakukan gerakan. Abdulhadi melihat struktur kesempatan politik internasional berperan penting sebagai pendukung gerakan, bukan hanya struktur kesempatan politik dalam negeri. Dengan demikian konsep struktur kesempatan politik sebagaimana dikemukakan Meadon dan kawan-kawan harus diperluas pemahamannya sehingga mencakup perubahan sosial politik yang melampaui batas-batas suatu negara dan memasukkan aspek gender sebagai lensa untuk melihat efek perubahan konteks politik bagi gerakan perempuan (Abdulhadi, 1998: 661)

Argumen Abdulhadi sejalan dengan pemahaman pengkaji gerakan sosial yang lain. Belkangan, sebagian pengkaji gerakan sosial politik menggeser pemahaman struktur kesempatan politik pada dimensi internasional. Stammers, misalnya menyatakan konvensi internasional tentang hak asasi manusia kini menjadi bagian dari kesempatan politik yang dimiliki oleh gerakan hak asasi manusia. Margaret Keck dan Kathryn Sikkink juga mengemukakan bahwa organisasi internasional seperti Amnesty International, jaringan feminis internasional dan jaringan advokasi transnasional akan mengubah orientasi strategi ke arah global manakala kekuatan mereka di tingkat nasional dibatasi/balasan oleh negara. Ketika suatu negara melanggar hak asasi manusia dan tidak memperhatikan protes

dan warga negaranya, maka organisasi-organisasi yang tergabung dalam jaringan advokasi akan mem-bj-pass negara mereka dan mencari aliansi internasional dengan negara lain atau jaringan advokasi transnasional untuk meminta intervensi negara mereka dan luar. Kesempatan politik dalam jaringan internasional ini menyediakan informasi dan sumber-sumber dukungan internasional sehingga mereka dapat memperluas jangkauan kelompok-kelompok di level domestik, menanggapi isu-isu baru dan konflik-konflik menuntaskan tuntutan-tuntutan ke lembaga-lembaga.

Sidney Tarrow (1994: 42) juga mengemukakan arti penting konteks internasional dalam memahami struktur kesempatan politik. Media cetak, kaum imigran dan aktor-aktor transnasional merupakan agen-agen yang berperan besar dalam menyebabkan gerakan sosial melintasi batas-batas negara. Gerakan anti perbudakan yang berawal dari Inggris menyebar ke seluruh dunia melalui media massa, agen dan kaum imigran, serta bertakl kepada pemerintah Inggris sendiri. Kaum Proletariat Sosial di Jerman membetarkan model partai buruh demokratis sosial ala Jerman ke negara-negara lain. Negara-negara seperti Belanda, Skandinavia dan Austria meniru model tersebut bukan karena memiliki struktur kesempatan politik yang mirip dengan Jerman, namun karena terdapat kontak internasional antara kaum sosialis di negara-negara tersebut.

Tarrow menambahkan bahwa gerakan sosial kini tidak hanya mengalami penyebaran dari satu negara ke negara lain, tetapi juga telah melakukan kolaborasi dalam berbagai kampanye, seperti yang terjadi dalam

gerakan perdemikian di Eropa dan gerakan lingkungan hidup pada tahun 1980-an. Dalam abad teknologi informasi dengan fasilitas komunikasi satelit, televisi global dan mesin faksimili, gerakan-gerakan di berbagai negara akan dengan mudah mengakses informasi secara instan tentang apa yang sedang dilakukan gerakan-gerakan di negara lain. Tidaklah mengherankan gelombang gerakan-gerakan transnasional demokratisasi yang berlangsung pada akhir dekade 1990-an memiliki kemampuan saling legi dan rekonek satu sama lain, karena gerakan yang muncul belakangan telah belajar dari gerakan-gerakan terdahulu.

McAdams (2004: 34) belakangan menyatakan bahwa kesempatan politik di tingkat internasional merupakan bagian dari struktur kesempatan politik yang harus menjadi perhatian para pengkaji gerakan sosial politik yang sebelumnya hanya melihat kesempatan politik secara sempit pada proses dan lembaga-lembaga politik domestik (dalam negeri). Menurut McAdams peristiwa internasional berperan penting dalam mempengaruhi lembaga-lembaga domestik, menaruh perhatian pada isu-isu internasional. Perubahan-perubahan politik dan ekonomi global menurut McAdams akan membuka peluang bagi keberhasilan sebuah gerakan dalam mempengaruhi lembaga-lembaga domestik.

E.2 Struktur Mobilisasi

Struktur mobilisasi adalah sarana-sarana kolektif, baik formal maupun informal tempat orang dimobilisasi dan terlibat dalam aksi kolektif.

(McAdam, McCarthy, Zald, 2004: 3). Aktor gerakan harus menciptakan struktur organisasi yang kuat untuk menjaga kelangsungan gerakan melalui pembentukan organisasi gerakan sosial formal (*General Involvement Organizations* (GI/Os)).³⁰ Namun untuk dapat terus bertahan organisasi gerakan sosial harus mampu mengatasi berbagai tantangan. Di level makro organisasi gerakan sosial harus mampu melakukan negosiasi dan mengelola hubungan dengan aktor organisasi gerakan sosial yang lain, negara, gerakan landingsan, media massa dan masyarakat umum. Sementara itu di level mikro organisasi gerakan sosial harus memobilisasi sumberdaya - anggota, uang dan lain-lain yang mereka perlukan agar gerakan terus berlangsung, memelihara komitmen anggota serta melakukan politik (McAdam, McCarthy dan Zald, 1998: 716-726).

Keberhasilan gerakan ditentukan oleh bagaimana ia mengambil bentuk mobilisasi yang tepat sesuai dengan kesempatan politik yang dihadapi. Sistem politik yang terbuka akan menguntungkan gerakan karena mempermudah jalaran akses strategis untuk mendukung aktivitas gerakan. Demikian pada stabilitas politik suatu negara bisa dimanfaatkan oleh gerakan untuk mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok yang berselubungan dengan rezim, sehingga akan mendorong perkembangan dan keberhasilan gerakan.

³⁰ Kelahiran teori sumberdaya merupakan upaya untuk mengatasi fraksi perbedaan gerakan sosial politik yang pernah dikemukakan oleh studi-studi tentang. Selain keberagaman dan ketidakpastian sebagai pendukung kelahiran gerakan pada perhatian terhadap proses mobilisasi dalam gerakan. Salah satu titik kritis dan soon penelitian sumberdaya adalah studi mengenai organisasi gerakan sosial (*General Involvement Organizations* (GI/Os)).

Namun demikian, keberhasilan gerakan juga diungkap oleh kemampuan gerakan dalam merancang taktik yang inovatif dan dapat memancing perhatian publik (Adams dan kawan-kawan) pada gerakan tersebut. Aksi duduk-duduk dan menenggang kaca yang dilakukan oleh para aktivis gerakan hak-hak sipil di Amerika ketika menghadapi jalan buntu sewaktu berhadapan dengan kelompok penentang, terbukti berhasil menarik perhatian publik. Keberhasilan melaksanakan taktik tergantung kepada kemampuan gerakan dalam mengontrol sumberdaya kemasyarakatan, yaitu dana, pendukung dan pengaruh. Ketidakkampuan gerakan dalam memobilisasi sumberdaya akan mengakibatkan gerakan kurang memiliki kemampuan menarik simpati publik (McAdam, McCarthy, Zald, 2004: 13-14).

Di samping itu penting taktik menarik perhatian publik, keberadaan kelompok radikal akan menguntungkan gerakan. McAdam dan kawan-kawan (2004: 14) menyebutnya sebagai efek sampingan kelompok radikal (*radical offshoot*). Kehadiran kelompok-kelompok ekstremis yang radikal akan memberi keuntungan bagi kelompok-kelompok moderat dalam memobilisasi dana dari lembaga donor sebagai sarana untuk memelihara atau memuonng pengaruh kelompok radikal.

Taktik menarik perhatian publik banyak digunakan oleh gerakan perempuan dalam memobilisasi dukungan, terutama ketika aksi protes secara terbuka dilarang atau dianggap memiliki konsekuensi yang membahayakan. Dalam kondisi politik ketika protes secara terbuka tidak mungkin dilakukan, maka sarana-sarana alternatif, misalnya media seni menjadi pilihan para

aktivis perakan perempuan untuk menarik perhatian pemerintah dan publik (West dan Blumberg, 1990: 28)

Bentuk protes semacam itu menggambarkan aksi politik gerakan perempuan termasuk dalam bentuk yang tampaknya nonpolitik (gerakan perempuan, sebagai aksi yang diorganisir secara kolektif untuk melawan atau melakukan perubahan sosial memiliki strategi yang berdimensi politik. Namun kaum perempuan telah berwak memilih lembaga-lembaga nonpolitik, seperti gereja, sekolah dan lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang lain sebagai tempat untuk berkumpul dan menahkulasikan gerakan. Dan tempat yang nonpolitik semacam itu perempuan melakukan aksi dan proses politik, sehingga sebagian orang mengidentikkan gerakan perempuan sebagai aksi moral daripada aksi politik (West dan Blumberg, 1990: 5, 10)

B.4. Pembungkaman (Censorship)

Pembungkaman (*censorship*) adalah pembungkaman atau pembungkaman kegiatan atau isu-isu atau peristiwa-peristiwa yang dianggapnya tidak untuk melakukan aksi, melewatkan aktivitas atau kampanye gerakan sosial. Proses pembungkaman melibatkan aktor gerakan dalam produksi dan penyediaan makna yang berbeda dengan asumsi yang sudah diyakini sebagai kebenaran oleh kebanyakan orang. Ketika aktivis perakan melihat atau berhadapan dengan kondisi sosial yang tidak adil, ia akan mengembangkan bentuk aksi

¹ Istilah *course of action* diemukakan oleh Giddens (1974) untuk menunjukkan pola-pola yang diuraikan oleh individu dalam menanggapi atau menakar dan memahami generalisasi-perilaku atau tindakan. *Course of action* tersebut merefleksikan "realitas" berbagai peristiwa dan perilaku personal yang melata/berlangsung pada saat keberterdapat.

kollektif untuk menunjukkan bahwa kondisi yang tidak adil itu harus diubah. Hampir semuanya itu akan menjadi dasar untuk melaksanakan legitimasi kampanye atau mobilisasi gerakan (McAdam, McCarthy, Zald, 1988: 713).

Snow dan Hanford (1988: 199) mengidentifikasi empat proses pembungkaman dalam gerakan sosial. Pertama adalah tahap transformasi tunggal (*frame transformation*), yaitu suatu proses yang terjadi ketika pemimpin gerakan memertanyakan atau memperkenalkan ide-ide yang secara radikal mengancam apa yang sudah diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat. Kedua adalah amplifikasi tunggal (*frame amplification*), yaitu tahap ketika pemimpin gerakan harus meyakinkan para pendukungnya bahwa isu yang diperjuangkan bersesuaian dengan nilai-nilai dan kepercayaan yang mereka anut. Ketiga adalah ekstensi bingkai (*frame extension*), merupakan tahap ketika pemimpin gerakan mengembangkan kepentingan-kepentingan utama yang diperjuangkan oleh gerakan dengan kepentingan-kepentingan tambahan para pendukungnya sebagai strategi untuk menggembangkan dukungan. Keempat adalah pembungkaman lingkup (*frame bridging*), yaitu fase ketika individu-individu yang potensial menjadi anggota gerakan telah mendapatkan cukup informasi, sehingga mereka berpartisipasi dalam gerakan.

Pembungkaman sangat berkaitan dengan kesempatan politik dan mobilisasi gerakan karena aksi-aksi gerakan sosial dibentuk dan merefleksikan pemahaman aktor gerakan "yang mengidentifikasi kesempatan

dan aksi adalah orang dan bukan uang mereka lakukan pada waktu yang tertentu hanya " Proses pembangkitan mendorong mobilisasi, karena kelahutan gerakan selalu berawal dari ketidaknyamanan atau kekecewaan yang dialami seseorang atau sekelompok orang sehingga menimbulkan keinginan bertindak secara kolektif untuk memperbaiki keadaan. Tanpa didahului faktor kekecewaan orang tidak akan memobilisasi gerakan sekalipun ada kesempatan untuk melakukannya (McAdams, 1992: 48).

Proses pembangkitan akan secara terus-menerus berlangsung dalam sebuah gerakan. Para anggota gerakan akan senantiasa membicarakan dan membahas masalah yang mengancam/merusakkan peristiwa-peristiwa dan kondisi-kondisi yang mereka hadapi untuk memobilisasi dukungan dan sekaligus memetakan lawan. Oleh karena itu pembangkitan berperan penting untuk memonitorisasi dan merekonstruksi upaya-upaya yang dilakukan anggota gerakan. Di sini pembangkitan memiliki fungsi diagnostik, yaitu menunjukkan ketidakadilan kondisi sosial politik yang harus dibawahi atau dibongkar. Gerakan sosial juga memiliki fungsi prognostik dengan menunjukkan solusi ideologi alternatif apa yang ditawarkan untuk menggantikan ideologi yang digugat.

Seringkali kelahiran sebuah gerakan diilhami oleh gerakan-gerakan besar yang muncul terlebih dahulu yang oleh Snow dan Rendford disebut sebagai *master frame*. Gerakan hak-hak asasi manusia misalnya telah mengilhami kelahiran gerakan perempuan. Banyak sebagai aktivis gerakan. Keberhasilan mereka dalam gerakan-gerakan terdahulu dapat menjadi

pendorong untuk melahirkan gerakan-gerakan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa mereka secara aktif dan terus-menerus terlibat dalam konstruksi makna, memonet ketidaktahuan dan mencari jalan perubahan (Snow dan Benford, 1988: 193).

Menurut Tarrow (1992) konsep pembungkaman dari Snow dan Benford kurang ekspansi dalam menjabarkan bagaimana simbol-simbol ideologis gerakan sosial berinteraksi dengan budaya yang lebih luas. Karena itu Tarrow berupaya menghubungkan bingkai aksi kolektif dengan "pilihan-pilihan kultural" untuk menunjukkan bagaimana aktor gerakan sosial dengan budaya politik yang mereka miliki menggunakan simbol-simbol kultural untuk menepikan makna yang berorientasi aksi, sehingga dapat memobilisasi orang untuk mendukung gerakan.

Zaid (2004: 269) juga mendukung argumen Tarrow bahwa proses pembungkaman terkait dengan persoalan kultural sebagai konteks dan kesempatan bagi para aktivis untuk melakukan gerakan. Dalam sebuah gerakan para aktivis secara aktif membangun dan mendefinisikan ideologi, simbol-simbol dan berbagai peristiwa untuk menentramkan isu dan taktik gerakan. Aspek kultural berperan penting dalam mempengaruhi cara berpikir aktivis gerakan. Budaya politik masyarakat suatu negara dan hambatan struktural yang berbeda akan mempengaruhi bagaimana aktivis gerakan memandang sebuah isu. Aktivis gerakan di negara dengan tradisi kultural yang cenderung membatasi kebebasan warganya untuk bersikap akan memiliki cara berpikir yang berbeda dengan aktivis di negara yang lebih

egaliter. Gerakan tentang moralitas dan keadilan yang membekali pemikiran aktivis di negara yang membatasi kebebasan warganya mungkin akan dianggap tidak penting oleh aktivis di negara yang lebih membenarkan kebebasan bagi warganya.

Dalam memobilisasi dukungan sebuah gerakan memerlukan pembingkaihan strategis untuk mengemas isu, sehingga orang tertarik dan bersimpati dengan gerakan. Langkah ini bisa dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktivis gerakan harus berupaya untuk mengemas isu sesuai dengan tema-tema kehidupan masyarakat yang kontemporer dan ideal. Sensitivitas atas isu-isu apa yang sedang menarik perhatian masyarakat akan membantu aktivis gerakan dalam menarik perhatian orang pada isu-isu yang mereka perjuangkan, sementara pada saat yang bersamaan para aktivis juga harus dapat mengakomodasi berbagai tuntutan masyarakat. Kedua, aktivis gerakan harus menunjukkan data yang mendukung isu untuk menarik perhatian. Data seperti angka kejahatan, kasus perkawinan dan hukum-budhi pelanggaran hak asasi manusia memiliki arti penting untuk mendapatkan perhatian publik (McCarthy, Smith dan Zald, 2004: 310).

Argumen tersebut sejalan dengan pemikiran McAdam (2004: 35-41) bahwa aktor gerakan menencukan aksi-aksi dan pilihan taktis yang akan diambil oleh gerakan melalui proses peninjauan. Kemampuan untuk menyorotkan isu sangat diperlukan oleh pemimpin gerakan agar mendapatkan dukungan masyarakat.¹ McAdam mengkritik konsep-konsep pembingkaihan yang terlalu difokuskan pada pernyataan-pernyataan ideologis yang abstrak

gerakan. Menurut McAdam upaya untuk menarik perhatian publik tidak semata-mata dilakukan melalui pidato-pidato formal sang pemimpin gerakan. Teknik dramaturgi yang dilakukan sebuah gerakan, yaitu di panggung belahadag melakukan pertunjukan, tetapi di panggung depan menunjukkan diri sebagai kelompok yang cinta damai dan anti kekerasan terbukti lebih efektif untuk menarik perhatian dan simpati publik. Terlebih lagi jika gerakan berhasil mendapatkan dukungan media massa sebagai wahana untuk menunjukkan dukungan dan simpati publik pada gerakan.

F. Metode Penelitian

F.1. Identifikasi Sumber Informasi

Sebelum memasuki tahap penelitian lapangan peneliti terlebih dahulu melakukan identifikasi kebutuhan sumber informasi melalui wawancara singkat dengan Direktur Eksekutif Yayasan, yaitu Amin Muftiyannah pada bulan Januari 2003. Wawancara tersebut dilakukan untuk mengetahui secara lebih rinci siapa pendiri Yayasan, siapa saja yang pernah menjadi Direktur Yayasan, apa yang telah dilakukan Yayasan sejak berdiri hingga akhir pemerintahan Soeharto (secara singkat), tekanan-tekanan dan intimidasi macam apa yang dihadapi Yayasan selama kurun waktu tersebut, dan siapa (aktivis) yang berada di lapangan pada waktu itu.

Amin Muftiyannah sangat membantu peneliti dalam menghimpun kebutuhan sumber informasi yang sangat diperlukan sebagai data lapangan. Selain ramah dan mudah ditemui, selama proses wawancara untuk

identifikasi kebutuhan sumber informasi berlangsung tidak jarang Amin membuka rak tempat penyimpanan laporan-laporan tahunan Yasanti untuk menunjukkan contoh dokumen yang bisa dimanfaatkan peneliti dalam memperoleh data lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Eksekutif Yasanti peneliti kemudian menetapkan daftar informan yang diwawancarai dan membuat acuan dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai data lapangan.

1.1.1 Identifikasi Informan

Peneliti menetapkan dua kelompok informan yang dibagi berdasarkan kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan dari permasalahan penelitian yang ditanyakan. Informan kelompok pertama adalah mereka yang akan diwawancarai untuk mendapatkan data tentang kelahiran Yasanti. Mereka adalah para pendiri Yasanti yang terdiri dari Sri Kusumawati, Hudi Wahyuni, Neodjanah Djihanoni, Kumara Devi dan Siti Maslumah Widayanti.

Informan kelompok kedua adalah para aktivis Yasanti yang dianggap mampu memberikan keterangan tentang kegiatan-kegiatan Yasanti di lapangan untuk mendapatkan data tentang dinamika gerakan Yasanti. Untuk kebutuhan ini selain kelima pendiri Yasanti tersebut peneliti juga menetapkan dua aktivis Yasanti yang bukan pendiri, namun pernah menjadi Direktur Yasanti yaitu Nadhroh Assanirah dan Amin Muftiyannah sebagai bagian dari daftar informan. Hal Nadhroh Assanirah maupun Amin Muftiyannah selain pernah menjabat sebagai direktur Yasanti, keduanya juga pernah menjadi

petugas lapangan di Kulonprogo dan Ungaran. Amin bahkan juga pernah bertugas di Sukoharjo sebelum menjabat Direktur Eksekutif Yasanri pada tahun 1998.

F 1.2. Identifikasi Dokumen

Berdasarkan keterangan dan Aman Muftiyannah peneliti mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen yang tersedia di Yasanri. Peneliti kemudian membuat daftar kebutuhan dokumen untuk menunjang data yang dibutuhkan, yaitu Aktif berdayanya Yasanri, laporan tahunan yang berisi seluruh kegiatan atau program yang telah dilakukan oleh divisi-divisi yang ada di Yasanri, *leaflet* Yasanri, serta buletin-buletin yang diterbitkan oleh Yasanri, yaitu *Swasri* dan *Amanu Swasri* diterbitkan sejak tahun 1996 dan dicetak secara terbatas bagi kalangan buruh sebagai media bertulis untuk melakukan penyadaran buruh perempuan. Sementara itu *Amanu* berbit secara berkala sejak tahun 1993 dan disebarluaskan untuk kalangan umum.

Pada tahapan identifikasi dokumen ini peneliti mulai menghirup sumber pustaka untuk mendapatkan data tentang konteks global dan nasional sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an. Berbagai buku, artikel dalam jurnal dan majalah, serta surat kabar yang berisi analisis dan berita tentang kondisi sosial politik nasional Indonesia dan internasional sejak akhir dekade 1970 hingga akhir masa pemerintahan Soeharto menjadi sumber penting untuk memahami konteks nasional dan internasional. Peneliti menghirup sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku tentang politik Indonesia, jurnal-

jurnal berbahasa awal 1980 hingga pertengahan 1990 dan dalam dan luar negeri (*Perempuan Perempuan dan Indonesia* - jurnal terbitan *Si Putih* (Universitas) surat kabar *Kompas* dan majalah *Jawa*, *malakiah-malakiah* dalam seminar dan workshop, serta berbagai artikel dan laporan yang diakses dari sumber online).

Pemahaman atas situasi sosial politik global dan nasional peneliti dianggap penting untuk menganalisis bagaimana kedua konteks tersebut memengaruhi kelahiran dan mempengaruhi isu yang diperjuangkan Yayasan. Dengan cara lain gerakan Yayasan sepanjang tahun 1982 hingga 1998 akan dikaitkan dengan konteks sosial politik global dan nasional.

1.7 Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data penelitian dilakukan sejak akhir Januari 2003 hingga Januari 2005. Data yang dihipung adalah semua informasi tentang konteks global dan nasional dekade 1980-an hingga 1990-an, wacana atau isu internasional yang berkembang selama kurun waktu 1980-an hingga 1990-an, sejarah kelahiran Yayasan, agenda kegiatan yang dilakukan Yayasan, keterkaitan konteks global dan nasional dengan agenda Yayasan, jaringan organisasi, serta strategi yang dilakukan Yayasan berhadapan dengan masyarakat patriarkis dan negara.

Jangkaun penelitian yang mengahmid kurun waktu masa Orde Baru (1982-1998) tidak memungkinkan peneliti melakukan pengamatan langsung atas fenomena yang sedang diteliti. Proses penelitian yang tidak

memungkinkan peneliti melakukan pertanyaan langsung terhadap informan di lapangan. mensahkan peneliti harus bekerja keras untuk mendapatkan sumber data dari hasil wawancara dan penelaahan sumber-sumber dokumen.

1.2.1 Wawancara

Penelusuran tentang sejarah kelahiran Yasanti dan kebijakan seperti Yasanti dalam memperjuangkan kaum perempuan dilakukan lewat wawancara secara *profesional* (Miles dan Huberman, 1994) dengan tokoh-tokoh pendiri Yasanti. Sumber data dari hasil wawancara dengan para pendiri Yasanti menjadi sangat penting mengingat kegiatan-kegiatan Yasanti di masa-masa awal sendiri belum didokumentasikan.

Kesibukan masing-masing pendiri Yasanti menyebabkan peneliti kesulitan mencari jang bertemu untuk melakukan wawancara. Tidak jarang kontak dan komunikasi terpaksa beberapa kali dilakukan hingga mendapatkan waktu yang tepat untuk melakukan wawancara. Kondisi ini menyebabkan waktu penelitian menjadi lebih lama karena terhambat kesibukan informan.

Budi Wahyuni adalah aktivis yang paling mudah ditemui. Wawancara dengan Budi Wahyuni berlangsung dua kali, yaitu pada tanggal 10 Januari 2003 dan 16 Juni 2003. Sementara Kusumanti, Nurdjanah dan Siti Mustinah baru bisa ditemui setelah peneliti mengadakan kontak beberapa kali.

Wawancara dengan Kusyuniati berlangsung pada tanggal 12 Juni 2005 dan 23 Januari 2005, Noordjanah pada tanggal 21 Maret 2005 dan Siti Muslimah pada tanggal 19 Maret 2005.

Sayang sekali hingga penelitian berakhir peneliti tidak bisa bertemu dengan Kumara Dewi. Peneliti sudah melakukan kontak berkali-kali melalui telepon untuk membuat janji bertemu, namun informan selalu mengawahi belum tahu kapan bisa ditemui karena sibuk dengan pekerjaannya akan pergi ke luar kota selama beberapa hari. Kumara Dewi menyinggalkan Yasanti setelah berlangsung konflik antar pendiri pada tahun 1999. Penjelasan serupa diberikan oleh Kusyuniati saat wawancara pada tanggal 12 Juni 2005 di Jakarta. Liliek Harwati, Tin Irtjah Fakhri dan Susilawati sempat tidak diwawancarai karena tidak banyak berperan membesarkan Yasanti. Menurut Kusyuniati, Hudi Wahyuni, Noordjanah dan Siti Muslimah meskipun dalam Akte Kelahiran Yasanti nama Liliek Harwati, Tin Irtjah dan Susilawati tercatat sebagai pendiri mereka tidak berperan banyak di Yasanti. Liliek dan Tin pulang ke Jawa Timur tidak lama setelah Yasanti berdiri sehingga tidak berperan aktif dalam kegiatan Yasanti. Sementara itu Susilawati sempat mengikuti sebentar kegiatan Yasanti, namun kemudian telah memilih pindah ke Jakarta untuk bekerja.

Kepada para pendiri Yasanti peneliti menanyakan bagaimana mereka saling mengenal, latar belakang keluarga, pengalaman berorganisasi, mengapa tertarik pada isu perempuan, siapa tokoh perempuan yang mereka kagumi dimana mengenal isu perempuan, siapa yang memutuskan ide

untuk mendirikan Yasanti, bagaimana konteks sosial politik nasional dan global saat itu, apa yang mendorong mereka sehingga mendirikan Yasanti, siapa yang mendorong, dan membantu mereka mendirikan Yasanti, agenda apa yang dilakukan Yasanti untuk membantu perempuan kelas bawah, bagaimana mereka melakukan kritik terhadap Orde Baru, bagaimana mereka melakukan proses penyadaran hak perempuan, bagaimana implikasi keberensi-keberensi perempuan internasional bagi Yasanti, mengapa Yasanti melakukan pergeseran agenda gerakan, bagaimana Yasanti memobilisasi dukungan bagi gerakannya dan bagaimana mereka merencanakan strategi agar tidak disungai masyarakat dan aparat karena memobilisasi butuh.

Di antara para pendiri Yasanti, Kusyuniati memiliki ingatan yang paling tajam atas sejarah kelahiran Yasanti dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejak 1982 hingga 1993. Hal ini bisa dimengerti karena Kusyuniati adalah pencetus gagasan untuk mendirikan Yasanti dan ia pernah memimpin Yasanti sejak organisasi ini berdiri pada tahun 1982 hingga tahun 1993 ketika ia mengundurkan diri dari jabatan direktur Yasanti karena akan melanjutkan studi S2 ke Australia.

Selama melakukan proses wawancara peneliti mengetahui ada beberapa tokoh yang dirujuk oleh para pendiri Yasanti sebagai penyemangut atau pemberi motivasi bagi mereka untuk mendirikan Yasanti, yaitu Adi Sasono, Saraswati dan Habib Chirris. Peneliti kemudian mencoba melakukan kontak dengan ketiga tokoh tersebut, namun hanya berhasil menemui Habib

Chirzin Kontak untuk mencoba mewawancarai Adi Sasono telah dilakukan dua kali melalui sekretarisnya, namun selalu berganjak oleh kesibukan Adi Sasono. Peneliti tidak berhasil mewawancarai Saraswati karena sekarang ia menjadi dosen di *Widyadarmas Universitas* dan hingga penelitian berakhir peneliti belum berhasil melakukan kontak.

Wawancara dengan Habib Chirzin dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2003.¹² Kepada Habib Chirzin peneliti menanyakan bagaimana ia mengenal para pendiri Yasanti, mengapa ia mendukung Kusyuniati dan lawan-lawannya mendukung Yasanti, pesan-pesan dan bentuk dukungan apa yang ia sampaikan kepada Kusyuniati dan lawan-lawannya.

Ascanroh diwawancarai pada tanggal 10 Juni 2003 di rumahnya, desa Kawitan, Pamul. Sementara Amin Mufrivanah diwawancarai empat kali masing-masing pada tanggal 26 Januari 2003, 18 Februari 2003, 3 Maret 2004 dan 11 Mei 2004 bertempat di kantor Yasanti Yogyakarta. Amin sempat diwawancarai beberapa kali dengan perimbangan ia adalah aktivis senior Yasanti yang memiliki banyak pengalaman lapangan, baik di Hegaran maupun Sukoharjo dan hingga kini masih aktif di Yasanti. Amin berkegiatan dengan Yasanti sejak tahun 1989. Ia pernah menjadi petugas lapangan (PL) Yasanti di Hegaran dan Sukoharjo yang mengakibatkan ia harus berhadapan dengan tekanan aparat negara dan militer. Kepada Ascanroh dan Amin

¹² Pada dekade 1970 dan 1980 Habib Chirzin sempat dikenal sebagai aktivis senior yang memiliki relasi baik dengan organisasi-organisasi dan lembaga donor dari luar negeri. Menjelang Yasanti berdiri dan pada masa-masa awal berdiri para aktivis Yasanti sering berkolaborasi dan mendapatkan arahan khusus dari Habib Chirzin. Sebagai aktivis Yasanti yang berlatarbelakang keluarga Muhammadiyah telah mengenal Habib Chirzin sebelumnya karena Habib Chirzin adalah tokoh Pergerakan Muhammadiyah.

Muftiyannah peneliti menanyakan sejak kapan mereka bergabung dengan Yasanti, apakah mereka pernah ikut dalam aksi demonstrasi turun, apakah mereka pernah berhadapan dengan aparat desa atau aparat keamanan, apakah Yasanti pernah mendapat ancaman atau intimidasi dari aparat, bagaimana mereka mengatasinya, bagaimana Yasanti menyalang dukungan bayu gerakannya, Forum jaringan nasional dan internasional apakah yang pernah mereka ikuti dan apa implikasinya bagi Yasanti dan kelompok dampingan

Ketika menceritakan pengalamannya Yasanti sewaktu berhadapan dengan aparat negara Amin memotong Umi Asih (staf harian kesekretariatan Yasanti) untuk melakukan konfirmasi atas keterangan yang ia berikan. Peneliti kemudian mewawancarai Umi Asih untuk mendapatkan penjelasan tentang bagaimana Yasanti menyalang jawaban ketika harus melaporkan aktivitasnya pada Kantor Sosial Politik DIY.

Dari hasil wawancara dengan para pendiri Yasanti peneliti merasa perlu untuk meneliti beberapa perempuan mantan anggota kelompok dampingan Yasanti untuk mendapatkan sumber data yang lebih komprehensif. Peneliti bertanya tentang kegiatan yang pernah mereka ikuti di Yasanti, dimana mereka mengetahui Yasanti dan manfaat yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan Yasanti. Berikut bantuan Amin Muftiyannah dan Asarirroh peneliti mendapatkan beberapa nama yang bisa ditemui. Mereka adalah Ibu Sutaryo dan Kubyah, keduanya adalah perempuan mantan dampingan Yasanti di desa Kebunrejo kecamatan Temon Kulonprogo, Martini, mantan dampingan dari kelompok remaja putr putus sekolah dan Ibu Irenn anggota

dan kelompok perempuan buruh gendong Ihu Sutaryo dan Kubiyyih dapat ditemui dengan mudah di Kulanprogn setelah peneliti menanyakan alamat mereka pada Yasanti. Kebetulan keduanya masih melakukan kontak dengan Yasanti hingga sekarang. Martini ditemui di kamar Yasanti, karena sekarang menjadi staf Yasanti. Sementara Ihu Inem ditemui pada saat berlangsung kegiatan pertemuan buruh gendong di masjid Al-Muttaqin kawasan pasar Benengharu Para enamah dampingan Yasanti tersebut masih mengutarakan dengan baik kegiatan-kegiatan dan pengalaman-pengalaman mereka ketika mengikuti kegiatan Yasanti.

Peneliti sebenarnya berusaha untuk melakukan wawancara dengan buruh perempuan di Unjiran yang pernah aktif mengikuti kegiatan Yasanti selama dekade 1980-an dan 1990-an. Akan tetapi peneliti menghadapi kesulitan untuk melacak di mana keberadaan mereka sekarang. Keengganan kelompok-kelompok buruh perempuan di Unjiran yang disorganisir oleh Yasanti tidak tetap (berganti ganti orang) membuat buruh yang berpindah pindah tempat kerja atau tidak lagi menjadi buruh setelah berkeluarga, sehingga mereka pun keluar dari keanggotaan kelompok dan tidak lagi mengikuti kegiatan Yasanti.

Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan prinsip wawancara berperspektif feminis, yaitu dengan melakukan wawancara terbuka yang lebih bersifat sebagai diskusi informal bukan wawancara yang terstruktur kaku dan ketat. Kesempatan yang luas diberikan kepada para aktivis Yasanti yang diwawancarai untuk menuturkan pengalaman-

pengalaman mereka sebagai perempuan yang harus berhadapan dengan masyarakat dan negara patriarkal.²¹

Lama wawancara bervariasi antara 10 menit hingga 3 jam. Sebagian wawancara dilakukan di kantor Yasanti, sebagian di kantor tempat para pendiri Yasanti kini bekerja, sebagian di rumah para perempuan dampungan Yasanti dan sebagian lagi di lokasi kegiatan sewaktu Yasanti mengadakan acara pertemuan dengan perempuan dampungan. Sebagian besar wawancara direkam dengan *note-recorder* dengan persetujuan subjek penelitian. Wawancara dengan huruf gendong tidak direkam dengan pertimbangan akan mengganggu kealamiahannya suasana santai dan akrab para huruf gendong yang sedang menunggu dimulainya acara pengajian. Sebagian besar wawancara berlangsung di Yogyakarta, sementara dua wawancara, yaitu wawancara dengan Kasyuniyah dan Hafid Chirani, dilakukan di Jakarta masing-masing di Lentera *Al-Biharul Iman* (Kampung Bientak) (MNIH) dan Lentera Komunitas Hak Asasi Manusia (Komunitas HAM).

Keseluruhan data hasil wawancara kemudian diolah ke dalam

²¹ Liz Stanley mengemukakan penelitian dengan partisipatif feminis memiliki beberapa ciri. Pertama, penelitian dipandu oleh para subjek feminis. Kedua, penelitian dilakukan oleh partisipatif feminis untuk perempuan dan yang difokuskan pada masalah perempuan. Ketiga, penelitian partisipatif feminis memiliki tujuan yang bersifat politik untuk menantang ketidakefektifan Keempat, bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial, kelima, berupaya perbedaan antara masyarakat Keenam, bertujuan untuk mengembangkan hubungan sosial dengan orang lain sedang dipelajari dalam cara interaktif. Menjelaskan tentang metodologi feminis juga lebih jauh. Liz Stanley, "Feminist Praxis and the Academics: Mode of Production" dalam Liz Stanley, *Feminist Praxis: Gender and Epistemology in Feminist Research*, (London: Routledge, 1993) 11-12 juga menjelaskan Esther Margit, "Feminist Methodology" dalam *Current Sociology* (Volume 45 Nomor 2, April 1997), Hal. 12. Untuk penjelasan tentang istilah penelitian partisipatif feminis pada studi-studi gender sosial lihat Yuzima Cahum, "Feminism and Models of Qualitative Research" dalam Norman K. Denzin, *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 1994) 116-167.

transkrip, yaitu salinan hasil rekaman wawancara ke dalam bentuk di atas kertas. Setelah dibuat transkrip, data hasil wawancara kemudian dikompilasi dan disistematisasikan sehingga siap menjadi bahan analisis.

F 2.2. Kajian Dokumen

Dokumen pertama yang dikaji oleh peneliti adalah Akte Kelahiran Yasanti yang menjadi sumber data awal untuk memahami latar belakang dan tujuan pembentukan Yasanti. Akan tetapi pengkajian Akte Kelahiran semata tidak bisa memberikan penjelasan secara mendalam tentang apa yang sebenarnya melatarbelakangi pembentukan Yasanti dan bagaimana proses kelahiran itu terjadi. Oleh karena itu data untuk mendapatkan pemahaman tentang kelahiran Yasanti lebih banyak disandarkan pada data dari hasil wawancara dengan pendiri Yasanti. Awal disyutngkan catatan-catatan rapid pembetulan Yasanti tidak bisa didapatkan karena tidak didokumentasikan di kantor yayasan, sementara para pendiri Yasanti karena kesibukan masing-masing sudah tidak bisa mengingat lagi dimana catatan-catatan tersebut disimpan.

Laporan-laporan kegiatan tahunan Yasanti di Kulonprogo, Ungaran, Yogyakarta dan Sukoharjo menjadi dokumen penting yang turut dijadikan data penelitian. Meskipun Yasanti telah berdiri sejak 1982, namun kegiatan-kegiatannya baru didokumentasikan sejak tahun 1987. Dengan demikian data untuk lima tahun pertama aktivitas Yasanti tidak bisa didapatkan dari sumber dokumen. Sebagai gantinya data sebelum tahun 1987 dirampas dari hasil

wawancara dengan para pendiri Yasanti. Tidak terdapatnya dokumen tertulis ini berkaitan dengan dana Yasanti yang sangat terbatas. Selama lima tahun pertama sejak berdiri, kegiatan Yasanti didanai dan hasil honor penelitian yang diperoleh berkat kerjasama para aktivis pendiri Yasanti dengan lembaga-lembaga lain. Pada fase ini Yasanti belum mendapatkan dana dari lembaga penyalang dana *donor (fundings)* untuk menjalankan aktivitas-aktivitasnya. Kantor Yayasan masih menyempang di rumah salah satu pendiri. Sementara itu pendekatan-menusun juga belum sempurna. Sekitar tahun 1987 Yasanti mulai mendapatkan dana dari Nwib untuk melibutkan kegiatan di lapangan. Sejak itu dokumen-dokumen, termasuk laporan-laporan kegiatan tahunan, mulai didokumentasikan dengan baik.

Laporan-laporan tahunan Yasanti membantu peneliti dalam mendapatkan data kegiatan yang dilakukan Yasanti di lapangan sejak tahun 1987 hingga 1998, perubahan fokus gerakan yang mencerminkan dinamika gerakan Yasanti, sekaligus untuk memahami konteks sosial politik nasional ketika program-program dalam laporan itu dijalankan. Beberapa laporan tahunan Yasanti diawali dengan pemaparan singkat situasi sosial politik nasional dan kecenderungan global yang sedang terjadi. Pada beberapa laporan bahkan terdapat situasi politik nasional yang mempengaruhi kegiatan Yasanti. Akan tetapi tidak semua aktivis Yasanti yang bertugas menyusun laporan kegiatan lapangan mengupas konteks sosial politik nasional dan kecenderungan global yang mendukung, menghambat atau menghambat pelaksanaan kegiatan Yasanti di lapangan. Kebanyakan laporan yang ditulis

hanya berisi peningkatan jumlah kelompok dampingan dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di lapangan. Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan data dari hasil laporan tahunan peneliti melakukan wawancara dengan aktivis yang melakukan pendampingan di lapangan pada saat laporan tersebut dibuat.

Selama proses pengkajian dokumen berlangsung peneliti menemukan dokumen penting, yaitu beberapa naskah-naskah rapat tahunan Yasanti yang ketika setiap identifikasi sumber data dilakukan dokumen ini belum dimasukkan sebagai sumber informasi. Naskah-naskah rapat ini menjadi data penting untuk memahami argumen-argumen yang mendasari pelaksanaan kegiatan Yasanti di lapangan, pernyataan-pernyataan para aktivis lapangan atas kondisi sosial politik yang berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan Yasanti di lapangan, dan silang pendapat tentang pelaksanaan visi dan misi Yasanti sebagai organisasi perempuan.

Dari bulletin-bulletin yang diterbitkan oleh Yasanti, yaitu *Arum* dan *Nevada*, peneliti menghimpun data tentang isu-isu yang menjadi pusat perhatian Yasanti dari waktu ke waktu, pandangan Yasanti tentang persoalan perempuan, kegiatan-kegiatan Yasanti dalam upaya pemberdayaan perempuan, bagaimana Yasanti menanggapi isu-isu yang mengemuka di tingkat nasional dan global dan menyampaikannya kepada para buruh dampingan.

Buku berjudul "Perguliran Hidup Wanita Perempuwan" menjadi sumber data yang berharga selama proses pengkajian dokumen karena dari buku ini

peneliti menjabarkan data tentang sejarah perkembangan Yayasan, terutama memetakan strategi gerakan Yayasan dan strategi ekonomi ke strategi politik yang dikemukakan oleh Sri Kusyuniati sebagai pemertama gerakan perempuan tersebut menjadi data bagaimana konteks nasional dan internasional yang mempengaruhi visi dan misi Yayasan sebagai organisasi perempuan.

B.5 Analisis dan Interpretasi Data

Setelah data dan hasil wawancara dan penelusuran dokumen terkumpul keseluruhan data kemudian disusun dalam rekaman kasus (*case records*), yaitu ringkasan data mentah yang sudah diorganisasi, diklasifikasi dan diindeks. Rekaman kasus mencakup semua informasi yang digunakan untuk melakukan analisis tentang bagaimana konteks nasional dan global mendukung kelahiran dan mempengaruhi dinamika gerakan Yayasan. Pada tahap penulisan kasus semua informasi dibuat, tanpa bagian yang diabaikan, kemudian disusun sehingga terlihat secara kronologis dan terklasifikasi berdasarkan topik.

Studi kasus merupakan gambaran deskriptif tentang orang, program, lembaga atau organisasi sehingga semua pembaca dapat mengakses semua informasi mengenai orang, program, lembaga atau organisasi itu. Namun demikian studi tentang Yayasan ini tidak bersifat deskriptif semata-mata, karena peran gerakan Yayasan akan dianalisis dengan melihat keterkaitan antara struktur kesempukan politik dengan proses pembangkitan dan struktur mobilisasi gerakan. Seluruh data dianalisis sehingga menjadi peran Yayasan

sehagai susul gerakan perempuan Analisis ditumun oleh kerangka konseptual tentang struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan penubungkaan gerakan sosial. Proses analisis data juga memperhatikan hasil-hasil penelitian terdahulu gerakan perempuan yang pernah dilakukan para peneliti sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Stanley dan Wise (1990: 22) peneliti tidak dapat bertangan kosong dalam proses penelitian, sehingga temuan-temuan dan penelitian-penelitian yang pernah ada sebelumnya amat penting untuk diperhatikan.



BAB II

PROFIL YASANTI

Sebelum masuk pada deskripsi dan analisis tentang bagaimana konteks global dan nasional mendorong kelahiran dan dinamika gerakan Yasanti, untuk memberikan gambaran secara umum mengenai Yasanti bab ini memberikan pengantar mengenai apa dan siapa Yasanti. Pada bab ini akan diberikan deskripsi mengenai sejarah kelahiran, tujuan, struktur organisasi, kelompok dampaian, program-program yang dilaksanakan, pendanaan dan jaringan Yasanti.

A. Sejarah Kelahiran

Yayasan Annisa Swasti (Yasanti) didirikan pada tanggal 22 Oktober 1982 di Yogyakarta oleh 8 orang perempuan, yaitu Sri Kusyuniati (mahasiswa), Rudi Wabiyuni (mahasiswa), Sri Maslumah Widyatuti (mahasiswa), Siti Ningsihah Djoharwan (mahasiswa), Kuntara Dewi (mahasiswa), Susilawati (mahasiswa), Dra Liliek Haryati (guru) dan Iin Insiyah Fakiela (mahasiswa). Sebelum bersepakat mendirikan Yasanti, sekelompok perempuan ini telah saling mengenal satu sama lain lewat kegiatan kepramukaan semua SMP, organisasi pelajar Islam PII dan organisasi perempuan Islam Nasyiyatul Aisyiyah (NA). Terdorong oleh keprihatinan 8 orang koedus perempuan yang terpinggirkan dalam proses pembangunan mereka bergerak untuk melakukan sesuatu yang membantu kaum perempuan kelas bawah kelas dan keterpurukan mereka.

Keinginan sekelompok perempuan ini untuk membantu sesama kaum perempuan didasari oleh semangat perjuangan Karni. Dalam *Leaflet Yasanti* yang pertama mereka mengutip tulisan Karni dalam buku *Haras Cerkut Terbitlah Perempuan* sebagai berikut:

Saya sayang kepada wanita, saya menaruh perhatian kepada nasibnya
Tidak terhina wanita yang tertindas di berbagai-bagai daerah dalam
abad "berang" ini. saya bela dia dengan sekuat dan seisi *Leaflet*
Yasanti

Kurangnya dan kurang-kawannya membenarkan pernyataan Karni tersebut, menunjuk pada dekade 1980-an jumlah perempuan yang tertindas semakin bertambah hanya sementara perempuan yang terlibat dalam kegiatan dan organisasi perempuan hanyalah perempuan yang sudah mapan

Kasa keprihatinan itu akhirnya mendorong Kurangnya dan kurang-kawannya mendirikan sebuah organisasi perempuan untuk membantu perempuan kelas bawah dengan nama Yayasan Annisa Swasti. Annisa berarti perempuan swasti berarti esubadi. Sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran Yasanti, organisasi ini didirikan dengan tujuan untuk pertama, mengembangkan aspek-aspek dan potensi kaum perempuan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budi kemaqum dan kesepahaman bangsa dan negara Republik Indonesia Kedua, mengembangkan sunterdaya manusia dan masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan perempuan agar mampu menjawab tantangan sosial dan ekonomi di masa mendatang Ketiga, bekerjasama dengan lembaga atau organisasi lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan sejalan dengan Yasanti (Akte Kelahiran Yasanti, Pasal 4)

B. Struktur Organisasi

Sejak kelahirannya hingga saat ini Yayasan telah mengalami beberapa kali perombakan struktur organisasi. Ketika berdiri pada tahun 1982 struktur organisasi Yayasan terdiri dari ketua (Sri Kusyuniati), wakil ketua (Sri Muslimah Widayastuti), sekretaris (Budi Wahyuni), wakil sekretaris (Kumara Dewi), bendahara (Siti Noordjanah Djohantini), wakil bendahara (Iris Insiah Fauzih), departemen tilibusu (Liliek Haryati) dan departemen usaha (Susilawati)¹

Setelah mendapatkan dana dari Novib dan akhiras semakin bertambah banyak Yayasan mulai merekrut staf untuk membantu proses pendampingan buruh di lapangan dan staf yang melakukan tugas-tugas administratif di kantor. Struktur organisasi akhirnya terbagi menjadi dua, yaitu Badan Pengurus dan Pengurus Harian. Badan Pengurus terdiri dari para pendiri Yayasan yaitu Sri Kusyuniati, Kumara Dewi, Noordjanah Djohantini, Budi Wahyuni, Siti Muslimah Widayastuti dan Susilawati yang keanggotaannya bersifat parif dan tidak turut serta dalam kegiatan harian. Sementara itu Pengurus Harian adalah para pengelola yayasan yang sehari-hari terlibat dalam seluruh kegiatan yayasan. Pengurus Harian terdiri dari ketua harian (Direktur Pelaksana Harian)

¹ Ditutupi dan Alas Yayasan tanggal 12 Oktober 1982. Menurut pengakuan Kusyuniati beberapa tahun yang telah berpacu, mendirikan Yayasan akhirnya tidak aktif dalam kegiatan yayasan karena pendiri besar kota Merauke adalah Liliek Haryati, Iris Insiah Fauzih dan Susilawati. Sementara semua semua lain yang masih tinggal di Yogyakarta dan kota Kusyuniati tidak pernah mau membesarkan Yayasan karena masalah keselamatan sendiri di organisasi atau pengurusan yang lain, sehingga Kusyuniati memisahkan berpisah sendiri pernah dan untuk membesarkan Yayasan hingga menjadi lembaga yang dikenal dan mendapatkan dana yang besar dan berbagai lembaga donor (Wawancara dengan Kusyuniati, 12 Juni 2011)

dijumpai oleh para staf yang terbagi dalam 4 divisi, yaitu Divisi Aksi dan Advokasi, Divisi Penelitian, Penelitian dan Dokumentasi, Divisi Pendidikan dan Pelatihan, serta Divisi Kelembagaan dan Keuangan¹

Pada tahun 2004 struktur organisasi kembali mengalami perubahan untuk menyesuaikan kebutuhan program Yasanin di lapangan, yaitu membentuk organisasi buruh perempuan yang kuat. Divisi yang semula terbagi menjadi 4 ditambah menjadi 3 divisi. *Pertama* adalah Divisi Pengujian Organisasi di Tingkat Basis yang melakukan pengorganisasian dan penguatan di dalam komunitas duplek. *Kedua* adalah Divisi Administrasi dan Kesekretariatan yang menangani urusan administratif sebagai penunjang seluruh kegiatan Yasanin. *Ketiga* adalah Divisi Kajian dan Dokumentasi. Divisi kajian menunggui penerbitan, pengumpulan informasi, analisis dan pengkajian tentang perubahan, gender dan perempuan, serta melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain dalam rangka advokasi. Sementara itu divisi dokumentasi melakukan pengelolaan perpustakaan, pembuatan dokumen berupa foto, rekaman proses, *photostatic* dan pengelolaan *e-mail*.

Hingga saat ini Yasanin telah mengalami lima periode kepemimpinan. Dua periode kepemimpinan pertama dipegang oleh pengurus yayasan, yaitu Sri Kusyanti (1982-1993) dan Kumara Dewi (1994-1995). Pada periode berikutnya kepemimpinan dipegang oleh salah seorang staf, yaitu Nadroh Asrarroh melalui proses pemungutan suara. Asrarroh hanya memimpin selama satu tahun (1996-1997) karena memutuskan untuk mengundurkan diri

¹ Lihat Yasanin dan Periode ke-Periode dalam *Dayang Tutaresa, Amal Muliyasoh, Jurnal Pengabdian Masyarakat Perempuan, Yogyakarta: Yayasan Yasanin, 1999*, Hal. 117

Setelah itu kepemimpinan kembali dipegang oleh pengurus yasanu yaitu Hudi Wahyuni selama satu tahun (1997-1998). Sejak tahun 1998 hingga sekarang Yasanu kembali dipimpin oleh mantan staf, yaitu Anon Mafriyannah yang merupakan periode kepemimpinan kelima di Yasanu.

4. Aktivitas dan Kelompok Dampingan

Dalam skte Sebelasan Yasanu disebutkan bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya Yasanu melakukan kegiatan-kegiatan (1) pendidikan, latihan serta segala upaya dalam arti yang seluas-luasnya demi pengembangan swadaya dan swakarsa peningkatan terencana di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kesehatan, lingkungan dan lain sebagainya, (2) dengan batas-batas kemampuannya Yasanu bekerjasama dengan pihak-pihak yang dapat mendukung maksud dan tujuan Yasanu, (3) melalui usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan.

Implementasi tujuan-tujuan tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan kelas bawah. Mereka meliputi buruh pabrik dan ibu rumah tangga di Klatenprogo, buruh industri di Ungaran, pramuniaga di Yogyakarta, remaja putri putus sekolah di Yogyakarta, buruh industri di Sukoharjo, dan buruh gendong *terakhir-sudung* di pasar Bantinghargo Yogyakarta. Aktivitas dan gambaran masing-masing kelompok dampingan Yasanu dapat di simak sebagai berikut:

C.1 Perempuan Buruh Petani di Kebonrejo Kulonprogo

Pemberdayaan perempuan di Kebonrejo Kulonprogo dimulai pada tahun 1982 bagi warga Kebonrejo, salah seorang pendiri Yastuti, yaitu Kusyuniati bukanlah orang asing karena ia pernah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa itu. Sebagaimana diungkapkan Siti Mulimah desa Kebonrejo sengaja dipilih dengan pertimbangan Kusyuniati sudah dikenal oleh warga desa. *"Kita ngajak mereka masuk ke suatu tempat yang tidak ubahan sama sekali karena orang dapat mendapat dan untung"* (Siti Mulimah. Wawancara tanggal 14 Maret 2013).

Di Kebonrejo Yastuti mendirikan kaum perempuan yang sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga dan buruh petani agar bisa mencari uang sendiri melalui kegiatan keterampilan menyahit yang kemudian berkembang menjadi usaha konveksi mukera, celana kolor dan seragam sekolah. Usaha konveksi ini pernah meraih sukses mendapatkan banyak pesanan pada tahun 1980-an, namun saat ini tidak lagi berjalan karena kesulitan untuk mendapatkan pasaran.

Kegiatan lain yang dikembangkan oleh Yastuti adalah Usaha Bersama (UB) yang merupakan kegiatan simpan pinjam. Beberapa UB yang terbanyak di Kebonrejo adalah (1) UB Jujur dengan usaha melayani pesanan anggota berupa gelas, piring, sendok, panci, kompor dan sebagainya, (2) UB Setia Dewi yang mempunyai usaha konveksi pakaian wanita, celana kolor, mukera dan seragam sekolah, menjual pakaian jadi, jaket, sarung, pakaian anak-anak, handuk dan sebagainya, (3) UB Sederhana yang mempunyai usaha konsumsi di bidang keperluan sehari-hari seperti sabun mandi, sabun cuci, teh,

gula pasir, pasta gigi, shampoo dan sebagainya dan (4) UB Lanasuci dengan kegiatan usaha melayani pesanan anggota misalnya peralatan rumah tangga, sprei, tikas, radio dan barang-barang konsumsi, seperti sabun, gula, kopi, shampoo, obat-obatan dan lain-lain. Keanggotaan masing-masing kelompok berkisar antara 25-56 orang (Laporan Yasanti, 1990: 271)

Pelaksanaan program UB didukung dengan latihan-latihan kepemimpinan agar kelompok-dampingan di Kebonrejo dapat mengelola UB dengan baik. Salah satu latihan yang pernah diberikan Yasanti adalah Latihan Dasar Kepemimpinan Wanita (LDKW) pada tahun 1987 dan 1988 yang dilaksanakan sebagai bekal agar kaum perempuan dapat melakukan kerjasama, komunikasi, manajemen organisasi dan memdayagunakan modal kelompok. Yasanti juga mengadakan latihan pembukuan untuk anggota kelompok agar mereka dapat mengelola buku kas harian, buku simpanan anggota, buku pinjaman, buku notulen, buku taruh, buku identitas anggota, buku pembelian barang, buku penjualan barang, buku rekening-buku, buku neraca, buku nagitaba (Laporan Yasanti, 1990)

Sejak tahun 1994 Yasanti tidak lagi melakukan pemberdayaan perempuan di Kebonrejo. Namun demikian kelompok-kelompok yang telah terbentuk tetap melakukan kegiatan secara mandiri. Saat ini kelompok yang masih aktif berjalan melakukan kegiatan usaha simpan pinjam. Kontak dengan Yasanti tetap terjalin dalam bentuk konsultasi dan pemberian pinjaman modal oleh Yasanti kepada kelompok.

C.2. Buruh Perempuan di Ungaran

Pada tahun 1982 Yasanti mendapat tawaran dari omop Lembaga Studi Pembangunan (LSP) untuk membantu proyek penelitian tentang tenaga kerja perempuan di sektor formal di kawasan industri Ungaran. Proyek tersebut dibentuk oleh Saraswati Sunindyo ketika mengetahui bahwa Kusyuniati dan kawan-kawan memiliki lembaga, tetapi tidak memiliki dana. Saraswati kemudian mengajak mereka ikut dalam penelitian itu. Kusyuniati menerima tawaran Saraswati, sehingga bersama-sama dengan Lembaga Studi Pembangunan (LSP) dan E.KBHaWK (Lembaga Kajian dan Penelitian Hukum untuk Wanita dan Keluarga) pada akhir tahun 1982 sampai dengan awal tahun 1983 Yasanti melakukan penelitian bersama.¹

Dari pengalaman selama melakukan penelitian lapangan para aktivis Yasanti melihat realita kondisi buruh perempuan sangat menyedihkan. Buruh perempuan mendapatkan upah yang lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki, mereka tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan gizi yang baik, tidak

¹ Untuk mengetahui kehidupan buruh perempuan yang bekerja di industri Kusyuniati dan kawan-kawannya melakukan observasi ke tempat kerja buruh dan tempat tinggal buruh. Mereka melakukan wawancara dengan buruh, untuk mencari data primer dan sekunder untuk menganalisis kondisi dan masalah buruh perempuan. Mereka juga mengunjungi kantor-kantor pemerintah untuk mendapatkan data sekunder. Kemudian dilakukan Kusyuniati dan kawan-kawannya kepada buruh-buruh di dalam pabrik. Di dalam foto perwujudan hasil terapan pelaksanaan penelitian publik permasalahannya berkolaborasi melalui sampel dengan penelitian-lahar dan sampelnya alternatif buruh perempuan yang sedang bekerja di pabrik. Pada Wahyuni representasi bahwa proyek penelitian ini dilaksanakan secara bertahap. Ia melakukan kepala bagian personalia dan merupakan dia bertanggung-jawab, kemudian Kusyuniati dan kawan-kawannya lalu menyempatkan waktu ke pabrik dan berinteraksi langsung kehidupan buruh perempuan dan antara di dalam pabrik. Setelah itu juga kepala bagian personalia. Dengan partisipasi yang lengkap dan berwujud yang mereka lakukan melalui penelitian. Dengan partisipasi yang lengkap dan berwujud yang mereka lakukan melalui penelitian. Setelah berkolaborasi-buruh, selama berkolaborasi dengan melalui Budi Wahyuni, berwujud kepala bagian personalia dia sedang bekerja Kusyuniati dan yang lain-lain sudah berwujud ke dalam pabrik (Wawancara dengan Bedi Wahyuni, 16 Juni 2007 dan Sri Wahyuni, 19 Maret 2007).

memiliki keterampilan, tidak memahami hak-hak mereka sebagai buruh, serta rawan menghadapi pelecehan seksual. Banyaknya buruh perempuan yang menyertai pasaran kerja dan rendahnya kualitas dan keterampilan yang mereka miliki mengakibatkan pihak perusahaan dapat dengan leluasa memperlakukan buruh perempuan. Kesulitan memasuki pasar kerja dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan posisi buruh perempuan semakin terpinggirkan. Mereka tidak memiliki alternatif lain selain berikap lunak, menerima upah rendah, kondisi kerja yang buruk, fasilitas kesehatan yang sangat minim dan tidak ada jaminan kesejahteraan. Pendidikan, keterampilan-keterampilan dan ketidaksihinggaan telah berlangsung dalam kurun waktu yang lama, sehingga buruh perempuan menghidupinya sebagai suatu kewajiban tanpa biaya untuk melepaskan diri dan kondisi sulit yang mereka hadapi karena pengetahuan tentang hak-hak buruh sangat rendah (Liaqatun Yasanti kepada *The Asia Pacific Journal*, Tanpa Tahun 11).

Kondisi seksual buruh perempuan tidak hanya menyebabkan mereka harus menerima kondisi kerja yang memprihatinkan, namun juga memicu munculnya kerawanan-kerawanan sosial, termasuk pelecehan seksual. Noordjanah menuturkan:

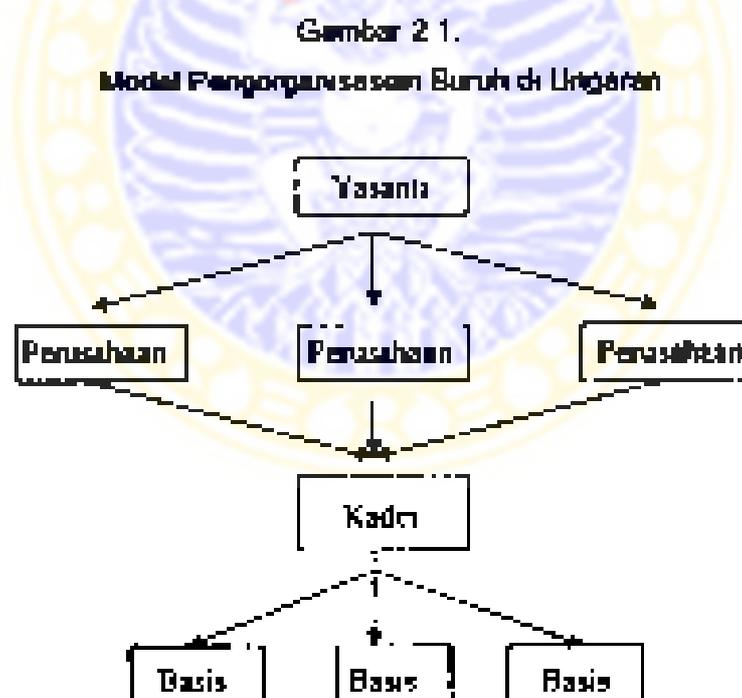
Awal-awalnya nu kira *meurup* meulihat perempuan-perempuan berbondong-bondong pulang kadang-kadang dilecehkan, *uyuwit-jawit* wano kempel. Makou nu kan yang umumnya wacana kekerasan belum seperti sekarang. Mengapa mereka bisa diperlakukan seperti itu. Mungkin kira ke *Arwa-kawar* ternyata senekan ngerti lagi. Nanci kalau sudah dibumih ada yang bunuh diri dan sebagainya itu ya sudah yang terjadi karena yang dasarnya perempuan itu tidak berharga. Dianggap yang satu deudeun yang lain nu sama model-modelnya. Ya yang namanya keneh eu kan hukunya yeu ya. Apalagi kalau pulang *meulaw* (Wawancara, 21 Maret 2001)

Fenomena marginalisasi buruh perempuan tersebut mendorong Yasuni untuk membantu buruh perempuan keluar dari ketergantungan mereka. Kusyurnati dan kawan-kawannya meyakini bahwa buruh perempuan sebenarnya memiliki potensi atau kemampuan untuk keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Untuk itulah sejak akhir tahun 1982 Yasuni membantu buruh perempuan di Ungaran memecahkan permasalahan-permasalahannya dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan huri-huri untuk memberikan kesadaran akan peranan dan keberadaan buruh, serta menumbuhkan kepercayaan diri sebagai seorang manusia yang mempunyai harga diri (Laporan Yasuni kepada *The Asian Community*, Tanpa Tahun 2).

Pada awal mulanya kegiatan yang dilakukan Yasuni untuk memberdayakan buruh perempuan di Ungaran adalah memberikan latihan keterampilan (terutama menjahit), penyajian dan Usaha Bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk menarik buruh agar mau berkumpul dan berorganisasi. Kegiatan kemudian dikembangkan menjadi diskusi perubahan yang dilakukan secara rutin seminggu sekali di kantor Yasuni dengan mengundang lembaga atau orang yang ahli dalam L.C. Perubahan. Selain itu Yasuni juga mengadakan kegiatan arisan dan anjingsana untuk mengakrabkan anggota kelompok dan mencari dukungan warga kampung (desa tempat tinggal buruh) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan buruh bukanlah kegiatan yang negatif. Arisan dan anjingsana juga diisi dengan diskusi mengenai permasalahan-permasalahan kelompok atau permasalahan

perusahaan dan terkadang diisi pula dengan pembahasan buku-buku perburuhket Yasanti juga mengadakan latihan kepemimpinan bagi buruh, latihan teater buruh dan penyuluhan kesehatan yang pelaksanaannya dibantu oleh PKKI (Laporan Kegiatan Lapangan Divisi Aksi dan Advokasi di Ungaran, 1993: 31)

Pengorganisasian buruh di Ungaran dilakukan dengan sistem gerak *swin* (gubernurahuan atau sejatun dan mulut ke mulut) dan satu buruh ke buruh lainnya hingga akhirnya terbentuk beberapa kelompok dengan jumlah anggota kelompok antara 15-20 orang (Laporan Ungaran, 1992). Model pengorganisasian buruh di Ungaran dapat disianak pada gambar berikut ini:



Sumber: Laporan Evaluasi Akhir Yasanti Tahun 1995, Hal 8.

Jumlah kelompok buruh yang menjadi dungsongan Yasanti di Ungaran senantiasa berubah dari waktu ke waktu. Berikut ini adalah tabel tentang jumlah kelompok buruh dan kegiatan yang mereka lakukan bersama Yasanti sejak tahun 1988 hingga 1998.

Tabel 2.1.
Jumlah Kelompok dan Kegiatan Buruh Industri di Ungaran
Tahun 1988-1998

	T A H U N										
	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
Jeni Kelompok	12	10	10	14	9	18	8	8	8	8	8
Kegiatan	MJ UB KK	MJ LMB	MJ LMB	MJ OP AJ	MJ OP AJ	MJ KT OP AJ	MJ KT AJ DK OP	MJ KT AJ DK OP	MJ KT AJ DK OP	MJ KT AJ DK OP	MJ KT AJ DK OP

Sumber: Diolah dari Data Penelitian.

Keterangan:

- MJ : menjahit
- UB : Usaha Bersama
- KK : Koperasi Komunitas
- OP : Organisasi Perburuhan
- AJ : Arjansana
- KT : Kurus Tes
- DK : dakorasi

Mobilitas buruh yang sangat tinggi menjadi kendala yang dihadapi Yasanti dalam melakukan pengorganisasian buruh di Ungaran. Tidak jarang anggota kelompok yang sudah dibina Yasanti dan mampu untuk mengembangkan kelompok berkecukupan di tengah jalan akibat berpindah kerja ke tempat lain, mengikuti suami atau pulang ke desanya. Hal ini menyebabkan

kegiatan yang sudah berakumulasi berhenti di tengah jalan atau berkurang anggotanya (Laporan Pembinaan Ungaran, Yasanti, 1992). Kondisi ini pula yang menyebabkan anggota kelompok dampingan di Ungaran berganti-ganti orang sepanjang waktu, sehingga menyebabkan Yasanti senantiasa harus kembali melakukan pengorganisasian dari awal. Namun demikian, sesuai komitmen Yasanti sebagai orang perempuan pembela buruh perempuan, hingga saat ini komunitas buruh industri di Ungaran tetap menjadi basis utama aktivitas Yasanti.

C.3 Pramuniaga di Yogyakarta

Seiring dengan perjalanan waktu dalam memberdayakan buruh perempuan di Ungaran, Yasanti mendapati bahwa kehidupan buruh perempuan di sektor ritel tidak berbeda jauh dengan buruh perempuan di sektor industri yang ditandai oleh upah dibawah standar, tidak ada jaminan kesehatan dan hak cuti, serta jam kerja yang panjang. Terdorong oleh kepedulian pada kondisi yang memprihatinkan sejak tahun 1986 Yasanti mengadakan program pemberdayaan pramuniaga beberapa toko di Jl Malioboro Yogyakarta, yaitu pramuniaga toko Ramai, toko Limas dan toko Sunijaya.⁸ Kelompok dampingan Yasanti kemudian meluas meliputi pramuniaga di Jl Solo dan Gejayan Yogyakarta.

Pengorganisasian pramuniaga dilakukan Yasanti melalui kegiatan-kegiatan kesenioran, yaitu kursus menjahit, kursus mengetik dan kursus Bahasa

laggris dengan mendatangkan instruktur khusus. Sebagaimana cara yang dilakukan Yasanti di Kintaran, sistem *getak tekor* juga dipromosikan untuk mengajak para pramuniaga mengikuti kegiatan Yasanti. Selain kegiatan-kegiatan khusus, setiap setengah bulan sekali Yasanti bekerjasama dengan LBBH mengadakan diskusi UU Perburuhan untuk membahas masalah upah, perjanjian kerja, jam kerja, pemvetsuan masalah perselisihan perburuhan, jaminan kerja dan hak cuti. Diskusi perburuhan juga dilakukan pada acara kursus jika instruktur tidak datang.

Diskusi-diskusi perburuhan membuahtkan manfaat positif bagi pramuniaga. Berkat diskusi itu beberapa pramuniaga sudah mulai berani mencoba menanyakan hak cuti dan perhitungan jam lembur. Demikian pula jika ada pramuniaga yang diperlakukan tidak adil, misalnya dicuduh menghilangkan uang dari toko padahal dia tidak melakukannya, maka pramuniaga tersebut berkonsultasi atau meminta pendapat Yasanti (Laporan Yasanti, 1990).

Untuk mempermudah komunikasi antar pramuniaga kelompok-kelompok, pramuniaga dampingan Yasanti membentuk forum komunikasi pramuniaga Yogyakarta sebagai sarana pertemuan dan pertukaran informasi permasalahan-permasalahan perburuhan. Pembentukan forum komunikasi ini juga bertujuan untuk menunjukkan pada masyarakat bahwa profesi pramuniaga tidaklah negatif sebagaimana anggapan masyarakat (Laporan Yasanti, 1994: 9).

¹ Lihat Laporan Yasanti Tahun 1990 dan Yasanti, "Laporan Huru Hara dan Advokasi" dalam Laporan Yasanti, 1991 Hal 8.

Jumlah kelompok pramuniaga dampungan Yasanti juga mengalami pasang surut seperti rumpak pada tabel berikut

Tabel 2.2
Jumlah dan Kegiatan Kelompok Pramuniaga
Di Yogyakarta Tahun 1987/1995

	T A H U N									
	87	88	89	90	91	92	93	94	95	
Jumlah Kelompok Kegiatan	10	6	3	4	8	4	3	7	9	
	Mj	Mj	Mj	Mj	Mj	Mj	Mj	Mj	Mj	
	Mg	Mg	Mg	Mg	Mg		BI	DP	BI	
	BI	BI	BI	BI	BI				DP	
	UB	UB								

Sumber: Dohan dan Data Penelitian

Keterangan

- Mj menjahit
- Mg mengembik
- BI Bahasa Inggris
- DP Diskusi Perburuhan

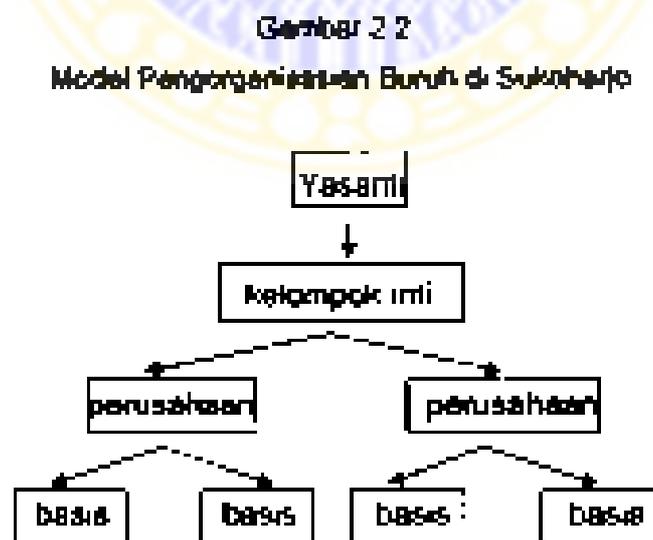
Pertemuan pramuniaga di Yogyakarta berhenti pada tahun 1990 dengan pertimbangan bahwa Yasanti ingin lebih mengintensifikan diri pada pengorganisasian buruh industri di Irian Jaya sebagai kegiatan utama dan buruh pendong di Yogyakarta sebagai kegiatan tambahan

4.4 Buruh PE Sirex Sukoharjo

Alasan perkembangan buruh PE Sirex Sukoharjo berasal pada tahun 1992 ketika para mantan anggota kelompok dampungan dari PE Kalidimas Lampung yang berpindah kerja ke PE Sirex Sukoharjo mengantar Yasanti

melakukan pendampingan buruh di Sukoharjo. Di tempat kerja yang baru para mantan buruh PT Balamex merasakan bahwa mereka juga mendapatkan perlakuan yang tidak memuaskan dari pihak perusahaan sehingga kemudian meminta Yasami mendampingi mereka di Sukoharjo. Oleh karena itu kebanyakan anggota kelompok pendampingan Yasami di Sukoharjo adalah mantan buruh PT Balamex Ungaran yang di-PHK, menyusul aksi demonstrasi buruh di PT Kacamex tahun 1992.

Tidak seperti di Ungaran dan Yogyakarta, media untuk menarik buruh agar mengikuti kegiatan Yasami tidak dilakukan melalui kursus keterampilan, tetapi melalui media arisan dan UB (serapan gajian). Kelompok arisan kemudian membentuk kelompok inti. Anggota kelompok inti masing-masing membentuk kelompok baru. Model pengorganisasian buruh di Sukoharjo dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Laporan Evaluasi Akhir Yasami Tahun 1995, Hal 8

Kegiatan utama yang dilakukan Yasanti bersama bawah PT Srilex Sukoharjo adalah pertemuan kelompok yang terdiri dari pertemuan kelompok kader dan pertemuan antara kader dengan anggota kelompoknya. Pertemuan kelompok kader (kelompok inti) dilakukan sebanyak dua kali di kantor Yasanti Sukoharjo. Pertemuan ini bertujuan untuk menyempurnakan dan mempertajam kemampuan beranalisa kader dalam melihat masalah yang sedang terjadi di perusahaan maupun dalam kelompok yang mereka bentuk. Pertemuan ini juga menjadi forum untuk mendiskusikan atau menguji ulang pemahaman-pemahaman pemerintah yang bertubung dengan perusahaan.

Pertemuan bentuk kedua, yaitu pertemuan masing-masing kader dengan anggota kelompok yang mereka bentuk dilakukan di rumah anggota kelompok secara bergilir. Pertemuan mendiskusikan masalah-masalah perubahan yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman anggota serta melihat situasi kelompok. Para kader harus berhati-hati dalam menyampaikan pendidikan perubahan, sebab jika tidak demikian anggota kelompok akan merasa takut untuk datang lagi dalam pertemuan kelompok karena mengira akan diajak keluaran perusahaan atau dikeluarkan dari pekerjaannya karena mengikuti pertemuan kelompok tersebut (Laporan Yasanti, 1994).

Untuk memobilisasikan masalah perubahan pada buruh dan masyarakat serta sebagai kamouflage untuk menutupi kegiatan pengorganisasian buruh Yasanti mengadakan latihan kerajinan dan makan. Latihan ini tidak saja diikuti oleh buruh, tetapi juga oleh masyarakat sekitar (Laporan

pendampingan kegiatan kelompok buruh, divisi aksi dan advokasi Sukoharjo, dalam Laporan Yasanri, 1994:11

Kegiatan Yasanri beserta jumlah jumlah kelompok dampingan di Sukoharjo sejak tahun 1992 bisa disimak pada tabel berikut

Tabel 2.3
Jumlah dan Kegiatan Kelompok Buruh di Sukoharjo
Tahun 1992-1995

	T A H U N			
	1992	1993	1994	1995
Jumlah	5	6	7	5
Kelompok				
Kegiatan	DP Adv	DP A ₁ Ti Kr	DP Kr A ₁	DP A ₁

Sumber: Ditolah dan Data penelitian

Keterangan:

DP	Diskusi Perburuhan
Adv	Advokasi
A ₁	Anjangan
Kr	Karawitan
Ti	Tan

Kegiatan Yasanri di Sukoharjo berhenti pada tahun 1996 karena aktivitas pendampingan diredakan tidak berjalan maksimal. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi Yasanri adalah mobilitas buruh yang sangat tinggi. Buruh-buruh yang berasal dari PT Harmonix sudah banyak yang berpindah kerja ke perusahaan-perusahaan lain di Bandung, Jakarta, Ngatan dan lain-lain.

sehingga pencapaian keberhasilan diskusi-diskusi perbantuan untuk memandirikan buruh sulit diukur. Kendala kedua adalah timbulnya rasa bosan di kalangan buruh akibat kepekaan kelompok yang menurun dan akhirnya mereka tidak aktif lagi dalam kegiatan. Kendala ketiga adalah kesediaan Yayasan untuk mengorganisir buruh perempuan akibat kebanyakan buruh perempuan tidak tertarik untuk datang untuk mengikuti kegiatan diskusi, padahal menurut *Perencanaan Strategis (Renstra) Yayasan Tahun 1995* sasaran kelompok di Sukoharjo adalah buruh perempuan. Kendala-kendala tersebut akhirnya menjadi bahan pertimbangan bagi Yayasan untuk melepas pendampingan buruh di Sukoharjo yang dimulai dengan proses *passung sur* (terap masih melakukan kepekaan dan komunikasi, namun tanpa PI, yang tinggal di Sukoharjo pada tahun 1996) (*Laporan Kegiatan Pengorganisasian Divisi Aksi dan Advokasi Yogyakarta, Ujungragu dan Sukoharjo Tahun 1996*: 2 & 4).

C.4 Remaja Putri Putus Sekolah

Pendampingan remaja putri putus sekolah dimulai pada tahun 1996 ketika Yayasan memutuskan untuk ikut memberdayakan remaja putri putus sekolah sebagai bagian dari tanggung jawab dan kepedulian Yayasan pada kaum perempuan yang tinggal di sekitar kantor Yayasan.

Kegiatan yang dilakukan Yayasan meliputi keterampilan menjahit yang dilakukan seminggu dua kali di kantor Yayasan. Selain itu Yayasan juga mengadakan kegiatan *Kisah Bersama* dengan melakukan pertemuan antar dan sipan pertemuan dua kali setiap bulan. Dalam acara pertemuan kelompok

kegiatan-kegiatan juga diadakan latihan keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan praktis seperti memasak, membatik bunga dan pita, merangkas bunga dan lain sebagainya. Mereka juga diberikan bekal latihan kebermanian dengan menjadi penjual unik menjadi pemahwa acara, kuliah tujuh menit dan membuat sambutan, terutama dimula dan pengantar (Laporan Yasani, 1991).

Kecangyamanan kelompok remaja putri sekolah mengalami pasang surut karena anggota memkalah atau mengikuti suami (lihat tabel 2.4). Hingga saat ini kegiatan kelompok remaja putri putri sekolah masih berjalan, meskipun Yasani tidak lagi melakukan program pemberdayaan bagi kelompok ini.

Tabel 2.4
Jumlah dan Kegiatan Kelompok Remaja Putri Putri Sekolah
Tahun 1987-1995

	T A H U N								
	87	88	89	90	91	92	93	94	95
Jumlah Kelompok	8	3	3	2	4	4	4	4	6
Kegiatan	Mj UB	Mj UB	Mj UB	Mj UB	Mj UB	Mj BI	Mj BI	Mj UB	Mj KT UB

Sumber: Dikolah dan Data persediaan

Keterangan

- Mj : mengajar
- UB : Usaha Bersama
- BI : Bahasa Inggris
- KT : Kursus Tas

C.6 Buruh Gendong (Fasakng-Fasakng) Pasar Beringharjo Yogyakarta

Pemberdayaan buruh gendong di pasar Beringharjo Yogyakarta dimulai pada tahun 1994. Sebelumnya Yasanti telah sudah dengan kehidupan buruh gendong karena pernah melakukan penelitian tentang buruh gendong pada tahun 1987. Pengalaman selama melakukan penelitian menyadari Yasanti bahwa buruh gendong menghadapi pekerjaan berat yang rawan mengganggu kesehatan mereka. Tidak jarang buruh gendong mendapatkan perlakuan kasar dari pedagang atau pembeli yang menggunakan jasa mereka, sementara upah yang mereka dapatkan sangat kecil. Sementara itu buruh gendong yang masih muda terkadang mengalami pelecehan seksual. Kondisi-kondisi itu mendorong Yasanti untuk memperluas langkah pemberdayaan perempuan dengan melakukan program untuk buruh gendong.

Buruh gendong yang diberdayakan Yasanti semula hanya meliputi buruh yang tinggal (Jawa) di daerah Iodok Ratmakan dan Cokrodaryan (daerah perkotaan di pinggiran sungai Code) yang terletak di timur laut pasar Beringharjo. Lama kelamaan buruh gendong yang tidak tinggal di Iodok Ratmakan atau Cokrodaryan juga tertarik untuk mengikuti kegiatan Yasanti sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok sendiri. Yasanti menggunakan masjid Al-Muttaqin yang terletak di kawasan pasar Beringharjo sebagai tempat untuk melakukan kegiatan bersama mereka (laporan divisi aksi dan advokasi dalam laporan Yasanti 1994: 13).

Kegiatan yang pernah dilakukan Yasanti untuk buruh gendong adalah memberikan pelajaran membaca Al-Quran dengan metode lqo dan tuntunan

lata cara melakukan ibadah wajib, serta menambatkan pelajaran membaca (pembiasaan buku huruf) yang dilakukan seminggu tiga kali berselang seling dengan kegiatan agama. Kegiatan ini semula akan dilakukan dengan metode kejar paket. Yusemi sudah meminjam buku ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DIY, namun dipinjam bahwa buku itu sudah tidak tersedia karena Kodya. Yogyakarta dianggap sudah bebas buku huruf. Akhirnya Yusemi memutuskan untuk tidak meminta bantuan Depdikbud. Sebagai gantinya Yusemi melakukan kegiatan belajar mengajar dengan metode sederhananya.

Kegiatan yang hingga saat ini masih rutin berlangsung adalah Usaha Bersama simpan pinjam yang dilaksanakan di kost buruh gendong dan masjid Al Mutaqien pasar Beringharjo setiap selapan (15 hari) sekali. Terkadang pertemuan UB juga diisi dengan ceramah pengajian yang bertitik dengan isu kesetaraan gender. Usai mengikuti kegiatan UB para buruh gendong mendapat kesempatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan secara gratis oleh dokter dari PKBI.

Jumlah kelompok buruh gendong di pinggan Yusemi beserta kegiatan yang dilakukan dapat disimak pada tabel berikut:

Tabel 2.5
Jumlah Kelompok dan Kegiatan Buruh Gendong di Pasar Beringharjo
Yogyakarta Tahun 1994-1998

	T A H U N				
	94	95	96	97	98
Jumlah Kelompok	1	1	1	2	2
Kegiatan	UB Pg BT	UB Pg BT	UB Pg PK	UB Pg PK	UB Pg PK

Sumber: Olah dan Data Penelitian

Keterangan:

UB : Usaha Bersama
Pg : Pengajian
BT : Baca Tulis
PK : Pemenuhan & penyukuhan kesehatan

Saat ini Yaswati tetap memfokuskan diri untuk melakukan pendampingan kelompok buruh di Uaparan. Meskipun pengorganisasian kelompok-kelompok buruh gendong telah memberikan banyak masukan pelajaran berharga, khususnya dalam hal ketayutan pengalaman praktis mengorganisir keorganitas-komunitas buruh pada tingkat basis. Namun program tersebut diinisiasi Yaswati kurang memiliki nilai strategis. Pengorganisasian buruh gendong dipandang lebih tepat untuk dijadikan program suplemen sebagai kamufase politik yang dibutuhkan dalam kondisi Ikuw Jawa Tengah dan DIY (Kebijakan dan Strategi dasar Arah Pengembangan Program Yaswati 1992-1994). Beberapa kelompok dampingan yang lain, yaitu perempuan di Kulonprogo dan remaja putri putus sekolah masih melakukan kegiatan secara mandiri tanpa didampingi Yaswati. Kondisi kelompok-kelompok perempuan yang dibendayakan Yaswati bisa dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.5
Kegiatan dan Status Kelompok Dampingan Yaswati

Nama Kelompok Dampingan	Tahun	Kegiatan	Status saat ini
Perempuan buruh tani Kulonprogo	1982	Mengajar, Usaha Bersama (UB), latihan kepemimpinan	Masih aktif 3 kelompok yang berjalan mandiri

Perempuan buruh pabrik di Unggulan	1992	Menjahit, UB, deduksi perburuhan, aksi mogok, pembebasan kasus (advokasi), pelatihan gender, pelatihan keselamatan kerja dan kesehatan reproduksi	Kelompok utama dampingan Yasanti
Perempuan pemurni air	1998	Menjahit, kurban mengabdikan, kultur Bahasa Inggris, deduksi perburuhan	Kegiatan berhenti tahun 1998
Perempuan buruh industri di Sukoharjo	1992	UB, karawitan, manula, deduksi perburuhan, keadilan gender	Kegiatan berhenti tahun 1998
Ramaya putri pusat sekolah	1998	Menjahit, UB, latihan kepemimpinan, pelatihan gender, pelatihan kesehatan reproduksi	Kelompok berjalan secara mandiri
Buruh gandong	1994	UB, pengajian, baca tulis Al-Quran dan lain, pengetahuan kesehatan reproduksi, pemantauan kesehatan	Hingga saat ini masih menjadi kelompok dampingan Yasanti

Sumber: Ditah dan data penelitian

D. Pendanaan

Pada masa awal berdiri keseluruhan dana untuk membiayai aktivitas Yasanti di limpung dari iuran para pendiri. Berkat perkecualan Kusyurini dengan Adi Sasono dan Sarinwati dari LSP, Yasanti diajak untuk membiayai penelitian tentang buruh di Unggulan. Sebagian honor hasil penelitian kemudian disisihkan untuk membiayai aktivitas Yasanti. Budi Wahyuni membatalkan

Untuk setiap kuesioner dapat honor sebesar Rp 12.500,00. Dari honor sebesar itu kita hanya mengambil Rp 5000, 00 untuk honor pribadi, sisanya digunakan sebagai dana aktivitas Yasanti (Wawancara, 16 Juni 2003)

Kusyuniati mengemukakan bahwa pada tahun-tahun pertama berdiri Yasanti belum memiliki lembaga donor untuk membiayai aktivitas sehingga dana dihipung dari berbagai honor penelitian.

Waktu itu mungkin sampai lima tahun kita nggak dapat dana untuk aktivitas, tapi aku terlibat dalam penelitian dan penelitian sana sehingga dapat uang. Setelah penelitian dengan LSP kita penelitian dengan departemen Perindustrian melalui orang-orang LPSN untuk melakukan Study P2WIKSS di Kulonprogo. Kemudian meneliti teman di Podan, dapat uang lagi jadi penelitiannya cukup banyak. (Kusyuniati, Wawancara tanggal 16 Juni 2003)

Setelah kegiatan berjalan beberapa tahun, Yasanti mulai belajar mengajukan proposal dana ke lembaga donor. Kusyuniati dan kawan-kawannya belajar membaca proposal dari para aktivis omop yang lebih senior, antara lain Adi Sasono dan Anton Sujarwo. Berkait bantuan para tokoh omop, Yasanti diperkenalkan pada orang-orang dari lembaga donor hingga kemudian mendapatkan dana untuk mendukung aktivitasnya.

Siapa pun yang bersedia membantu aku saat turun kemana-mana. Ada waktu luang antara seminggu satu kerja terus. Ada Sasono kemana-mana saya turun gitu, kemudian ketemu donor ahkemudian. Yang pertama dapat dari Oxfam tapi kecil, dapat 1,25 juta. Yang besar dari Asw Foundation 20 juta. Itu untuk busana. (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Dana dari *Asw Foundation* digunakan untuk melakukan penelitian 'lanjutan' tentang kehidupan buruh perempuan di Lingaran secara lebih mendalam, melakukan pengajaran tentang kebutuhan yang diperlukan oleh buruh perempuan dan memberikan bursus serta pelatihan untuk meningkatkan

¹ Penelitian awal tentang kehidupan buruh perempuan sudah dilakukan pada akhir tahun 1980 hingga awal 1990 dalam rangka membiayai penelitian Lembaga Studi Pemberdayaan (LSP).

kemampuan dan kemampuan mereka (Laporan Yasanti kepada *The Asia Foundation*. Tanpa Tanggal)

Yasanti juga mendapatkan dana dari NOVIB untuk membiayai aktivitas di lapangan dan melakukan pemberdayaan kantor, berstatus untuk menggaji pengurus dan staf NOVIB adalah lembaga donor yang cukup lama memberikan dana bagi Yasanti sehingga memiliki peran penting dalam membesarkan Yasanti. Noordjanub mengemukakan

Berkas NOVIB Yasanti yang semula adalah lembaga kecil bisa berkembang menjadi lembaga yang mapan dan memiliki dana yang cukup untuk melakukan program-programnya dan membiayai kebutuhan kantor (Wawancara, 21 Maret 2013)

Hingga tahun 1995 NOVIB adalah lembaga utama penyandang dana bagi Yasanti. Setelah itu NOVIB hanya memberikan dana untuk program-program pendukung (Notulensi Rapat Tahunan Yasanti, 1996)

Lembaga lain yang juga cukup lama memberikan dana untuk Yasanti adalah *Arca for the World*, sebuah lembaga donor dan Asosiasi Yasanti juga pernah mendapatkan dana dari *Carrolli Fund* untuk membiayai kegiatan penelitian kesehatan dan keselamatan kerja bagi buruh. Dana itu juga dipergunakan untuk membuat modal penelitian kesehatan bagi buruh. Sementara itu *Ford Foundation* memberikan dana untuk membiayai program-program lapangan dan penelitian tentang *Arca*

Selain mendapatkan dana dari lembaga-lembaga donor asing Yasanti juga pernah mendapat dukungan dana pendukung program dari lembaga-lembaga di dalam negeri, antara lain dari LPJES dan YLKI. Saat ini program-program Yasanti didanai oleh *The Asia Foundation* dan *The Global Fund*

E. Jaringan Kerjasama

Yasanti memiliki banyak jaringan kerjasama dengan berbagai lembaga omop atau tanah yang tersebar di lingkup regional, nasional maupun lokal (DIY). Kerjasama untuk membentuk jaringan ini telah dilakukannya sejak Yasanti berdiri. Habib Chirizis memunculkan pengalamannya

Waktu itu mbak Kus saya ajak menghadiri pertemuan ACFOD (*Asian Central Forum on Development*) di Bangkok. Di sana mbak Kus saya kenalkan dengan aktivis omop dari Malaysia dan Jepang. Sejak saat itu Yasanti selalu diundang dalam pertemuan-pertemuan ACFOD. Mbak Kus juga saya kenalkan kenalkan dengan para aktivis SEARCE (*Southeast Asian Regional Institute for Community Education*) yang berpusat di Manila dan membentuk jaringan kerjasama. (Wawancara, 12 Juni 2003)

Dalam jaringan ACFOD Yasanti pernah diundang untuk menghadiri pertemuan pertama omop 10-Asia-Eropa di Bangkok Thailand tanggal 26-28 Februari 1998. Pertemuan Omop 10-Asia-Eropa membahas agenda tentang hak asasi manusia yang meliputi isu-isu buruh, perempuan, lingkungan dan kebijakan-kebijakan ekonomi, sosial dan politik dalam lingkup Asia dan Eropa. Yasanti dalam pertemuan itu diundang untuk melakukan presentasi tentang *labour solidarity* (Laporan Divisi Pendidikan dan Latihan, 1998: 29)

Sebagai omop perempuan yang peduli dengan persoalan buruh Yasanti menjadi anggota forum CAW (*Central Asian Women*) dan APWSL (*Asia-Pacific Workers's Solidarity Link* - bagian dari ACFOD yang menaungi proyek perburuhan). Yasanti secara rutin selalu hadir dalam pertemuan CAW dan APWSL.

Yasanti juga menjadi anggota INFID yang sekarang bernama INFID (*International Forum on Indonesian Development*), sebuah forum beranggotakan orop-orop yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki jaringan internasional sebagai bagian dari upaya untuk menekan pemerintah Indonesia agar memperhatikan kepentingan rakyat dan hak asasi manusia. Akibat menjadi pimpinan INFID pada masa pemerintahan Soeharto Yasanti yang diwakili oleh Kusyuniati pernah dipanggil ke Koramil dan diwajibkan melaporkan seluruh aktivitasnya ke kantor Direktorat Sosial Politik.

Forum lain yang diikuti Yasanti adalah *Global Alliance Against Trafficking in Women* (GAATW). Dalam forum ini Yasanti mendapatkan banyak pengalaman dalam menangani kasus perdagangan perempuan. Salah satu peristiwa yang pernah diikuti Yasanti dalam forum GAATW adalah pertemuan untuk membahas perdagangan perempuan, yaitu mengkaji konvensi internasional tentang HAM dan mengidentifikasi serta mendokumentasikan kasus-kasus perdagangan perempuan.

Di tingkat nasional Yasanti menjadi anggota WALHI (*Wahana Lingkungan Hidup*), GAKTPI (*Gerakan Aksi Ketenangan terhadap Perempuan Indonesia*), dan jaringan orop antar buruh Ketenangan dalam WALHI sudah diikuti sejak tahun 1980-an. Keikutsertaan dalam GAKTPI dilakukan sejak gerakan ini terbentuk pada tahun 1998 sebagai reaksi atas aksi kekerasan terhadap perempuan pada peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Sementara itu jaringan orop antar buruh Jakarta-Yogyakarta-Surabaya sudah diikuti sejak tahun 1980-an. Saat ini jaringan antar orop buruh sedang membentuk

RAH II

KONTEKS GLOBAL DAN NASIONAL KELAHIRAN YASANTI

Bab berikut akan mendeskripsikan gambaran konteks global dan nasional pada kurun waktu dekade 1970-an hingga 1980-an sebagai konteks yang melatibelakang kelahiran Yasanti. Konteks global dan nasional yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah konteks yang berkaitan dengan ketidakadilan di tingkat global dan nasional yang mendorong kelahiran gerakan melawan ketidakadilan, termasuk diantaranya adalah gerakan perempuan. Dalam konteks ketidakadilan global dan nasional bab ini selanjutnya akan mendeskripsikan bagaimana Yasanti sebagai orang perempuan berperspektif feminis berdirinya pada tahun 1982.

A. Konteks Global dan Nasional

Konteks global dekade 1970-an dan 1980-an ditandai oleh semaraknya fenomena globalisasi gelombang ketiga¹ atau yang oleh Czelmas (2013: 9) disebut juga dengan abad perusahaan multinasional (*multinational corporation*). Globalisasi gelombang ketiga sebenarnya telah dimulai waktunya sejak tahun 1883 ketika raja minyak dunia John D. Rockefeller mendirikan *Standard Oil*

¹ Globalisasi gelombang ketiga menjadi penanda berakhirnya era merkantilisme (1492-1789) sebagai bentuk globalisasi gelombang pertama dan abad ekspansifisme kapitalis (1789-1914) yang merupakan globalisasi gelombang kedua.

Itulah sebuah perusahaan multinasional yang pertama di dunia. Sejak saat itu Amerika menguasai perekonomian dunia lewat ekspansi perusahaan-perusahaan multinasional di berbagai negara yang menandai lahirnya revolusi industri yang kedua dengan ciri-ciri penggunaan mesin-mesin berteknologi listrik dan produksi barang secara besar-besaran.

Logika yang mendasari ekspansi globalisasi gelombang ketiga diturunkan dari ideologi neo-liberalisme yang menempatkan (1) arti penting institusi pemilikan privat dan efek disributif dari ekspropriasi kemakmuran yang tidak tertangkap oleh korporasi-korporasi multinasional, (2) hukum pasar sebagai mekanisme superior distribusi sumber daya, kekayaan dan pendapatan, dan (3) perdagangan bebas sebagai mekanisme terbaik untuk menjamin kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan individu (Gelinas, 2001: 24).

Dalam ekspansi globalisasi gelombang ketiga segala sesuatu yang memiliki nilai menjadi bahan komodifikasi dan komersialisasi sistem ekonomi global. Dalam implementasinya proses ini harus diimbangi dengan marjinalisasi kekuasaan dan otocitas negara-negara Dunia Ketiga di dalam pengaturan ekonomi nasional yang hingga dekade 1980-an telah terjadi dalam beberapa gelombang tahapan. Pertama, deregulasi sistem keuangan internasional. Breton Woods yang terjadi sejak tahun 1971 dan telah mengubah semua aset keuangan dunia ke dalam kapital spekulatif yang menandai awal mula globalisasi finansial. Kedua, deregulasi ekonomi Dunia Ketiga secara sistematis dan gradual yang dimulai sejak awal tahun 1980-an melalui program-program penyesuaian struktural (*structural adjustment*) di bawah pengawasan IMF dan Bank Dunia yang

bertujuan untuk mengintegrasikan negara-negara sedang berkembang ke dalam pasar global. Ketiga, deregulasi pasar saham yang terjadi sejak tahun 1980 untuk mengahub deregulasi semua pasar saham di seluruh dunia (Gehring, 2003: 31)

Bentuk-bentuk pengurangan melalui regulasi sistem perdagangan internasional tersebut telah merampas kekayaan dan merugikan kehidupan masyarakat negara-negara Dunia Ketiga. Globalisasi sistem pertanian modern menurunkan pendapatan petani Dunia Ketiga akibat kebijakan devaluasi mata uang, meningkatnya biaya produksi, mahalnya harga mesin-mesin pertanian dan merosotnya harga komoditas. Serupa itu modernisasi sistem pengolahan makanan telah merusak keragaman budaya pangan dan ekonomi pangan lokal. Produk pangan lokal yang diolah secara tradisional (menggunakan tangan) dipertanyakan keberlanjutannya untuk dikuatirkan. Tangan manusia dianggap sebagai pembawa kuman yang menyebabkan makanan terkontaminasi, sehingga harus digantikan oleh mesin-mesin dan bahan kimia yang dibeli dari perusahaan multinasional (Silva, 2001: 60-61).

Tragedi kemanusiaan akibat globalisasi neo-liberal di negara-negara berkembang secara lebih rinci tergambar dalam beberapa fenomena sebagai berikut. (1) 4 sampai 6 milyar penduduk di 127 negara terbelakang berada dalam kondisi kemiskinan yang luar biasa. (2) 40 negara paling terbelakang secara teknologis mengalami kebungkaman. (3) pendapatan per kapita per tahun dari 100 negara di Dunia Ketiga mengalami penurunan dibandingkan dengan 10, 15, 20 atau bahkan 30 tahun yang lalu. (4) 2,8 milyar penduduk di negara-negara Dunia Ketiga hidup dengan pendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari. (5) 1,3 milyar

penduduk di negara-negara yang sama habitat hidup dengan tingkat konsumsi kurang dari 1 dollar AS (6) 2,0 milyar penduduk dunia tidak memiliki infrastruktur sanitasi yang memadai dan (7) 1,4 penduduk dunia tidak memiliki akses air minum yang bersih.⁷

Dampak ekhwalisasi pemahang ketiga di Indonesia menunjukkan gejala serupa. Salah satu gejala itu ditanda oleh terjadinya ketimpangan pendapatan antara penduduk miskin dan penduduk kaya. Pada tahun 1960 penduduk miskin di Indonesia meraknate 19,5 persen pendapatan nasional. Namun sepuluh tahun kemudian yaitu pada tahun 1979 tingkat kesjahteraan justru menurun ketika 40 persen penduduk Indonesia yang tergolong miskin hanya meraknate 14,4 persen pendapatan nasional. Sementara itu 10 persen lapisan teratas menerima bagian yang cukup besar, yaitu 34 persen dari pendapatan nasional (Rahardjo, 1982: 5).

Kaum perempuan berada pada barisan kelompok masyarakat yang mengalami nasib menyedihkan di tengah laju pemhanguran. Asumsi bahwa pembangunan akan memberi keuntungan pada perempuan melalui proses *trickle down*⁸ hasil pertumbuhan ekonomi ternyata merupakan kekeliruan besar. Pemhanguran justru berdampak merugikan bagi perempuan, karena proses pembangunan tidak menyentuh kelompok perempuan. Sejumlah penelitian tentang dampak pembangunan pertanian bagi perempuan selama dekade 1970-an dan 1980-an menyimpulkan bahwa program Revolusi Hijau telah menyedihkan

⁷ Analisis lebih lanjut oleh Jacques E. Gelinas, *Development Without Condemning Productive Substitution*, London & New York: Zed Books, 2001.

⁸ Para perencana modernisasi meyakini bahwa pemerataan ekonomi secara bertahap akan "menembur ke bawah" untuk kelas dan menengah-bawah.

penyediaan kehilangan peran mereka dalam proses produksi pangan. Peningkatan peran perempuan di sektor pertanian pada akhirnya mengakibatkan langganannya posisi ketertandusan perempuan. Sebelum Revolusi Hijau diperkenalkan, perempuan memiliki peran aktif dalam keseluruhan proses produksi pertanian, sejak masa menanam hingga memanen. Namun perkenalkan padi baru varietas unggul dan teknologi baru dalam program Revolusi Hijau telah mengubah peran perempuan desa. Kawan perempuan yang semula bertugas menanam padi (sawah) dan menyiangi padi, mengukir (tanam) dan menumbuk padi (giling) menjadi kehilangan pekerjaan karena terjadi intensifikasi di bidang pertanian dengan masuknya varietas padi unggul yang cara penanaman dan pemeliharaannya berbeda. Ketika panen tiba perempuan tidak lagi melakukan *mu-sam*, karena padi diganen dengan cara disabit. Demikian pula kegiatan *nyam* telah digantikan dengan mesin penggilingan padi sehingga banyak perempuan kehilangan pekerjaan. Program Revolusi Hijau telah mengganti peran perempuan dengan teknologi yang dikontrol oleh kaum laki-laki. Program ini juga diimangi dengan peningkatan peran lembaga formal untuk membantu petani mendapatkan benih, pupuk, kredit dan informasi pertanian. Kondisi ini semakin mengesalkan petani perempuan karena banyak diantara mereka yang hura huruf dan tidak mempunyai hak atas tanah (Smych, 1991: 123).

Di bidang industri perempuan mengalami nasib yang tidak kalah menyedihkan. Perusahaan-perusahaan mempekerjakan perempuan dalam industri industri pembuatan makanan, elektronik dan tekstil. Meskipun buruh perempuan kurang memiliki keahlian atau kemampuan dibandingkan buruh laki-laki, banyak

perubahan lebih sering menyesuaikan barang perempuan karut dianggap lebih mudah untuk dikontrol, lebih pasti dan rajin, lebih ekonomis karena mau dibayar murah, dan jarang melakukan protes yang bisa mengganggu jalannya proses produksi. Rendahnya pendidikan dan keterampilan yang dimiliki menyebabkan barang perempuan cenderung upah yang lebih rendah⁴ dibanding barang laki-laki, tidak mendapatkan jaminan keselamatan kerja, pengembangan karir yang terbatas, kondisi pekerjaan yang berat, status disertai tuntutan agar mereka tetap produktif dan penuh.⁵

⁴ Kertaji Poes yang diterbitkan Ford Komisaris pada tahun 1980 menyatakan bahwa di banyak negara berbagai program mengatasi ketidakadilan upah dan mendapatkan lapangan pekerjaan oleh perempuan berikut: (1) mengatasi segregasi perempuan dalam lapangan kerja yang ditandai dengan pembagian status dan upah secara, (2) perempuan mendapat tanggung jawab penuh atas pengambilan rumah tangga dan pemeliharaan anak dan mengatasi hambatan yang dihadapi para ibu-ibu. (3) perempuan dimasukkan dalam berbagai kegiatan, pengajaran dan pelatihan untuk mendapatkan kredit. (4) dalam perempuan anak berpartisipasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk menguasai para standar lebih sering dibanding laki-laki, (5) kelas-kelas pendidikan, pelatihan guru, pelatihan-pelatihan administrasi kesehatan dan manajemen apa perempuan itu sebenarnya dan dapat menjadi seperti apa, (6) dilaksanakan sistem tanggungjawab pada persoalan staf keluarga pendidikan, (7) ketetapan pekerjaan perempuan dianggap, (8) peran sebagai ibu dianggap signifikan dan signifikan sebagai partisipasi anak membantu laki-laki dan kompetensi perempuan dan (9) tanggungjawab perhatian pada strategi untuk mengatasi masalah ketidakadilan terhadap perempuan.

Sayth (1993) menggunakan istilah kebijakan publik yang dibuat pemerintah sebagai kebijakan gender. Kebijakan ini diadopsi dan diimplementasikan tanpa mempertimbangkan dampak pada perempuan sebagai subjek, bukan objeknya, dan tidak menggali dan menggali. Sayth mencatat dan berfokus pada istilah kebijakan ini. Pertama, kebijakan-kebijakan ini bersifat "integratif", yaitu memberi prioritas pada orang yang dapat diandalkan perempuan dalam pembangunan, sehingga keuntungan yang diperoleh perempuan dianggap minor dan PKK dan Program P2WKS (Peningkatan Peranan Wanita Melalui Keluarga Sehat Sejahtera) mendistribusikan perilaku perempuan ini. Secara mendistribusikan aktivitas-aktivitas pertanian dan pekerjaan rumah di area publik dan mendukung pembangunan pemerintah di area publik. Kedua, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah mengabaikan ketidakadilan. Pada saat ini kebijakan ini diimplementasikan dalam konsep pembangunan yang dominan, berpusat pada nilai-nilai keluarga dan modernitas. Namun di sisi lain kebijakan ini mengabaikan strategi gender yang mengabdikan peran tradisional perempuan dalam masyarakat. Kebijakan ini lebih dari sekedar pemerintah yang melihat perempuan sebagai ibu rumah tangga dan laki-laki sebagai pencari nafkah. Pihak domestik tidak mampu bagi perempuan untuk memiliki tanggung jawab masyarakat. Para-pada yang diimplementasikan ini dan-dan konsep PKK bahkan bahkan dengan tugas-tugas reproduksi perempuan, pemeliharaan anak serta pemertanian nilai-nilai dominan dalam masyarakat karena gender berfokus. Secara kultur pendidikan ini bahkan dengan konsep peyaya Jawa tentang keluarga. Perempuan sebagai ibu diimplementasikan nilai dan nilai-nilai mereka, masyarakat dan negara. Mereka harus mengabdikan tugas mereka dalam berbagai tugas praktis kelurahan. Implementasi konsep ini dapat diadopsi dalam organisasi perempuan

B. Gerakan-Gerakan melewati Keadilan

B.1 Gerakan Mahasiswa

Ekspansi kapitalisme global yang melahirkan ketidakadilan global dan rasional pada akhirnya melahirkan bentuk-bentuk perlawanan. Di Indonesia perlawanan ini antara lain dimotori oleh para mahasiswa lewat aksi-aksi demonstrasi sepanjang dekade 1970-an yang mengkritik kebijakan Perumahan Modal Asing (PMA) oleh pemerintah.⁴ Para aktivis mahasiswa memiliki ideologi-ideologi yang didukung oleh pemodal rakus hanya menguntungkan sedikit orang, sementara rakyat tetap berada pada kondisi kemiskinan struktural. Strategi ekonomi rasional yang dikawal dengan istilah *market down effect* dikritik mahasiswa sebagai sebuah rumpi besar. Kemarahan mahasiswa antara lain terungkap saat JJ Prink, Menteri Pembangunan Belanda dan sekaligus ketua IGGI berkunjung ke Indonesia pada bulan November 1973. Ia disambut dengan aksi demonstrasi mahasiswa yang menyatakan, “Kami sudah membentik pembangunan dari hasil penanaman modal asing dan bantuan luar negeri dalam bentuk bangunan-bangunan bertingkat dan hotel-hotel, Cico Cico, Klub malam, dan sejenisnya sementara pada waktu yang bersamaan

bermasalah karena Soekarno Dianggap Wanita Dalam organisasi Dianggap Wanita kaum perempuan - yang beberapa diantaranya berprofesi sebagai dokter, guru, dan lain-lain- harus menyumbangkan tenaga dan waktunya dalam organisasi Dianggap Wanita dan kaum muda

⁴ Mahasiswa adalah salah satu aktor yang mendominasi Soekarno menduduki jabatan perdana merangkaplah Soekarno pada tahun 1966 namun kemulutua rasial menggerak keajaiban-keajaiban yang diambil Soekarno di bidang pembangunan karena menggalang rakyat. Pada tahun 1970 hingga 1972 mahasiswa menggerak rasialitas rasialitas rasialitas di bawah pemerintahan soekarno untuk mempergunakan. Mereka juga mempergunakan pembangunan proyek Tamsil Mula yang diprakarsai oleh Mo Tien Soekarno. Akibatnya pada bulan Januari 1972 pemerintah menakuti proyek dengan berbagai alasan politis dan para pemer sarat kabar.

pengangguran terjadi dimana-mana, rakyat sudah patah rumah dan tanah, meluara-meluara kecil-kecil, tanah oleh budak-budak mereka dieksploitasi"

Pada tanggal 31 Desember 1973 Hariman Situmorang, ketua Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa pembangunan ekonomi telah menjadi "mitos politik baru" yang bentuk-bentuk ekspropriasi tanah dan pemaksaan penjualan tanah para petani kepada pemerintah, sehingga semakin mempersulit kondisi kehidupan masyarakat desa. Sementara itu sekelompok kecil orang yang memegang kekuasaan justru memantapkan strategi ekonomi pemerintah sebagai sarana untuk menumpuk kekayaan dan memuaskan kebutuhan mereka akan barang-barang mewah (Bresnan, 1993: 140)

Aksi penolakan Penanaman Modal Asing yang lebih besar berlangsung ketika PM Jepang Tanaka Kakuei berkunjung ke Indonesia bulan Januari 1974. Satu bulan sebelum Tanaka berkunjung, para aktivis mahasiswa telah mendampingi kedubes Jepang dan *writer-writer* yang menjual barang-barang produk Jepang sambil membawa spanduk-spanduk bertuliskan kritik bahwa Jepang telah melakukan eksploitasi ekonomi Indonesia. Kritik ini meledak ketika PM Jepang Tanaka Kakuei datang ke Indonesia pada tanggal 15 Januari 1974. Kedatangan Kakuei disambut oleh demonstrasi mahasiswa. Sekelompok mahasiswa berhasil menerobos pasukan keamanan dan masuk ke barisan sementara kelompok mahasiswa yang lain berusaha memblokir jalan yang akan dilewati Kakuei dan rombongan, namun mereka berhasil dihajar oleh tentara. Pagi harinya mahasiswa menggelar aksi di jalanan. Mereka merampas sepeda motor buatan Jepang, mengenspekan bus-busnya, membakar mobil-

mobil buatan Jepang dan melompati jendela showroom Toyota Astra, serta memasuki hotel tempat Tanaka dan rombongan menginap (Breunen, 1993: 133). Insiden ini dikenal dengan Peristiwa Lima Belas Januari (Malari) yang berakhir dengan penangkapan dan penahanan beberapa aktivis mahasiswa.²

Akta tersebut mendapatkan reaksi keras dari pemerintah melalui Surat Keputusan 028/1974 tentang pelarangan kegiatan politik di kampus pemerintah menyatakan (1) hentikan kegiatan-kegiatan yang bersifat politik di kampus, (2) pimpinan perguruan tinggi bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berlangsung di kampus, (3) kegiatan yang dilakukan mahasiswa harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan perguruan tinggi, termasuk program kerja dan rapat organisasi mahasiswa. Akibat pembatasan-pembatasan itu mahasiswa mencari alternatif kegiatan lain, salah satunya adalah menjadi aktivis organisasi non pemerintah/otonom (Najpospos, 1996: 27).

Meskipun pemerintah menerapkan pembatasan terhadap aktivitas politik bagi dunia kampus, mahasiswa tidak surut dalam melakukan kritik-kritik terhadap Orde Baru. Lewat Gerakan Anti Kebodohan mahasiswa melakukan diskusi-diskusi yang mengkritik masalah perekonomian, kebijaksanaan ekonomi, perkembangan situasi sosial politik dan sistem pendidikan nasional. Menurut mahasiswa rakyat telah "dibodohi" dengan slogan-slogan pembangunan yang justru meminta pengorbanan rakyat banyak.

² Utala menulis bahwa aksi demonstrasi mahasiswa tersebut sangat besar kemungkinannya mendapat ilham dan gerakan demokratis mahasiswa di Thailand yang bertolak belakang dengan rezim militer pada tahun 1973 berikut. Itu pun terjadi karena Indonesia yang secara resmi membantukam aksi pemerintahan rezim militer di Thailand. Lihat Anders Utala, *Democracy and Difficult Transitions: From Military to Democracy in Thailand* (Lund: Lund University, 1993), hal. 111.

Beberapa contoh kasus yang diangkat oleh mahasiswa adalah masalah penyelesaian kasus Pertamina dan kasus Satelit Pelapa yang tidak jelas detail perselaluannya, serta masalah ketimpangan pemerataan pendidikan.⁸

Penilaian kritis mahasiswa diperkuat oleh beredarnya isu tentang "Mafia Berkeley" sebagai jukikan terhadap para teknokrat pembangunan alumni Universitas California di Berkeley Amerika Serikat.⁹ Negara Adidaya itu dianggap sebagai biang kapitalis dunia. Mahasiswa mengkritik kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia karena semakin diarahkan ke dunia kapitalis sehingga hanya menguntungkan kaum pemodal dan melemahkan posisi golongan ekonomi lemah.

⁸ Hasil diskusi mahasiswa kemudian dikonsekrasikan dengan para pemangku partai politik (PPP dan PDI) serta Kelompok Karya di Jakarta. Mereka juga berdiskusi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thuyob beserta staf alihnya. Lewat Gerakan Aksi Mahasiswa yang punya konsep agar paku-paku yang berada di bawah naungannya bukan naungan bagi para koruptor. Pasca diskusi rangka penyusunan GEMAS tahun 1974-1982. Menanggapi aksi mahasiswa yang paku-paku pada tanggal 24 Juli 1977 dibantu Time Dialog Pameran yang digelar dan digelar pameran, dibantu oleh Menteri Riset Prof Soesanto Djajadikusuma. Anggota him un adalah Menteri Perhubungan Carol Satiro, Menteri Perencanaan Faldi, Menteri Keuangan Menteri Nukentahap Sabroto, Menteri Kesehatan Mochtar Kusumahatmadja dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Syarif Thuyob. Mereka semua sebagai ideologi juga adalah para koruptor yang dikenal luas sebagai koruptor dalam masyarakat. Setelah bulan Juli-Agustus 1977 mereka mengorganisir aksi pengorganisasian, yaitu Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran dan Universitas Gadjah Mada untuk melakukan aksi-aksi pembangunan seperti mahasiswa dengan tujuan untuk meredakan situasi-situasi yang tidak stabil. Tapi itu tidak berhasil sehingga mereka terpaksa diadukan dan gagal di Bandung. Akibatnya mahasiswa terpaksa melakukan protes. Mereka mengorganisasikan konferensi nasional mahasiswa kerja, organisasi kerja, struktur baru, pembangkitan disiplin, pendirian per kampus yang radikal dan kelompok ekonomi lemah. Analisis tentang Gerakan Mahasiswa 1978 oleh guru kelas Haryandito, *Pergerakan Gerakan Mahasiswa 1978 dalam Pergerakan Politik Nasional*, (MILITER Golden Tarigan Press, 1994), Hal 15-20. Lihat juga John Bratton, *Mahasiswa Indonesia*, New York: Columbia University Press, 1974, Hal 124-136.

⁹ Di masa para pemangku radikal, kelompok aksi HIM ekonomi dan demokrasi dan Universitas Indonesia di dalam Berita -sebagai koruptor dalam Universitas of California di Berkeley- yang dipaparkan oleh Prof. Widyono Mawanto ini mengorganisir berbagai aksi-aksi berdasarkan konsep-konsep yang ada-hingga para koruptor.

Puncak aksi gemakan mahasiswa terjadi di Bandung pada tanggal 14 Januari 1978 ketika Dewan Mahasiswa ITB mengeluarkan pernyataan sikap menolak Soeharto menjadi presiden RI kembali. Pada tanggal 16 Januari 1978 mereka mengadakan "apel siaga" yang diisi antara lain dengan pidato Winat Witoejar (aktivis gemakan mahasiswa 1966) dan pembacaan pernyataan sikap mahasiswa ITB yang "tuntut mengingankan Soeharto kembali menjadi presiden RI"¹¹. Gerakan menentang pemilihan Soeharto dengan cepat menyebar ke seluruh Indonesia, sehingga ABRI menyalakan siaga penuh dan kadang-kadang meningkatkan kesiapannya.¹²

¹¹ Reaksi pemerintah terhadap aksi mahasiswa ITB sangat keras, sehingga pada tanggal 13 Januari Pebruari tahun 1978 orang-orang di ITB yang non-kampus ditangkap. Diperkirakan lebih dari seribu mahasiswa diantar. Beberapa kampus di Jawa diduduki pasukan militer dengan senjata lengkap hingga Sabtu 4 Maret 1978 sekitar.

¹² Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa sepanjang dekade 1970 memiliki kekuatan luar biasa dalam mengkritik sistem karena didukung oleh tokoh-tokoh penting dalam tubuh angkatan bersenjata, terutama para perwira yang telah pernah berinteraksi dengan para perwira lain adalah Letjen HR Dharsono, Letjen Kemal Idris, Jenderal Nasution, dan Ali Sadikin. Semua perwira mahasiswa 1966 berinteraksi dengan perwira ABRI sebagai pendukung aksi aksi mahasiswa untuk menjatuhkan Soeharto. Ketika Soeharto memenangkan pemilihan KEMRI Idris adalah salah satu perwira yang sangat mengancam pemerintahan Soeharto karena dianggap sebagai pemegang harapan perwira muda, sehingga melakukan radikalisme politik mahasiswa. Tanggal 14 Januari 1978 ketika sampai di Darmasatya Indonesia di R. Rikawa. Menara Panglima Komrad su merupakan "Cahaya Orde Baru dan baru". Makna tersebut "Cahaya" ini kali pertama tidak dilaksanakan oleh beberapa kelas generasi kaya KEMRI Idris. Menjadikan idak-nya mempromosikan soal perwira mahasiswa 45. "Kalau saya bicara soal itu sebenarnya saya itu bangsalah Orde Baru yang sekarang menjadi warna Orde Baru". HR Dharsono juga dikenal sebagai tokoh pendukung mahasiswa sejak lahir perwira mahasiswa 1966. Pernyataan-pernyataan yang mengkritik rezim Orde Baru dikemukakan pada saat berdialog dengan mahasiswa dan mereka mempromosikan mahasiswa untuk bergabung dengan mendukung dari kelompok militer senior. Pada saat acara pengajian 17 tahun Trinita oleh mahasiswa Bandung 1978 HR Dharsono mengemukakan bahwa kerusuhan-kerusuhan yang timbul di masyarakat dikarenakan adanya penyimpangan perwira Orde Baru. "Saya sangat mendengar tekanan "kemungkinan ABRI kepada rakyat" itu semua karena ada sesuatu yang diturunkan rakyat sebagai pemilikannya". HR Dharsono menyamakan agar masyarakat yang terpolah sebagai pimpinan nasional dalam ABRI agar memperhatikan kerusuhan masyarakat karena tekanan dari bawah bukan berarti mengancam, namun mengingatkan. Sementara itu Jenderal Nasution dan Ali Sadikin dikenal karena ucapan-ucapan mereka yang terpolah mengkritik pemerintah. Sejak permulaan 1977 keduanya secara resmi terpolah mempromosikan diri sebagai perwira dan kerusuhan yang dikawatirkan oleh pihak militer. Akibat upaya-upaya ini pada tanggal 27 Januari 1978 Soeharto memberi penghargaan kepada perwira perwira perwira Jenderal A. H. Nasution, Letjen Ali Sadikin, Letjen H. R. Dharsono dan Letjen Kemal Idris. Mereka diberi penghargaan agar berikan hasil dalam ucapan dan tindakan mereka yang berpolah dari pemerintah. Sebagai bagian dari rencana pemerintah kepada kelompok perwira militer yang terpolah itu, Letjen HR Dharsono yang

Untuk meredakan aksi mahasiswa Pengkoptamrib Laksmadana Sudomo mengeluarkan Surat Keputusan mengenai pembekuan kegiatan-kegiatan Dewan Mahasiswa Pada tanggal 23 Januari 1978 Laksmadana Sudomo dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Sjaif Thayeb mengundang para rektor dan meminta agar kampus berada di bawah pengawasan rektor dan para pemimpin Dewan Mahasiswa harus mendaftar pada Kopkamtib. Surat kritis mahasiswa akhirnya dibungkam ketika Doroed Yoesoef yang diangkat oleh Soeharto sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III mengeluarkan peraturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) pada tahun 1978 yang melarang kegiatan politik di kampus.¹³ Kebijakan NKK membuat mahasiswa tidak lagi memiliki ruang gerak karena tanggung jawab keamanan kampus berada di tangan rektor (Ali, 1995: 29).

Penemuan kebijakan NKK pada tahun 1978 mendorong sebagian

kegiatan sebagai ... bagi Selvon ASEAN dibentangkan dan jebaknya. Para pemimpin politik menjadi pembentangan HR Doroed dan jebaknya ... persiapan peringatan bagi para jenderal yang bisa yang sering dianggap pemerintah dan pribadi Soeharto agar tidak bertabrakan dalam urusan mereka.

¹³ Peraturan ini dikeluarkan karena menurut para-streets mahasiswa telah keluar dan jalan mereka. Kegiatan mahasiswa diarahkan lebih banyak pada politik dibandungkan kegiatan akademik dan rekreatif. Akibat peraturan NKK kegiatan mahasiswa yang masih berjalan hanya bersifat akademik dan rekreatif. Periode ini merupakan masa sulit bagi gerakan mahasiswa, karena banyak kampus yang merupakan representasi mahasiswa seperti UINd Bani adalah mengizinkan dan mengizinkan setiap kegiatan mahasiswa di dalam kampus. Mereka menolak kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik dan pengorganisasian mahasiswa. Implementasi politik mahasiswa seperti Deklarasi Mahasiswa, perpelebaran dan pers kampus dipusatkan dan diarahkan keagutnya, sehingga tidak lagi menjadi di bawah mahasiswa. Faktor dominan awal mengorganisasi kerendahan gerakan mahasiswa 1978. Diarahkan gerakan mahasiswa pada masa Orde Baru memiliki keterbatasan sebagai persiapan di tingkat elit. Akibatnya politik yang dilakukan kelompok oposisi menjadi politik keberagamaan politik mahasiswa. Kemandirian yang ada membuat kerendahan bagi mahasiswa banyak terlihat. Sebaliknya, apabila kelompok oposisi berhasil dikendalikan dan dipacatkan, maka jalan pada dasarnya yang dapat menggunakan gerakan politik mahasiswa. Dalam konteks kerendahan politik mahasiswa pada 1978, mendasarnya kerendahan oposisi membuat kerendahan politik mahasiswa yang terwujud kembali. Hal ini dapat ditambah dengan kemampuannya ditangani media massa yang sebelumnya memiliki peranan cukup luas bagi elite elite mahasiswa.

aktivis gerakan mahasiswa yang semula melakukan aksi-aksi demonstrasi mengkritik rezim Orde Baru mengalihkan aktivitas mereka dengan bergabung dengan ormap yang sudah mapan atau mendirikan ormap sendiri. Bentuk kegiatan baru ini merupakan salah satu alternatif dari dua kecenderungan penyekompokan aktivis mahasiswa untuk tetap mempertahankan kegiatannya. Bentuk kecenderungan yang pertama adalah mereka yang tetap menempatkan kampus sebagai pusat kegiatan mahasiswa dengan berbagai perubahan organisasi maupun orientasi kegiatan. Kedua adalah mahasiswa yang berupaya mencari bidang kegiatan baru di luar kampus yang dianggap sebagai lapangan dan berbagai hal yang pernah dipergulirkan dalam gerakan mahasiswa.

Upaya mahasiswa menggalikan kegiatan ke luar kampus dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Pertama adalah kelompok yang tetap menjadikan mahasiswa sebagai pelaku utama dan kelompok sasaran yang dituju, dalam arti tetap mempertahankan tradisi pendidikan tinggi dan budaya "intelektualisme". Termasuk di sisi ini adalah kelompok-kelompok studi dan diskusi yang tumbuh menyebar di kota-kota besar, seperti Jakarta, Bandung dan Yogyakarta. Satu kelompok studi kurang lebih terdiri dari 10 orang. Mereka melakukan kegiatan penelitian wawasan sosial dan intelektual dan secara khusus menyiapkan kader atau sarjana berpandangan kritis dan memiliki cara tanggung jawab sosial. Salah satu diantara kelompok studi yang tumbuh menyebar itu adalah Kelompok Studi Proklamasi yang mengadakan diskusi bulanan di kampus Sekolah Tinggi Bahasa Deiyakarta Jakarta. Mereka secara rutin mendiskusikan isu-isu sosial politik, mengundang puluhan aktivis

mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta dan mengundang para pakar berkemuka sebagai pembicara. Diskusi-diskusi itu kemudian dipublikasikan di berbagai surat kabar nasional. Sementara itu di Yogyakarta ada Kelompok Studi Tehnosofi yang melakukan aktivitas lebih mendalam dengan membentuk jaringan antar kota dengan para aktivis mahasiswa yang lain. Salah satu kegiatan yang pernah dilakukan adalah mengadakan kemah perdamaian pada acara tahun baru 1987 yang dihadiri oleh para aktivis mahasiswa dari seluruh Jawa (Ali, 1989: 47).

Tumbuh subur nya kelompok-kelompok studi mahasiswa harus diperkuat oleh masuknya teori Neo-Marxis dan jalan ke "sosialisme" yang dipopulerkan oleh Arief Budinans pada awal 1980-an. Demikian pula tulisan-tulisan Adi Sasono, Sriwa Arief, Dewart Rahardjo dan Furchus Bulkin membawa mahasiswa kepada teori-teori radikal. Bekal pemahaman baru tersebut mendorong mereka membuat kajian alternatif dan mencari jawab atas perubahan struktural yang mereka inginkan. Mereka yang semula aktif dalam kelompok studi banyak yang kemudian menjadi aktivis orop (Setiawan, 1994: 43).

Kelompok kedua adalah mereka yang menjadikan masyarakat bawah atau rakyat kecil tidak hanya sebagai kelompok sasaran, tetapi juga sebagai kawan dan subjek perubahan. Termasuk dalam kelompok ini adalah mahasiswa yang mendirikan orop-orop dalam bidang teknologi tepat guna, pembinaan kewira seni, manajemen dan koperasi, serta berbagai yayasan yang bergerak di sektor informasi membantu pedagang kecil dan memulus kegiatan

lain seperti kerohanian di masjid.¹⁴ Sebagian mahasiswa yang masuk dalam pengelompokan ini kemudian bekerjasama atau bekerja dalam ormap yang sudah mapan. Beberapa ormap yang didirikan oleh aktivis mahasiswa masa NKK adalah Yayasan Mandiri Pribadi dan Yayasan Kalyanamitra di Jakarta yang bergerak di bidang informasi, Yayasan Mandiri di Bandung yang bergerak di bidang teknologi tepat guna, Yayasan Cermi di Salatiga yang terlibat dalam masalah pengangguran tukang becak dan di Yogyakarta ada Kelompok Penggir Kali yang menangani anak-anak gelandangan, Yayasan Nusantara yang aktif dalam kegiatan pesantren, Yayasan Widyadari yang mengajar masyarakat buta huruf dan Yayasan Annisa Smituti (Yasanti) yang menaruh perhatian pada pemberdayaan perempuan kelas bawah.

B.2 Kritik Organisasi Non-Pemerintah (Ormap)

Organisasi non-pemerintah (ormap) merupakan wadah saluran ketidakpuasan terhadap pembangunan Orde baru dalam bentuk yang lebih modern. Ormap generasi 1970-an dan 1980-an yang oleh Utlin (1995: 102) disebut sebagai ormap generasi lama, dipimpin oleh para aktivis dan intelektual yang semula mendukung Soeharto menggantikan Soekarno menduduki kursi presiden, namun kemudian kecewa terhadap peran Orde

¹⁴ Keberadaan kelompok studi dan ormap yang dibentuk oleh para mahasiswa di suatu perguruan tinggi sudah mulai pada tahun 1982 dan berkembang pada tahun 1990 ketika berbagai Sistem danisasi sejumlah ormap berkembang. Baru dan kecil-kecil itu adalah karena kegiatan kelompok studi maupun ormap dinilai bermanfaat di kalangan kampus, terutama yang bergerak di luar lapangan, sehingga kegiatannya di dalam tidak menyiratkan mahasiswa secara keseluruhan. Jika ingin melaksanakan program yang lebih bernilai seperti harus kembali ke kampus. Setelah lulus banyak yang mengambil alihnya kelompok studi dan ormap kemudian para mahasiswa dengan kegiatan menerbitkan majalah dan koran serta melakukan berbagai diskusi dan seminar. Lihat Dejak Supriyanto, *Perjalanan Para Mahasiswa: Peran Organisasi NKK-NKK*, Jakarta: Pusataka Sinar Harapan, 1998, Hal. 37.

Baru. Kontrol pemerintah yang kuat terhadap partai politik mengakibatkan mereka pengaju tidak memanfaatkan saluran politik melalui partai politik dan memilih menyalurkan keberesannya terhadap Orde Baru dengan mendirikan organisasi non-pemerintah (onop) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).¹⁴

Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu keberadaan onop tidak terpisahkan dari para aktivis sosialistis, karena sebagian besar aktivis onop adalah mantan aktivis sosialistis di kota besar yang mendapat iklim kultur besar terhadap sumber daya.¹⁵ Para aktivis ini awalnya terpenggil

¹⁴ Istilah organisasi non pemerintah (onop) merupakan terjemahan dari NGO (*Non-Government Organization*). Sementara istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mulai digunakan dalam sebuah seminar Onop di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada tahun 1980 atas inisiatif Bina Desa, WALITA dan YTKI. Alasan awalnya istilah LSM adalah untuk membedakan terhadap istilah Onop yang mengadopsi arti "berlawanan dari pemerintah". Lukes Hendaru, salah seorang aktivis yang lebih sering menggunakan istilah LSM, melihat penggunaan istilah onop sebagai terjemahan dari NGO berdasarkan anggapan bahwa menggunakan kata "non", sehingga dalam bahasa Indonesia istilah NGO digantikan dengan LSM. Namun sebagai aktivis NGO melihat ada masalah penggunaan istilah LSM merupakan upaya untuk memisahkan diri dalam berhadapan dengan pemerintah, sehingga bisa bekerjasama secara-luasnya dengan pemerintah. Karena itu istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) banyak muncul baik di kalangan aktivis NGO sendiri, namun ada kerumitannya, kata "swadaya" tidak cocok dengan makna LSM yang keberadaannya sangat tergantung pada bantuan dana dari luar negeri. Oleh karenanya sebagian aktivis menolak penggunaan istilah LSM. George Adijendra misalnya, lebih suka menggunakan istilah onop (Dependensi Non-Pemerintah) sebagai terjemahan dari NGO. Lukes juga ironis M-M. Beliau bahwa penggunaan istilah LSM mencerminkan konsep "kegagalan" negara dan antar-negara masyarakat apa. Sebaliknya istilah onop merupakan wujud modal yang sengaja dipergunakan sebagai upaya dekonstruksi makna hegemonis yang penguasanya sangat kuat. Sebelum berkembang penggunaan istilah LSM, di Uruguay pada tahun 1977 dalam upaya pemertamaan istilah onop yang bergerak di bidang pembangunan pedesaan pernah muncul istilah Lembaga Pembinaan Swadaya Masyarakat (LPSM) atau istilah De Eerlos Maatschappij-Kennedij istilah itu berganti menjadi Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat. LPSM pada awalnya didirikan oleh orang-orang yang relatif lebih maju karena mereka terpenggil untuk memperoleh mereka yang "terbelakang". Sedangkan LSM adalah lembaga yang berasal dari kelompok miskin dan terpinggirkan yang bermaksud membangun diri mereka sendiri. Tujuan utama LPSM adalah membantu kelompok miskin mencapai kemandirian, sedangkan tujuan utama sebuah LSM adalah meraih kemandirian itu sendiri, terutama di bidang ekonomi. LSM memiliki kelompok utama LPSM Namun baik LPSM atau LSM berwujud masyarakat menghadapi berbagai kemungkinan organisasi atau rasional dengan dukungan lembaga kerjasama pembangunan internasional atau lembaga donor (*fundraising agencies*)

¹⁵ Salah satu lembaga donor yang berperan dalam pembentukan onop di Indonesia adalah NORDIC (*Nordische Organisatie voor Democratiese Ontwikkelingsaanpak*). NORDIC adalah lembaga donor pemerintah Kerajaan Belanda yang mengahasilkan diri pada proyek-proyek yang

untuk memperhitungkan lapisan masyarakat bawah yang terpinggirkan oleh pembangunan Orde Baru. Dengan bekerja masuk pembangunan masyarakat mereka dapat menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. Beberapa diantara perintis Ortop di masa Orde Baru ini adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH, 1971) yang didirikan oleh Adnan Kuryan, Niswanto, Yayan Indonesia Sejahtera (YIS, 1974) oleh Lukas Hendrata dan Soediono KH, Rupa Swadaya (1967) oleh Bambang Imanan dan kawan-kawan, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LPPIES, 1971) oleh Noto Arsoyo Mubandito, Ismail Hudaib dan kawan-kawan, Sekretariat Buruh Ortop (1975) oleh Bambang Imanan, Ortop Adhyandru dan kawan-kawan, Lembaga Studi Pembangunan (LSP, 1976) oleh Adi Sasono dan kawan-kawan.¹⁶

Ortop-ortop yang berkembang pada dekade 1970-an dan awal 1980-an mengadopsi wacana demokratisasi sosial yang sangat dipengaruhi oleh ide-ide negara kesejahteraan dan kombinasi kesetaraan sosial dan ekonomi pada Ortop menjadikan negara-negara di Eropa Barat Utara sebagai modelnya. Pengadopsian ide-ide demokratisasi sosial berlangsung melalui interaksi antara aktivis ortop Indonesia dan kaum demokrat sosial di Eropa yang terjalin

¹⁶ Untuk berbanding Kanada, NOVIB mencoba mencari strategi untuk mencapai pemerintahan Indonesia karena keterbatasan jumlah Indonesia pada perjanjian dan ICGL (*International Council on Indonesian*) yang diawasi oleh Belanda. Selain melalui NOVIB hubungan pemerintah Belanda untuk lembaga-lembaga non-pemerintah di Indonesia diarahkan melalui ICGL dan CEBEMO (ICGL) (*International Council on Indonesian Development Program*) yang bermitra dengan Dewan Gereja-Gereja Protestan Belanda merupakan lembaga yang memiliki bantuan untuk proyek-proyek sosial yang diawasi gereja-gereja Protestan di Indonesia. Sedangkan CEBEMO (*International Council on Indonesian by Underdevelopment and Underdevelopment Program*) adalah yang bermitra dengan gereja Katolik Belanda.

¹⁷ Tentang sejarah ortop masa Orde Baru lihat Rumus Setiawan, "Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil" dalam *Perempuan* (No. 7 Tahun XXV Juli 1996).

sejak dekade 1970-an dan meruncing pada dekade 1980-an, terutama melalui jaringan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INFID)

Kebanyakan orang dekade 1970-an dan awal 1980-an bekerja dengan organisasi kerangka *developmentalisme*. Menurut Fakhrieh (2000: 4) tidak satu pun di antara mereka yang benar-benar menolak konsep dasar dan gagasan pembangunan. Pertanyaan meliputi kritik yang mereka ajukan lebih didasarkan kepada implikasi metodologis dan teknis pembangunan Orde Baru. Para aktivis orang pada masa itu mempertanyakan pendekatan dan metode pembangunan, terutama dengan mengkritik pola pendekatan *top-down* yang digunakan oleh pemerintah. Mereka mencoba memperkenalkan metodologi yang lebih baik dalam proyek-proyek pemerintah melalui pendekatan *bottom-up* dan partisipasi. Sebagian besar proyek orang menggunakan teknik dan metode "alternatif" yang berbeda dengan metode dan pendekatan proyek-proyek pembangunan pemerintah, seperti proyek pembangunan industri kecil, proyek pengembangan kerajinan, proyek peningkatan pendapatan, pelayanan kesehatan masyarakat, program keluarga berencana dan pengendalian penduduk, teknologi tepat guna dan proyek pembangunan pedesaan lainnya. Proyek-proyek itu dijalankan dengan menggunakan metodologi alternatif sebagai ganti pendekatan *top-down* dalam pembangunan yang dipraktikkan oleh pemerintah, namun tidak memperhatikan aspek struktural dan ketahanan sistemik dan masalah yang sedang diupayakan pemecahannya. Posisi ini menurut Lihou (1995: 10) merupakan

bentuk modernitas atas kekecewaan terhadap Orde Baru, sehingga pemerintah melihat keberadaan omong tidak membahayakan eksistensi rezim.

Sikap moderat omong generasi lama terwujud dari kebijakan yang dilakukan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3S). Lembaga ini menerbitkan buku-buku dan jurnal tentang permasalahan-permasalahan ekonomi, politik, sosial dan budaya Indonesia. LP3S juga melakukan proyek-proyek pembangunan dalam masyarakat kota dan desa, terutama di lingkungan pesantren.

Sebagian besar omong moderat di Indonesia menjadi anggota *INTEL* (*Inter-NASA Conference on Global Interests*) yang dibentuk pada tahun 1985 dan kemudian pada tahun 1988 berubah nama menjadi *International NGA Forum on Indonesia*. Pada tahun 1995 INTEL kembali berganti nama menjadi *INPII* (*International NGA Forum on Indonesian Development*) seiring dengan berubahnya *Intel* (*Inter-Government Group on Indonesia*) (*INGI*) berperan melalui negara-negara donor pemberian bantuan pembangunan Indonesia yang tergabung dalam *INGI* (sejak tahun 1992 berganti *INGI-Coordination Group on Indonesia*) agar mereka mendesak pemerintah Indonesia untuk memperhatikan dampak ekonomi dan sosial dari proyek-proyek pembangunan yang dijalankan pemerintah serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Lilim, 1999: 106).

Sikap yang lebih keras terhadap Orde Baru dianjurkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga yang didirikan di Jakarta pada tahun 1971 ini mengadopsi konsep "bantuan hukum secara struktural" dalam pengujian

bantuan bekuam yang dilakukau LBH diarahkaku pada upaya-upaya untuk menghapuskaku ketidakadilan sosial, ekonomi dan politik. LBH bukan berjujau untuk memberikaku pembelaan di pengadilan, namun untuk memajukan pertuiau domestik dan internasional pada pelanggaran HAM di Indonesia dan memobilisasi dukungau dalam memodifikasi reformasi hukum yang diskriminatif terhadap kaum lemah. Beberapa kasus yang pernah diangkat oleh LBH adalah pengguguran massal keluarga di Jakarta Selatan karena tanah mereka akau digunakaku sebagai lahan pembangunan Taman Mini, pembelaan terhadap demonstrasi periswaku Malari, kasus penahanan aktivis mahasiswa pada tahun 1979 dan kasus Tanjung Priok (Utami, 1995: 103).

Di tengah melemahnya perekonomian Indonesia pada pertengahan dekade 1980-an karena penurunan harga minyak dunia, posisi omop dalam bertuadap-bertuadap dengan pemerintah Indonesia mejadi mejuat bukan kemampuaan omop dalam memobilisasi sumber dana asing. Bank Dunia dan negara-negara Barat mulai merangkul organisasi masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan pemerintah yang beraka dana. Dalam kerangka bantuan dana dari luar negeri omop-omop di Indonesia memuikaku peran penting dalam membantu merecakaku program pembangunan, mengidentifikasi dan memobilisasi kelompok-kelompok masyarakat, serta mejadi lembaga perantara pembawa bantuan dana dari lembaga-lembaga internasional kepada masyarakat. Pengaruh internasional (a) melunahkan kontrol pemerintah terhadap omop (Eldridge, 1989: 38)

B.3. Reaksi Aktivistis Perempuan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal Bab III ini Revolusi Hijau yang diterapkan sejak tahun 1970-an telah menggeser peran perempuan di bidang pertanian untuk digantikan oleh wanita dan laki-laki. Hal itu mendorong petani perempuan mencari pekerjaan lain seperti pembantu rumah tangga, pekerja seks, buruh pabrik atau berjualan kecil-kecilan kepada penduduknya lokal pendidikan yang mereka miliki

Fenomena feminisasi pertanian¹⁷ tersebut mendorong para aktivis perempuan mendirikan organisasi perempuan untuk memperjuangkan kepentingan perempuan kelas bawah. Mereka menggunakan pendekatan *Women in Development* (WID) untuk membantu kaum perempuan melalui Pendekatan WID juga diadopsi oleh rezim Orde Baru pada tahun 1980-an, tidak lama setelah Deklarasi "Decade untuk Perempuan" tahun 1976-1985 dicetuskan oleh PBB. Pengadopsian pendekatan WID oleh organisasi-organisasi perempuan tidak terlepas dari upaya lembaga donor dalam mendekati pemerintah Indonesia dan group-group developmentalis agar mengadopsi pendekatan WID. Dokumen itu mendorong kalangan group developmentalis dan organisasi-organisasi perempuan¹⁸ melakukan program-program untuk membuka akses yang lebih besar bagi perempuan dalam pembangunan. Mereka memperjuangkan kepentingan gender perempuan desa

¹⁷ Fenomena feminisasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan terjadinya perubahan struktur kelas perempuan

¹⁸ Yana Mochtar menggunakan istilah organisasi wanita untuk menyebut organisasi-organisasi perempuan yang terpengaruh oleh pendekatan WID, sementara istilah organisasi perempuan ia gunakan untuk menyebut organisasi-organisasi perempuan yang menggunakan pendekatan GAD yang muncul sejak dekade 1970-an

dan perempuan miskin melalui proyek-proyek *income-generating* dengan mengembangkan kapasitas ekonomi mereka melalui pendidikan dan latihan (Mulyati, 2000: 11).

Sebagai organisasi perempuan, terutama kelompok perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan orang-orang non-perempuan memaruh keprihatinan yang besar pada nasib buruh perempuan yang bekerja pada industri-industri manufaktur berorientasi ekspor (Liblin, 1995: 121). Kelompok perempuan ini menjadi bagian dari kelahiran gerakan buruh karena mereka aktif memperjuangkan isu-isu buruh, salah satu diantaranya adalah melakukan pengorganisasian buruh. Mereka mengalokasikan waktu hidup dan tinggal bersama para buruh perempuan untuk memahami kondisi kehidupan dan eksploitasi yang dialami buruh perempuan di pabrik. Namun mereka menggunakan pendekatan yang berbeda dalam memperjuangkan kepentingan buruh perempuan. Sebagian kelompok perempuan melakukan strategi memberikan layanan kesehatan bagi buruh perempuan agar mereka mempunyai penghasilan tambahan dan memiliki bekal keterampilan acendaianya untuk bisa bekerja di pabrik. Kelompok yang lain berupaya memundikan buruh perempuan dengan melakukan penyadaran politik bagi buruh untuk memfasilitasi berdirinya organisasi buruh independen.

C. Kelahiran Yasanti

Fenomena ketidakadilan terhadap perempuan yang terjadi di level global dan nasional memulhami sekelompok mahasiswa di Yogyakarta.

memadatkan organisasi perempuan untuk membeta kebutuhan perempuan. Realita keterpurukan perempuan meggagah kesadaran mereka untuk membuat kaum perempuan miskin. Berbekal semangat untuk memberdayakan perempuan mereka akhirnya mendirikan Yasanti pada tahun 1982. Kelahiran Yasanti tidak lepas dari peran para aktivis ormap yang telah menabuhkan wacana pembangunan masyarakat, termasuk wacana global tentang perempuan dan teredimnya peluang bagi pertumbuhan ormap sehingga mendorong kelahiran Yasanti sebagai organisasi perempuan yang diperjuangkan kepentingan perempuan kelas bawah.

C.1 Peluang Pertumbuhan Ormap

Kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) yang diterapkan oleh rezim Orde Baru pada tahun 1978 menyebabkan pembatasan aktivitas mahasiswa pada kegiatan-kegiatan non-politik. Kondisi ini mendorong sebagian aktivis mahasiswa mencari alternatif kegiatan lain untuk menggantikan aksi-aksi demonstrasi mahasiswa yang sebelumnya sering mereka lakukan sebelum penerapan NKK. Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, ketika aksi demonstrasi mahasiswa dilarang sebagian aktivis mahasiswa kemudian mencoba mengalihkan perhatian mereka kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin melalui wadah organisasi non-pemerintah (ornop). Mereka beramai-ramai membentuk ormap atau bergabung dengan ormap yang sudah ada.¹⁴

¹⁴ Ada dua alasan yang mendorong pilihan aktivis mahasiswa untuk bergabung atau mendirikan ormap. Pertama adalah upaya melawan arus penguasaan strategi atau model pembangunan alternatif

Namun demikian pengalihan aktivitas mahasiswa pada kegiatan non politik tidak begitu saja melenyapkan kesadaran sosial mahasiswa. Mereka melaksanakannya diskusi-diskusi kritis melalui kajian-kajian sosial di mushola, masjid atau pusat-pusat studi malam. Langkah ini merupakan upaya kumulatif untuk menuntun aktivitas kritis mereka di tengah-tengah pembatasan ruang gerak mahasiswa akibat penerapan kebijakan NKK, sekaligus menjadi pilihan kegiatan yang aman dilakukan setelah aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dilarang (Schauz, 1994: 237).

Komunitas dan kawan-kawannya yang bergabung dalam HMI pun mengisi kegiatan di masa NKK dengan berkumpul dan berdiskusi dengan para aktivis orop. Diskusi berlangsung secara intensif karena sebagian besar aktivis orop, antara lain Adi Sasoro adalah mantan aktivis HMI. Sebagai sesama umat Islam dalam diskusi-diskusi dengan para aktivis HMI, Adi Sasoro banyak menyangkut teologi keislaman untuk mendorong para mahasiswa aktivis HMI melakukan sesuatu guna membantu masyarakat miskin.

Walaupun ada falsaf-falsaf HMI, PMKRI, GHI,NI Nah, yang dibawa oleh Adi adalah anak-anak HMI, sehingga teologi keislaman masuk ke situ. Jadi teologi-teologi keislaman mendekati keferafan bahwa keadilan itu mendekati keadilan menjadi bahan diskusi di situ. Kemudian Islam itu nur bagi umat. Tetapi bagi orang miskin bagaimana mereka bisa percaya itu. Bagaimana Allah adalah nur kalau kita tidak menerjemahkan itu pada masyarakat. Kemudian Islam adalah rukun-rukn di 'alqam. Orang yang miskin bagaimana bisa merukmati dunia kalau kita tidak membantu menerjemahkan itu. Sehingga tugas kita adalah

yang lebih bertanggung pada aspek pemerintahan, paripada masyarakat dan pemenuhan kebutuhan pokok. Ketika waktu menunjukkan kritik yang mengatakan bahwa gerakan mahasiswa bersisi elita, jauh dari perhatian nyata masyarakat dan lebih berorientasi pada urusan besar dan abstrak, seperti keadilan, demokrasi, korupsi dan sebagainya. Faktor kedua ini berkembang setelah beberapa elemen mahasiswa melakukan penyelidikan terhadap apa peranan dan kedudukan mahasiswa serta mengidentifikasi kelompok gerakan mahasiswa 1974 yang sudah mendapatkan dukungan yang nyata dan cukup banyak. Lihat lebih lanjut Bomas Tigor Napospos, "Mahasiswa Indonesia dalam Pasang-pukul" dalam *Prisma*, (Nomor 7 Tahun XXXI Juli 1996), Hal 79.

untuk mengerjakan tugas Allah kepada masyarakat. Nah, itu menjadi bahan diskusi (Kusyuniati, Wawancara tanggal 23 Januari 2003).

Ketika Dwarawati Social Institute,²⁰ sebuah orop di Yogyakarta yang didirikan oleh para mantan aktivis PUI (Pelajar Islam Indonesia) mengadakan pelatihan Usaha Bersama (UB) Kusyuniati dan kawan-kawannya pun tertarik untuk mengikutinya.²¹ Noordjannah menuturkan:

Kita memang anak-anak yang kalo kumpul ada sesuatu yang bisa dikerjakan. Nah waktu itu kita sering berkumpul berdiskusi, salah satunya dengan mas Habib Chirzin, ikut aktivitas. Termasuk ketika ada kegiatan Dwarawati kita kemudian baru sebentar mendirikan Yasawi itu (Wawancara, 21 Maret 2003).

Keterlibatan Kusyuniati dan kawan-kawannya di Dwarawati membuka jalan untuk memabkani kegiatan pembangunan masyarakat (*community development*), terutama masyarakat miskin. Mereka terlibat dalam diskusi-

²⁰ Dwarawati Social Institute merupakan salah satu LSM Pusat Peran Serta Masyarakat. Organisasi ini mengorganisir kegiatan dengan dilakukannya berbagai tatap dan berdiskusi berkembang menjadi diskusi-diskusi masalah pembangunan.

²¹ Di tengah-tengah perkembangan kegiatan kampus berkembang mahasiswa yang lebih berminat mendirikan Yasawi sebagai organisasi kegiatan Rukun Mahasiswa (Mikro) di kampus masing-masing. Kampus yang sebelum kegiatan NKK dilakukan sering terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi mahasiswa sebagai anggota bilangan di IKIP Yogyakarta seperti itu berkecambah. Termasuk Kusyuniati, yaitu Bush Waluya. Saat Mahasiswa dan Kampus Dera! mendapat perhatian di perguruan tinggi yang berbeda juga menjadi anggota Rukun Mahasiswa (Mikro) di kampus masing-masing. Dalam kegiatan kampus mereka tetap aktif dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan karena tugas Kusyuniati dan kawan-kawan berorganisasi melibatkan pengabdian baru. Sejak SHIP Kusyuniati dan kawan-kawan telah aktif dalam kegiatan keorganisasian. Organisasi sosial yang mempereratkan mereka menjadi teman akrab, meliputi berbagai sekolah, karena mereka sering bertemu dalam kegiatan jumatoh mereka setelah shalat-masjid. Sebagian di antara mereka, yaitu Noordjannah dan Kusyuniati juga sama-sama aktif dalam organisasi Mahasiswa Ayyubiah (MA) Organisasi-organisasi untuk pelajar Islam baru menjadi wadah bagi keaktifan mereka, yaitu Kusyuniati sebagai anggota Pelajar Islam Indonesia (PII), sementara Noordjannah dan Siti Alhamdulillah aktif dalam organisasi Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Oleh karena itu, meskipun berkecambah di perguruan tinggi yang berbeda Kusyuniati dan kawan-kawan saling mengenal sejak SHIP. Setelah terlibat perlawanan sebagai anggota alim-kawan mereka kembali diperkenalkan dalam kegiatan Mikro. Kusyuniati menyatakan bahwa di Dwarawati mereka secara luas belajar mengahmpun pedagang laki-laki yang berminat

belanja bersama masyarakat (*community development*) yang ia anggap lebih bermakna daripada melakukan aksi demonstrasi:

Saya sering mengorganik demonstrasi sih mudah, sedikit keberanian dengan spidol, selembur kertas plus bisa demonstrasi Tapi untuk belanja bersama masyarakat saya setiap waktu itu perlu 3 hal: (1) *documentation* atau melakukan riset pemukiman atau riset yang berorientasi pada transformasi dengan jalan mendokumentasikan masalah sekaligus berbicara dengan masyarakat, (2) *articulation* atau mengajak masyarakat untuk mengartikulasikan kepentingannya, apa masalahnya, kemampuannya, harapan-harapannya, apa yang bisa dilakukan, (3) *organizing*, karena untuk memperbaiki diri dan berubah nasib atau untuk memperjuangkan kepentingan mereka harus *well-organized*, tidak bisa sendiri-sendiri (Habib Chirizah, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Intensitas dialog dengan para aktivis ormap melahirkan semangat Kuryonisti dan kawan-kawannya untuk ikut melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mendirikan sebuah ormap²⁴ Kuryonisti memaparkan bagaimana ia dulu tertarik untuk mendirikan ormap

Dialog-dialogi itu (dengan para aktivis ormap sesama aktivis HMI) akhirnya lebih mengentalkan tali semangat kebersamaan dan semangat teologi saya untuk mendirikan Yustisi (Kuryonisti, Wawancara tanggal 23 Januari 2003)

Kecondongan menambahkan bahwa meskipun pada waktu itu sudah banyak ormap didirikan, namun ormap-ormap tersebut didominasi oleh kaum laki-laki, sehingga ia dan kawan-kawannya berkeinginan membentuk sendiri sebuah ormap yang khusus membela kepentingan perempuan.

waktu itu memang sudah ada LSM-LSM, tetapi LSM-nya kebanyakan formasi laki-laki, seperti Dworowati itu juga laki-laki.... Nah kenapa nggak mendirikan sebuah lembaga yang di situ bisa

²⁴ Pada kesempatan yang sama wawancara dengan Adi Setono kemudian mendefinisikan ormap di berbagai kota Aktive HMI di Solo mendirikan LPTP, HMI Yogyakarta mendirikan Dian Dasa, dan HMI Bandung mendirikan Yayasan Mandiri

harung-borong, punya aktivitas, cita-cita harung Meski waktu itu kami memang-muang sudah punya kesibukan dalam organisasi lain namun kami menginginkan sesuatu yang baru dengan mendirikan organisasi yang arahnya disepakati secara bersama-sama untuk membantu sesama perempuan (Nurdjanah, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

Keterlibatan Kusyanini dan kawan-kawannya di Dworowati memberi kesempatan yang berharga dalam memperjuangkan pembentukan konsep. Mereka banyak menggalang pengalaman dari para aktivis Dworowati tentang tata cara mendirikan konsep

Kita tanya gimana sih dulu mendirikannya? Oh, ternyata ada Anggaran Dasarnya. Ketika satu per satu peserta di Dworowati pada nonton, saya lama-lama juga ikut keluar. Tapi akses di Dworowati ini kan banyak. Itu saya pakai untuk mendirikan Yasani (Kusyanini, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Keberadaan organisasi perempuan sebenarnya bukanlah fenomena baru pada masa ini. Kusyanini, Nurdjanah dan Kumala Dewi telah lama aktif dalam organisasi perempuan Islam, terutama Nasyiyatul Aisyiyah (NIA). Sementara itu Budi Wahyuni dan Siti Muslimah bukan aktivis NIA, namun aktif dalam berbagai organisasi sosial kemasyarakatan. Meskipun demikian, mereka masih memiliki ideologis untuk mendirikan sebuah organisasi perempuan karena menginginkan sesuatu yang berbeda dari kegiatan yang telah mereka ikuti

Kita ingin sesuatu yang berbeda. Kegiatan-kegiatan organisasi sudah kita punya, seperti saya di IPM, di Menwa Kus itu di NA. Tapi dengan mendirikan organisasi sendiri yang khusus membela kepentingan perempuan keberpihakan kita lebih jelas, karena kita juga perempuan (Siti Muslimah, Wawancara tanggal 19 Maret 2003)

C.2. Peluang Global: Perhatian Dunia pada Isu Marginalisasi Perempuan

Sebagaimana telah disinggung pada bagian terdahulu, pembangunan di negara-negara berkembang ternyata diikuti oleh peminggiran penuh perempuan. Realita tersebut melahirkan pemikiran untuk memajukan kaum perempuan yang terwujud dalam penyelenggaraan Konferensi Perempuan Sedunia di Meksiko tahun 1975. Konferensi ini memberikan sumbangas penting dalam mengubah pandangan tentang peran perempuan dalam pembangunan, yaitu dari pandangan bahwa perempuan adalah pemirsa bantuan pembangunan yang pasif ke pandangan bahwa perempuan adalah mitra sejajar laki-laki yang memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Transformasi serupa terjadi dalam pendekatan pembangunan, yaitu munculnya pergeseran dari pandangan bahwa pembangunan dilakukan untuk memajukan perempuan beralih pada pandangan bahwa pembangunan tidak mungkin dilakukan tanpa partisipasi penuh perempuan di dalamnya.

Permasalahan marginalisasi perempuan dalam pembangunan yang sedang terjadi itu global saat itu menjadi bahan pertukaran kaum feminis. Sariswati Sunandyo, seorang feminis di Jakarta bersama-sama teman-temannya sering mengadakan diskusi informal membahas persoalan-persoalan perempuan. Karyumuri menceritakan pengalamannya ketika diajak bergabung dengan kelompok diskusi Sariswati

Kami mendiskusikan bagaimana dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh 80% perempuan ternyata perempuan hanya memperoleh 20% keuntungan. dalam diskusi kami juga membahas buku-buku tentang perempuan sebagai korban pembangunan, termasuk karya Ester Boserup yang sangat populer pada waktu itu. (Karyumuri. Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Pada suatu kesempatan diskusi di Dharmawandi, fenomena global tentang pemberdayaan peran perempuan dalam pembangunan diangkat sebagai topik diskusi oleh Ann Susono, seorang antropolog feminis dari Amerika yang menikah dengan orang Indonesia dan menjadi koordinator *Forum Perempuan Kusyuniati* menuturakan

Dia (Ann) membicarakan apa yang dialami oleh perempuan sehari-hari, terutama marginalisasi perempuan di Indonesia. Dia menceritakan bagaimana dari anti-nya menjadi sukses terutama banyak perempuan dirugikan. Kemudian bagaimana modernisasi batik merugikan pengrajin-pengrajin batik tradisional. Demikian juga ketika bahan kain diganti dengan plastik, bukan dengan mengolah lagi. Ternyata dalam usaha *craft* maupun pertanian banyak perempuan tergiliran akibat modernisasi teknologi. Dia menggugah kesadaran para peserta pelatihan bahwa kaum perempuan merupakan korban pembangunan. (Wawancara, 12 Juni 2003)

Perspektif marginalisasi perempuan dalam pembangunan juga banyak diangkat sebagai kajian dalam berbagai literatur. Realita penertutupan peran perempuan sebagai aspek utama dalam studi-studi perempuan pada dekade 1970-an dan 1980-an Kusyuniati kembali menuturakan

Sejak itu buku-buku tentang perempuan dan pembangunan sangat mendominasi. Tahun-tahun itu WID yang dibicarakan, misalnya kapitalisasi perempuan dalam rumah tangga. Kalau di tingkat Asia saya baca tulisannya Nolan Hester tentang buruh perempuan di Asia yang dipojokkan dalam industri hilir itu yang berkembang saat itu bersifat *development studies*. Akhir 70-an dan awal 80-an belum bicara pada *women equity* baru akhir 80-an. Waktu itu feminisme masih yang soft. Belum begitu banyak bicara mengenai hak, pendekatannya masih ekonomi. Waktu itu belum ada buku-buku feminisme yang menggugat hak. Itu kan baru ada tahun 90-an. (Kusyuniati, 23 Januari 2005)

Literatur tentang perempuan dan pembangunan yang sering diujuk sebagai bahan diskusi oleh kaum feminis adalah karya Ester Boserup *Woman's Role in Economic Development* (1970) yang berisi pemikiran tentang perlunya kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Boserup mengemukakan gagasan penghapusan ketidakadilan (regulasi) dalam pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan dengan cara melibatkan perempuan sebagai partisipan aktif dalam proses pembangunan baik dalam peran produktif dan reproduktif. Langkah itu, menurut Boserup dapat dilakukan dengan cara mengakui nilai-nilai ekonomi dalam setiap pekerjaan perempuan baik yang bergaji maupun tidak dan menjabarkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga dan di tempat kerja.²⁴

Kurangnya pengakuan bahwa diskusi-diskusi tentang marginalisasi perempuan dan maraknya buku-buku yang membahas tentang isu-isu perempuan mendorong semangatnya untuk mendirikan Yummi

Ini-isu itu (marginalisasi perempuan) menggugah kesadaran saya dan mendorong semangat saya untuk melibatkan sesuatu bagi perempuan (Kurniyanti, Wawancara tanggal 23 Januari 2005)

Meskipun waktu kesetaraan gender belum dikenal luas pada waktu itu Nordiyanti mengemukakan bahwa semangat untuk memandirikan perempuan

²⁴ Gagasan Boserup dalam bukunya oleh wadanya dalam masyarakat Afrika Sub Sahara. Perempuan Afrika Sub Sahara dengan menggunakan teknologi tradisional membangun peran penting dalam produksi pertanian. Peran perempuan dalam proses pertanian mengabdikan ketika kebanyakan pertanian pada ketanul diorganisasikan. Kebijakan tersebut menaruh Boserup mengemukakan dukungan di wilayah Afrika Sub Sahara bahwa laki-laki dikendalikan dengan aktor-aktor seperti memelihara perempuan untuk dengan pertanian tradisional, sehingga mengabdikan perempuan ketahanan produksi, rumah dan kesehatan dibantu dengan laki-laki.

melalui pengorganisasian semakin memampukan nial mereka untuk mendirikan Yasanti

Tahun 80-an itu gender belum menjadi isu, gender itu kan baru tahun 90-an, tapi justru yang kita inginkan itu bagaimana kita bisa membantu memampukan perempuan melalui pengorganisasian. (Nurdiana, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

Melalui pengakuan Kusyuniati dan kawan-kawannya meskipun semangat feminis melandasi keinginan mereka untuk mendirikan Yasanti kelahiran Yasanti tidak dipengaruhi oleh ideologi feminisme yang berkembang di negara-negara Barat karena literatur-literatur feminisme karya penulis Barat belum mereka kenal saat itu.²⁴ Pernyataan tersebut mengindikasikan asal ideologi feminis yang mengilhami dan memberi semangat bagi Kusyuniati dan kawan-kawannya mendirikan organisasi perempuan. Dalam sejarah feminisme Barat, literatur-literatur tentang penggunakan hak perempuan telah ditulis jauh sebelum dekade 1980-an, sehingga pernyataan Kusyuniati bahwa saat itu buku-buku tentang feminisme yang mengagukan hak belum ada perlu dipertanyakan kebenarannya. Kemungkinan yang terjadi adalah literatur feminisme Barat belum dikenal luas di Indonesia pada waktu itu. Kalau pun Kusyuniati telah membaca pada pembacaan atas karya-karya marginalisasi perempuan di negara berkembang, hal tersebut mengindikasikan bahwa

²⁴ Sesuai dengan Budi Wahyuni (2000) lebih tepatnya oleh kekaguman pada tokoh Kartini dan karanya "Maha Cendek Terbitlah Terangi". Semangat Budi Wahyuni dalam menulis tentang perempuan dan memunculkan gerakan Kusyuniati untuk bisa bergabung mendirikan Yasanti lebih didasarkan oleh pengalaman hidup melihat ibundanya sebagai aktivis Pergerakan umum di tanah selat pada saat yang menjabdi pada saat itu. Pergerakan itu oleh Budi Wahyuni dianggap sebagai awal yang membetulkan "Misyaruf perempuan Aceh seperti itu." (Budi Wahyuni, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

belakangan Yasanti lebih diilhami oleh pemikiran feminisme yang diadopsi dari pengalaman perempuan di negara-negara berkembang yang terpinggirkan dalam proses pembangunan (yang oleh Kusyuniari disebut dengan istilah feminisme yang *soft*) dibandingkan feminisme yang berkembang di negara-negara Barat.

Istilah feminisme yang *soft* seperti yang dikemukakan Kusyuniari tidak dikenal dalam literatur sosiologi. Sebagaimana lazim dikenal, feminisme dapat dibedakan menjadi paling tidak lima tipologi (Ritzer, 1988: 296-331). Pertama adalah feminisme liberal, yaitu feminisme yang menuntut persamaan hak bagi perempuan di bidang hukum, politik, ekonomi dan pendidikan. Kedua adalah feminisme Marxis yang melihat bahwa penindasan kelas merupakan penyebab ketidaksetaraan hak antara perempuan dan laki-laki. Ketidakadilan gender akan berakhir ketika kelas pekerja telah berhasil menuntaskan penindasan kelas melalui perjuangan revolusioner. Ketiga adalah feminisme psikoanalitik yang mengemukakan bahwa penindasan terhadap perempuan terjadi karena ada kebutuhan emosional laki-laki untuk mengontrol perempuan. Keempat, feminisme radikal yang melihat bahwa penindasan gender merupakan penindasan paling mendasar karena menciptakan repressi, sadisme dan masochisme, manipulasi dan deesepi. Namun radikal menyerasikan bahwa upaya untuk mengalahkannya harus dimulai dari kesadaran terhadap perempuan, sehingga perempuan menyadari kekuatannya sendiri, menolak tekana-tekana patriarkal yang memandang perempuan lemah, terpinggirkan dan kelas dua. Kelima adalah feminisme sosialis yang merupakan penggabungan

dari pemikiran feminisme Marxis dan radikal. Menurut feminis sosialis, ketertarikan sosial yang eksploitatif memperagakan kondisi kehidupan manusia yang lebih luas, tubuh manusia, seksualitas dan keterlibatan dalam penelenggaraan anak dan tugas-tugas domestik yang tidak dihayat. Strategi yang mereka tawarkan adalah melihankan kelompok-kelompok yang tertindas itu dalam proses peradaban sehingga mereka dapat melaksanakan upaya-upaya emansipasi (Ritzer, 1988: 311).

Dengan demikian keinginan Kusyuniati dan kawan-kawannya untuk mendirikan Yayasan bukan didukung oleh hasil pembacaan literatur-literatur feminisme Barat, namun lebih dipengaruhi oleh penyebutan isu gender dan nasional tentang marginalisasi perempuan dalam pembangunan. Sebagaimana akan dianalisis lebih mendalam pada Bab VI pengalaman Kusyuniati berpacu dengan sesama aktivis perempuan yang kemudian mengasah kepeduliannya pada penderitaan perempuan kelas bawah, menunjukkan bahwa pemahaman cesung kesadukaditan terhadap perempuan yang berkembang di konteks global dan nasional menjadi bingkai yang melahirkan kesadaran bahwa kehidupan sosial telah menempatkan kaum perempuan dalam posisi marginal. Perhatian dunia pada isu perempuan dalam pembangunan, sebagaimana tercermin dari berlangsungnya konferensi perempuan sedunia yang membahas isu tersebut di diskusi-diskusi kaum feminis dan munculnya studi-studi tentang marginalisasi perempuan dalam pembangunan menjadi kesempatan politik untuk melahirkan omong perempuan yang membela kepentingan perempuan kelas bawah.

C.3. Dorongan Aktivis Ormap

Sesungguhnya Kusyuniati dan kawan-kawannya untuk mendirikan sebuah organisasi perempuan pembela perempuan kelas bawah semakin terpacu berkat dorongan dari para aktivis ormap. Dukungan semangat itu antara lain datang dari Habib Chirzin sebagaimana dituturkan oleh Siti Mustimah

Kami (para pendiri Yustitia) sering berkumpul, berdiskusi dan mendapatkan masukan rohani di rumah mas Habib Chirzin (di daerah Plengkung Wijilan, sebelah timur kraton Yogyakarta). Secara kebetulan kami juga anak-anak muda Muhammadiyah, jadi mas Habib tidak lain adalah senior kami. Mas Habib selalu mendorong kami berbuat sesuatu untuk masyarakat (Wawancara tanggal 19 Maret 2003)

Habib Chirzin tidak saja memberikan arahan rohani pada Kusyuniati dan kawan-kawannya. Melalui diskusi Habib Chirzin juga mendorong mereka untuk mendirikan sebuah lembaga sendiri sebagai pengikat cita-cita mereka bersama. Noordjanah menuturkan

Kita sering diajak diskusi, salah satunya dengan mas Habib Chirzin. Nah ketemu ketemu *mas* kita *ngumpul*, banyak *Acara* utama lain mas Habib itu mas Habib bilang kenapa kita tidak mendirikan sebuah lembaga yang di situ kita bisa *berang-berang*, punya aktivitas dan cita-cita *berang*. Kemudian kita mulai berpikir memangnya kita itu ada institusi yang mengikat (Noordjanah, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

Habib Chirzin selalu menekankan pentingnya pemukiman kepada perempuan. Meskipun ia tahu bahwa Kusyuniati dan kawan-kawannya aktif di Dworowati, ia justru mendukung keinginan Kusyuniati dan kawan-kawannya untuk keluar dari Dworowati dan membentuk organisasi sendiri yang khusus membela kepentingan perempuan. Habib Chirzin mengemukakan

Saya selalu menekankan pentingnya perempuan. Perempuan harus dieksplisitkan, sebab jika tidak perempuan akan selalu diabaikan, diwakili dan diabdikan sudah termasuk di dalam apa yang disebut manusia, padahal mereka diabaikan dan dilupakan. Saya melakukan pembelaan dan mendukung mbak Kuti dan teman-temannya keluar dari Dworowati untuk mendirikan lembaga sendiri yang khusus membahas kepentingan perempuan. (Habib Chozin, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Dorongan bagi Kusyuniati dan kawan-kawannya untuk mendirikan Yasanti juga datang dari Saraswati Sunindyo. Dalam berbagai diskusi Saraswati secara biasa membujuk Kusyuniati dan kawan-kawannya untuk membuat sendiri organisasi perempuan, sebab jika tidak demikian perempuan tidak akan pernah diperhitungkan. Kusyuniati mengemukakan

Saras selalu mendorong saya. Dia bilang, "Sudalah, kamu kalau enggak mandiri sendiri yang eksklusif perempuan enggak bakal diperhitungkan." Dorongan itu semakin mendorong saya untuk mendirikan Yasanti. (Wawancara, 12 Juni 2003)

Gagasan untuk mendirikan Yasanti pada saat keberadaan orop perempuan berperspektif feminis belum menjadi fenomena yang lazim ditemukan di masyarakat membuat Yasanti menjadi kritik dari orang-orang yang tidak memahami Kusyuniati mengumumkan bahwa langkahnya bersama-sama kawan-kawannya untuk mendirikan Yasanti ketika itu disikapi secara sinis oleh sebagian orang.

Dulu ketika kami mendirikan Yasanti orang-orang sinis. Kalau yang laki-laki mengabdikan ah paling-paling nanti kalau kamu sudah kawin bukar. Yang perempuan mengatakan mengapa mesti perempuan sendiri, kenapa enggak jadi satu. Poloknya sinismenya banyak. Yang terakhir di Dworowati itu kan saya, sehingga yang paling dibenci oleh Dworowati itu saya. Kok enggak membuat departemen wanita di situ. Kok malah keluar. Dibenci sampai sekarang mungkin. Adi pernah juga marah ke

saya, tapi saya coba yang lain, ini mau mandiri (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Kalangan omop menilai langkah Kusyuniati dan kawan-kawannya mendirikan Yasanti merupakan bentuk segregasi seksual karena isu feminisme belum berkembang di Indonesia pada waktu itu. Habib Charizis menulis:

Pada waktu itu hanya kalangan omop dan perguruan tinggi menilai Kusyuniati dan kawan-kawannya telah melakukan segregasi sosial secara seksual. Isu feminisme belum berkembang di Indonesia waktu itu dan feminisme dilihat dari kerangka feminisme Eropa pada tahun 1950-an, padahal feminisme di Indonesia adalah dalam kerangka patriarki, persamaan dalam kerangka pemerintahan, dalam kerangka hak dan kewajiban, peran-peran sosial, peran-peran politik dan sebagainya, bukan kultural. Di Indonesia secara politik dan ekonomi perempuan adalah sektor yang paling berindus (Habib Charizis, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Meskipun gagasan untuk mendirikan Yasanti menuai kritik dan sebagian aktivis omop, namun dukungan dan dorongan dari para aktivis feminis, terutama Sutarwati dan Habib Charizis membuat Kusyuniati dan kawan-kawannya tidak surut semangat mendirikan omop perempuan yang dapat memperjuangkan kepentingan perempuan kelas bawah sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam pembangunan Orde Baru. Mereka pun akhirnya mendirikan Yasanti pada tahun 1982.

Kelahiran Yasanti yang dilatari dari fenomena marginalisasi perempuan dalam pembangunan tersebut mengindikasikan terjadinya proses penobngkahan kesempatan global dan nasional sebagai pendorong kelahiran gerakan Hal itu ditunjukkan oleh besarnya pemikiran Kusyuniati untuk

mengajak lawan-lawannya mendirikan ormas perobela kepentingan perempuan setelah pembuktian isu global menyadarikannya bahwa kaum perempuan mengalami keterpurukan akibat proses pembauran. Keterbatasan politik yang membuka peluang kelahiran Yasanti di sini bermakna luas, bukan sekedar politik yang berhubungan dengan lembaga-lembaga politik, elit politik atau negara, namun mencakup isu-isu non politik dan keberadaan aktor-aktor di masyarakat yang membuka kesempatan bagi kelahiran sebuah gerakan.

Meskipun demikian, konteks politik nasional ikut memberi andil bagi kelahiran Yasanti. Ketika kesadahan akan keterpurukan kondisi perempuan tumbuh, konteks politik nasional turut memberi peluang bagi pertumbuhan organisasi-organisasi non-pemerintah Yasanti memetik keuntungan dari kondisi politik nasional yang memangkiskan pertumbuhan ormas, terutama karena ketiadaan repressi rezim atau pembungkaman dan keberadaan ormas. Kondisi semacam itu menjadi kesempatan politik yang membuka peluang bagi kelahiran Yasanti.

BAB IV

DINAMIKA GERAKAN: DARI PENDEKATAN *WOMEN IN DEVELOPMENT* KE ISU KESEHATAN REPRODUKSI

Perhatian dunia pada persoalan perempuan telah dibuktikan oleh PBB sejak penyelenggaraan Konferensi Perempuan Sedunia tahun 1975 di Mexico City Meksiko, 1980 di Kopenhagen Belanda, 1985 di Nairobi Kenya dan 1995 di Beijing Cina. Bersamaan waktu dengan meningkatnya perhatian dunia pada persoalan perempuan wacana keperempuanan mulai mengkalami perubahan dari pendekatan *Women in Development* (WID) yang berkembang sejak dekade 1970-an ke pendekatan *Gender and Development* (GAD) pada dekade 1990-an. Bab IV berikut ini akan mendeskripsikan bagaimana Yasnici membingkai ragam wacana keperempuanan yang berkembang di tingkat global sebagai kesempatan politik untuk meneneukan agenda gerakan.

A. Wacana Keperempuanan Global

A.1. Penyebaran Pendekatan *Women in Development* (WID)

Sejarah penyebaran pendekatan WID bermula ketika pada awal dekade 1970-an sekelompok perempuan praktisi pemerintahan di Washington yang tergabung dalam *Women's Committee of the Washington DC Chapter of the Society for International Development* memperkenalkan istilah *Women in*

*Development (WID)*¹ Pengalaman-pengalaman yang mereka dapatkan selama bertugas dalam misi pembangunan di luar negeri telah mendorong mereka untuk menolak konsep *male world* dalam teori pembangunan, karena proses pembangunan tersebut tidak memperhatikan status dan hak-hak perempuan. Hal ini justru merupakan keludapan perempuan. Terinspirasi oleh pemikiran Esther Boserup tentang peran penting perempuan dalam pembangunan ekonomi sekelompok praktisi Amerika ini kemudian membentengi jaringan dengan perempuan di lembaga-lembaga Persekutuan Bangsa-Bangsa dan para akademisi perempuan yang memiliki minat dalam penelitian tentang dampak proses pembangunan bagi kaum perempuan. Mereka juga berhasil mempengaruhi pemerintah Amerika Serikat sehingga mengeluarkan *The Ford Amendment* bagi Undang-Undang Bantuan Luar Negeri pada tahun 1973 yang menetapkan perhatian khusus kepada perempuan dalam program pembangunan internasional. Amendemen Amerika Serikat ini mempengaruhi Persekutuan Bangsa-Bangsa, sehingga pada tahun 1975 PBB mengeluarkan kebijakan "Dasar-dasar untuk Perempuan 1975-1985". Sejak saat itu berbagai kebijakan diadopsi ke dalam kehidupan kaum perempuan Dunia Ketiga (Fakih, 2001: 96).

Pendekatan WID dilandasi oleh pandangan kaum feminis liberal bahwa ketidapatannya perempuan berakar dari stereotip peran perempuan seharusnya dikendalikan laki-laki dimernalisasi dan diquantifikasi kepada kaum

¹ Konsep mengenai pendekatan WID dengan istilah pendekatan *andromedean* (*andromedean approach*) dan pendekatan *WID* yang dikembangkan Moser untuk melihat peran perempuan dalam pembangunan adalah pendekatan *critical view approach* yang identik dengan pendekatan

perempuan. Ketertarikan yang dialami kaum perempuan dapat dibapaskan melalui pendobrakan stereotip tersebut, antara lain dengan memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak perempuan, memulihkan UU yang anti diskriminasi atau dengan memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk masuk ke dalam pasaran tenaga kerja (Razavi dan Miller, 1995: 9)

Menurut pendekatan WFP perempuan adalah anggota masyarakat yang produktif. Perempuan bukanlah agen yang pasif dalam pembangunan, justru sebaliknya perempuan berperan aktif dalam pembangunan ekonomi. Namun ketertarikan akses dan kemampuan perempuan di bidang ekonomi telah menyebabkan perempuan memiliki status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Untuk memperbaiki status perempuan berhadapan dengan laki-laki, serta agar perempuan dapat memberikan sumbangsan positif bagi pembangunan, maka perempuan perlu diintegrasikan ke dalam sektor ekonomi (Razavi dan Miller, 1995: 11)

Strategi pengintegrasian perempuan ke dalam sektor ekonomi dilakukan melalui proyek-proyek *income-generating*, misalnya industri rumah tangga yang memproduksi makanan kecil atau usaha kerajinan pakauan. Proyek *income-generating* ditujukan untuk memperbaiki pendapatan kaum perempuan ibukin guna memenuhi kebutuhan pokok, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal dan bahan bakar. Kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam proyek-proyek *income-generating* membuka akses ke sumber-sumber

Women and Development (WAD) dan pendekatan pembangunan (*development approach*) atau yang mulai dikenal dengan istilah pendekatan *Gender and Development (GAD)*.

produktif yang semula didominasi oleh laki-laki, seperti tanah dan kredit (Moore, 2003: 203, 205)

Pendekatan WID menyebar di negara-negara berkembang berkat kampanye yang dilakukan secara intensif oleh ilmuwan atau akademisi, advokat dan para praktisi, yaitu laki-laki dan perempuan yang bekerja di berbagai lembaga yang menaruh perhatian pada pemberdayaan perempuan dalam pembangunan. Dalam konteks Indonesia para praktisi ini, yang bekerja secara intensif dengan lembaga-lembaga donor menelaah omop-omop developmentals di Indonesia untuk menaruh perhatian pada isu-isu perempuan dan menggunakan pendekatan WID dalam program-program mereka. Sebagai respon atas tuntutan lembaga donor, banyak omop developmentals kemudian mengadakan program-program perempuan, mempekerjakan staf perempuan, membentuk kelompok-kelompok perempuan di komunitas yang mereka dampingi dan membentuk departemen perempuan dalam organisasi omop. Pada saat yang bersamaan organisasi-organisasi perempuan mulai bermunculan.² Organisasi-organisasi ini menggunakan perspektif WID dalam program-program mereka untuk membantu kelompok-kelompok perempuan miskin meningkatkan kemampuan ekonomi mereka melalui pendidikan dan pelatihan (Machler, 2000: 6-7)

² Proyek-proyek *women-empowerment* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bersama-sama dengan lembaga donor telah membantu kelahiran bagi kaum perempuan sebagai mandarin organisasi-organisasi perempuan.

A.2 . Pergeseran ke Pendekatan *Gender and Development (GAD)*¹

Sejak akhir 1970-an pendekatan WID mulai mendapatkan kritikan. Pendekatan WID dianggap kurang memperhatikan sifat hubungan subordinasi yang lebih mendasar, meskipun pendekatan ini telah berupaya melepaskan subordinasi terhadap perempuan. Kelemahan pendekatan WID terletak pada pandangannya bahwa akar masalah subordinasi terhadap perempuan adalah kurangnya akses perempuan pada sumber-sumber produktif. Pandangan semacam itu mengakibatkan persolan relasi gender yang justru menjadi penghambat utama akses perempuan ke sumber-sumber produktif. Kritik tersebut melahirkan pendekatan baru yang dikenal dengan sebutan *Gender and Development (GAD)* (Razani dan Miller, 1993: 12).

Pendekatan GAD berbeda dengan pendekatan WID (dan juga WAD) dalam analisisnya terhadap asal dan struktur perundasan perempuan, serta bagaimana pendekatan itu dapat mengubah posisi perempuan Dunia Ketiga. Berbeda dengan pendekatan WID yang menekankan pentingnya pertantuan (*empower*) kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, pendekatan GAD meyakini ketertinggalan perempuan disebabkan oleh relasi kekuasaan gender yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan. Menurut pendekatan GAD ketidakadilan relasi gender bukan hanya disebabkan oleh superioritas laki-laki, tetapi juga

¹ Setelah pergeseran pendekatan WID, masalah kesetaraan bagi perempuan dalam pembangunan dimunculkan pula oleh penyebaran pendekatan *Women and Development (WAD)*. Pendekatan yang lahir dari Latin Amerika sep-Maret, ini melihat bahwa perempuan memiliki peran khusus yang penting dan pekerjaan yang dibelakangkannya di rumah tangga dan masyarakat sebagai tindakan untuk mempersembahkan ketahanan. Dalam pendekatan WAD peran marginal perempuan dilihat sebagai bagian dari siklus eksploitasi dan ketidakadilan kelas dan kelas karena ideologi patriarki. Karena itulah para pengantar pendekatan ini memiliki keyakinan bahwa peran perempuan akan lebih baik selama siklus internasional bertahap dari pembangunan. Pendekatan WAD tidak diadopsikan di sini karena pendekatan ini tidak dianggap oleh Yayasan.

karena masih ada pola-pola tekanan dalam masyarakat akibat kolonialisme dan neo kolonialisme. Pendekatan yang lahir dari pemikiran kaum feminis sosialis ini melihat sektor produksi dan reproduksi adalah basis penindasan perempuan. Oleh karena itu pembebasan perempuan tidak cukup hanya dilakukan pada sektor reproduksi (domestik), tetapi juga pada bidang-bidang produktif (publik). Para pengagujur pendekatan GAD menyiratkan teori-teori yang melahirkannya pendekatan WID karena telah mendomestifikasi perempuan. Untuk mewujudkan emansipasi perempuan pendekatan GAD memandang pentingnya partisipasi negara, bahkan negara berkewajiban melakukannya. Hal ini berkebalikan dengan pendekatan WID yang melihat negara sebagai pihak yang justru menuntut partisipasi perempuan dalam pembangunan yang dijalankan oleh negara (Harsono, 1997: 285, 291). Perbedaan antara pendekatan WID dan GAD bisa disimak pada tabel 4.1

Pendekatan GAD masuk ke Indonesia pada pertengahan tahun 1990-an, ditandai oleh pelaksanaan pelatihan-pelatihan gender oleh organisasi-organisasi perempuan, nongovernmental, dan lembaga-lembaga donor secara intensif di seluruh pelosok Indonesia. Melalui pelatihan gender dan feminisme mereka memperkenalkan isu-isu perempuan dan isu-isu gender sehingga semakin banyak orang yang menyadari perhatian pada isu-isu perempuan. Peningkatan jumlah aktivis perempuan dan aktivis pro demokrasi yang menaruh perhatian pada isu-isu perempuan menjadi faktor penting dalam perkembangan gerakan perempuan di Indonesia pada dekade 1990-an. Ketika kelompok-kelompok pro demokrasi di Indonesia menengganggah isu-isu hak asasi

manusia pada pertengahan dekade 1990-an, organisasi-organisasi perempuan dengan mendapat pengaruh wacana GAD mengadopsi dua hak-hak ekonomi dan politik bagi perempuan ke dalam wacana gerakan pro-demokratis. Mereka terutama menyoroti hubungan yang tidak adil antara laki-laki dan perempuan (Muchtar, 2000: 9. 11)

Tabel 4.1
Perbedaan Pendekatan WID dan GAD

	WID	GAD
FOKUS	Partisipasi perempuan dalam pembangunan	Relasi gender
ASUMSI	Perempuan adalah kelompok bermasalah dan yang tidak termasuk sumber kebutuhan bagi perempuan.	Subordinansi perempuan sumber ketidakadilan, perspektif pembangunan bukanlah sebagai pertumbuhan ekonomi
TUJUAN	Mempertinggi pendapatan perempuan maka untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar (makanan, pakaian, tempat tinggal)	Pemberdayaan perempuan, transformasi struktur yang mendasar
STRATEGI	Income-generating, partisipasi ekonomi kolektif	Penyadaran pemberdayaan organisasi perempuan untuk menegakkan kekuasaan politik, peran negara, masyarakat dan keluarga
ORIENTASI STRATEGIS	Keadyamanan dan efisiensi	Keadyamanan untuk menegakkan keadilan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Penyebaran wacana GAD diperkuat oleh penyebaran isu hak asasi manusia di tingkat global. Pada tahun 1993 PBB menyelenggarakan Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Wina. Konferensi yang menghasilkan Deklarasi dan Program Aksi Wina ini pada butir ke-18

menyatakan bahwa hak-hak perempuan dan anak perempuan merupakan bagian integral dari hak-hak manusia secara universal. Partisipasi perempuan dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya di tingkat nasional, regional dan internasional dan penghapusan semua bentuk diskriminasi seks menjadi prioritas utama masyarakat internasional PBB menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender dan semua bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual harus dihapuskan karena merupakan pelanggaran terhadap semua manusia. Untuk itu PBB mendesak pemerintah, lembaga-lembaga, organisasi pemerintah dan non-pemerintah mengintensifkan upaya-upaya perlindungan dan promosi hak-hak perempuan dan anak perempuan.⁴ Selain PBB sebagaimana tercantum dalam Deklarasi dan Program Aksi Wina 1993 menjadi pendukung penyebaran wawasan kesetaraan gender ke seluruh penjuru dunia sejak pertengahan dekade 1990-an.

Pertanian dunia pada isu gender kembali dibuktikan oleh PBB ketika pada tahun 1993 pula Majelis Umum PBB mengumumkannya Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan. Hal ini membawa kemajuan yang sangat berarti dalam mengungkap isu-isu gender di tingkat global. Kelahiran Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan menjadi bukti bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan yang sebelumnya dianggap sebagai masalah non-politik telah digeser oleh pandangan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan adalah masalah politik yang perlu diperhatikan oleh dunia (Peterson, 2001: 594).

⁴ Lihat Deklarasi dan Program Aksi Wina pada Konferensi Dunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia di Wina 14-25 Juni 1993.

A.3) Penyebaran isu Kesehatan Reproduksi

Bersamaan waktu dengan menyebarnya pendekatan GAD, persoalan kesehatan reproduksi berkembang menjadi isu yang banyak mendapat perhatian dari kalangan umum perempuan. Isu kesehatan reproduksi mulai mengemuka sejak pertengahan dekade 1990-an setelah berlangsung konferensi internasional tentang kependudukan yang diselenggarakan oleh PBB di Kairo Mesir tahun 1994. Konferensi Kairo menghasilkan Program Aksi¹ untuk mendukung upaya pemberdayaan perempuan, terdapat dan kesetaraan gender (butir 2) dan perwujudan hak-hak di bidang reproduksi dan kesehatan reproduksi bagi perempuan sebagai bagian dari hak asasi perempuan (butir 3). Pada Bab VIII dinyatakan bahwa hak reproduksi merupakan penguatan hak mendasar dan semua manusia dan individu untuk memutuskan secara bebas jumlah dan waktu untuk memiliki anak, mendapatkan perlindungan kesehatan reproduksi dan seksual, dan juga untuk memenuhi kebutuhan reproduksi yang bebas dari diskriminasi, penindasan dan kekerasan sebagaimana terdapat dalam dokumen-dokumen HAM.

Program Aksi Kairo menjelaskan pengertian kesehatan reproduksi sebagai keadaan fisik, mental dan sosial yang berhubungan dengan sistem,

¹ Program Aksi Kairo meliputi aspek-aspek sebagai berikut: (1) peningkatan angka harapan hidup, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, (2) kesetaraan gender, keadilan dan pemberdayaan perempuan, (3) keluarga persua, hak-hak perempuan dan struktur keluarga, (4) pertumbuhan penduduk dan struktur kependudukan, (5) hak-hak reproduksi dan kesehatan reproduksi, (6) kesehatan, kelahiran dan kematian, (7) pemerataan penduduk, urbanisasi dan migrasi internal, (8) energi internasional, (9) kependudukan, pembangunan dan pendidikan, (10) teknologi, penelitian dan pengembangan, (11) aksi nasional, (12) kerjasama internasional, (13) lapangan kerja sektor neo-pemerintah dan (14) rencana tindak lanjut.

fungsi, serta proses reproduksi. Definisi ini mengandung pesan-pesan bahwa individu berhak memiliki kehidupan seks yang menyenangkan dan aman, memiliki kemampuan untuk melakukan reproduksi dan kebebasan untuk memertukuskan kapan dan bagaimana melakukannya. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk mendapatkan informasi dan memilih alat KB yang cocok, aman dan efektif. Perempuan juga memiliki hak dan akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan agar dapat hamil dan melahirkan dengan selamat, serta memiliki anak yang sehat (Paragraf 72).

Menurut Program Aksi Cairo kampanye kebebasan reproduksi sangat penting dilakukan mengingat masih banyak orang yang kurang memiliki pengetahuan seksualitas, kurang mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi, memiliki prevalensi perilaku seksual yang berisiko tinggi, mengalami diskriminasi praktik-praktik sosial, mengalami perlakuan buruk, terutama kaum perempuan dan anak-anak perempuan, serta keterbatasan perempuan dan anak-anak perempuan dalam mengontrol sendiri kehidupan seksual dan reproduksi mereka.¹

Untuk menyesuaikan implementasi kebijakan di bidang kependudukan sebagaimana tertuang dalam Program Aksi Cairo, PBB menyarankan agar organisasi-organisasi non pemerintah, terutama yang bergerak di bidang kesehatan seksual, reproduksi dan keluarga berencana dan organisasi-

¹ Lihat lebih lanjut Program Aksi dan Konvensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan oleh PBB di Cairo tahun 1994, terutama Bab VII tentang Hak-Hak Reproduksi dan Kesehatan Reproduksi

organisasi perempuan melakukan pendidikan massyarakat untuk memyukseskan pelaksanaan kebijakan-ketijakan di bidang kependudukan.⁷

Seruan PBB tersebut disambut positif oleh organisasi-organisasi perempuan. Pada Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing tahun 1994 isu kesehatan reproduksi menjadi salah satu agenda pokok yang dibahas dan kemudian dinumuskan dalam Rencana Aksi Beijing (*Beijing Platform of Action*) Konferensi Beijing mengakui bahwa HAM yang dimiliki perempuan meliputi hak untuk mengontrol dan memutuskan secara bebas semua hal yang berhubungan dengan seksualitas mereka, termasuk di antaranya kesehatan seksual dan reproduksi, penghormuan sepenuhnya pada integritas manusia, saling menghormati dan tanggung jawab bersama dalam perilaku seksual.⁸

B. Dominika Agenda Gerakan Yasanti

B.1. Pengaruh Pendekatan WIE

Kecenderungan gerakan perempuan menggunakan pendekatan *Women in Development* (WID) mempengaruhi visi dan misi Yasanti pada dekade 1980-an. Implementasi pendekatan WID yang menekankan isu ekonomi dan aspek-aspek yang bersifat *women-generating* mendorong Yasanti untuk melakukan pemberdayaan perempuan melalui program-program ketrampilan yang memiliki nilai produktif untuk menghasilkan uang sebagai pendapatan tambahan (Yasanti, 1998: 116). Salah satu program ketrampilan yang diberikan Yasanti adalah kursus menjahit untuk pemberdayaan di

⁷ Lihat buku tahunan untuk organisasi non pemerintah lokal, nasional dan internasional dalam *Programs And Issues Konferensi Kependudukan di Kairo tahun 1994*

Keboneja Kulonprogo pada tahun 1985, bantah perempuan di Unjuran sejak tahun 1988, serta remaja puisi puisi sekolah dan peminatnaga di Yogyakarta sejak tahun 1987

B 1.1 Strategi Masuk Komunitas

Sejak semula para aktivis Yasami telah menyadari bahwa kelahiran Yasami akan menimbulkan sinisme dari berbagai kalangan mengingat langkah untuk mewujudkan perubahan juga kaum perempuan tidaklah mudah. Mereka melihat kondisi yang dialami perempuan telah menjadi sebuah fenomena sosial budaya yang kuat dan telah "diyakini" masyarakat sehingga memperlakukan gerakan Yasami harus berbenturan dengan fenomena sosial budaya masyarakat. (Annisa O, 1997: 8)

Agar bisa masuk dengan mudah ke dalam komunitas perempuan dan tidak menimbulkan kecanggungan masyarakat Yasami melakukan strategi memanfaatkan organisasi PKK sebagai institusi yang diterima oleh pemerintah dan masyarakat. Kemudian merencanakan

Waktu-waktu awal itu PKK bisa dimanfaatkan. Jadi kita tidak terlalu berbenturan. Yang penting bagaimana kita bisa masuk ke komunitas mereka. Jadi komunitas kita dirikan, tapi PKK, institusi yang anggota-anggotanya masyarakat itu kita masuk. Jadi kita tidak terlalu berbenturan. Itu bagian dari strategi bagaimana kita bisa masuk dengan relatif mudah. Di awal-awal kita tidak perlu berbenturan dengan hal-hal yang tidak terlalu penting. (Wawancara, 21 Maret 2017)

Selanjutnya akan dianalisis lebih jauh pada bab VI kesengajaan

Yasami menggunakan organisasi PKK merupakan bagian dari strategi

¹ Lihat lebih lanjut *Strong Women, Weak Men* Paragol 90

karena para aktivisnya menyadari bahwa mereka akan lebih mudah diterima masyarakat jika masuk melalui organisasi yang telah secara luas diakui oleh negara dan masyarakat. Namun demikian karena masuk lewat PKK Budi Wahyuni membuat Yasuni pada dekade 80-an sangat *low profile*. Meskipun pilihan untuk masuk melalui PKK merupakan strategi Yasuni agar bisa memburu dengan mudah ke dalam komunitas perempuan dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat, strategi itu telah membuat Yasuni mengalami kesulitan untuk secara langsung dan tegas menajak kelompok dampungannya berdiskusi melancarkan kritik terhadap Orde Baru Wahyuni menuturkan

Sepak awal kita beranggotai dari ketidakpuasan terhadap Orde Baru. Cuma yang agak repot Yasuni waktu itu sangat *low profile* karena masuknya lewat PKK. Itu menyulitkan kadang-kadang sulit bagi kita untuk secara langsung dan tegas mengkritik Orde Baru. (Wawancara, 16 Juni 2013)

Organisasi PKK dimanfaatkan Yasuni sebagai wadah untuk memberdayakan kaum perempuan dengan jalan mengubah kegiatan PKK menjadi kegiatan yang positif dan bermanfaat. Di Kulonprogo pemberdayaan perempuan dilakukan dengan membuka kegiatan keterampilan untuk anggota PKK yang sebagian besar terdiri dari ibu rumah tangga dan buruh petani agar bisa mencari uang sendiri.

Di Kulonprogo kita membina ibu-ibu, buruh tani, semua perempuan. Waktu itu tujuannya baru bagaimana perempuan bisa cari uang sendiri. (Suzi Mulyotriah, Wawancara tanggal 19 Maret 2013)

Yasanti memanfaatkan peluang yang tersedia dari pemerintah untuk mengembangkannya kegiatan menjahit di Kulonprogo. Pada waktu itu dalam rangka menanggapi penyebaran pendekatan WID pemerintah mengadakan beberapa program pelatihan untuk meningkatkan pendapatan perempuan. Salah satu proyek yang dilakukan adalah program pelatihan untuk meningkatkan pendapatan perempuan melalui mobile training van Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) Departemen Tenaga Kerja. Yasanti berhasil mendapatkan bantuan pelatih menjahit secara gratis dari program tersebut.

Dulu di Depasuker itu di masing-masing kabupaten ada mobile training van. Nah saya berhasil minta fasilitas itu ke Depasuker, sehingga bisa dapat trainer gratis (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Berkat bantuan BLKI Yasanti berhasil menyelenggarakan kegiatan kursus menjahit selama enam bulan pada tahun 1985.⁷ Ibu Sutarno, salah seorang ibu rumah tangga di desa Kecamatan Kulonprogo yang pernah mengikuti kegiatan Yasanti sejak tahun 1982 menceritakan pengalamannya mengikuti kursus menjahit

Kada saya mulai jahit Kurs KKN, terus berlanjut, dan berlanjut. Terus menerus kegiatan jahit. Kursus jahit mulai tanggal 9 Desember 1981, sehingga tahun (sambil menyambut kedatangan) Minggu malam lanjut kearaham. Saya kenal ibu-ibu PKK (Dulu mbak Kus KKN, terus berlanjut, ikut kegiatan Terus ada kegiatan menjahit. Kursus menjahit dimulai tanggal 9 Desember 1985 selama setengah tahun. Beresapan di kantor kultural yang ikut ibu-ibu PKK.) (Ibu Sutarno, Wawancara tanggal 4 Juli 2007)

⁷ Kegiatan ini ternyata mendapat perhatian RRI Yogyakarta untuk mempromosikannya pada persentase dampaknya Yasanti di Kulonprogo. Ny. Sutarno salah seorang mantan dampaknya Yasanti yang pada waktu itu baru diorganisasikan RRI dilaksanakan di dusunnya termasuk apa saja yang dilatih dari kegiatan menjahit, kecuali jumlah anggota, dan mana-mana mendapatkan macam-jam dan bagaimana cara membuat hasil atau apa saja lain.

Keberhasilan Yasanti membangun komunitas perempuan melalui organisasi PKK di tingkat kalurahan kemudian dilanjutkan dalam pertemuan PKK pedukuhan Kusyuniati mengemukakan alasan mengapa Yasanti masuk dalam pertemuan pedukuhan.

Kalau pertemuan PKK ketemuanya hanya dia Nah ketupadan kita datang ke pertemuan pedukuhan Di situ kenal sama orang-orang pedukuhan Nah, di pedukuhan itu, di level yang lebih kecil kita mulai program *habis kursus menjahit* bikin paksiwi serigala (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Di level pedukuhan ini Yasanti kemudian mencoba pembentukan Usaha Bersama (UB) semacam embrio dari koperasi Rubiyah, mantan dampingan Yasanti di Kulonprogo memutuskan

habis kursus menjahit bikin semacam *perbaikan-perbaikan* kepemimpinan, Usaha Bersama (Rubiyah, Wawancara tanggal 4 Juli 2003)

Siti Muslimah menjelaskan bahwa Yasanti mendorong pembentukan UB agar perempuan memiliki bidang usaha yang menghasilkan uang, sehingga mereka memiliki kekuatan ekonomi

Di Kulonprogo kita membina pembentukan UB, semacam embrio dari koperasi. Kita berpikir bagaimana uang bisa tetap berada di situ, tidak ke kota. Jadi bagaimana kelompok masyarakat perempuan di situ bisa menabung, bisa membecek usaha, caranya dengan memberikan kemampuan. Kalau ada uang kan ada kekuatan. Kita menantik mereka melakukan Usaha Bersama dengan cara menabung simpan pinjam (Siti Muslimah, Wawancara tanggal 19 Maret 2003)

Berkat dorongan Yasanti para perempuan di Kabupaten Kulonprogo banyak yang tertarik untuk membentuk berbagai kelompok Usaha Bersama. Jenis usaha yang dilakukan sangat beragam, antara usaha konveksi pakaian, celana kolor dan sebagainya sekolah, makan lese, penjualan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari seperti beras, sabun dan shampo, hingga penjualan peralatan rumah tangga seperti sapu, ember dan kompor (Laporan Yasanti, 1990).

4.1.2. Agenda Terselubung

Ketika Yasanti berdiri wacana kesetaraan gender belum dikenal luas. Namun demikian Yasanti telah berkeinginan untuk membantu sesama perempuan dengan jalan memandirikan perempuan secara ekonomi. Yasanti tidak sekedar memberikan latihan keterampilan bagi kaum perempuan, karena tujuan di halis itu adalah ingin menumbuhkan harga diri, harkat dan martabat perempuan (Korijannah menjelaskan:

Yasanti berdiri ini tidak bicara gender, tapi bagaimana perempuan bisa hidup mandiri. Bahasanya belum bahasa gender. Kita melihat kepribadian, ingin berbuat sesuatu, bagaimana itu disistematisasi, bagaimana bisa dicapai dengan cara berorganisasi. Dia kita anggap sekedar *women governing*, tapi bagaimana menumbuhkan harkat dan martabat perempuan (Wawancara, 21 Maret 2003).

Yasanti meyakini bahwa penguatan perempuan secara ekonomi melalui program-program latihan keterampilan, antara lain kelas menjahit untuk perempuan di Kulonprogo akan dapat memperkuat posisi perempuan dalam masyarakat. Kusumawati menuturkan

Waktu itu di Kulonprogo kita enggak berpikir jauh. Yang penting waktu itu jika perempuan paham kalau secara ekonomi dia independen, maka dia akan bisa terlibat dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Kepercayaannya masih seperti itu. Aktivitasnya masih seperti aktivitas ekonomi (Komunitas, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Untuk mewujudkan kemandirian ekonomi perempuan dan memajukan hak-hak dan martabat perempuan di Kulonprogo maka pertemuan PKK pedukuhan tidak semata-mata dilaksanakan untuk melakukan kegiatan UB atau program-program yang bersifat *income-generating*, namun juga dijadikan forum untuk menyisipkan pesan-pesan penyadaran hak-hak perempuan. Siti Muallimah mengemukakan bahwa dalam kegiatan kursus pembekuan untuk menunjang pelaksanaan UB, Yasumi selalu mengingatkan bahwa perempuan harus memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki

Dalam kursus pembekuan mereka (anggota PKK) diberi pengertian bahwa perempuan harus punya kemampuan yang sama dengan laki-laki. Yang terbaik itu koperasi bukan hanya bapak-bapak di kalurahan saja .. ya kita mulai dari membuktikan bahwa perempuan punya kemampuan yang seperti itu, bukan hanya monopoli bapak-bapak yang kerja di kalurahan. Kita mulai dari pengetahuan cara mengelola angkutan mesin jahit, siapa yang nyetir ini itu (Siti Muallimah, Wawancara tanggal 19 Maret 2003)

Ibu Sutarno menambahkan bahwa dalam pertemuan pedukuhan Yasumi sering mengingatkan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, meskipun Ibu Sutarno sendiri mengakui bahwa sosampas di rumah ia sudah lupa dengan pesan tersebut

Kalau lebih dari pertemuan PKK pedukuhan kurang 10 mbak-mbak mbak Yasumi rumah masing-masing sehingga kalau masalah perempuan itu harus maju, perempuan itu punya hak. Ming ngerti ngerti dulu ngapain aja kerajinan (dulu waktu awal-awal, waktu pertemuan PKK pedukuhan tanggal 10 mbak-mbak dari Yasumi datang memberikan satu dua

nasibnya perempuan baru saja, perempuan punya hak. Tapi ya sampai di rumah sudah lupa lagi) (Ibu Sulistyono, Wawancara tanggal 4 Juli 2003)

Yasanti menyadari bahwa upaya untuk menyadarkan hak-hak perempuan tidaklah mudah, terutama karena Yasanti mengalami keterbatasan waktu. Pertemuan PKK pedukuhan dilakukan pada sore hari hingga Maghrib. Waktu yang sempit menyebabkan Yasanti kurang memiliki keleluasaan untuk menyampaikan penyadaran hak-hak perempuan. Budi Wahyuni menyarankan:

Kadang waktunya lebih bisa simpan panjang. Jadi kadang sampai Maghrib kita nggak dapat melakukan penyadaran. Ya sudah pada prinsipnya kita kan pemberdayaan kelompok. (Wawancara, 16 Juni 2003)

Media yang dianggap lebih tepat bagi Yasanti untuk melakukan proses penyadaran hak perempuan adalah forum LDKW (Latihan Dasar Kelompok Wanita). Kegiatan ini pernah beberapa kali diselenggarakan Yasanti di Keborejo. LDKW berisi sesi-sesi pembentukan dan pengelolaan kelompok, kepemimpinan dan penyadaran diri bagi perempuan, sehingga Yasanti melihat forum ini dapat berakademi untuk mendiskusikan persoalan kepemimpinan perempuan.

Kalau kita latihan LDKW itu mulai dipertanyakan kenapa PKK, kenapa harus bu bambu sudah didiskusikan di tingkat itu. Kemudian kenapa PKK kenapa harus bu bambu, masalahnya seperti itu didiskusikan. Itu kalau latihan LDKW nampak sekali. Ada empat sesi penyadaran diri (Budi Wahyuni, Wawancara tanggal 16 Juni 2003)

Keyakinan Yasanti bahwa kemandirian ekonomi perempuan akan diikuti dengan kemandirian dalam pengambilan keputusan rumah tangga merupakan proeminan dan pengaruh wacana global WID yang sedang mengemuka saat itu. Meskipun kelak pada dekade 1990-an asumsi itu diadopsi sebagai suatu kekeliruan, perjalanan sejarah Yasanti memperlihatkan bahwa wacana keberempusuan yang sedang dominan di tingkat global maupun nasional telah memengaruhi pemikiran para aktivis Yasanti dalam merencanakan agenda pemberdayaan perempuan di tingkat grassroots.

Sebagaimana akan dibahas lebih lanjut pada bagian analisis gerakan Yasanti langkah kognitif dan kawat-kawatannya untuk menyisipkan pesan penyadaran hak perempuan menunjukkan bahwa dalam kerangka adopsi pendekatan WID keorganisasian untuk menumbuhkan masyarakat patriarkis yang mem subordinasikan perempuan telah dilakukan Yasanti dalam bentuk yang sederhana dan dilakukan secara perlahan-lahan Amin Muftiyarah yang merupakan salah seorang aktivis senior di Yasanti mengemukakan,

Perspektif kesetaraan gender sudah memengaruhi kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasanti sebelum wacana *Gender and Development* dikenal luas, hanya saja pada saat itu (dekade 1980-an) agenda kesetaraan gender di Yasanti belum diprogramkan tersendiri. Kalau dulu lebih ke Lajisan Dasar Kepemimpinan Wanita karena menyertakannya itu saat itu. Dalam LKDW (diberikan pengalihan) bagaimana perempuan bisa menjadi pemimpin yang baik, tapi sebenarnya perspektif gendernya sudah ada di situ tapi tidak terprogramkan (Amin Muftiyarah, Wawancara, tanggal 18 Februari 2003)

Akan tetapi pernyataan ibu Sutaryo menarik pula untuk disimak jika pesan-pesan penyadaran hak perempuan yang disampaikan Yasanti dalam

peremuan kelompok menjadi terhapuskan atau sampai anggota kelompok dampaikan tiba di rumah, maka perlu dipertanyakan (konsep dan waktu yang sangat terbatas) mengapa penyadaran bak-huk perempuan yang dibentakan begitu saja mudah dilupakan. Apakah kultur masyarakat patriarkis sudah sedemikian melekat dan dinerion sebagai suatu kewajaran bagi perempuan sehingga penyadaran hak perempuan bagaikan sesuatu yang hanya didengar seperti angin lalu.

B 1.3 Penolakan terhadap PKK

Ketika usaha menyalin (konversi) di tingkat bawah telah berkembang Yasanti mendapatkan kesempatan untuk mulai mengkritik PKK dan sekaligus mempertanyakan apa yang didapat oleh perempuan dari kegiatan PKK. Namun kondisi sosial politik yang dihadapi Yasanti pada saat itu tidak memungkinkan Yasanti melakukan kritik terhadap PKK (sebagai organisasi perempuan bertakam rezim Orde baru) secara terbuka, sehingga kritik terhadap PKK disampaikan secara terbatas untuk kalangan anggota PKK. Kebonoro Budi Wahyuni menuturkan pengalamannya di Kebonoro ketika mengkritik PKK:

Kalau mereka ikut PKK, mendapatkan apa sih sebenarnya. Sementara waktu itu kita ada kursus keterampilan menjahit. Nah waktu yang dia pakai untuk menjadi busah menjahit itu lumayan tinggi. Waktu dan HUK (Buku Latihan Kerja) ada borongan-borongan terus sehari. Nah kemudian Yasanti mengajak diskusi ke sana. Sebenarnya PKK gimana? Namun kembali karena Yasanti masuk melalui PKK, maka cara mengkritiknya ya terbatas intern anggota saja, tidak seperti sekarang dengan gerakan yang relatif jelas (Budi Wahyuni, Wawancara tanggal 16 Juni 2003)

Pada kesempatan yang lain dalam suatu acara simpan pinjam penemuan pedukuhan Kusyuniati menyajikan kaum perempuan Kebonrejo mengkritisi Orde Baru dengan mendiskusikan relevansi Panca Dharma Wanita (sisi peran perempuan menunaikan peran Orde Baru) dalam kehidupan sehari-hari perempuan Kebonrejo.¹⁴ Kusyuniati menuturkan

Saya tanya sama mereka tahu nggak arti Panca Dharma Wanita itu? Satu wanita penampiang suami itu artinya apa? Mereka bilang wah, itu nggak cocok karena kita ke sawah itu ya suami. Dua, penerus keturunan menurut iya. Duri yang lima ini kok yang cocok cuma rumah dua ini ya? Kalau dua lima hanya satu yang cocok nggak juga dipajang? Masalahnya gitu, terus dilepas. Kita juga mengutipkan dari mereka itu jadi larah. Waktu ada larah yang panyun itu harus ada kelas perempuan. Ya kita dukung. Walaupun akhirnya gagal, tapi sudah berani nyawa. Sampai tinggal dua orang. (Wawancara, 12 Juni 2017)

Setelah mengikuti kegiatan-kegiatan Yasanti lama-kelamaan banyak perempuan Kebonrejo tidak mau menghadiri pertemuan PKK. Jumlah peserta PKK kemudian menjadi menurun, sehingga kegiatan PKK kemudian lama-kelamaan mati. Kusyuniati menuturkan pengalamannya

Ketika pertama kali datang dalam pertemuan PKK ada seratusan lebih. Semenjak pertemuan pedukuhan diaktakan jumlah orang yang hadir dalam PKK pedukuhan menurun. Akhirnya tinggal sekitar 20 orang dan itu pun hanya para pengurus. Jika anggota PKK diundang untuk hadir dalam pertemuan mereka menjawab sedang sibuk dengan pesanan jahitan. Lama-kelamaan kegiatan arisan PKK buhar dan tidak lagi ada pertemuan rutin. Jadi dibolak sendiri oleh orang desanya. Yasanti tidak langsung melat PKK, tapi menggerakkan mereka (perempuan Kebonrejo) agar tidak menerima PKK. (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2017)

¹⁴ Persepsi Panca Dharma Wanita pernah dibahas oleh Kusyuniati ke forum INFID (atau bernama PKSI) Kusyuniati menggunakan forum pertemuan INFID untuk mengkritik Dharma Wanita dan mengkritik agar Panca Dharma Wanita dihapuskan. Akibatnya Kusyuniati sering diugali banyak orang karena mengkritik Dharma Wanita (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2017)

Alkitab menggerakkan perempuan Kebonrejo untuk menolak PKK Yasanti dimusuhi oleh pemimpin PKK Kebonrejo Ibu Sutaryo menuduhkan Yasanti pernah dimusuhi oleh anak Kepala Desa yang bertugas mengkampanyekan ibu Lurah memimpin PKK. Anak ibu Lurah tidak senang dengan kehadiran Yasanti karena dianggap menyingsingi kegiatan PKK.

Mbak Roh, mbak Siti, mbak Yanti (nama alumnus Kasoran yang bertugas sebagai PI di Kulonprogo) melalui miter pernah jadi nama kaitan antara bu Lurah. Bu Lurah mbak Roh pun sempat mbawa mampas, terus abgnya antara mbak Siti, tapi pnyambung antara mbak Siti kaitan Yasanti. Dianggap nyindir. (Mbak Roh, mbak Siti, mbak Yanti (para aktivis Yasanti) waktu itu pernah ngak ramai dengan anak bu Lurah. Bu Lurah sudah tua, sudah tidak mampu maka digantikan anaknya dalam memimpin PKK, tapi dia tidak suka dengan Yasanti. Dianggap menyingsingi) (Ibu Sutaryo, Wawancara tanggal 4 Juli 2003)

Di dukuh Seling Kebonrejo Kulonprogo Yasanti juga pernah ditolak oleh seorang anggota PKK yang secara kebutuhan juga menjadi anggota kelompok UB Handayani. Ia tidak mengabdikan kebebasannya Yasanti dalam pertemuan kelompok karena menganggap Yasanti selalu menandingi kegiatan PKK. Menghadapi situasi semacam itu Yasanti kemudian mengoreksi keputusan untuk tidak mempenemukan Pengurus Lapangan (PL) dalam forum UB, namun cukup menemui beberapa pengurus dan anggota kelompok UB. Terlebih lagi dalam kelompok tersebut ada motivator yang selalu melaporkan semua kegiatan kelompok UB kepada Yasanti. Dalam perkembangannya banyak anggota kelompok yang sangat mengharapkan pembinaan dari Yasanti.

sehingga Yasanti kembali hadir dalam pertemuan kelompok (Laporan Yasanti, 1990).

B.1.4. Ungaran. Menjahit sebagai *Survival Power*

Strategi yang kita pilih yaitu memfasilitasi organisasi PKK untuk melatih keterampilan menjahit sebagai sarana pemberdayaan perempuan juga diterapkan Yasanti di Ungaran. Strategi ini dilakukan agar Yasanti bisa masuk dengan mudah dalam komunitas buruh Ungaran. Semula Kusyuniati dan kawan-kawannya hanya melakukan acara *linggong-kusyong* bersama buruh perempuan secara informal untuk menjalin keakraban dan mendengarkan keluhan-keluhan pengalaman hidup mereka, hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mengadakan kegiatan kursus menjahit dalam wadah kegiatan PKK sebagai media mengumpulkan buruh. Kusyuniati menuturkan,

Waktu itu kita bingung cari media untuk mengumpulkan buruh. Apa jodoh? Mula-mula nujukan kursus. Ya akhirnya jahit (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2001)

Yasanti memiliki keyakinan bahwa pemberdayaan ekonomi melalui kegiatan menjahit bagi buruh perempuan di Ungaran dalam jangka panjang akan memberikan mereka kemampuan dan kepercayaan diri sehingga pada akhirnya mampu menciptakan kesempatan pengembangan diri bagi buruh perempuan agar mendapatkan perlakuan yang sama dengan laki-laki (Laporan Yasanti kepada *The Asia Foundation*, Tanpa Tahun)

Karena warga pendatang lebih banyak dari penduduk asli, maka kehadiran Kusyuniati dan kawan-kawan di Ungaran tidak menyolok sehingga

mereka bisa dengan lebih mudah masuk ke dalam komunitas buruh tanpa kecungasan dan pihak perusahaan dan masyarakat. Nondjariyah menitikratkan pengalamannya

Jika pendahulunya tanya siapa kamu dijawab kamu adalah mahasiswa yang memiliki sedikit pengalaman dan ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat (Wawancara, 21 Maret 2003)

Berbeda dengan Kulnprogo kursus menjahit di Tegalaran tidak melibatkan instruktur ahli dari Departemen Tenaga Kerja, tetapi dilakukan sendiri oleh Yayasan secara bergantian. Kustodian dan kawan-kawan berangkat ke Tegalaran memberikan kursus menjahit mulai dari mengukir membuat pola hingga menjahit seperti dituturkan oleh Nondjariyah

Dulu berangkat ke Ungaran ya Kus, Dewi, saya. Saya ngasih loro waktu para-para bisa ngopyeng kursus jahit (Nondjariyah, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

Nondjariyah kembali menceritakan pengalamannya bahwa ia dan kawan-kawannya di Yayasan harus bersabar dalam mendampingi agar buruh perempuan bisa berkongkil. Kondisi fisik buruh yang sudah lebih bekerja di pabrik menyebabkan mereka malas mengikuti kegiatan Yayasan

Kebanyakan buruh perempuan bekerja di pabrik tekstil yang sehari bekerja selama 7 jam dengan posisi berdiri sehingga menjadi sangat wajar jika mereka malas untuk mengikuti kegiatan Yayasan, apalagi belum jelas apa yang akan mereka dapatkan (Nondjariyah, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

Pemanfaatan organisasi PKK sebagai wadah untuk mengumpulkan buruh di Ungaran tidak berlangsung lama. Yayasan menilai upaya untuk

mengumpulkan buruh perempuan melalui kegiatan PKK tidaklah efektif karena tidak semua buruh mengikuti kegiatan PKK. Akhirnya kegiatan bersama buruh tidak lagi dilakukan dalam wadah PKK, namun melalui pembentukan atau pengorganisasian kelompok-kelompok buruh secara langsung.

Kursus tersebut bagi buruh di Ungaran juga bermakna sebagai media untuk mengajak agar buruh perempuan mau berkumpul dan mendiskusikan hak-hak mereka sebagai buruh. Kusyuniati menceritakan usia menjahit ia dan kawan-kawannya mengajak para buruh perempuan mendiskusikan hak-hak yang semestinya mereka miliki:

Malahnya cuma sedikit, setelah itu bricau tentang hak. Kami dulu punya bahan diskusi misalnya tentang upah, hak cuti. Kalau perempuan kan ada cuti haid, cuti melahirkan. Kemudian ketika berselisih harus pergi ke mana. Begitu mengenai upah itu nggak cukup satu pertemuan harus bertali-tali. Jadi itu bisa menjadi pertemuan yang panjang. (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Noordjannah menyatakan alasan serupa bahwa kegiatan menjahit hanyalah menjadi titik masuk (*entry point*) sebagai media bagi Yayasan untuk membusur buruh perempuan agar berani untuk berkumpul dan berorganisasi:

Orang melihat sekant-kalan keluarnya belajar nyafar, belajar untuk meningkatkan ekonomi, tapi di situ kita melakukan proses penyadaran. Kan di awal-awal kita nggak punya metode, ya kumpul-kumpul, diskusi. Kita berkeyakinan bahwa melalui pemberdayaan organisasi buruh mereka mempunyai kemampuan untuk bicara, bernegosiasi, mengontrol keputusan. Setelah itu bagian dari *entry-point* Lama-lama berkembang diskusi buruh, dapat upah berapa, gimana kondisi kerjanya, apa yang dirasakan jadi mengahir begitu saja. (Noordjannah, Wawancara tanggal 21 Maret 2005)

Proses penyadaran diaku oleh Yasanti bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Noordjanah melaporkan bahwa proses untuk menyadarkan buruh perempuan memerlukan waktu yang panjang karena buruh takut untuk diajak berkumpul akibat belum terbiasa berorganisasi.

Karena sesuatu yang baru ada rasa takut juga bagi buruh. Proses kita panjang. Buruh disuruh menulis harapan-harapanya, kalau tidak masuk keorganisasi harapan lama-lama akan bisa untuk diskusi dan mereka menjadi sadar itu tidak adil. Nah awal-awal itu jelas ada yang takut juga, mereka itu tidak biasa berorganisasi. (Noordjanah, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

Proses penyadaran hak buruh perempuan tidak hanya dilakukan Yasanti dalam kegiatan latihan menjahit. Yasanti juga masuk ke dalam kelompok-kelompok pengajian untuk memberikan penyadaran tentang perscutan-perscutan sosial yang mau menerima perempuan. Noordjanah mengatakan salah satu tugas yang diberikan oleh Yasanti adalah melakukan dakwah bagi sesama manusia. Oleh karena itu selain kursus menjahit forum pengajian juga sering digunakan oleh Yasanti sebagai media untuk menyadarkan buruh perempuan.

Rumahnya penduduk itu kan kebanyakan untuk kasur masalah-masalah dan macam-macam hal-hal yang tidak pantas itu banyak terjadi, ya jadi kita sering pengajian. Yang tidak pantas itu misalnya pacarnya datang yang kita harus harus keluar dari kamar. Kalau gitu-gitu itu sesuatu yang nggak mudah. (Noordjanah, Wawancara tanggal 21 Maret 2003)

Pilihan menggunakan pengajian sebagai media untuk melakukan penyadaran buruh perempuan merupakan pencerminan sosok Yasanti yang disadari juga oleh para pendirinya merupakan organisasi perempuan yang diduskan oleh sekelompok mahasiswa Islam. Bahkan, sebagian besar di antara

mereka adalah aktivis organisasi Islam sehingga peranan keislaman sangat mewarnai kegiatan Yasanti di lapangan. Hal ini diakui oleh Kusyuniemi bahwa pengikat yang mempersatukannya dengan kawan-kawannya di Yasanti adalah kesamaan agamita, yaitu Islam. " semua serong yang menjadi pengikat Yasanti untuk religius " (Kusyuniemi, Wawancara tanggal 12 Juni 2003). Hal yang sama juga dikemukakan Kumara Dewi bahwa Yasanti mempunyai komitmen terhadap Islam, sehingga apabila semua aktivis Yasanti muslimah adalah bukan tanpa direncanakan dan sejak didirikan pada tahun 1982 Yasanti telah menjadi media dakwah alternatif bagi para aktivisnya (Kusyuniemi, Rujat, 5 Februari 1994).

B.1.5. Mobilisasi Dukungan Aparat Desa

Kelanjutan kegiatan Yasanti di Ungaran mendapat dukungan dari aparat desa setempat. Yasanti banyak dibantu oleh kepala dukuh dalam mengorganisir buruh perempuan. Secara kebetulan kepala dukuh tersebut sudah dikenal oleh para aktivis Yasanti ketika mereka melakukan penelitian tentang buruh perempuan di Ungaran bermitra-sama dengan Lembaga Studi Pembangunan (LSP). Kepala dukuh banyak membantu Yasanti karena ia juga merasa terbantu oleh keberadaan Yasanti di desanya akibat merasa kewalahan menangani kasus-kasus para pendatang (sebagian besar buruh adalah pendatang).

Hubungan baik dengan kepala dukuh membuat kegiatan Yasanti menjadi aman dan kecurigaan masyarakat dan aparat. Tidak jarang rumah

kepala dukuh dijadikan tempat untuk berkumpul dengan para buruh perempuan. Bahkan oleh kepala dukuh Yasanti juga diperkenalkan dengan aparat kesehatan, sehingga kesehatan Yasanti lebih terjaga. Noordjaniab menceritakan pengalamannya ketika berada di Ungaran:

Kita ikut tinggal di rumah pak Dukuh, jadi kita tinggal di Ungaran. Lama kita berjumpa hawa kesehatan, jadi kan sama, tidak ada kecurigaan (Noordjaniab, Wawancara tanggal 21 Maret 2003).

Kekuatan Yasanti dengan pamong desa sempat dimanfaatkan oleh Yasanti untuk menggerakkan buruh perempuan agar mau mengikuti kegiatan. Pamong desa dilibatkan dalam kegiatan Yasanti salah satunya adalah dengan meminta mereka untuk memberikan sambutan atau motivasi pada pertemuan kelompok yang pertama kali. Bagi Yasanti pendekatan semacam ini dirasakan penting untuk mendapatkan "legalitas" program Yasanti dan memperluas gerak Yasanti lebih luas. Pamong desa bahkan turut membantu mendekati rumah-rumah atau havi buruh dan mengajak mereka ikut dalam kegiatan kelompok. Kedekatan dengan pamong desa dirasakan Yasanti sangat berguna untuk menjalin komunikasi yang intensif sehingga persemaian pemahaman dan partisipasi lebih mudah dibentuk.

Berikat pendekatan-pendekatan dengan buruh dan dukungan pamong desa pada tahun 1983 terbentuk tiga kelompok buruh perempuan dengan jumlah keaharhan anggota sebanyak 80 orang. Akan tetapi kelompok ini tumbuh bukan karena keaharhan, kebanyakan dari para anggota masuk kelompok karena ilusi-ilusi. Hanya sebagian kecil anggota yang benar-benar menyadari arti penting kelompok sebagai wadah aktivitas belajar dan

pengorganisasian diri. Sebagian besar anggota kelompok berhitung pasif dalam menerima ide dari orang lain. Dalam banyak kasus mereka hanya diam atau setuju terhadap semua jenis keputusan, namun kemudian tidak mau melaksanakan keputusan itu. Pada awal tahun 1985 tumbuh empat kelompok yang beranggotakan sekitar 20-32 orang. Kelompok-kelompok ini terbentuk karena ada persamaan kebutuhan yang dirasakan masing-masing anggota. Keberhasilan dan manfaat kegiatan yang mulai bisa dirasakan oleh anggota kelompok mulai menyebarkan ke sesama-sesama dan teman-teman sekerja. Keberhasilan tersebut memotivasi mereka untuk ikut membentuk kelompok-kelompok baru. Nama Yasmu kemudian mulai dikenal di lingkungan buruh perempuan di desa Gedanganak Ungaran (Laporan Yasmu kepada *The Asia Foundation*, Tanpa Tahun).

B.1.6. Implikasi Kompetensi Nairobi: Mobilisasi Energi dan Kerjasama Jaringan

Konferensi Perempuan Sedunia di Nairobi tahun 1985 berdampak positif bagi perkembangan Yasmu karena semakin banyak orang atau lembaga yang mempunyai keprihatinan besar terhadap masalah yang dihadapi kaum perempuan.¹¹ Terbunuh lagi gelombang perhatian pada perempuan diiringi dengan

¹¹ Kompetensi Nairobi dilaksanakan bagi aspek Kesehatan, Pembangunan dan Pendidikan. Pada kesempatan ini para anggota delegasi diharapkan tidak hanya sebagai pendengar oleh PBB bahwa permasalahan kaum perempuan dan upaya untuk mengorganisir diri terhadap permasalahan yang dialami oleh sebagai local perempuan. Di samping-samping berkembang status perempuan lokal menjadi Dengan cara lain upaya program "Delude untuk Perempuan" bahwa Kerjasama Nairobi berupaya mencari penyelesaian untuk mengorganisasi kegiatan-kegiatan perempuan seperti "Delude untuk Perempuan". Kerjasama lainnya berfokus mengorganisir strategi yang menjadi Mawani masa depan perempuan hingga akhir abad ke-20 yang dikenal dengan istilah *The Nairobi Forward-Looking Strategy to the Year 2000 - NFS* yang berisi konsep dan *Problema adalah kesadaran seksual yang meliputi penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Hal yang sama di depan hukum, hak untuk memilih dan*

kecapaian mendapatkan dana dari lembaga-lembaga donor untuk membiayai program-program penempatan Peluang ini dimudahkan oleh Yuumi untuk mengajukan dana ke lembaga donor. Karyuniati menuturkan:

Pada Konferensi Nasional kebijakan PBB untuk perempuan menjadi luas, sehingga banyak donor yang menyediakan dana untuk perempuan. Peristiwa ini mendorong pertumbuhan LSM-LSM perempuan atau LSM perempuan yang sudah ada, misalnya LP3ES membuat program penempatan. Saya senang karena Yuumi menjadi tidak lagi sendiri. Yuumi mencoba memanfaatkan peluang ini dengan mengajukan dana ke lembaga donor (Karyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003).¹²

Upaya Yuumi untuk mengambil peluang mendapatkan dana membuahkan hasil ketika *The Asia Foundation*, OXFAM dan NOVIB memberikan dana untuk membiayai aktivitas-aktivitas *income-generating*. *The Asia Foundation* memberikan dana bagi Yuumi untuk mengembangkan pengorganisasian buruh di Ungaran melalui kegiatan *Ujaha Bersama*, kursus

buruh, serta pemberitahan badan pemerintah di arena negara untuk memonitor dan mengimplementasikan konvensi. Kerja adalah ekonomi dan ketahanan perempuan dalam lingkungan perkotaan, partisipasi laki perempuan untuk memiliki rumah, mendapatkan kredit, pelatihan, investasi dan pendidikan sebagai bagian integral dari reformasi agraria dan privatisasi pertanian, keberdayaan perempuan dalam arena village pembangunan, promosi perempuan dalam arena pasar ketahanan di semua tahapan badan legislatif dan lembaga politik, pengabdian tingkat-tingkat untuk mempromosikan distribusi *mother-tooth* produktif dan kerjasama ketahanan perempuan, terutama dalam arena pasar ekonomi. Kerja adalah pengabdian atau pekerjaan perempuan yang tak terpisahkan yaitu pengabdian atau nilai pekerjaan perempuan yang tidak terpisahkan di dalam dan di luar rumah, memisahkan pekerjaan perempuan yang terpisahkan dan tidak terpisahkan antara status ekonomi nasional, tanggung jawab bernilai di luar pekerjaan rumah tangga, pemberdayaan para pebisnis untuk mengatasi beban kerja menggugah jiwa perempuan dalam pemberdayaan anak dan rumah tangga serta perempuan jawa kerja yang dikelompokkan untuk mengatasi perempuan tanggung jawab pemeliharaan anak dan pekerjaan domestik bagi ibu-ibu dan perempuan. Kerjasama ketahanan dalam pekerjaan apakah untuk perempuan yang cukup berprestasi yang sama dalam pekerjaan dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.

¹² Karyuniati menceritakan pengalamannya bahwa ia belajar membuat proposal ke berbagai lembaga donor dan dari semua semuanya di LP3ES atau siapa pun yang bersedia mengajukan proposal. Ia sangat-sangat acuh acunya di sela-sela membuat dan mengirim surat yang sama mengajarnya, termasuk membuat lembar *age* Ad Sarwa yang. Ada banyak lembaga yang menawarkan Karyuniati kepada orang-orang dari lembaga donor (Karyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003).

menjahit, usaha makanan kecil dan usaha koperasi konsumsi serta berbagai macam pelatihan, antara lain latihan kepemimpinan, latihan pembukuan subjek rumah, latihan pembukuan koperasi konsumsi/pemukiran serta latihan pengelolaan usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan buruh perempuan (Laporan Yayasan kepada *The Asia Foundation*, Tanpa Tahun)

OXFAM memberikan dukungan dana untuk mengembangkan kegiatan menjahit di Kukinprogo dengan memberikan mesin jahit dan modal produksi. Kusyuniati menceritakan ketika itu mereka kekurangan mesin jahit untuk menjalankan usaha kerajinan sehingga mengajukan bantuan kepada Oxfam

Mesin jahit saya dapatkan Oxfam itu. Mesin jahit butuh lima hanya ada dua, yang lagi saya ke Dafun sama modal produksi, kain (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Dukungan dana yang terbesar diberikan oleh NOVIB. Lembaga donor ini memberikan dana untuk kebutuhan administrasi kantor, termasuk menggaji staf dan membayar hampir keseluruhan program-program Yayasan di lapangan. Peran NOVIB sangat besar dalam membesarkan Yayasan sehingga menjadi lembaga yang mapan. Salah satu program lapangan yang didanai oleh NOVIB adalah Latihan Dasar Kelompok Wanita (LDKW) yang dilakukan Yayasan untuk kelompok-kelompok perempuan maupun organisasi-organisasi yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan perempuan. LDKW bertujuan memberi bekal pada kaum perempuan agar mereka mampu mengelola dan menjalankan Usaha Bersama simpan pinjam (Laporan Latihan Dasar Kelompok Wanita di Seling Kelorejo Kukinprogo, 18-23 Juli 1989)

Dana dari lembaga-lembaga donor memberi manfaat bagi perkembangan organisasi Yasanti baik secara administratif kelembagaan maupun dalam memperbaiki pelaksanaan kegiatan di lapangan Nourdjannah mengemukakan

"Dari NOVIB itu kita mulai pemberdayaan kantor, pemberdayaan SDM-nya bagaimana dilatih berorganisasi, *work power system*. Dari situ ada pembagian kerja. Di awal-awal itu dengan NOVIB bagaimana memintakan kita ya lebih ke situ Kita kemudian profesional Meraka yang bekerja ya memang dapat kompetensi dan melakukan program" (Wawancara, 21 Maret 2003)

Keberadaan dana yang diperoleh dari lembaga donor memungkinkan Yasanti dapat mengundang konsultan untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan di lapangan sehingga program-program yang dilakukan Yasanti menjadi lebih terstruktur

Setelah dapat dana kita bisa mengundang konsultan agar Yasanti berkembang menjadi institusi yang bukan kaki lima. Sebelumnya menjemennya sederhana. Setelah ada dana kita ada aturan, ada kontrak kerja, kemudian juga surat keluar masuk, laporan keuangan dan bagaimana akuntabilitas harus dibangun. Itu kami perlu mengundang konsultan. Kita juga perlu konsultan teknis. Ada yang ahli manajemen, ahli koperasi, orang yang bisa audit, ahli pertunahan, jadi banyak yang kita undang (Kusyonirih, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Pengaruh nyata kompetensi Nairobi bagi perkembangan gerakan Yasanti juga terlihat pada pengembangan kerjasama jaringan, yaitu terbentuknya jalinan kerjasama antara Yasanti dengan LKBHuWK (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga) dalam memberikan bantuan hukum bagi buruh perempuan datarajangan Yasanti. Kuanyuniaru kembali menuturkan

Hasil Nairobi itu mempengaruhi donor, antara lain *World Commission* Kebijakan (hasil konferensi Nairobi) ini terhubung dengan aktivitas Yayasan Ibu dan Lew Lembaga semacam LKBB-HuWIK mendapatkan angin. Nah kamu perlu dengan Lew untuk buruh berjasama dengan LKBB-HuWIK, bantuan hukum untuk buruh (Wawancara, 12 Juni 2013)

Hasil-hasil yang dicapai dalam konferensi Nairobi juga membuka kesempatan pada Yayasan untuk memperkuat jaringan kerjasama antar organisasi perempuan di wilayah regional Asia Pasifik sebagai anggota pertemuan *Asia Pacific Forum on Women, Law and Development* (APWLD). Yayasan meskipun hasil-hasil Konferensi Nairobi dengan melakukan tugas pengkajian dan informasi tentang perundangan perempuan di Asia

Kita menyelenggarakan seminar tingkat Asia Pasifik untuk Konferensi Nairobi itu. Kita diskusi tentang akar penyebab perundangan perempuan di Asia dan sepakat tukar informasi dan pengalaman (Kusyuniati, Wawancara tanggal 27 Januari 2015)

11.2. Pergeseran Yayasan ke Pendekatan GAD

Pergeseran kecenderungan pergerakan perempuan di dunia pada dekade 1990-an menggunakan pendekatan GAD menggantikan WLD membawa implikasi bagi Yayasan. Pengaruh ini terlihat pada agenda penyadaran kesadaran gender yang dilakukan Yayasan untuk kelompok-kelompok dampungan secara terstruktur dan terorganisir (tidak lagi diselubungi) dan keterlibatan Yayasan dalam kampanye-kampanye kesadaran gender yang dilakukan melalui forum-forum jaringan (Yasaris, 1998: 117)

Kusyuniati mengemukakan bahwa masuknya pendekatan GAD telah membuka kesadarannya bahwa semua kemandirian ekonomi akan dikugi

dengan kesetaraan dalam pengambilan keputusan merupakan suatu kekeliruan. Kesetaraan ekonomi tidak menjamin perempuan akan diperlakukan secara adil, sehingga Yasuni mengubah orientasi programnya.

Tahun 1990-an ada kesadaran gender, bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya diperlakukan adil dalam segala hal. Itu menyadarkan bahwa kemerdekaan ekonomi tidak diikuti dengan kemerdekaan pengambilan keputusan. Ya kita harus mengubah sistem ini. (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Pengimplementasian wacana kesetaraan gender ke dalam program aksi di level grassroots tidaklah mudah. Karena itulah Kusyuniati meyakini bahwa Yasuni sering terlambat dalam merespon perkembangan wacana global.

Aksi mudah merubah sistem karena kita bicara dalam program yang sudah, kebijakan. Nah sehingga selalu kita ini terlambat. Antara wacana dan aksi itu ada gap. Demikian saja sudah diaplikasikan. Hanya kalau di bawah lebih mudah. Ketika pendekatan UJG tidak diikuti dengan kekritisan butuh agak bisa lebih cepat diimplementasikan perubahannya. (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

6.2.1 Peluang Dana dari Lembaga Donor

Lembaga donor memiliki peran penting dalam membawa wacana wacana kesetaraan gender ke Yasuni melalui pejabat-pejabat yang diselenggarakan lembaga donor dalam rangka sosialisasi program kesetaraan gender. Kusyuniati menuturkan

Kita mengenal wacana gender dari perguruan dan awang dari donor. Pertama-tama ada donor awang awang mengenai gender gitu. Orang awang. Kita jadi tahu. Dari donor ini kemudian diterjemahkan ke masyarakat. (Kusyuniati, Wawancara tanggal 12 Juni 2003)

Pemahaman wawasan kesetaraan gender dipendalam melalui keikutsertaan para aktivis Yasanti dalam berbagai kompetensi dan pelatihan gender. Moordjanah mengemukakan bahwa ketika wawasan gender mengemuka pada tahun 1990-an para aktivis Yasanti sering mengikuti kompetensi dan pelatihan gender. Hasil-hasil yang diperoleh setelah mengikuti kompetensi atau pelatihan gender selanjutnya dimulankan kepada sesama aktivis Yasanti, sehingga memengaruhi dalam pemahaman mereka tentang kesetaraan gender.

Dalam merespon wawasan gender pada tahun 1990-an kami senantiasa melakukan sharing setiap kali selesai mengikuti kompetensi atau pelatihan yang berkaitan dengan gender. (Moordjanah, Wawancara tanggal 21 Maret 2002)

Sosialisasi pendakwaan GAD oleh lembaga donor diikuti dengan peluang mendapatkan dana untuk membiayai program-program sosialisasi kesetaraan gender. Keberadaan dana dan lembaga donor, mengikuti kecenderungan dunia yang sedang mengarah pada wawasan (*gender and Development*) dilihat oleh Yasanti sebagai peluang untuk melakukan program penyadaran kesetaraan gender secara terprogram. Kusyuniati menjelaskan

Gender and Development itu *two track*, kemudian ada dana (*donor funding*) kenapa enggak diambil. Pertama-tama kamu masih hibah, kamu-luna memang omdan. Tapi Yasanti enggak perlu dicunai *money* kami sudah ngudakor kok. (Wawancara, 23 Januari 2005)

Pemahaman Kusyuniati tersebut menarik untuk disandingkan dengan penikatan kemandirian Yasanti sebagai potret gerakan perempuan sebagaimana akan dibahas lebih mendalam pada bagian analisis gerakan

Yasanti dan refleksi kritis gerakan perempuan Indonesia. Meskipun Kusyuniati menyatakan bahwa Yasanti tidak mendapatkan tekanan dari lembaga donor untuk mengarahkan program-programnya pada sosialisasi kesetaraan gender secara eksplisit, namun pertimbangan Yasanti untuk melakukan sosialisasi kesetaraan gender karena lembaga donor sedang menaruh minat pada program-program semacam itu membuktikan bahwa Yasanti, disamping memanfaatkan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan dana, secara tidak langsung terpengaruh oleh "tantangan" dari lembaga donor.

Peran lembaga donor dalam mendukung kampanye kesetaraan gender terlihat dari dana untuk melakukan program-program sosialisasi kesetaraan gender bagi buruh dan pelatihan gender bagi aktivis Yasanti. Pelatihan itu bertujuan agar mereka mampu mengembangkan wawasan dan pemahaman tentang gender, meningkatkan kesadaran gender, mengimplementasikan kesadaran gender dalam kehidupan sehari-hari dan memersonalisasi kesadaran gender ke dalam kelompok dampungannya. Arti penting dana dari lembaga donor dalam mendukung kampanye kesetaraan gender juga terlihat dari dukungan dana dan *Forum Framework* bagi Yasanti sejak tahun 1996 untuk membiayai penerbitan tabloid *Annusa* sebagai media pendidikan kesetaraan gender yang didaraskan untuk khalayak umum.

2.2.2. Dan Agenda Terselubung ke Agenda Terbuka

Pergeseran wacana global dan pendekatan WED ke GAD membuka kesempatan bagi Yayasan untuk melakukan kampanye kesetaraan gender dalam bentuk sosialisasi dan penyadaran kesetaraan gender secara eksplisit dan terprogram bagi kelompok-kelompok dampingan melalui kegiatan pelatihan gender. Kegiatan ini merupakan bentuk baru kegiatan penyadaran hak-hak perempuan yang semula dilakukan sebagai agenda terselubung di balik kegiatan kursus onejaha. Meskipun demikian menurut Amin Muftiyannah akibat keterbatasan waktu pelaksanaan pelatihan gender sulit diimplementasikan di lapangan.

Ada yang membuat modul, tapi implementasinya susah. Kita ngomong gender mungkin sampai berhari-hari. Kita ada keterbatasan waktu. Misalnya kita maksimal pelatihan harus tiga hari sementara dalam tiga hari itu harus mencakup banyak hal, tidak hanya gender ahnik. Kita lebih membahas bagaimana persoalan tenaga kerja dampaknya ke persoalan gender. (Amin Muftiyannah, Wawancara tanggal 11 Mei 2014)

Keberadaan tabloid *Atma* memungkinkan Yayasan melakukan kampanye kesetaraan gender secara terus-menerus dan eksplisit, tidak saja kepada buruh dampungannya tetapi juga kepada khalayak umum. Pada halaman paling belakang tabloid *Atma* edisi 4 tahun 1997 Yayasan menyalip isi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan yang telah disahkan dalam UUD RI No. 7 tahun 1994 dengan huruf yang agak besar: "*Perempuan dan laki-laki memiliki persamaan kesempatan dan perlakuan dalam kerja dan pekerjaan*".

Kompleksitas bentuk dampingan Yasanti yang tidak saja terdiri dari buruh perempuan, namun juga buruh laki-laki (di Unwan dan Sukoharjo) menyebabkan Yasanti harus menggunakan strategi dalam melakukan penyadaran kesetaraan gender. Proses penyadaran kesetaraan gender tidak hanya dilakukan dalam pelatihan gender, namun juga dilakukan pada saat percakapan sehari-hari dengan anggota kelompok dampingan. Oleh karena peserta diskusi perburuhan, terutama di Sukoharjo didominasi oleh buruh laki-laki, maka Yasanti melakukan penyadaran kesetaraan gender pada setiap kali kesempatan pertemuan buruh dengan menunjukkan nyata kesetaraan pembagian peran laki-laki dan perempuan yang mereka alami Amin Muhiyannah menuturkan

Pada acara pertemuan buruh saya sering melecehkan pertanyaan kenapa yang jawab harus perempuan. Saya mendiskusikannya dengan buruh yang mayoritas laki-laki untuk membuka kesadaran mereka (Wirwanora, 11 Mei 2004)

Strategi serupa dilakukan Nadroh Asuarinoh ketika mengangkas isu kesetaraan gender dalam komunitas buruh karena dianggap lebih tepat dibandingkan menggunakan teori-teori gender yang tidak dipahami oleh buruh

Di tingkat buruh penyadaran gender kita coba sederhanakan. Caranya dengan berdiskusi. Saya angkat persoalan sehari-hari seperti gender. Penyadaran gender saya bukan contoh suami-kamu kalau pagi siapa? Sama-sama buruh kalau pagi apa yang dilakukan suami dan apa yang dilakukan istri itu beda. Nah di situ sudah tidak adil. Nah, kalau dari realitas yang mereka alami itu kan mereka paham. Suami harus diajak bersama-sama siapa, siapa, ya pembagian. Sedertara saya seperti itu. Kalau pakai teori waktu mereka akan mundur (Nadroh Asuarinoh, Wawancara tanggal 10 Juni 2003)

Sebagai implikasi dan penyebaran wacana GAD, materi Latihan Dasar Kepemimpinan Wanita (LDKW) yang secara rutin dilakukan Yassemi pun mengalami perubahan. Pada masa ketika wacana keperempuanan masih didominasi oleh pendekatan WID, materi LDKW hanya menekankan aspek-aspek kepemimpinan bagi perempuan, terutama untuk mengorganisi dan mengelola Usaha Bersama. Ketika pendekatan GAD menggeser WID, Yassemi menyesuaikan diri dengan perubahan wacana global dengan menambahkan materi gender dan analisis sosial dalam rangkaian materi LDKW untuk membuka kesadaran tentang kesetaraan gender (Laporan Divisi Aksi dan Advokasi, 1996).

Penyadaran kesetaraan gender juga dilakukan melalui media *Swara* yang khusus dicembirkan dan didedahkan untuk kalangan buruh. Pada setiap edisi penerbitan *Swara* Yassemi senantiasa menyisipkan materi kesetaraan gender yang disajikan dalam bentuk cerita pendek untuk menarik perhatian buruh. Pada *Swara* edisi IV/1998 Yassemi menyajikan percakapan dari dua orang perempuan yang mengisahkan beban berat seorang perempuan karena harus menanggung semua keperluan rumah tangga sementara suaminya justru tidur dan tidak mau membantu istrinya. Berikut kutipan cerita tersebut:

"Sumi, ada apa to, kok anakmu nangis terus-sekali?" tanya Narmi
 "Ini lo ya, si Rumi emng nyalak semenege aku belum masak" jawab Sumi
 "Taman mana kok nggak kelihatan?" tanya Narmi
 "Masih tidur, yu!"
 "Apa masih tidur? Hari sudah hampir siang begini masih tidur, apa dia nggak kerja? Lagian apa dia juga nggak denger kalau anaknya nangis seperti itu?" Narmi nampak jengkel.

"Bisaunya juga begitu kok. Kang Yurnan nggak pernah mau membantu aku lagiin merutuku yang semuanya masak, beres-beres rumah, mengurus anak itu kan pekerjaan perempuan" terang Sumi

"Ya nggak begitu Sumi! Memasak, beres-beres rumah, mengurus anak itu semua pekerjaan bersama, diberjalkan oleh suami isen. Namanya saja sudah berkeluarga, jadi pekerjaan rumah itu harus diselesaikan bersama. Tak adil dong kalau kamu bangun pagi terus menyelesaikan semua pekerjaan rumah dan mengurus anak sementara suaminya bangun tidur semua sudah beres lalu tinggal makan. Wah bisa bobrok badannya! Kalau menurutmu laki-laki itu tugasnya hanya mencari nafkah tanpa mau mengerjakan pekerjaan rumah itu salah sekali!" jelas Nurni (Swasti, 14/1998)

Paula Siman edisi 1996 Yasanti mengungkapkan topik "lelaki juga wajib memomong anak" untuk melakukan penyadaran gender bagi buruh laki-laki karena sebagian anggota kelompok dampingan Yasanti adalah buruh laki-laki. Dua orang buruh laki-laki, yaitu Paulul dan Mas Tara menjadi tokoh cerita

- Paulul "Kasihlah pak Kasan itu, movent laki-laki kok disuruh memomong anak"
- Mas Tara "Kok kasihlah emangnya kenapa?"
- Paulul "Maksudnya itu kan pekerjaan perempuan, movent pak Kasan yang jelas laki-laki kok disuruh memomong anak. Lalu apa artinya juga nggak mau suaminya movent menggendong anak seperti itu. Nek ada ya isni!"
- Mas Tara "Kalau toplesnya suami istri punya anak yang karep ngopu to? Kok yo kedun-duanya? Iha kalau begitu yang movent bertanggung jawab memelihara anak itu ya kedua-duanya"
- Paulul "Oho isoi! Yang namanya menggendong, menyusui, memomong itu kodrat wanita!"
- Mas Tara "Kamu ngerti terus pe kodrat wanita itu apa? Kodrat wanita itu menggendong dan menyusui, karena hal itu tidak mungkin dilakukain oleh laki-laki. Nah kalau memomong itu bukan kodrat wanita, tapi tanggung jawab orang tua, ya bapak dan ibunya. Jadi memomong itu pekerjaan laki-laki dan perempuan." (Swasti 1996: 6-7)

Sosialisasi kesetaraan gender bagi buruh dilakui oleh Amin Muftiyannah merupakan pekerjaan sulit, karena buruh masih menganggap permasalahan

gender adalah masalah perempuan. Mayoritas buruh yang mengikuti pertemuan diskusi adalah laki-laki, sehingga bias gender sangat terlihat

Di lapangan kesadaran buruh perempuan masih sangat minimal. Rata-rata buruh perempuan berusia produktif, punya anak satu atau dua atau baru mau mengandung. Itu menjadikan mereka hanya punya waktu sebentar. Kalau laki-laki meskipun di rumah ada anak nggak pengaruh. Buruh perempuan senang nggak tega meninggalkan anak untuk diskusi. Kalau yang sadar dia akan menaruh anaknya ditany ke diskusi, tapi kalau nggak anggap nggak yang akan anak kritik. Sampai sekarang kalau diskusi atau mengadakan kegiatan laki-laki dan perempuan *gigit-gigit* itu susah sekali. Ada saja alasannya. Akhirnya persoalan-persolan perempuan menjadi bias, nggak muncul di situ. (Amin Muftiyannah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Amin Muftiyannah mengemukakan bahwa buruh laki-laki masih enggan jika istrinya dipersalahkan hal-hal dengan dirinya, seperti yang pernah terjadi dalam kasus pengastanrumahan hutik milik perusahaan buruh¹⁷ kepada buruh perempuan.

Pernah dalam kasus perumahan ada buruh laki-laki ngomongin rumah, aku anak ngomongin rumah. Itu rumah aku mau ambil, aku comot. Iya yang ngomongin rumah, sebabe anak rumah ngomongin (Mbak, saya nggak mau menganggur/membayar cicilan rumah. Salahnya sendiri kenapa dianggur/makan ikan saya, saya nggak mau). Meskipun kita sudah mendiskusikan persoalan hutik, persoalan budaya tapi di lapangan seperti itu. (Amin Muftiyannah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004).

Meskipun diskusi kesetaraan gender sudah berkali-kali dilakukan. Yasanti masih menemukan kesulitan dalam membuka kesadaran gender, terlebih lagi buruh yang menjadi anggota kelompok dampingan Yasanti juga berganti-ganti orang. Amin Muftiyannah kembali menuturkan

¹⁷ Yasanti memiliki proyek perumahan untuk buruh di Lapangan. Syarat yang diberlakukan Yasanti adalah bahwa hutik untuk perumahan harus di utangkan buruh perempuan atau laki-laki buruh laki-laki.

Saya tidak tahu apa artinya yang belum pas atau penyampaiannya belum pas. Ya ketika itu disampaikan dia lewat (paham), tapi ketika kita review lagi dia (buruh perempuan) nyebutin kayak aku kerja banya mbayar suami. Nah itu kadang-kadang muncul. Kita harus mengulanginya terus-menerus. Ya kita sadar karena ini tidak sewarna di keluarga mereka di pengajian yang sering ada semacam bias gender, lingkungan yang bias gender. Misalnya di ngomongin wab di agama saya ngikut boleh berara sama suami saya. Saya kemana-mana harus izin. Yang namanya kepala keluarga itu ya suami. Hal-hal kayak gitu yang muncul di lapangan (Wawancara 11 Mei 2004)

Kesulitan Yasanti untuk meवादarkan buruh perempuan itu dikarenakan buruh perempuan sendiri tidak menyadari bahwa dia mengalami pelecehan seksual. Perlakuan yang dialami buruh perempuan sehari-hari seperti misalnya dicolak-colek, ketika berdesak-desakan di kendaraan atau di pabrik adalah hal yang mereka anggap biasa (Annisa, 1997)

B.2.3 Mobilisasi Jaringan Aktiva

Untuk melakukan sosialisasi penyadaran kesetaraan gender bagi kelompok dampingan Yasanti menggalang dukungan dari para aktiva perempuan. Yasanti pernah mengundang para aktiva perempuan untuk bersama-sama menyusun buku panduan pelatihan gender. Buku ini telah berulang kali digunakan Yasanti dalam pelatihan-pelatihan gender untuk para buruh dampingan. Yasanti tidak jarang juga mengundang para aktiva perempuan dari lembaga atau ormas lain untuk mengisi acara pertemuan buruh dengan poster-pesan penyadaran kesetaraan gender.

Forum jaringan antar ormas juga dimanfaatkan oleh Yasanti sebagai media untuk melakukan kampanye kesetaraan gender secara lebih luas bagi

keluarga masyarakat umum dan mempengaruhi lembaga pemerintah. Jaringan yang diikuti Yessami untuk mengkampanyekan kesetaraan gender beragam, dari tingkat lokal DIY hingga regional Asia Pasifik (Lihat tabel 4.2.). Di tingkat lokal isu tentang kesetaraan gender pernah dikampanyekan Yessami bersama omop-omop bina yang terhimpun dalam Forum LSM DIY. Aksi ini dibuktikan sebagai bentuk dukungan atas basil-hasil yang dicapai Konferensi Perempuan Sedunia Keempat di Beijing tahun 1995. Aksi diindikasikan dengan pembentukan Komite anti kekerasan terhadap perempuan yang merupakan tim yang bekerja bersama-sama menentang kekerasan terhadap perempuan, terutama pelecehan seksual terhadap perempuan. Tim ini melakukan sosialisasi masalah pelecehan perempuan di pusat pertokoan Maliboro, membuat artikel di surat kabar, siaran pers dan diskusi tentang pelecehan seksual (Laporan Yessami Tahun 1996: 24, 37).

Tabel 4.2

Jaringan Yessami untuk Kampanye Kesetaraan Gender

Nama Jaringan	Level	Aktivitas
GAATW (Global Alliance against Trafficking of Women)	Regional Asia	Kampanye pencegahan perdagangan perempuan
GAATWAP (Coalition against Trafficking of Women Asia-Pacific)	Regional Asia Pasifik	Kampanye menentang perdagangan perempuan dan prostitusi
GIKATPI (Gerakan Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia)	Nasional	Kampanye anti kekerasan terhadap perempuan
Forum LSM DIY	Local DIY	Kampanye kesetaraan gender
KAMP (Komite Anti Kekerasan terhadap Perempuan)	Local DIY	Kampanye anti pelecehan seksual

Sumber: Ditulis dan data penelitian

SEFY dengan dukungan OXFAM dan Bisnis Indonesia yang bergabung menjadi satu tim untuk menanggapi isu kekerasan terhadap perempuan.¹² Mereka melambungkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan melalui media informasi kartu pos, poster, karikatur, kalender, stiker dan brosur dan mengadakan kampanye bersama dengan menggunakan momentum Hari Ibu untuk mendorong para penulis membuat artikel tentang kekerasan terhadap perempuan, serta mengajak PKK, Dharma Wanita serta organisasi perempuani yang lain untuk mengkampanyekan masalah kekerasan terhadap perempuan (Laporan Perjalanan Sud Yastono, 1996)

¹² Lunjolo itu terbentuk dari forum perempuan gerakan perempuan Indonesia sejak 20 November 1996. Forumnya ini menyepakati untuk membuat rencana aksi dengan prioritas tiga isu besar, yaitu (1) masalah ras, bangsa, etnik, dan suku bangsa gerakan perempuan Indonesia, (2) isu hak asal perempuan, (3) isu kekerasan terhadap perempuan. Tujuan kekerasan terhadap perempuan menggunakan acuan kebijakan Komporasi Perempuan Selatan Korea di Beijing Cina tahun 1993. Mengingat komporasi para perempu ini melibatkan perempuan pribuditas di berbagai negara untuk menyuarakan isu-isu yang akan dibahas ke dalam forum komporasi. Indonesia dianggap sebagai salah satu negara bagian perempat. Laporan Beijing di tingkat memeri-memeri arena perempuan Asia Asia Pacific pada bulan Juni 1993. Kemudian di berbagai grup perempuan di Indonesia (Wahana Yastono) mengorganisasikan pertemuan perempuan secara di Jakarta tanggal 4-7 Juli 1996. Pertemuan antar grup perempuan dilakukan bersama ada keterwakilan mereka untuk akan diundang dalam pertemuan formal tingkat menteri karena komporasi besar hanya organisasi-organisasi perempuan yang berdiskusi dengan pemerintah saja yang diundang. Sebanyak 10 kelompok grup perempuan tidak memiliki akses untuk hadir. Selain untuk mendiskusikan grup perempuan agar dapat memanfaatkan pertemuan internasional semacam ini, pertemuan juga bertujuan untuk revitalisasikan gerakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW) dan ratifikasi PBB dalam mengimplementasikan dan memastikan implementasi konvensi tersebut di tingkat-tingkat negara yang telah meratifikasi konvensi, mengidentifikasi secara independen peluang, pengetahuan dan pembaruan grup perempuan dalam berbagai aktivitas vitalitas perempuan di berbagai, dan mengungkap bagaimana grup perempuan untuk mengatasi kompleksitas perempuan kekerasan di Beijing Komporasi Beijing dilahirkan oleh sekitar 40 tba perempuan dan aktivis-aktivis masyarakat 3 isu besar, yaitu *active to equality, action to development dan action to power*. Secara rinci komporasi membahaskan 12 pokok persoalan, yaitu: (1) hak perempuan, (2) perempuan dan pendidikan, (3) perempuan dan kesehatan, (4) kekerasan terhadap perempuan, (5) perempuan dan kualitas, (6) perempuan dan media, (7) perempuan dan lingkungan, (8) hak, etnik, dan ras, (9) perempuan, kekerasan dan penghapusan kekerasan, (10) perempuan dan konflik, (11) perempuan dan konflik bersenjata dan (12) rencana untuk menggalakan partisipasi dan partisipasi perempuan. Keabsahan politik perempuan ini dirumuskan ke dalam Deklarasi Beijing dan *Beijing Platform for Action* (BPA) yang menjadi dokumen penting Komporasi Beijing.

Tidak semua isu yang diangkat oleh jaringan secara langsung berkait dengan isu buruh perempuan yang diangkat Yasanti. Dalam kasus semacam itu maka peran yang dimainkan oleh Yasanti adalah peran pendukung.

Kegiatan-kegiatan jaringan misalnya kekerasan terhadap anak dan kekerasan terhadap perempuan Yasanti kan nggar langsung melakukan itu. Nah ketika ada lembaga lain yang melakukan kita mendukung. Jadi ini kegiatan bersama, bagaimana melibatkan lembaga lain untuk ikut terlibat. Jadi advokasinya berupa *statement* bersama (Amin Muftiyarah, Wawancara tanggal 18 Februari 2003)

Amin memantapkan rencana implikasi Konferensi Beijing bagi agenda kegiatan Yasanti di lapangan. Meskipun hasil Deklarasi Beijing tidak secara langsung berpengaruh bagi Yasanti, namun harus dijadikan acuan bagi program Yasanti di lapangan.

Hasil-hasil Konferensi Beijing memang tidak secara *direct* kita bicarakan tapi mungkin 12 atau lebih itu menjadi perhatian. Kita masuk dimana? Karena itu kan punya *concern* masing-masing. Ini menjadi perhatian pengurus bahwa ketika kita melakukan ini ada rupakannya. Paling tidak kita melihat dari sisi ekonominya. Persoalan ekonomi memang jangka pendek. Tapi jangka panjang bagaimana buruh bisa kuat itu memerlukan proses yang lama (Amin Muftiyarah, Wawancara tanggal 18 Februari 2003)

Arti penting mendukung kegiatan jaringan meskipun tidak secara langsung berkait dengan konsensasi Yasanti dibuktikan oleh Yasanti ketika memunculkan untuk bergabung dengan *Global Alliance Against Traffic in Women* (GATAW) yang merupakan jaringan untuk menentang perdagangan

perempuan.¹⁴ Menurut Yasanti semakin banyaknya persoalan perempuan yang saling berkait satu sama lain semakin menantang hari untuk berbuat sesuatu. Meskipun Yasanti tidak memfokuskan perhatian pada masalah perdagangan perempuan, namun Yasanti menyadari bahwa para pekerja perempuan dampaknya Yasanti sampai senjat terhadap praktik perdagangan perempuan. Karena itu Yasanti mendirikan GAAAW sebagai jaringan yang mempunyai kepedulian untuk turut memperjuangkan nasib perempuan di luar negeri (Laporan Training HAAW, 1996).

Meskipun isu yang ditangani jaringan tidak selalu secara langsung memiliki keterkaitan atau relevansi dengan isu yang ditangani Yasanti, namun pertemuan-pertemuan jaringan, terutama yang ditangani di luar negeri dirasa sangat penting bagi Yasanti karena dapat membuka pintu untuk melakukan jaringan regional dan internasional. Hal ini menjadi akses agar Yasanti dapat mengambil kesempatan yang ada di dunia internasional dalam melakukan pengembalian lembaga. Jaringan juga dirasa penting untuk pengayaan informasi dan teman seperjuangan yang diharapkan dapat memberikan dukungan terutama dalam langkah-langkah advokasi Yasanti (Laporan HAAW Pendidikan dan Latihan 1996: 35).

¹⁴ Yasanti ikut menghadiri pelatihan tentang HAAW dan perdagangan perempuan yang diselenggarakan Global Women Against Trafficking in Human (GAAW) di Bangkok pada bulan Juli 1996. Yasanti adalah satu-satunya peserta dari Indonesia. Peserta lain berasal dari Filipina, Vietnam, Laos, Kamboja, India, Bangladesh, Polandia dan Rumania. Lihat Laporan Training Hak Asasi Perempuan dan Laporan GAAW Pendidikan dan Latihan 1996: Hal 34.

13.3 Perhatian Yayasan pada Isu Kesehatan Reproduksi

Isu global tentang kesehatan reproduksi yang mengemuka bersamaan waktu dengan penemuan wacana GAD juga memiliki pengaruh kepada Yayasan, sehingga menaruh perhatian pada persoalan kesehatan reproduksi isu internasional tersebut direspon oleh Yayasan dengan melakukan kampanye kesehatan reproduksi untuk kelompok-kelompok dampungan. Khusus bagi kaum perempuan di Ungaran Yayasan mendirikan kampanye kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kampanye kesehatan dan keselamatan kerja untuk kaum. Agenda kampanye kesehatan reproduksi ini sekali lagi membuktikan pengaruh wacana global bagi gerakan Yayasan liberal dimana agenda gerakan Yayasan pada tabel 4.3 :

Tabel 4.3
Pengaruh Wacana Global
Bagi Agenda Gerakan Yayasan

WACANA GLOBAL	WAKTU	AGENDA PRAKSI	MISI GERAKAN	PENYAMPAILAN MISI	MEDIA
WID	1900-an	Kurasi keterampilan (manajeri)	Pemertanian, teknik teknik dan perempuan	berselubung	PRK, kelompok perempuan
GAD	Sejak 1990-an	Sosialisasi kesadaran gender kampanye kesadaran gender	Relasi gender yang adil	terbuka	Kelompok perempuan dan laki-laki
Kesehatan reproduksi	Sejak 1990-an	Sosialisasi kampanye kesehatan reproduksi	Hak reproduksi yang sehat	terbuka	Kelompok perempuan dan laki-laki

Sumber: Dialeh dan data penelitian

Isu kesehatan reproduksi sebagai bagian dari kampanye kesehatan dan keselamatan kerja bagi buruh menjadi perhatian Yayasan karena di lapangan Yayasan melihat masalah kesehatan dan keselamatan kerja buruh perempuan masih sangat memprihatinkan. Di samping itu buruh perempuan kurang memiliki kesadaran akan arti penting kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja. Sementara organisasi yang mempechatakan persoalan tersebut, baik dalam pemecitan melakukan persuasasi maupun pembelaan hak kesehatan reproduksi dan keselamatan kerja bagi buruh masih sangat sedikit. (Laporan Yayasan 1995)

Amin Muftiyannah menambahkan alasan mengapa Yayasan menaruh minat pada isu kesehatan reproduksi dalam program pemberdayaan buruh perempuan

Tahun 1994 kan ada konferensi perempuan (tentang kependudukan) Reproduksi dibicarakan di situ dan hak reproduksi itu bagian dari perburuhan karena selama ini jarang tersemuh. Jalan perburuhan yang dibicarakan hanya upah, upah, upah. Bahkan dalam IIII masalah kesehatan reproduksi belum diperhatikan. Apalagi dipimpin Yayasan juga meliputi buruh gendong yang perlu mengemukakan kesehatan reproduksi Yayasan juga mendukung program itu dilakukan di manapun. Ternyata kesehatan reproduksi perlu dilindungi. Ada yang waktu hamil baru *bedrest* dan sebagainya. Hal-hal semacam itu nggak pernah *recover*. (Amin Muftiyannah, Wawancara tanggal 28 Juni 2009)

Untuk mengkampanyekan kesehatan reproduksi bagi buruh pabrik, Yayasan telah melakukan penelitian tentang persoalan-persoalan di perusahaan yang berdampak merugikan bagi kesehatan reproduksi seperti dituturkan oleh Amin Muftiyannah

Kita melakukan investigasi persoalan-persoalan yang ada di pabrik. Apa yang berdampak ke kesehatan reproduksi. Apa dan kenapa, kebersihan? Oh kamar mandi, apa yang bisa berdampak ke kesehatan reproduksi. Jadi ketika kita pelatihan kesehatan kan menyadarkan bahwa alat reproduksi itu harus bersih, tidak ada kuman. Tapi bagaimana dengan fasilitas yang ada di perusahaan. Misalkan orangnya ribuan kok kamar mandinya cuma berapa. Kita menaruh mereka agar menyadari dampak dan disabilitas kerja salah satunya kesehatan reproduksinya (Wawancara: 18 Februari 2003)

Sebagai bagian dari kampanye kesehatan reproduksi sejak tahun 1996

Survei yang diterbitkan oleh Yayasan secara rutin memuat rubrik tentang kesehatan reproduksi. Rubrik ini memuat informasi tentang sistem seksualitas, arti penting kesehatan reproduksi, pengetahuan tentang menstruasi, mitos-mitos tentang menstruasi, bahaya penggunaan obat-obatan pelancar haid, hal-hal yang harus dilakukan pada saat menstruasi serta petunjuk untuk menjaga alat reproduksi agar tetap sehat. Dalam Survei edisi XII tahun 1998, misalnya, Yayasan menegaskan arti penting kesehatan dan gizi perempuan pada masa reproduksi. Usaha untuk menciptakan keadaan gizi yang baik bagi perempuan pada masa reproduksi akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan status sosial perempuan. Namun untuk mencapai gizi yang baik bagi perempuan selama masa reproduksi dukungan-dukungan dari sisi hukum, ekonomi, sosial dan budaya sangat diperlukan.

3.1.1 Mobilisasi Dana

Lembaga donor memiliki peran penting dalam mendukung Yayasan melakukan program kesehatan reproduksi. Sebagaimana dikemukakan Anis Muftiyannah ketika hendak mengkampanyekan isu kesehatan reproduksi

Yasanti mengetahui bahwa *Fond Perempuan* menaruh minat pada isu itu, sehingga Yasanti mengajukan dana ke lembaga donor tersebut. Amin Muftiyannah menuturkan

Ketika ingin melakukan program kesehatan reproduksi *Fond Perempuan* memang punya program itu, jadi kita tawarkan ke sana. Salah satunya dalam rangkaian kesehatan keselamatan kerja. Kalau (formop) yang lain lain kesehatan reproduksi *tidak*. Kalau kita kesehatan dan keselamatan kerja salah satunya kesehatan reproduksi. Kebetulan ada rangkaian *workshop* untuk kesehatan reproduksi untuk petani nelayan, nah kita di perbuihan (Wawancara, 18 Februari 2021)

Salah satu dukungan *Fond Perempuan* diberikan pada Yasanti dalam bentuk dana untuk menyelenggarakan *workshop* tentang Perempuan dan Kesehatan Kerja pada tanggal 31 Juli - 4 Agustus 1995. *Fond Perempuan* juga memberikan dana bagi penerbitan huluas *Arusa* dan *Swara*, dua media cetak berbasis Yasanti yang menjadi media penyadaran kesetaraan gender dan kesehatan reproduksi.

Untuk memperdalamnya *workshop* Perempuan dan Kesehatan Kerja tersebut Yasanti mengajukan dana ke YLKI. Permohonan tersebut disetujui positif oleh YLKI, sehingga Yasanti berhasil menyelenggarakan *Jajian* kesehatan bagi buruh pabrik yang diikuti oleh para hulah pabrik dari DIY dan Jawa Tengah.

Dukungan dana untuk melakukan sosialisasi kesehatan reproduksi bagi buruh perempuan juga diberikan oleh *Comodo Fund* pada tahun 1995. Dana ini diperoleh Yasanti berkat hubungan baik antara Kusyurni dan Melody Kemp, seorang aktivis yang peduli pada isu kesehatan dan keselamatan kerja. Dana dari *Comodo Fund* digunakan untuk melakukan pelatihan kesehatan dan

kekeselamatan kerja buruh yang salah satu aspek di dalamnya adalah tentang kesehatan reproduksi, serta untuk menyusun buku panduan pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja (Laporan Yasanti, 1995).

B.3.2 Mobilisasi Jaringan

Kampanye kesehatan reproduksi dilakukan Yasanti dengan dukungan PKBI sebagai oragan yang memiliki konsentrasi kegiatan pada isu kesehatan reproduksi. Yasanti mengakui tidak memiliki sumberdaya yang memadai untuk melakukan kampanye kesehatan reproduksi sehingga bekerjasama dengan PKBI. Ansin kembali menuturkan

Kita kerjasama dengan PKBI. Kalau untuk kesehatan kita tidak mampu kalau kita sendiri yang mampu, jadi kita mengundang PKBI untuk membuat kampanye kesehatan reproduksi (Ansin Mulyahyuma, wawancara tanggal 18 Februari 2003).

Dengan bantuan PKBI secara rutin Yasanti mengadakan diskusi tentang kesehatan reproduksi untuk mengedukasikan arti penting, memelihara kesehatan reproduksi. Berbagai pengetahuan tentang alat-alat reproduksi perempuan, proses reproduksi, keputihan, siklus menstruasi, menopause, penyakit-penyakit yang bisa menyerang alat reproduksi dan cara-cara menjaga alat reproduksi dibagikan dan didiskusikan bersama kelompok dampingan Yasanti yang meliputi buruh Ungaran, buruh gendong dan remaja putri putus sekolah. Dalam diskusi para anggota kelompok dampingan Yasanti sangat antusias menanyakan masalah-masalah kesehatan reproduksi mereka yang

sebelumnya dianggap tabu) secara terbuka. (Laporan Aksi dan Advokasi 1995)

Di tingkat jaringan antar ormas buruh dan ormas perempuan Yasanti bergabung dengan sebuah jaringam yang beranggotakan wakil dari Yasanti, I.B.H. Laporan buruh Sibalek dan Rifka Annisa. Jaringan ini dibentuk untuk membahas isu kesehatan dan keselamatan kerja buruh, melakukan ulung dan advokasi tentang persoalan kesehatan dan keselamatan kerja buruh (Laporan Yasanti 1995)

Keragaman agenda gerakan Yasanti sebagaimana ditunjukkan dalam Bab IV yang mencerminkan dinamika gerakan Yasanti sejak 1982 hingga 1998 ini memperlihatkan pembingkauan kesempatan politik global oleh Yasanti (seperti dikemukakan oleh para aktivisnya ketika menjelaskan alasan-alasan yang mendorong Yasanti mengadopsi isu perempuan global sejak WII) ke C.I.A.D dan kesehatan reproduksi). Penyebaran isu perempuan global merupakan bentuk kesempatan politik bagi gerakan perempuan di level internasional karena berkaitan dengan peluang mendapatkan dana dari lembaga donor untuk mendukung kelangsungan gerakan

Pergeseran penyampaian misi gerakan dari agenda tertutup ke agenda terbuka membuktikan pengaruh kesempatan politik bagi mobilisasi gerakan. Ketika konteks rasional (dan lokal) tidak memberi peluang bagi Yasanti untuk menyampaikan kritik terhadap Orde Baru dan mengkampanyekan hak-hak perempuan secara terbuka, maka agenda-agenda tersebut disampaikan secara terselubung dengan menggunakan media PKK. Namun ketika konteks berubah

seiring dengan penyebaran wacana global kesetaraan gender (GAD), maka penyampaian agenda kesetaraan gender dilakukan secara terbuka dan langsung disampaikan lewat kelompok-kelompok kampanye. Bank laki-laki maupun perempuan, serta melalui media cetak yang secara rutin diterbitkan oleh Yasanti dan diedarkan untuk kelompok kampanye dan masyarakat luas



BAB V

PERGESERAN STRATEGI GERAKAN

Sejak awal dekade 1990-an Yayasan* mengubah strategi pergerakannya dari strategi ekonomi ke strategi politik. Hal ini akan meredeskripsikan konteks global dan nasional akhir 1980-an dan awal dekade 1990-an, bagaimana Yayasan* merespon kecenderungan global dan nasional pada kurun waktu ini, serta bagaimana Yayasan* menghadapi implikasi gerakan setelah mengubah strategi gerakan ke arah politik.

A. Pengantar Isu Hak Asasi Manusia

Sejak awal dekade 1990-an isu Hak Asasi Manusia (HAM) kembali menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat dunia. Perhatian dunia pada isu HAM tidak terlepas dari konteks global yang mendukung penyebaran warana HAM. Berakhirnya Perang Dingin antara negara-negara Barat, yaitu Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya dan negara-negara Sosialis yang diadopsi Uni Soviet membawa dampak meredunya persaingan ideologi dan kekuatan militer antara dua blok yang berseberangan. Meredunya ketegangan ideologi tersebut mendorong isu-isu global yang selama Perang Dingin terhambatkan, seperti demokratisasi, pemerintahan yang baik (*good governance*) dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi agenda* (Panshadningrat, 2004).

Perhatian dunia pada persoalan HAM ditunjukkan oleh PBB ketika pada tahun 1948 badan dunia tersebut menyelenggarakan Konferensi Internasional Hak Asasi Manusia di Wina Italia. Konferensi HAM menghasilkan kesepakatan dalam bentuk Deklarasi dan Program Aksi Wina. Kedua dokumen ini menepatkan komitmen semua negara di dunia agar menghormati dan melindungi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua umat manusia sebagaimana tercantum dalam Program PBB, instrumen-instrumen hak asasi manusia yang lain dan lembaga internasional. Konferensi Wina meniadakan perlunya kerjasama antara negara-negara di dunia dan organisasi-organisasi internasional serta organisasi-organisasi non-pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perlindungan hak asasi manusia dan menghapuskan semua bentuk pelanggaran HAM di level nasional, regional dan internasional.¹

Pada konferensi HAM di Wina tahun 1948 perbedaan persepsi tentang perlindungan HAM antara negara maju (Barat) dan negara berkembang berhasil diimbangi. Negara-negara Barat cenderung memandungi HAM sebagai hak individu yang harus ditegakkan, bagaimanapun kondisinya. Sebaliknya, negara-negara sedang berkembang berpendapat bagi nilai-nilai HAM yang terlalu individual akan dapat membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara (yang memerlukan kesabaran) untuk mendukung proses pembangunan. Upaya untuk mengakomodasikan perbedaan pandangan tentang HAM antara negara Barat dan negara berkembang tercermin dari hasil akhir Konferensi Wina yang tidak saja menekankan arti penting memajukan hak-hak politik, hak-hak sipil serta

¹ Lihat juga pertama Deklarasi dan Program Aksi Wina hnu 1 dan 17

hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan namun juga sekaligus hak untuk pembangunan (Pamuhadinmyrat, 2004)

Penguatan penyebaran isu HAM tidak terlepas dari peran omop-omop internasional (*international NGOs*). Omop-omop yang peduli dengan persoalan HAM, seperti *Amnesty International*, *Human Rights Watch*, dan *International NGO Forum on Indonesian Development* (INHOD) aktif menibayuh pringga internasional dan melakukan persuasi untuk menekan kekuasaan dan operasi negara. Tidak jarang tuntutan omop agar negara-negara otomatiskan menghormati HAM berbenturan dengan nilai-nilai HAM yang diaku oleh negara tersebut ketika omop-omop ini bersama-sama dengan gerakan-gerakan akar rumput menentang kekuasaan negara yang opresif atau ketika gerakan mereka mendapatkan dukungan internasional (Falk, 2000)

B. Kebangkitan Kelompok Operasi dan Isu HAM di Indonesia

Sejak akhir dekade 1980-an konteks politik Indonesia diwarnai oleh kebangkitan gerakan-gerakan untuk menentang Orde Baru yang dilakukan para aktivis mahasiswa, buruh, aktivis omop, kaum intelektual, jurnalis dan seniman. Kebangkitan gerakan-gerakan oposisi diupayakan oleh konteks politik nasional Indonesia yaitu terjadinya konflik antara Soeharto dengan kelompok militer. Konflik ini ditandai oleh beberapa peristiwa menarik. Pertama ABRI (PANGAB) Jendral L B Moerdani tiba-tiba diberhentikan dari jabatannya di tengah berlangsungnya Sidang Umum MPR tahun 1988 yang pada waktu itu sudah siap memilih kembali Soeharto sebagai presiden yang ke-5 kalinya

meluas ke persoalan demokratisasi dan HAM khususnya ancaman tercapainya goal pemerintah, kebebasan berpendapat dan berserikat, adanya kepastian hukum, serta kelancaran pembangunan. Mereka juga mengkritik kebijakan Soeharto yang menindas rakyat miskin, seperti yang dilakukan oleh kelompok studi mahasiswa yang dipimpin Bonur Tigor Napospos di Yogyakarta.³ Di Semarang, sekelompok mahasiswa menyindir Soeharto dengan mengadakan kalender berjudul "Tajah untuk Rakyat". Kalender bergambar Soeharto sedang duduk memunggungi penonton, sementara ibu Ties yang mengenakan bikini sedang mengayunkan golf seperti dianggap menghinai presiden sehingga akhirnya dilarang beredar.⁴

Kalangan buruh yang menyuarakan tuntutan HAM dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi buruh Cikelombang aksi pemogokan buruh di berbagai kota meningkat sejak akhir 1980-an. Aksi mogok terbesar terjadi pada bulan Agustus 1991 ketika 12.000 buruh melakukan aksi di sepanjang jalan kota Tangerang. Dalam rentang waktu 10 tahun (1987-1997) jumlah aksi mogok buruh dapat dilihat pada tabel berikut.

bertacar di seminar, 17 grup atau organisasi mahasiswa mengorganisir dan menyebarkan "Pembinaan Setiap Kekuasaan Mahasiswa ETB tentang Kelambatan Saingan Rakyat" kepada "Mendapat tahu mereka pergi Lebih lanjut Lihat Tempo, 9 September 1989, Hal. 12"

³ Bonur Tigor Napospos juga dituntut mengedarkan buku tentang Marxisme dan menyebarkan pamflet bertajuk "Lansia Proklamasi Ajaran Tora" sementara yang dianggap berlawanan Kan oleh Dede Banu. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 3 1/2 tahun dengan tuduhan pelanggaran subversi.

⁴ Napospos (1996: 12) dan Hak Asasi Manusia dan demokratisasi bukanlah salah satu isu dan yang berkembang pada tahun diperjuangkannya oleh gerakan mahasiswa sejak akhir 1980-an. Isu kedua berkaitan dengan persoalan kelas buruh yaitu mau membangun tanah, membangun hidup dan pemerintahan. Beberapa kasus tanah yang dianggap oleh gerakan mahasiswa antara lain adalah kasus Baroga, Cimacan, Kelung Cibe dan Gal Terbangpan.

Tabel 5.1.
Angka Kasus Pemogokan Buruh

Tahun	Jumlah Pemogokan	Tahun	Jumlah Pemogokan
1987	37	1993	185
1988	38	1994	298
1989	19	1995	276
1990	61	1996	350
1991	130	1997	161
1992	251		

Sumber: Sri Kusyandib, *Strikes in 1990-1996 an Evaluation of the Dynamics Indonesian Labour Movement*, Disertasi pada Swinburne University, 1998, Hal 1969-7 dan Depnaker, Desember 1997

Alasan buruh melakukan aksi pemogokan sangat beragam, mulai dari tuntutan ekonomi seperti kenaikan Upah Minimum Regional (UMR), upah lembur, pemberian Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), cuti hamil, cuti hamil dan cuti melahirkan. Inggia tuntutan kepentingan buruh seperti kenaikan upah, uang makan, uang transport, pengobatan, pakaian kerja, pengadran tempat ibadah dan Tunjangan Hari Raya (THR)

Sorotan atas pelanggaran HAM oleh Orde Baru juga datang dari kalangan urnop Pada Konferensi di Brussel tahun 1989 pimpinan INGI (sekutanya bernama CNFID) memalis surat kepada Bank Dunia mempermasalahkan kelalaian Bank Dunia dalam mengawasi program *revolusi* masyarakat yang bergusur dari Kedung Ombo. Rezim Orde Baru telah mengurbankan rakyat karena tidak memberikan ganti rugi yang memadai bagi warga Kedung Ombo yang rumahnya rusak. Bank Dunia kemudian mempertanyakan isu sruat tersebut kepada

pemerintah Indonesia yang menimbulkan kemarahan Soeharto, sehingga para pimpinan INGI dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri untuk "dibareng".²

Tedung Mulya Lubis, aktivis dari omag Lembaga Bantuan Hukum (LBH) pernah melakukan kritik terhadap penyusunan pemerintah bahwa perhatian pada persoalan HAM akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Tedung mengesakan pernyataan pemerintah tersebut sebagai ketidakhormatan besar dan mencemoohkan sikap "standar ganda" karena di satu pihak pemerintah Indonesia menerima bantuan asing, sementara di lain pihak tidak menerima kritik atas pelanggaran HAM yang dilakukannya. Bahkan dapat memuat Tedung sebagai negara donor tidak mengizinkan dana yang mereka berikan digunakan untuk mendanai praktik-praktik pelanggaran HAM (Schwarz, 1994: 257).

Faktor eksternal, yaitu tekanan Amerika Serikat berpengaruh pada pengudaran isu HAM di Indonesia. Kongres Amerika berulang kali menyuarakan pelanggaran HAM rezim Soeharto dan meminta George Bush bersikap tegas terhadap Indonesia. Di bawah pemerintahan Clinton, Amerika kembali mengkritik keras pelanggaran HAM di Timor Timur dan mengadakan repatriasi rezim Soeharto terhadap para aktivis buruh. Pada pertemuan dengan Soeharto di Tokyo 7 Juli 1993 Clinton membicarakan isu HAM di Timor Timur. Clinton juga mengesakan kebijakan perdagangan *Generalized System of Preferences* (GSP) yang diterapkan Indonesia dan mengkritik pelanggaran organisasi buruh Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) karena merepresi buruh. Pada pertemuan APEC di

² Lihat masalah Korpos, 6 Agustus 1988, "Pangreh Seadun LSM yang Menyebarkan Buruh Sendu" dan Kompas, 30 September 1994, "Mentolakan Menyuarakan Ada LSM Mengesakan Itu untuk Mendua Negeri".

Jakarta Nopember 1994 persoalan Timor Timur dan situasi HAM di Indonesia kembali menjadi topik utama yang dibicarakan Clinton dengan Soekarno (Lilita, 1995: 91-92)

C. Pergeseran Strategi Gerakan Wanita

C.1 Latar Belakang Pergeseran

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengemuka sejak akhir 1980-an mempengaruhi banyak omop, termasuk Yasanti menggeser konsentrasi gerakan pada isu HAM sebagaimana dikemukakan Kusyuniati, sejak akhir 1980-an tidak ada omop yang tidak berbicara tentang HAM, sebab jika tidak omop tersebut akan dianggap tidak sensitif. Yasanti pun terpengaruh pada kecenderungan global tersebut, sehingga membawa gerakan Yasanti ke arah advokasi buruh (Yasanti, 1998: 116)

Fenomena tersebut sebagaimana akan dibahas lebih mendetail pada bagian analisis gerakan Yasanti merepresentasikan pengaruh global bagi pergeseran gerakan Yasanti. Hal yang menarik dalam memahami pengaruh global bagi gerakan Yasanti adalah alasan mengapa Yasanti selalu mengikuti kecenderungan global atau merespon trend yang sedang berkembang di masyarakat Kusyuniati menyatakan bahwa jika Yasanti tidak mengikuti trend global kritik terhadap lembaga sangat kuat.¹ Alasan tersebut menunjukkan terdapat diaku atau tidak terdapatnya tekanan bagi sebuah omop untuk selalu merespon isu global kontemporer. Terlebih lagi, kecenderungan mengikuti trend global

¹ Ibid: 117

² Persewaan Kusyuniati sebagai studi kasus dalam Mufyanah dkk, *Pengaruh Politik Internasional Terhadap Organisasi Wanita*, (1998) Hal 117

memiliki keterkaitan dengan kesempatan atau peluang untuk mendapatkan dana dari lembaga donor.

Sejalan dengan konsentrasi pergerakan dunia pada isu HAM, Yasanti menyalurkan arah gerakannya pada pembelaan hak asasi buruh. Pengalaman yang telah diperoleh Yasanti selama bertahun-tahun mendampingi buruh semakin membuka kesadaran Yasanti akan kondisi buruh yang tertekan. Ketika realita ini bertemu dengan menguatnya isu HAM, maka Yasanti terdorong untuk melakukan pembelaan hak asasi buruh, antara lain melalui mobilisasi aksi buruh. Kusyuniati menjelaskan sebagai berikut:

Sejak awal Yasanti menaruh keburuh. Tahun 90-an buruh menjadi tema. Waktu itu asunya *human right*. Buruh waktu itu nggak ada ruang bergerak. Karena diletak masuk *rightist*. Waktu itu kan harus ada SP3. Nah itu menyebabkan *power* berontak. Karena hak asasi buruh sebagai manusia diletak, maka Yasanti mendorong mereka melakukan aksi mobilisasi. (Wawancara, 23 Januari 2005)

Konteks politik nasional Indonesia turut mendorong pergeseran strategi gerakan Yasanti. Munculnya kembali gerakan-gerakan anti-Soeharto yang mengusung isu-isu HAM, terutama gerakan-gerakan buruh di berbagai kota di Indonesia, memberi semangat pada Yasanti untuk ikut menggoyahkan pemerintahan Soeharto yang telah mengepres buruh. Yasanti kemudian memperkuat gerakan pembelaan bagi buruh perempuan tidak lagi sebatas penguatan ekonomi (*basic needs*) tetapi bergeser pada kebutuhan strategis yang berbau politik seperti ketegasan bersejarah. Terlebih lagi pengalaman dalam memberdayakan buruh selama sepuluh tahun (1982-1992) menyadarkan Yasanti bahwa kegiatan Usaha Bersama (UB) dengan kegiatan ketangkulan

menjalani tidak melibatkan proses penyadaran buruh OSeb karena itu setelah Yasanti mengubah strategi gerakannya ke arah politik UB hanya dijadikan sebagai kegiatan *entry point*, sementara kegiatan utama adalah melakukan diskusi UU Perburuhan dan memobilisasi aksi buruh, di samping melakukan penyadaran pekerja. Melalui diskusi perburuhan dan mobilisasi aksi Yasanti mengharapkan buruh memahami dan dapat memperjuangkan hak-hak mereka.

Pergeseran strategi gerakan Yasanti ke arah politik tidak lepas dari pengaruh aktivis orang yang lebih senior. Seperti dikemukakan Kusyumaningrum dorongan untuk menaruhkan gerakan Yasanti pada strategi politik dengan melakukan advokasi dan mobilisasi aksi buruh tidak lepas dari masukan-masukan Roem Tjardimasing, aktivis dari Indeco de Lirie sebagai konsultan Yasanti ketika membantu Yasanti merumuskan Rencana Strategis pada tahun 1992 (Notulensi Rapat Evaluasi Akhir Tahun Yasanti, 1996).

Perubahan strategi ke arah politik diikuti dengan konsentrasi kegiatan Yasanti pada pembelaan buruh industri di Ungaran. Berbeda dengan program-program Yasanti untuk buruh gendong, pramuniaga dan remaja putus sekolah di Yogyakarta, Yasanti melibut bahwa pengalaman memberdayakan buruh di Ungaran melalui pengorganisasian yang sistematis dan terpadu dengan melakukan mobilisasi aksi buruh serta advokasi lebih mampu menciptakan gerakan buruh yang lebih kuat. Pengalaman di Ungaran juga meyakinkan Yasanti bahwa pengorganisasian dan mobilisasi aksi buruh di bidang industri strategis lebih mampu membawa dampak yang lebih besar dalam mempengaruhi pendapatan umum dan kebijakan, paling tidak di tingkat

perusahaan tempat buruh bekerja (Kebijakan dan Strategi dasar Arah Pengembangan Program Yasarni 1992-1994)

11.2 Upaya Pembinaan Meningkatkan Kesadaran Buruh

Upaya untuk melakukan mobilisasi aksi dan advokasi buruh diawali dengan mendiskusikan masalah-masalah yang dihadapi oleh buruh di perusahaan. Kebanyakan buruh tidak menyadari bahwa hak-hak mereka telah diabaikan oleh perusahaan, padahal Yasarni mengetahui kondisi buruh di Lingkar sangat menyedihkan tidak ada peralatan keselamatan kerja, upah rendah, kualitas (makan, minum, transportasi dan kesehatan) tidak diperhatikan. Pelanggaran jam kerja juga mengebekkan buruh, karena jika buruh menolak untuk lembur gajinya akan dipotong. Kondisi itu sebenarnya bisa tidak disadari oleh buruh. Kebanyakan buruh bahkan tidak mengetahui hak-hak yang semestinya mereka miliki. Organisasi buruh, yaitu SPSI yang semestinya memperjuangkan kesejahteraan buruh hampir tidak pernah mendengar suaranya karena kebanyakan pengurus SPSI adalah kepanjangan tangan pengusaha yang berfungsi meredam suara buruh yang berusaha memperjuangkan nasibnya. Kondisi buruh yang memprihatinkan ini diangkat oleh Yasarni dalam diskusi-diskusi dengan buruh. Yasarni membuka kesadaran buruh akan ketidakadilan yang mereka alami melalui kajian UU Perburuhan, pertolongan upah dan lembur yang benar, serta hak cuti. Diskusi-diskusi penyadaran buruh dilakukan akan memperkuat pengorganisasian buruh yang bisa memperjuangkan kepentingan buruh.

Pengorganisasian buruh di Ungaran dimulai dari pembentukan kelompok kader yang diberi nama kelompok Sekelasa (yaitu kelompok Karwaan Senasib dan Sepenanggungan) sebagai kelompok yang berfungsi melakukan analisis masalah perburuhan dengan menggunakan media pertemuan buruh. Anggota kelompok kader kemudian mengembangkan kegiatannya di perusahaan masing-masing maupun di lingkungan tempat dia tinggal. Pengorganisasian juga dilakukan dengan membentuk kelompok khusus perempuan yang diberi nama Kelompok Solidaritas Perempuan (KSP) dengan kegiatan yang masih stereotip perempuan, yaitu kegiatan pertemuan. Dalam jangka panjang Yayasan mengharapkan kelompok ini bisa meningkatkan partisipasi buruh perempuan karena anggota kelompok ini juga menjadi anggota kelompok kader dan kelompok perusahaan yang secara rutin mengadakan diskusi perburuhan (Laporan Divisi dan Adhokasi, 1994).

Usaha Yayasan dalam membuka kesadaran buruh membuahkan hasil yang antara lain ditandai oleh peningkatan munculnya kelompok-kelompok basis. Mereka sering meminta pendampingan Yayasan. Anggota kelompok basis juga merasakan pengorganisasian buruh yang dilakukan Yayasan telah membuka kesadaran bahwa sebagai buruh mereka memiliki hak. Suyati, buruh perempuan yang mulai bekerja di Ungaran sejak tahun 1989 mengemukakan "Sebelum saya mengenal Yayasan, saya sangat pemala dan sama sekali tidak tahu bahwa sebenarnya saya juga sebagai buruh yang ada haknya juga". Suyati, buruh perempuan yang juga bekerja di Ungaran menyatakan bahwa diskusi perburuhan yang dipandu Yayasan sangat berarti baginya. Ia menjadi

mengerti fungsi SPSI dan hak-hak yang semestinya ia miliki sebagai buruh. Setelah mengenal Yasanti ia merasakan adanya jalur alternatif untuk menyelesaikan persolan perburuhan. Demikian pula dengan Winarsih, salah seorang buruh yang mulai aktif mengikuti kegiatan di Yasanti sejak tahun 1991. Menyatakan bahwa penyadaran hak-hak buruh yang dilakukan Yasanti telah menumbulkan keberaniannya untuk melawan ketidakadilan yang ia alami di perusahaan tempat ia bekerja. *"Melakukan kegiatan perburuhan yang pernah dilakukan Perasut baru saja sebagai Aktivist"*. Karena keberaniannya itu Winarsih pernah mendapat surat dari perusahaan tempat ia bekerja dan dianggap sebagai tokoh pembertonak (Yasanti, 1998: 112-113).

C.3 Mobilisasi Aksi Buruh

C.3.1 Mobilisasi Aksi Buruh PT Banamtex

Diskusi-diskusi perburuhan pada gilranannya memotivasi para buruh melakukan aksi-aksi demonstrasi untuk menuntut hak-hak mereka. Aksi pemogokan buruh yang pertama dimobilisasi oleh Yasanti adalah aksi pemogokan buruh PT Hancosrex Linggati yang kedua pada akhir tahun 1992. Pemogokan ini terjadi pada tanggal 13 Agustus 1992 akibat para buruh merasa tuntutan yang diajukan pada pemogokan pertama belum dikabulkan seluruhnya.¹ Mobilisasi aksi buruh dilakukan Yasanti dengan dukungan para aktivis mahasiswa dan aktivis ormas, terutama janda sasi melakukan

¹ Dalam aksi mogok yang pertama buruh menuntut mundurnya 1 orang bagian perburuhan karena dianggap tidak benar dalam mengelola organisasi SPSI. Korup menghambat kemajuan upah buruh dan bertindak sewenang-wenang terhadap karyawan. Aksi ini mengakibatkan 1 orang buruh di-PHK, karena dianggap sebagai dalang pemogokan dan membatasi karyawan lain untuk

perencanaan aksi dengan buruh pada waktu berlangsung aksi dan ketika berlangsung perundingan antara perwakilan buruh dengan pihak perusahaan yang diinisiasi. Ekspektasi pasca aksi pemogokan Kusyuniati menuliskan

Pada waktu itu perwakilan politik di kampus mulai menguat kembali, antara lain di IAIN dan UGM. Karena itu ketika akan mengadakan demonstrasi aktivis mahasiswa dilibatkan dalam perencanaan. Dalam aksi demonstrasi para aktivis mahasiswa ini berpura-pura menjadi wartawan. Setelah demonstrasi buruh terjadi biasanya perusahaan akan memanggil perwakilan buruh untuk menanyakan apa yang diinginkan oleh buruh. Dalam forum itu kedua perwakilan buruh, perwakilan perusahaan dan polisi dengan jumlah yang tidak seimbang. Jumlah perwakilan buruh hanya sedikit, sementara perwakilan perusahaan dan polisi sangat banyak, sehingga membuat buruh tidak berani bicara. Para aktivis mahasiswa yang menyamar menjadi wartawan ini bisa mengintasi forum ini karena pers diperbolehkan masuk. Di situ lah mereka memberikan dorongan semangat agar buruh tetap berani mengajukan tuntutan. Saya juga dibantu kawan-kawan dari Insisi. Saya dibantu Roesan dan Totok. Waktu demo kalau saya ada di situ kan ketahuan. Kalau si Totok kan nggak ketahuan Wong wongnya buruh, laki-laki lagi! (Wawancara, 12 Juni 2003)

Malam menjelang pemogokan salah seorang buruh, yaitu Rasmadhar Laomang (Dony) mendatangi aktivis Yusuni di Ungaran menginformasikan bahwa pihak pengusaha telah mengetahui rencana pemogokan tersebut dan juga telah menyewa para sopir angkutan karyawan antara Rp 100.000 hingga Rp 150.000 per orang, agar pada sore tersebut langsung memasukkan mobil antar jemput karyawan ke dalam pabrik. Biasanya sopir hanya mengantarkan karyawan sampai di di depan pintu gerbang pabrik. Mendengar laporan itu

.....
 mengadakan pertemuan. Dengan adanya aksi mogok ini perusahaan lebih menungkatkan pengajaran yang lebih terdapat karyawan sehingga sudah mengadakan perubahan-perubahan seperti mendirikan komite pengawas SPK, mengadakan koperasi karyawan dan lain-lain. Akan tetapi dengan adanya PHK terhadap 5 orang buruh mereka tidak bisa menerima keputusan tersebut sehingga muncul aksi mogok kembali.

aktivis Yasanti langsung berangkat ke kantor Yasanti di Karangjati Ungaran. Di sana telah berkumpul sepuluh mahasiswa dari Yogyakarta.

Tanggal 18 Agustus 1992 jam 06.00 buruh yang masuk pagi telah berkumpul di pasar Babadan di samping perusahaan. Mereka berjumlah sekitar 50% dari jumlah buruh, karena sebagian telah masuk ke dalam pabrik diantar langsung oleh sopir-sopir perusahaan. Buruh kemudian menggelar beberapa tuntutan: (1) penyingkiran beberapa staf perusahaan, karena dianggap tidak bisa melaksanakan UU Perburuhan sebagaimana mestinya. (2) penyingkiran ketua umum SPSI unit kerja, karena tidak membela kepentingan karyawan, bahkan ikut memihak perusahaan dan mendukung sepenuhnya tindakan pengusaha jika ada karyawan yang di-PHK. (3) pemenuhan pemberian Aspek, gaji hari, kelebihan jam kerja, kesejahteraan karyawan dan (4) penyusunan serta pelaksanaan kesepakatan bersama tentang pemberian uang makan dan uang transport. Buruh mengancam jika tuntutan tidak dikabulkan sampai jam 10.00 mereka akan pulang ke rumah masing-masing dan melakukan mogok kerja selama 3 atau 4 hari, bahkan sampai seminggu sampai mereka mendengar kabar dari media massa bahwa tuntutan mereka dikabulkan.

Tidak lama setelah menggelar aksi, buruh yang berkumpul di samping pabrik berhasil dibubarkan oleh aparat keamanan dan diminta agar memasuki kawasan pabrik. Mereka kemudian berpencar karena dibubarkan oleh aparat keamanan. Beberapa jam kemudian para buruh yang telah bubar berkumpul di rumah salah seorang karyawan dan membatarkan rencana aksi petar poster pada jam 14.00 WIB yaitu pada saat pergantian shift jam 14.00 kurang lima

rapat aksi gelar poster telah dimulai dan sebagian besar buruh yang masuk ayah yang telah berkumpul. Pada saat itu aparat keamanan bertindak cepas langsung membubarkan buruh yang berkumpul sambil melakukan penangkapan dan penamparan sehingga buruh yang lain merasa ketaliban dan merokapas bubar (Laporan Yasami, 1992)

Amin Mufiyusab, aktivis Yasami yang pada waktu itu akan berdemokrasi bersama buruh menubulkan pengalamannya ketika dikejar-kejar oleh aparat keamanan yang membawa anjing pelacak dan menyemprotkan gas air mata:

Saya dikejar-kejar, disemprot gas air mata terus lari Kita masuk rumah-rumah penduduk Paling acan masuk pasar Pasarnya ada di seberang jalan Kita lari ke seberang jalan, terus ke rumah penduduk Mereka (buruh) lan kodat-kacir Sampai segitu-gitu itu dikejar terus sama gas air mata. Kalau polisi jelas itu mesti ada, tapi gas air mata dan anjing pelacak itu yang agak terkejut sebelumnya (Amin Mufiyusab, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Pada pemogokan itu dua orang tokoh buruh yang meninmpah aksi buruh yaitu Suturji dan Purwiyanti mendapat tempanan Suturji ditampar oleh Lettu Slamet Maryono (Daryasa). Purwiyanti ditampar oleh seorang oknum intel, tidak jelas dari polisi atau Angkatan Darat karena memakai pakaian preman Purwiyanti mendapat makian dari oknum tersebut dengan kata-kata yang tidak pantas "Coba apa kau jadi pemberontak, yang pantas kau penitipungku itu *Imir, HPS*" Pada hari itu juga tiga orang buruh dibawa ke Polsek Ungaran untuk diinterogasi Di Polsek Suturji mendapat tamparan yang kedua kalinya dari oknum polisi sambil berkata "Sifatmu dicar *Imir, HPS* Kamu punya apa

...dan apakah mereka laporan. urutkan laporan. Apa itu? muma siapa kemarin lagi?"
(Laporan Yasanti, 1992)

Melalui Amin kegagalan aksi mogok buruh PT Batamtex dikibarkan oleh kelemahan Yasanti berkolaborasi dengan para aktivis mahasiswa dalam mempersiapkan aksi mogok, sehingga perusahaan dapat dengan mudah mengetahui bahwa aksi tersebut melibatkan mahasiswa, bukan murni insyirif buruh

Waktu itu masih seru-serunya pak Harto. Kita melibatkan prinyan, mencari lain mahasiswa. Yessu-samen mahasiswa juga semua sekali yang namanya mogok. Kebetulan mereka dari Jogja. Kita kan referensinya banyak yang aktivis. Eh, kita baru aksi setup pabrik perusahaan lagi buruh tidak masuk karena ketahuan bahwa itu mahasiswa. Bertubung perusahaan tahu bahwa itu dianggap dianggap bukan murni buruh. Kelemahan kita di situ. Jadi ketahuan bahwa bukan murni aksi buruh itu menjadi lain bagi perusahaan bahwa untuk apapun itu bukan keinginan buruh. (Amin Muftiyannah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Setelah berlangsung aksi pemogokan para buruh masih melakukan diskusi dan konsultasi dengan Yasanti. Dalam diskusi-diskusi tersebut Yasanti membantu menyelesaikan masalah yang dialami buruh, terutama untuk mempersiapkan perundingan dengan Depnaker dan perusahaan. Amin mengemukakan

Ketika itu sedang kita diskusikan nanti tuntutanannya apa, kronologinya seperti apa, yang perlu kita dapatkan apa, kalau ada deadlock gimana. Terus maju. Hasilnya seperti apa nanti kita evaluasi. Kita diskusikan lagi. (Wawancara, 11 Mei 2004)

Yasanti kemudian mendampingi mereka hingga ke tingkat perundingan dengan Departemen Tenaga Kerja. Setelah Yasanti bersama-sama dengan para

aktivis mahasiswa dari Yogyakarta, Salatiga dan Semarang, wakil LBH Semarang dan Yogyakarta berkoordinasi mendampingi buruh PT Batamtex (melalui perwakilan) buruh yang masih berstatus dalam proses PHK maupun buruh yang masih aktif bekerja untuk menemui menteri tenaga kerja. Namun dengan pertimbangan bahwa sebuah perwakilan mahasiswa Salatiga memberikan pernyataan sikap kepada Menaker tentang kasus di PT Batamtex¹⁸ dan pihak Depnaker juga akan mempertimbangkan pernyataan sikap tersebut, maka keputusan rapat di Yogyakarta untuk menemui Menaker ditangguhkan dan dialihkan ke Kanwil Depnaker Semarang.

Ketika para wakil buruh PT Batamtex mendatangi Kanwil Depnaker Semarang, pihak Depnaker tidak bersedia menerima mereka dengan alasan belum ada pemberitahuan sebelumnya. Depnaker hanya bersedia menerima setelah mereka membuat surat resmi bertulis dan setelah itu mereka akan dipanggil untuk pertemuan. Aktivis Yasami yang mendampingi buruh pada saat itu mendesak pihak Kanwil agar tidak mengecewakan wakil buruh yang sudah datang. Kanwil Depnaker Semarang akhirnya bersedia menerima para wakil buruh yang terdiri dari 3 orang buruh, seorang wakil mahasiswa dan seorang wakil dari Yasami (Laporan Yasami, 1992).

3.2 Aksi Mogok di PT Nissan Bissoni

Mobilisasi aksi pemogokan buruh yang kedua dilakukan di PT Nissan Bissoni Ungaran pada tahun 1973. Pada tahun itu terjadi kasus PHK terhadap

¹⁸ Para wakil mahasiswa dari Salatiga berhasil menemui Menaker 6 bulan kemudian tanggal 16 September 1992 ketika menaker datang ke kampung LK 501 Salatiga untuk memberikan ceramah.

beberapa orang buruh yang dianggap mendalang aksi mogok Yasanti kemudian mengajak mereka berdiskusi. Dalam diskusi muncul keluhan-keluhan buruh tentang keadaan perusahaan yang semakin menekan para buruh, janji-janji dari perusahaan yang tidak pernah ditepati serta kasus PHK yang merugikan 4 orang buruh karena dianggap mendalang aksi mogok. Ketidakepercayaan itu mendorong para buruh kembali merencanakan aksi mogok agar persoalan mereka diperhatikan oleh perusahaan. Melihat para buruh belum memiliki strategi yang cukup Yasanti berupaya meredakan emosi mereka dan membujuk merencanakan aksi dengan strategi yang matang, yaitu melakukan pengujian kesimpulannya dan menentukan strategi di lapangan. Perencanaan aksi demonstrasi dimulai dengan mengadakan diskusi dengan perwakilan dari setiap departemen. Diskusi kemudian dilanjutkan dengan mempersiapkan kader cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu dengan kader yang telah dipersiapkan. Buruh diangkat agar bisa kompak dalam memperjuangkan hak-hak mereka.

Diskusi mengenai strategi pelaksanaan aksi mogok buruh PT Niswari Biscuit Ungaran dilakukan di kantor Yasanti Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 1993. Pertimbangan faktor keamanan menyebabkan perencanaan aksi mogok buruh Ungaran dilakukan di kantor Yasanti Yogyakarta. Kantor Yasanti di Ungaran tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk merencanakan aksi pemogokan karena pernah dinasabki oleh orang tak dikenal ketika kumuh sedang berlangsung. Assanroh menuturkan

Ketika mau demonstrasi mereka (mahasiswa dan buruh) ke Jogja. Di sana (Lingaran) nggath some Rumah dr sana pernah dibongkar oleh orang. File-nya diobrak-abrik (Wawancara, 10 Juni 2003)

Perencanaan aksi mogok menebicarakan analisa resiko, menapecek kesiapan organisasi, penayaman tuntutan, kesuguh tim perunding dan teknik pelaksanaan lapangan. Setelah mendiskusikan strategi para buruh danpangan Yasanti diminta untuk mengatur sendiri persiapan di lapangan karena mereka dianggap lebih mengetahui kondisi lapangan. Belajar dari pengalaman kemampuan aksi mogok di PT Batamtek, maka Yasanti menekankan arti penting strategi agar demonstrasi dibuat seakan-akan spontan dilakukan oleh buruh, bukan diorganisir oleh Yasanti dengan dukungan aktivis mahasiswa dan aktivis Ormap. Selain itu Yasanti juga menyapayakan agar ketika melakukan tawar-menawar dengan perusahaan seorang buruh tidak berkata bahwa dia adalah aktor intelektual.

Keesakan paginya, tanggal 7 November 1995 buruh melakukan aksi mogok kerja. Sejak pukul 5 pagi para buruh sudah berhadapan disekitar perusahaan untuk mencegah para buruh yang masuk pagi bekerja dan menahan agar buruh yang masuk malam (hari sebelumnya) tidak pulang. Tidak lama kemudian pihak kepolisian didatangkan dan menyuruh agar para buruh bekerja, namun mereka tetap tidak mau bekerja (Laporan Yasanti, 1999: 50-52)

Nadhuh Assarimah menceritakan pengalamannya ketika membar bersama buruh dalam aksi mogok buruh di PT Nissin Biscuit

Saya ikut turun bahkan sempat copot jilbab (dalam kesohoran Nadhoh Asarohh setiap menggunakan jilbab), tapi tidak sepengecewaan teman-teman (buruh) *Temen-temen* kan di dalam. Saya cuma pengen libat situasi aja. Saya ambil foto terus masuk dalam kerumunan. Saya lihat polisi masih mengikuti, tapi saya terus menyelusup dan menghilang (Asarohh, Wawancara tanggal 10 Juni 2003)

Perundingan akhirnya dilakukan antara 9 orang wakil buruh, wakapolresta, 9 orang anggota DPRD, Depnaker, DPC SPPI, pengusaha, Koramil, wartawan, staf personalia dan wakil SPPI. Karena Yasanti tidak diberi kesempatan untuk mengikuti perundingan Asarohh menambahkan bahwa ia sempat memasukkan teman menyamar menjadi wartawan.

Saya sempat memasukkan teman dari Jogja menyelusup jadi wartawan. Dia punya kartu wartawan, terus masuk dalam perundingan. Kalau saya nggak bisa masuk. Saya nggak punya kelulusan di sana. Waktu itu semuanya *abang-abangan* terus, tapi lupa-lupa ya orang (Asarohh, Wawancara tanggal 10 Juni 2003)

Perundingan menghasilkan KKB, namun tidak memuaskan para buruh karena dinilai mengambang, tidak jelas waktu dan kesepakatan kesanggupan pelaksanaannya oleh perusahaan (Laporan Yasanti, 1993: 69)

C 3.1 Aksi Mogok di PT Karya Puspita Indonesia

Sebagian anggota kelompok *Indar* yang dikoordinir Yasanti melalui diskusi perburuhan berhasil mengembangkan kegiatan di kelompok-kelompok perusahaan tempat mereka bekerja. Di kelompok-kelompok ini mereka juga mengadakan diskusi setiap bulannya sekali untuk membahas (1) Perburuhan maupun permasalahan-permasalahan lain yang mereka hadapi di perusahaan

Selub selubnya adalah kelompok buruh di PT Koryo Puspita Indonesia yang mulai gusar dengan persoalan UMR dan mesu makanan yang tidak pernah berhasil diselesaikan lewat SPSI. Lama-kelamaan kekecewaan buruh semakin tak terbendung. Akhirnya beberapa kader Yasami yang telah dikenal akrab oleh massa buruh mendesak untuk mengadakan aksi demonstrasi di luar pabrik.

Kader-kader Yasami berhasil mengumpulkan buruh untuk melakukan rapat-rapat persiapan menjelang aksi demonstrasi. Yasami mendatangkan Nadlima, tokoh demonstrasi buruh di PE Binarcaex yang menuturkan pengalaman-pengalamannya sehingga menimbulkan semangat untuk melakukan aksi. Karena kebanyakan buruh PT Koryo Puspita masih awam dengan UU Perburuhan, maka Yasami mengajak mereka untuk mendiskusikan UU Perburuhan, terutama tentang jam kerja, perhitungan upah dan upah lembur yang benar dan bagaimana mencari dukungan ketika melakukan aksi.

Setelah melakukan persiapan selama hampir dua bulan pada tanggal 16 Mei 1994 aksi demonstrasi digelar dengan jalan mogok kerja. Para buruh duduk-duduk di jalanan sambil membawa poster, gambar, selebaran yang berisi tuntutan UMR dan hak cuti, serta spanduk-spanduk bertuliskan "Tolak keras pemungutan korupt, hentikan operasi Anjak-anjak korupsi kubang korupsi", "Pembatalan hak-hak kami buruh melalui", "Perwakilan SPSI Koryopita", "Adonan Susu baru jadi juk". Namun belum lama demonstrasi berlangsung pihak militer dan aparat pemerintah datang. Aksi pun berhenti dan kemudian terjadi perundingan oleh 12 orang sebagai tim perunding yang antara lain

melibatkan polsek, Depnaker, SPSI, Kommit, Pemda, DPC SPSI. Sementara itu para buruh yang mengikuti aksi demonstrasi kerendian menghenda kelompok yang dikordinir Yasanti dengan nama APACIE (*Asosiasi Persebudharan Angkatan Cipta Ekspor- Adanya Persebudharan karena Himpitan Ekonomi*) (Laporan Divisi Aksi dan Advokasi, 1994)

C 3.4 Tera dan Keuangan dan Perusahaan dan Aparat Militer

Yasanti mengakui cukup menghadapi kesulitan dalam mengorganisir aksi mobilisasi buruh. Meskipun Yasanti telah mengambil sikap hanya akan bertindak sebagai fasilitator aksi, sementara aktor aksi nyata adalah buruh sendiri, namun di lapangan sering terjadi bumpang tindih peran. Buruh sering mengharapkan peran yang lebih dari Yasanti, tidak sekedar menjadi fasilitator, tetapi juga terlibat dalam aksi. Sering pula Yasanti baru mempelajari kondisi komunitas buruh, tetapi buruh sudah menuliskan persoalan yang mereka hadapi di perusahaan ke Yasanti. Akibatnya perusahaan menaruh kecurigaan yang besar kepada Yasanti, sementara informasi tentang Yasanti yang masuk ke aparat atau pemerintah lebih banyak berasal dari perusahaan (Notulensi Yasanti, 19-23 Januari 1994). Imbas dari kecurigaan tersebut kantor Yasanti di Ungaran dihongkir oleh orang tak dikenal. Pemerintah maupun perusahaan-perusahaan di Ungaran mulai mencurigai Yasanti sebagai penggerak aksi-aksi nyata di Ungaran. Informasi mengenai kecurigaan perusahaan diperoleh Yasanti dan buruh yang mengikuti kegiatan Yasanti (Notulensi Rapat, 5 Februari 1994).

Yasanti juga meyakini aparat militer telah mengetahui bahwa Yasanti berada di belakang aksi-aksi demonstrasi buruh di Ungaran. Namun demikian belum pernah seorang pun aktivis Yasanti dipanggil, diinterogasi atau ditahan oleh aparat militer.¹¹ Demikian aparat lebih ditujukan kepada para buruh yang mengikuti kegiatan Yasanti. Arsun Mufliyanah menuturkan

Kita nggak pernah secara langsung didatangi (aparat keamanan) Tapi buruh yang ikut kegiatan ditakut-takuti. Terus yang kerja sebetulnya Yasanti. Terus yang berdatangan Yasanti ya lebih keanu. Kita cuma kayak diprotes dari kejauhan" (Wawancara, 13 Mei 2004)

Nadjih Awanah yang beberapa kali ikut dalam demonstrasi buruh menceritakan pengalamannya serupa bahwa aparat keamanan tidak berani menahan aktivis Yasanti karena mereka tidak memiliki bukti keterlibatan aktivis Yasanti dalam aksi mogok buruh. Namun demikian, Yasanti sering mendapat ancaman dari polisi atau tentara yang dibayar oleh perusahaan

¹¹ Yasanti sangat beruntung karena belum pernah seorang aktivisnya ditahan oleh aparat karena mengorganisasi aksi demonstrasi buruh, padahal secara pribadi waktu itu sangat sering datang menentang aksi-aksi ditolak aksi demonstrasi buruh. Aparat militer sebenarnya ditugaskan untuk mengkhawatirkan aksi mogok buruh yang menentang kenaikan gaji. Dalam hal yang sama, menurut penulis, diikuti oleh beberapa guru pengantar atau pengorganisasi di Koronal atau Korwil. Tidak jarang mereka dipaksa menandatangani surat pengunduran diri. Bulan Juni tahun 1991 Surakarta mengorganisasi pemogokan Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan daerah dan telah dua minggu selanjutnya. Meskipun identitas pemogokannya tidak jelas, sumber intelijen militer menyatakan bahwa Kawan berada di belakang aksi pemogokan itu. Ancaman yang dilakukan bahwa 10 demonstrasi seperti itu-rasanya dalam Serikat Buruh dan disebarkan akan dituntut jika terus mengorganisasi pemogokan. Meskipun demikian pihak militer secara resmi tidak menahani keterlibatan pemogokan. Peristiwa itu menunjukkan pemerintah tidak menahani pemogokan buruh yang menentang organisasi buruh di luar SPPI. Peristiwa serupa dilakukan oleh 7 pemogokan Serikat Buruh Sepakerti Indonesia (SBSI) Pada bulan Juli tahun 1991 tentara menahani dua pemogokan SPPI di Medan karena terlibat dalam pemogokan di sebuah perusahaan tekstil. Kegiatan dipagar dan ditebarkan dua minggu kemudian. Pada bulan Juli pemerintah menahani SBSI memelemparkan kongres penahannya Selama tahun 1994 aktivis-aktivis baik yang menahani ditangkap dan ditahan karena menentang kepemimpinan buruh. Mekanisme Djohar dan Lembaga Advokasi Anak Indonesia ditahan karena keterlibatannya dengan buruh yang sedang dipagar karena melakukan aksi demonstrasi. Mekanisme dituntut terlibat dalam tindakan-tindakan rahasia dengan buruh yang melakukan aksi demonstrasi. Peristiwa yang sama menimpa Miana dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya karena melakukan pemogokan buruh buruh yang menahani

Meraka (aparal) nggat berani karena nggat punya buku Kita di belakang layar menyoakin teman-teman Yang ngga teman-teman Kita biasanya pakai LHM untuk mendampingi teman-teman Polisi. aparat berliubungan dengan LHM sudah takut Ya, kita pernah mendapat teror lewat telepon mengancam, menakut-nakuti Kita tenang-tenang aja dan lama-lama awak yang jelas dulu itu kan perusahaan motor polisi, motor mereka Jadi ya musuhnya seperti itu Peristiwa itu menaikkan gaji seratus urang lebih beral daripada motor polisi sama mereka. Btw sampai yang namanya demo itu polisi terus terang itu itu saya dikasih sepim " (Assaririh, Wawancara tanggal 10 Juni 2001)

Kecurangan aparat yang secara langsung dihadapi oleh Yasanti terjadi ketika pada suatu saat Yasanti sedang berlatih teater buruh¹² di sebuah lapangan terbuka. Pada waktu yang bersamaan ada pasukan tentara sedang berlatih pula di daerah itu. Peristiwa itu oleh Yasanti dianggap bukan suatu kebetulan. Assaririh yang berada di lokasi waktu itu menuturkan

Waktu itu kan nggat boleh ada kegiatan Yasanti dikira SAKA, PKI atau semacam itu. Saya menjelaskan bahwa kita bukan PKI, karena kegiatan Yasanti adalah pengajaran, kursus mengajar, kursus Bahasa Inggris. Bahkan jika pengajaran banyak sekali yang datang. (Assaririh, Wawancara tanggal 11 Juni 2001)

Budi Wahyuni juga menyatakan bahwa insiden itu bukan suatu kebetulan, namun merupakan kesengajaan dan pihak aparat yang sejak lama mencurigai Yasanti karena sering terlibat dalam aksi demonstrasi buruh

¹¹ "Mereka sudah merasa pada perusahaan jika mereka diperlakukan tidak adil. Mereka dianggap bernialah karena melakukan pertokoan-pertemuan tanpa izin."

¹² Sejak akhir 1980-an Yasanti menggunakan media teater buruh sebagai bagian boguna proyek upaya penyadaran buruh. Untuk melalui para buruh Yasanti bekerjasama dengan Yayasan Teater Rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Sumed HT. Kegiatan teater buruh dilakukan sebagai sarana untuk mengidentifikasi masalah yang timbul di tempat kerja maupun masalah-masalah lain dan kemudian memecahkan permasalahan-permasalahannya (Laporan Yasanti Tahun 1991). Menurut Budi Wahyuni media teater dianggap sangat efektif untuk melakukan penyadaran, karena mengandung unsur petunjuk dan pendidikan. Cerita dalam teater harus sangat beragam, mengandung unsur untuk menarik perhatian tetapi kadang-kadang juga ke arah pemertanian (Wawancara 10 Juni 2001)

Saya merasa mereka (terasa) sudah mengintan kita sejak lama. Cuma kita nggak tahu mengintainya gitu. Bisa jadi seogaja karena dari dulu kita sering teras. Kita itu masuknya ke kelompok pengajian remaja, pengajian buruh. Kan nggak terasa tapi sebenarnya mereka mencium gerakan kita sudah cukup lama karena kita selalu dihadapkan pada ribut-ribut soal SPST, Depnaker. Kita bermusuhan. Saya yakin itu disogaja, karena latihan itu bisa bersamuan (Budi Wahyuni, Wawancara tanggal 10 Juni 2015)

Insiden yang pernah dialami Yasanti berkaitan dengan ketidaksempurnaan perusahaan pada kegiatan Yasanti adalah kasus pencurian dokumen teater buruh kantor Yasanti di Ungaran selalu kosong pada hari Sabtu dan Minggu karena aktivisnya pulang ke Yogyakarta. Ketika Assarirah (PL yang bertugas di Ungaran) kembali pada hari Minggu siang ia mendapati kamar sudah berantakan.

Setelah diperiksa ternyata nggak ada barang-barang yang hilang, tapi dokumen-dokumen teater buruh porak-poranda. Setelah diperiksa yang hilang daftar nama buruh peserta latihan teater buruh. Setelah pencurian itu semua dokumen dipindah ke Angja. Siapa yang nggak bisa dileceh, tapi kemunkiman orang yang disuruh perusahaan yang buruhnya itu teater buruh (Assarirah, Wawancara tanggal 11 Juni 2015)

Pihak aparat kabupaten di Ungaran sebenarnya tidak mempersalahkan keberadaan Yasanti dan bahkan mendukung kegiatan Yasanti. Amin Muftiyahah menuturkan

Kita dengan buruhnya ya. Kebetulan rumah yang ditempati Yasanti untuk kantor di Ungaran adalah rumah tanah. Keuatan pelatihan juga sering pingin keburuhan dan dia sebenarnya tahu Yasanti apa itu. Isilah dia Yasanti mau kerja buruh, sehingga buruh melakukan mogok ya nggak masalah (Wawancara, 11 Mei 2014)

Namun demikian Yasanti tetap mengambil peran di balik layar dalam mobilisasi aksi buruh untuk menjaga agar tidak timbul persepsi bahwa demonstrasi buruh tidak semua berasal dari inisiatif buruh. Amin Muftiyusah kembali menuturkan

Udah itu kita ditemenin. Kita muncul pasti dianggap nggak murni lagi. Jadi kita di belakang layar. Waktu penyelesaian masalah kita sering diskusi terus bagaimana jalan keluarnya dengan LBH, orang-orang hukum yang punya hak untuk bersidang. Kita membantu, tapi tidak muncul karena dampaknya akan sangat terasa bagi buruh. Kondisi itu sangat berbeda dengan sekarang, karena orang yang bergerak di bidang advokasi perburuhan bisa menjangkapi buruh dalam sidang. (Wawancara, 28 Juni 2000)

C 3.3 Strategi Kelangkaan Gerakan

C 3.3.1 Pendekatan pada Aparat Desa

Setelah terjadi kasus pembongkaran dokumen oleh orang tak dikenal di kantor Yasanti menyusul aksi mogok buruh PT Batubek, maka Yasanti melakukan pendekatan intensif dengan aparat desa. Yasanti sering berunding ke kantor kelurahan untuk mengakrabkan diri dengan aparat desa dan kadangkala meminjam tempat untuk melakukan kegiatan. Setidaknya, Lunah juga sering datang ke kantor Yasanti di Lingkungan Petugas Lapangan (PL) Yasanti dan aparat kelurahan sering berbincang-bincang tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasanti. Lunah juga mendukung kegiatan Yasanti karena membantu meningkatkan keterampilan masyarakatnya. Tidak jarang Lunah juga membantu mendukung dan mengorganisir masyarakat yang sebagian besar

adalah buah pabrik untuk mengikuti kursus dan pelatihan yang diberikan.

Yasanti Amin Muftiyah mengemukakan

Ketertarikan dan ketasahan yang jadi lokasi Yasanti lahirnya masih muda, jadi kita dapat berkomunikasi dengan baik. Untuk mendukung kegiatan Yasanti, *uang buwoko* (meminimalkan) buruh. Hal ini kursus. Lelah biasanya tanya: materi apa yang diberikan? (Wawancara, 11 Mei 2004)

Melengkapi demikian. Amin Muftiyah mengaku bahwa sebelum tahun 1997 (masa kekuasaan Soeharto) selalu ada perasaan was-was atau ketakutan untuk melakukan diskusi dengan buruh di Ungaran karena dapat menega menyalnya kemungkinan penduduk terburai. Kegiatan yang dilakukan Yasanti bersama para buruh Yasanti mengantisipasi ketangkapan penduduk dengan memberikan contoh, yaitu teknik menjawab jika para buruh ditanya oleh penduduk.

Rumah yang disewa sebagai kantor Yasanti di Ungaran memiliki jendela dengan kaca – memanjang dari atas sampai bawah sehingga kegiatan yang dilakukan bisa terlihat dari luar. Diskusi buruh yang dilakukan pada malam hari akan dianggap sebagai sesuatu yang asing, karena masyarakat sekitar biasanya hanya berkumpul jika ada kemaran dan perayaan. Kegiatan yang hanya mengadakan para buruh dapat mengundang pertanyaan orang kampung. Perusahaan yang bisa mengetahui kegiatan itu dan melarang buruhnya mengikuti diskusi buruh. Karena buruh sering ditanya oleh orang kampung dan perusahaan untuk antisipasi Yasanti memberi trik menjawab, misalnya dengan membalikkan pertanyaan atau berpura-pura tidak tahu. (Amin Muftiyah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

3.3.2 Kegiatan Kamouflage Politik

Agenda politikisasi aksi mogok buruh membuat Yasanti harus berhati-hati agar tidak ditungai oleh aparat. Untuk menyamarkan aksinya Yasanti

mempertahankan kegiatan kursus menjahit dan kursus-kursus keterampilan yang lain di Ungaran, Yogyakarta maupun Sukoharjo. Kursus keterampilan akhirnya tidak saja dijadikan sebagai *entry point* dalam pengorganisasian buruh, tetapi juga berfungsi sebagai *canvasser* bagi kegiatan mobilisasi aksi buruh. Yasanti menyadari bahwa setelah berlangsung, aksi menolak buruh aktivis Yasanti dan buruh selalu mengalami ketakutan psikologis untuk melakukan kegiatan karena aparat keamanan selalu mencari pihak ketiga di belakang aksi. Dalam situasi penuh kekhawatiran, kursus keterampilan untuk buruh perempuan yang juga diikuti oleh warga lingkungan setempat (beberapa kursus dilaksanakan dan diikuti oleh kelompok PKK, kalurahan yang dipimpin oleh ibu rumah) membuat Yasanti sulit dukungan sebagai motor penggerak aksi demonstrasi buruh (Laporan Yasanti, 1993: 27-28).

Amin Muftiyah menuturkan Yasanti melakukan kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat untuk mendekatkan diri dengan masyarakat karena LSM sering dianggap sebagai musuh pemerintah.

Dulu LSM dianggap musuh pemerintah. Kegiatan menjahit diperlukan untuk kedek agar masyarakat tahu kita juga melibatkan masyarakat biar bisa ikut kegiatan, jadi nggak cuma buruh dolek. Kegiatan menjahit sesuai bisa ikut. Tapi di dalamnya kita mendiskusikan persoalan yang mereka (buruh) alami. Makanya dulu kita nggak menggunakan istilah LSM, tapi yayasan yang melakukan kegiatan keterampilan. (Amin Muftiyah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Untuk menyebarkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan Yasanti dan menarik kelompok-kelompok pendukung Yasanti menarik ke instansi pemerintah melalui kelompok Jharna Wanita. Keberadaan Yasanti di tengah-tengah organisasi pemerintah serawai dan permintaan ibu ketua

Dharma Wanita Pengadilan Agama Unyaran untuk mengembangkan keterampilan, yaitu membuat tas dari benang nylon di unititasinya. Yasanti merespon permintaan itu sebagai peluang yang baik untuk menguatkan keberadaan Yasanti di wilayah Unyaran, karena disamping penguatan akar ke bawah, pengembangan ke atas juga sangat diperlukan. Yasanti menghadapkan kelompok Dharma Wanita mau mengenali dan ikut menyuarakan persoalan-persoalan buruh (Laporan Yasanti, 1994: 9).

Yasanti juga mengorganisir kegiatan arisan dan angungana antar buruh untuk mengakrabkan anggota kelompok sekaligus menunjukkan pada warga kampung (desa terpadat tinggal buruh) bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pertemuan buruh bukanlah kegiatan yang negatif. Yasanti memiliki keyakinan bahwa semakin banyak dukungan dari warga masyarakat, maka gerakan buruh akan semakin kuat (Laporan Yasanti, 1993: 10).

Keberadaan kelompok-kelompok dampungan di Yogyakarta yaitu pramuniaga, remaja putri putus sekolah dan buruh gendong turut mengamankan Yasanti dari kemungkinan pemerintah terhadap aktivitas mobilisasi buruh yang dilakukan Yasanti. Kelompok-kelompok dampungan ini mengilahi kegiatan UB simpan pinjam dan kursus-kursus keterampilan praktis seperti menjahit, merangkai bunga, memasak dan membuat bunga. Meskipun sejak tahun 1994 kegiatan remaja putri putus sekolah dan buruh gendong tidak lagi menjadi inti program Yasanti, namun keberadaan kelompok-kelompok ini tetap dipertahankan karena dinilai efektif sebagai

kegiatan poliris bagi agenda utama Yasanti reorganisasi tahun pabrik (Laporan Divisi Aksi dan Advokasi, 1994)

Kegiatan-kegiatan ketraampilan tersebut juga bermanfaat untuk memenuhi kegiatan dislabur perburuhan bagi pramunaga di Yogyakarta. Lini Asih, staf bagian administrasi kantor Yasanti menceritakan sebagai sebuah contoh Yasanti pernah beberapa kali diminta untuk melakukan pendaftaran ulang di kantor Direktorat Sosial Politik (Ditsoespol) DIY Untuk keperluan mendaftar ulang ada dokumen-dokumen dan laporan-laporan aktivitas kegiatan yang harus dicurjukkan dan Yasanti berhasil meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan adalah kursus-kursus ketraampilan.

Kita melaporkan kegiatannya kursus nyahw, megetik, kursus Bahasa Inggris. Waktu petinggi dari Sospol reservat kegiatan (di kantor Yasanti) keberulan sedang ada kegiatan kursus nyahw (Lini Asih, Wawancara tanggal 3 Maret 2004)

C 4 Yasanti di Sukoharjo

C 4 1 Mobilisasi melalui SPSI

Di Sukoharjo pembinaan kasus-kasus perburuhan telah dimulai sejak tahun 1992. Munculnya kasus-kasus buruh yang berawal dari pembicaraan ringan antara teman sesama mereka (para buruh) merasa perlu untuk mengadakan pertemuan rutin untuk membahas persoalan-persoalan yang mereka hadapi di perusahaan mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok kecil untuk membicarakan berbagai masalah di tempat kerja maupun di luar tempat kerja. Dari beragam masalah kelompok kemudian mengidentifikasi persoalan-persoalan mana yang mendesak untuk diselesaikan

Dalam proses penyelesaian masalah Yasanti melihat bahwa para buruh banyak belajar mendokumentasikan penyelesaian kasus yang secara tidak langsung dapat melatih mereka untuk bernegosiasi dan berpikir kritis.

Para buruh akhirnya terbiasa mengutarakan segala persoalan yang mereka hadapi di perusahaan. Mereka juga mengetahui banyak temannya berbagai peraturan dan hukum perburuhan, sehingga banyak di antara mereka semakin berani dan mulai berani mengpernyakakan hak-hak mereka kepada pengusaha. Hal itu antara lain terlihat dalam pemilihan pengurus SPSP beberapa anggota kelompok ini terpilih menjadi pengurus SPSP, yaitu sebagai sekretaris SPSP dan koordinator BLMK (Badan Musyawarah Umi Kerja) SPSP di sub unit departemennya. Dengan terlaksananya mereka secara tidak langsung program serta susunan pengurus SPSP disusun sesuai aspirasi buruh (Laporan Divisi Aksi dan Advokasi, 1994).

Kedekatan Yasanti dengan pengurus SPSP dimanfaatkan oleh Yasanti untuk mengatasi kondisi ketidakamanan di Sutobanjo akibat dirumahnya terus-menerus oleh perusahaan, yaitu dengan menyusun materi pelatihan buruh bersama-sama SPSP. Yasanti memodifikasi materi perburuhan dari SPSP dengan menambahkan materi tentang ke disiplinian dan motivasi, kepemimpinan, kesehatan dan keselamatan kerja, sumbangsih, dinamika kelompok dan materi-materi penyempurnaan. Dalam setiap materi yang diberikan Yasanti selalu menyisipkan isu gender. Modifikasi ini diharapkan bisa memperluas wawasan buruh tentang hukum perburuhan dan menumbuhkan kemampuan buruh untuk berpikir kritis. Yasanti juga mendesakkan sistem

pelatihan yang partisipatif, yaitu dengan jalan melibatkan para peserta dalam pelatihan, sehingga permasalahan yang dirasakan oleh buruh bisa diangkat dalam pelatihan, sekaligus dapat dicari pemecahannya (Laporan Yasanti, 1995)

Kedekatan Yasanti dengan pengurus SPSI PT Sritex juga dimanfaatkan untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar atas kasus-kasus yang menimpa buruh. Kasus yang pernah didiskusikan SPSI dengan Yasanti adalah kasus PHK secara sepihak lima buruh bagian gudang persediaan yang terduduk di gudang pada jam kerja. Lima buruh tersebut semula hanya berniat untuk beristirahat sebentar, tetapi karena kelelahan mereka tertidur. Pekerjaan mereka sebenarnya sudah selesai, tetapi jam kerja masih tersisa beberapa jam. Menurut pengurus PT Sritex buruh yang sengaja tidur pada jam kerja dianggap melanggar peraturan. Nasib sial menimpa lima buruh tersebut karena sempat melihat mereka tertidur. Sempat kemudian melaporkan kejadian itu kepada manajer, sehingga kelima buruh itu di-PHK. Kelima buruh itu kemudian melaporkan ke SPSI yang kemudian mendiskusikannya dengan Yasanti. Kasus itu kemudian dibawa ke Depnaker (Laporan Yasanti, 1995)

Pada pertengahan tahun 1995 atas inisiatif beberapa buruh PT Sritex yang ingin mengajukan tuntutan kenaikan UMR, Yasanti mendukung gagasan itu dengan para buruh dan SPSI. Setelah melakukan diskusi dan konsultasi, akhirnya pada bulan Oktober 1995 beberapa buruh membuat surat pengaduan yang ditujukan kepada PUK SPSI PT Sritex. Selanjutnya para pemudharangan surat tersebut dipanggil oleh manajer personalia untuk

beruntung. Dalam perundingan hadir 5 orang buruh (pemuda tunggal serikat pihak SPSP dan persatuan Sritex. Perundingan berlangsung hingga empat kali dan berakhir dengan membuat kesepakatan. Saat itu menungga pihak perusahaan yang telah berjanji akan memisahkan LAMP, para buruh dan SPSP membentuk tim pengurus. Hal itu dilakukan untuk menanggulangi pengabaian syarat janji (Laporan Yasanti, 1995)

Kedekatan Yasanti dengan pengurus SPSP PI Sritex yang telah memungkinkan Yasanti mengadakan diskusi-diskusi perburuhan belum cukup untuk menarik perburuhan buruh. Hal ini karena motivasi buruh sangat tinggi, terutama buruh yang berasal dari PI Hatanitex pun sudah banyak yang berpindah ke perusahaan lain di antara Bandung, Cigugur dan lain-lain. Metode pendekatan juga masih memakai format yang kaku, mulai dari kegiatan lari, karawitan, TTS, aerobik, namun hasilnya belum maksimal. Pendekatan yang dilakukan adalah diskusi reguler bagi kelompok lama dan menggunakan kegiatan ansan untuk kelompok baru. Karena kegiatan tersebut akhir-akhir ini menimbulkan rasa bosan dan akhirnya buruh tidak lagi aktif mengikuti kegiatan.

Pendampingan Yasanti yang ditujukan untuk buruh perempuan juga belum berhasil. Kelompok yang sudah ada dan aktif mengikuti diskusi didominasi laki-laki. Pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan membuat kegiatan diskusi dan pelatihan menjadi tidak aman, sehingga menimbulkan banyak buruh takut untuk menghadiri acara diskusi perburuhan, terutama buruh perempuan. PI menjadi merasa kesulitan untuk

mengorganisir perempuan Yasanti pernah bertanya kepada para buruh perempuan mengapa mereka enggan menghadiri acara diskusi Para buruh perempuan menjawab bahwa mereka tidak mempunyai waktu dan takut Mayoritas buruh perempuan PT Sinter kerja di bagian garmen yang sering lembur Keengganan buruh perempuan untuk menghadiri diskusi perubahan menyebabkan Yasanti mengalami kesulitan mengorganisir buruh perempuan di Sukoharjo Akibatnya kelompok dampingan Yasanti di Sukoharjo didominasi oleh laki-laki, berbeda dengan kelompok Lingaran yang mayoritas anggota kelompoknya adalah perempuan (Laporan Divisi Aksi dan Advokasi 1996)

C.4.2 Gerakan-Gerakan Tandingan

Pada saat yang bersamaan dengan keberadaan Yasanti di Sukoharjo, organisasi buruh independen (di luar bingkai rezim Orde Baru) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) melakukan aktivitas yang sama di komunitas buruh PT Sinter Keberadaan SBSI menyebabkan Yasanti mengalami kesulitan membentuk jalinan antar kelompok basis, karena SBSI mempunyai format tersendiri yang berbeda dengan Yasanti dalam menangani persoalan perubahan Kondisi itu menyebabkan Yasanti mengalami kesulitan dalam menyamakan atau membawa persoalan perubahan sebagai persoalan komunitas, karena ada perbedaan antara Yasanti dan SBSI Ketua SBSI Mukhar Pakpahan pernah memberikan ultimatum bahwa anggota SBSI tidak boleh masuk SPSI Hal ini berbeda dengan kebijakan Yasanti yang

membebankan apakah kader-kader dan anggota kelompok dampungannya memilih menjadi anggota SPST atau SBSI. Yasanri bahkan sengaja memusatkan SPST untuk melakukan advokasi perburuhan. Yasanri tidak sepakat jika harus memusatkan buruh untuk masuk dalam satu organisasi tertentu karena tugas Yasanri hanya menjelaskan bagaimana melakukan pengorganisasian buruh. Jika nanti buruh ingin membentuk organisasi buruh sendiri, keinginan itu hanya muncul dari diri buruh sendiri (Notulensi Rapat 19-22 Januari dan 3 Februari 1994).

Keberadaan SBSI di Sidoarjo menyebabkan Yasanri mulai dicurigai oleh perusahaan karena memiliki kemiripan dengan SBSI. Melalui informasi yang diperoleh Yasanri dari buruh, perusahaan ingin mengetahui apakah Yasanri memiliki hubungan dengan SBSI. Buruh yang ditanyai oleh Yasanri akhirnya berhasil menunjukkan bahwa Yasanri bukan SBSI.

Sementara persoalan Yasanri dengan SBSI belum selesai, kelompok-kelompok mahasiswa pro buruh, yaitu Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi (SMID), Pusat Perjuangan Buruh Indonesia (PPBI) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD)¹³ yang lahir menyusul terjadinya konflik antara

¹³ Partai Rakyat Demokratik (PRD) didirikan tanggal 22 Juli 1996, sebagai cikal bakal PRD sebelumnya ialah serikat-serikat sejak tahun 1994 yang pada saat itu berlabel Partai Rakyat Demokratik. Beberapa tokoh oposisi adalah Ode Ebara, yaitu Sri Bintang Purnamasari, Pramodya Anand Tacer dan Permedi. Lahir dalam acara proklamasi Partai Rakyat Demokratik. Dalam acara itu Bintang Soejit selaku ketua PRD membeberkas pada yang berisi persoalan terhadap Dwifungsi ABRI, Paksi UJ Pekob tahun 1995 dan menuntut pemecatan Ode Ebara sebagai ketua partai. Bintang juga mengedarkan buku puisi berjudul "Menangi Demokrasi Multi Kelasnya". Ia juga pernah pergi dengan ketua Budi raya, namun secara kebetulan menemukannya pada program dan masalah PRD. Dengan balaq itu PRD mendesak DPR untuk mengadakan sidang istimewa mengenai pertanggungjawaban Soekanto sebagai menteri Indonesia. Mereka juga menggalang petisi-petisi kepada internasional yang beranggotakan masyarakat pembatalan kontrak yang terdapat antara perusahaan Ode Ebara. PRD, SMID dan PPBI menggalang dukungan dari para buruh sebagai manifestasi solidaritas. Untuk memobilisasi para buruh pada bulan Mei 1995 Partai

Sekelompok dan sekutu militernya, yaitu Juby L.B. Moerdani telah masuk di komunitas buruh Sukoharjo. Yasanis mengkapabilitaskan buruh atau mudah dipengaruhi dan diunggungi kepentingan-kepentingan kelompok mahasiswa dengan mengatasnamakan buruh. Oleh karenanya Yasanis bersikap sangat hati-hati menghadapi kelompok-kelompok semacam SMID dan PRD yang tidak jelas jangka panjangnya (Nopulensi Rupa, 20 Desember 1995)

Menurut Yasanis cara kerja PRD, SMID dan PPIBI menjerak buruh masuk dalam gerakan mereka yang bersifat politik. Mereka memanfaatkan kader-kader buruh Yasanis dan Yasanis tidak bisa mengbandarkannya. Kondisi buruh yang kebanyakan berasal dari desa dan berpendidikan rendah akan mudah dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok mahasiswa untuk kepentingan mereka dengan menyatukan buruh sehingga dalam gerakan-gerakan semacam itu kepentingan buruh justru tidak bisa muncul dan menyojokkan buruh pada persoalan yang bersifat politis. Masalah menjadi lebih parah ketika kelompok-kelompok yang mengatasnamakan buruh tersebut sudah ditunggunya pihak-pihak tertentu. Dalam kondisi semacam itu gerakan mudah dipatahkan (Laporan Evaluasi Akhir Yasanis, 1995: 6-7)

Kekhawatiran Yasanis benar-benar terjadi ketika pada akhir tahun 1995 mahasiswa yang bergabung dalam PRD dan SMID mengorganisasikan aksi mogok buruh PT Srimex di Sukoharjo. Sebelumnya beredar kabar di kalangan buruh PT Srimex bahwa rencana demonstrasi ditunda karena mahasiswa sedang

Perjuangan Buruh Indonesia (PPIBI) melakukan aksi mogok pabrik PT Srimex di gedung DPRRI bersama-sama dengan PRD dan SMID pada tanggal 12 Juli 1995. PPIBI menolak mengorganisasikan aksi buruh di PT Srimex Super International Bogor menurut kerangka upah

melakukan aksi di Bandung. Namun di Bandung, PRD dan SMID tiba-tiba menggerakkan aksi buruh

Di komunitas buruh Sirex ada dua pengelompokan. Pertama kelompok buruh yang dikordinir oleh Yasanti, kedua kelompok Wiji Thukul yang melibatkan mahasiswa seluruh Indonesia. Menjelang akhir tahun 1995 beredar berita rencana aksi mogok buruh ditunda. Tiba-tiba sekelompok mahasiswa menduduki rumah-rumah buruh dan menuntut buruh ikut demo (Amin Muftiyarah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Aksi mogok buruh PT Sirex yang dipimpin oleh PRD dan SMID berlangsung pada tanggal 11 Desember 1995. Mereka menuntut kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) menjadi Rp 7.000,00 per hari. Mereka juga menyebarkan slogan-slogan politik: "Gabus 3 Pihak UU Politik Tahun 1995", "Gabus Dukung ABRI", "Siapa Cuspar Jangwa Mitur abaku Masalah Perburuhan".

Mengenang aksi mogok buruh yang dipimpin oleh aktivis mahasiswa itu Amin Muftiyarah yang pada waktu itu berugas di Sukoharjo mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan aksi mogok tidak tepat waktu karena pihak perusahaan sudah mengetahui bahwa buruh akan mogok sehingga aparat militer telah disiapkan.

Pamuk masuk menuju Sukoharjo diotop semua oleh CPN. Semua jalur sudah ditutup dan orang yang mau masuk ke Sirex digeledah semua. Sudah tahu seperti itu kok aksi tetap dilakukan. Dua rencananya buruh yang ikut demonstrasi nggat pakai seragam kok malah pakai seragam Buruh-buruh dipotongin dari rumah ke rumah diajak aksi. Padahal rencana semula yang aksi ya aksi yang nggat ikut ya di rumah. Rencananya seperti itu. Tetapi ternyata buruh-buruh didatangi dan dipuruh pakai seragam. Sementara persiapan perusahaan sangat besar. CPN dikerahkan semua mahasiswa yang mau masuk diperiksa. Sementara pamuk masuk ke Sirex cuma satu. Jalan itu ditutup sudah nggat bisa lari kemana-mana. Peta itu yang belum dipatungin

mahasiswa yang jadi korban buruhnya (Amin Muftiyannah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Ketika demonstrasi berlangsung kekerasan yang dilakukan aparat keamanan terhadap buruh sebagaimana dikhawatirkan Yasanti benar-benar terjadi Amin Muftiyannah kembali menuturkan

Buruh yang masuk ke rumah penduduk diseret, dihajar. Buruh perempuan yang memakai jilbab dibuka baju dan jilbabnya, dihajar dan rambutnya dijambak. Dianggap nggak layak untuk pakai jilbab dan itu jadi Wiji Thukul ditahan. Wah orang kampung sampai nggak berani Mahasiswa dan Bandung. Jakarta mungkin nggak paham peta Sukoharjo. Karena Sukoharjo kecil, ditutup dari semua arah sudah nggak bisa kemana-mana. Satu satunya ke rumah penduduk (Wawancara, 11 Mei 2004)

Karena mogok lebih banyak dilakukan oleh mahasiswa, tuntutan buruh tidak berhasil. Perusahaan dan aparat hanya sibuk mengurus mahasiswa yang ikut mogok. Sebanyak 45 orang mahasiswa ditangkap di Polres Sukoharjo.¹⁴ Perusahaan menganggap budaya mogok yang dilakukan oleh buruh bukan masalah buruh. Hingga akhir tahun 1996 tidak ada kejelasan apakah tuntutan buruh tersebut akan dipenuhi. Bahkan setelah ada kebijakan kenaikan UMR

¹⁴ Tidak semua aktivis pendukung PRD yang bertanggung jawab atas buruh di Sukoharjo adalah mahasiswa. Salah seorang demonstrasinya adalah Wiji Thukul seorang buruh, budang politik dan selubung seniman. Lewat partisipasinya yang berfokus tentang dunia ketenagakerjaan yang terancam Wiji dengan terus menerus menulis *Sachato*. Lepas menjadi salah seorang tokoh-tokoh gerakan mahasiswa. Pada tahun 1994 Wiji menjadi anggota kedua dari hadapan Pergerakan Rakyat Demokratik dan kemudian mendirikan Jaringan Kerja Kesatuan Rakyat (JAKKER) bersama kerabatnya. Wiji aktif bergabung dalam aksi-aksi mogok buruh yang dimulai 1980. Terinspirasi oleh mogok buruh PT Smea di Sukoharjo pada akhir tahun 1994. Dalam demonstrasi itu Wiji berhasil ditangkap oleh aparat keamanan dan dihajar dengan pukulan-pukulan sampai hingga ketopal matanya meledak dan optikannya rusak sehingga terancam buta. Pada tanggal 28 Desember 1994 Menakipolkom Sugilo Soedarmanto menuntun dari Wiji Thukul sebagai salah seorang yang diburu. Sejak saat itu Wiji bergabung dan bekerja sebagai Komral dengan keluarga dan kerabat kerabatnya seperti pada tahun 1998. Hingga kini Wiji Thukul tidak diketahui keberadaannya apakah masih bersembunyi di suatu tempat atau telah ditangkap oleh rezim Sachato.

yang harus diberlakukan sejak 1 April 1996 PT Sritex justru mengajukan pemundian pembayaran 1.3M selama satu tahun dan pengajuan tersebut dipenuhi (Laporan Yasanri Tahun, 1996: 3)

C.4) Tekanan Aparat dan Strategi Yasanri

Akibat penistaan aksi mogok buruh yang dikordir oleh kelompok-kelompok mahasiswa tersebut setiap kegiatan yang dilakukan di kawasan pabrik, termasuk kegiatan Yasanri selalu diawasi oleh Kelompok Dampiran Yasanri. Diawasi oleh pengusaha maupun aparat keamanan karena mengikuti kegiatan Yasanri. Aparat keamanan yang ditugaskan untuk mengawasi kegiatan Yasanri sering bertanya kepada buruh tentang apa yang dilakukan di Yasanri dan siapa saja yang ikut. Perusahaan bahkan melarang guru buruhnya mengikuti kegiatan di Yasanri serta menyuruh salah seorang buruh menjadi mata-mata untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan Yasanri dan membuat laporan ke perusahaan (Laporan Yasanri, 1995)

Yasanri meyakini bahwa aparat keamanan yang di bayar perusahaan sebenarnya sudah mengetahui apa yang dilakukan Yasanri karena sebagian buruh yang mengikuti kegiatan Yasanri adalah teman mereka. Arnan menuturkan bahwa setelah terjadi peristiwa aksi demonstrasi di PT Sritex yang dipimpin oleh PRD, SIMID dan PPBT guru buruh yang mengikuti kegiatan Yasanri selalu diawasi oleh polisi perusahaan yang diberi tugas untuk mengawasi kegiatan Yasanri.

Mereka aparat keamanan perusahaan mengundang, duduk di depan warung. Setelah selesai kegiatan mereka bergerak ke buruh Ya sambil

gaya-gayut, karena mereka saling kenal. Tapi data itu (buruh yang mengikuti kegiatan Yasanti) kan masuk ke perusahaan. Akibat selalu diawasi buruh menjadi takut mengikuti kegiatan Yasanti karena bisa berdampak dikeluarkan dari perusahaan (Amin Muftiyannah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Aparat keamanan yang dibayar perusahaan juga sering bertanya kepada anak pemilik rumah yang disewa oleh Yasanti tentang kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasanti. Di Sukoharjo Yasanti menyewa bagian belakang rumah, sedang bagian depan rumah dipinjamkan untuk membuka toko kecil yang dikelola oleh anak pemilik rumah. Larah bahkan menaruh pemilik rumah untuk menyuara Yasanti dan tidak memperbolehkan rumahnya disewa sebagai kantor Yasanti (Laporan Yasanti Tahun 1996)

Sementara itu reaksi ketidaksetujuan pihak perusahaan terhadap Yasanti karena menggerakkan buruh dilakukan dengan cara mengancam dan menelan Yasanti melalui aparat desa. Staf Yasanti dipanggil ke hadapan aparat desa dan diminta keterangan mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasanti. dipanggil juga kali oleh lurah Jatis Sukoharjo. Amin Muftiyannah yang mewakili Yasanti diajari tentang keterkaitan Yasanti dengan Dony (pemimpin aksi mogok buruh PT Kasumex Ungaran), kegiatan-kegiatan Yasanti dan sumber dananya.

Saya ditanya apa kenal Dony? Dony, Dony siapa? Saya pura-pura nggak tahu. Masa nggak kenal? Itu kan jaringannya Australia, provokator (Amin menirukan larah). Saya tetap pura-pura nggak tahu. Panggilan kedua dan ketiga saya ditanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Yasanti dan sumber dananya. Saya tunjukkan lesyter. Kita mengadakan latihan karantina dan tari. Dananya dan perguruan tinggi dan berbagai lembaga. Dia (larah) nggak begitu memahami persoalan Dia

banyak disuruh perusahaan jadi nggak bertanya secara kritis (Wawancara 3 Maret 2004)

Alasan kondisi politik yang tidak memungkinkan untuk mengadakan kegiatan diskusi perburuhan dan pelatihan-pelatihan maka pada tahun 1996 banyak pelaksanaan kegiatan Yasanti di Ungaran yang tertunda Latihan gender dan latihan pengorganisasian kelompok yang seharusnya dilakukakan bersama dengan kegiatan diskusi perburuhan tidak terlaksana. Selama bulan April hingga Juni 1996 kegiatan diskusi perburuhan ditunda sementara karena kondisi lapangan tidak aman. Kegiatan yang masih sempat berjalan adalah kerajinan dan latihan menari Yasanti membuat kesepakatan dengan buruh dampangan di Sukoharjo untuk menunda diskusi perburuhan hingga kondisi aman. Dari komentar-pula selama bulan April-Juni aktivis Yasanti yang menjadi Petugas Lapangan (PL) di Sukoharjo tidak berada di lapangan. Pendampingan dilakukakan dengan cara PL menjanggunyi mereka seminggu sekali tanpa tinggal di kantor Yasanti di Sukoharjo. Semua itu dilakukakan untuk memengaruhi masyarakat dan membuktikan dari pada turah, persabuan dan aparat keamanan bahwa Yasanti tidak menambillansi aksi mogok buruh (Laporan Yasanti, 1996)

Budi Wahyuani mengemukakan ketika itu Yasanti memutuskan cundug aksi untuk menyesuaikan situasi karena posisinya sudah terbaca sehingga perlu melakukan strategi

Yasanti nggak pernah berubah orientasi dalam persoalan HAM. Hanya strategi untuk memperjuangkan HAM yang berubah, apakah mengambil bentuk demonstrasi, mengambil wawancara, berjarangan atau

dalam bentuk lain (*Coorlay dan lain lain*) karena Yasanti sudah berubah posisinya sehingga perlu merubah strateginya (Budi Wahyuni, Wawancara tanggal 16 Juni 2003)

Pada pertengahan tahun 1996 Yasanti kembali melakukan kegiatan di Ungaran karena melibat kondisi lapangan sudah cukup aman. Namun untuk menghindari kecungaan Yasanti mengadakan pendekatan ke masyarakat dan aparat kabupaten dengan cara berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan seperti mengisi hiburan dalam acara perayaan tujuh belas Agustus Masyarakat Jatis Sukoharjo kemudian sajian bermanis dengan seni karawitan dan tari. Karawitan Yasanti mengajak mereka untuk mengikuti kegiatan menari dan karawitan yang diadakan Yasanti. Salah satu kelompok dangungan Yasanti selalu mengadakan kegiatan karawitan di rumah salah satu penduduk yang menyediakan perangkai gamelan kepada masyarakat. Penduduk setempat tidak segan-segan berakrab dengan para rumah dan ikut melatih mereka latihan karawitan dan menari dilakukan sebagai strategi untuk menghindari Yasanti dan kewenangan dari aparat desa, pengusa, maupun aparat keamanan yang dibayar oleh perusahaan. Amis kembali menuturkan

Kami penias tari-tarian. Di sana tari dan karawitan sangat dipertah. Keberulan nolak Ery (salah satu PL Yasanti) pinter nari. Ada juga buruh yang pinter nari. Kami pernah perdas di Tasnangmangu. Ya kami tetap melakukan kegiatan tari-tarian, karawitan dan pengajian. Polaknya memburukkan bahwa kita memang tidak seperti dugaan mereka. Kalau buruh jadi pinter nu lain sebenarnya yang sering perusahaan. *Ukulan urunade mawar-mawar, lu gek buruh mawar*. Saya sendiri bersama teman-teman damicea ngate pengajian di kawasan buruh. Hujung yang meminta kalanya biar orang-orang paham apa yang sebenarnya dilakukan Yasanti. (Wawancara, 7 Maret 2004)

Para buruh yang aktif mengikuti kegiatan Yasanti memiliki andil besar dalam menjaga Yasanti agar terhindar dari kecurigaan perusahaan dan aparat keamanan. Buruh yang mengenal dan sering berbincang-bincang dengan aparat keamanan selalu melaporkan kepada Yasanti tentang apa yang mereka pertanyakan atau apa yang ditanyakan intel kepada mereka. Para buruh juga mengabarkan kepada aparat keamanan bahwa Yasanti tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan. Amin Muftiyannah mengemukakan

Arwah-temun (buruh) menubuni. Ada salah satu orang SP5I yang juga ikut kegiatan di Yasanti. Dia menyatakan ke personalia Yasanti tidak seperti yang dibayangkan SP5I kan sering mengadakan pelatihan. Mereka sering tanya-menanya apa yang para Yasanti membenarkan ahematif materi itu pendekatan dari sisi personalia. Terus dari sisi intel ada juga teman yang mendekati terus. Intinya menjaga agar Yasanti dan teman-temannya yang ikut Yasanti jangan kena duluan. Yasanti bisa saja dengan jujur mengatakan apa yang dilakukan Yasanti, tapi kami khawatir menimbulkan dampak ke buruh. (Wawancara, 1 Maret 2003)

Berkas dukungan dari anggota kelompok dampingan Yasanti, keberadaan Yasanti di Sukoharjo pasca aksi mogok di PT Sritex menjadi aman dan Yasanti dapat kembali melanjutkan kegiatan.

D. Terpinggalkannya Agenda Pemberdayaan Perempuan

Perubahan strategi gerakan Yasanti ke arah politik sejak tahun 1992 yang dianda dengan konsentrasi program-program mobilisasi dan advokasi pertunjukan pada akhirnya membuat agenda pemberdayaan perempuan menjadi terpinggirkan. Budi Wahyuni mengemukakan bahwa sejak Rencana 1992 visi dan misi Yasanti dalam memberdayakan perempuan patut dipertanyakan. Ia mengkritik bahwa ketika Yasanti menentulkan visi dan misi perjalan ke arah politik dengan

melakukan pemberdayaan buruh. nafas perempuan tidak nampak, karena yang nampak hanya nafas buruh dan tidak ada perbedaan antara buruh laki-laki dan perempuan. Banyaknya buruh laki-laki dalam kelompok yang dibangun Yasanti, terutama di Sukoharjo juga layak dipertanyakan jika Yasanti masih mengklaim diri sebagai organisasi yang memberdayakan perempuan (Mentubessi Ruyun, 20 Desember 1996)

Yasanti menyadari bahwa ada ketidaksesuaian antara visi dan misi Yasanti yang diuraikan dalam Akte pendirian Yayasan dengan ketentuan Perencanaan Strategis tahun 1992-1994. Dalam Akte Pendirian disebutkan bahwa Yasanti didirikan dengan tujuan untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Dengan demikian perhatian Yasanti sebenarnya adalah masalah perempuan. Sementara itu dalam Perencanaan Strategis 1992-1994 visi dan misi Yasanti bergeser kepada masalah perubahan, terutama buruh perempuan. Dua misi yang berbeda ini mendorong Yasanti melakukan evaluasi diri untuk melihat keefektifan apa yang sebenarnya hendak diperjuangkan. Sebagai organisasi yang pada awalnya bertujuan untuk memberdayakan perempuan Yasanti menyadari masih kurang melakukan aktivitas ke arah itu karena belum mampu mengangkat isu-isu perempuan dalam semua kegiatannya. Demikian pula jika mengacu pada Rencana 1992-1994 yang menegaskan visi dan misi Yasanti untuk menanggapi masalah perubahan pun masih menimbulkan kegunaan bagi para aktivis Yasanti. Konsentris pada isu perubahan semestinya membawa konsekuensi bahwa kelompok perempuan yang lain semacam buruh gedung, primuniaga dan remaja putus sekolah hanya merupakan kegiatan tambahan. Namun pada kenyataannya

energi yang dipergunakan Yasanti untuk menanganikan kelompok-kelompok ini sama besar dengan yang dilakukannya untuk kelompok buruh pabrik, sehingga menguras tenaga, waktu dan dana. Terlebih lagi hasil yang dicapai Yasanti sejak memusatkan strategi ke arah politik pada tahun 1992, baik di bidang perburuhan maupun dalam masalah perempuan tidak jelas. Selama beberapa tahun menangani isu perburuhan Yasanti menyadari tidak mempunyai kapabilitas dan kapabilitas yang memadai untuk menangani persoalan perburuhan sebagai isu utama organisasi. Hal tersebut dibuktikan dengan kurang maksimalnya pekerjaan Yasanti di bidang perburuhan, sehingga klaim Yasanti sebagai omong yang menangani isu buruh perempuan sebagai tujuan utama banyak dipertanyakan kembali. Perhatian Yasanti dalam menangani masalah buruh perempuan secara khusus tidak nampak dalam aktivitasnya, sehingga Yasanti tidak mampu mengangkat masalah spesifik buruh perempuan. (Membaca Rapat, 15 Juni 1996)

Menurut Kusyuniati ketidakjelasan hasil yang dicapai Yasanti sejak menggeser strategi gerakan ke arah politik disebabkan karena program-program yang dilakukan Yasanti terjebak pada ukuran fikturnya pertemuan, bukan isi dan penemuan. Selain itu para aktivis Yasanti tidak memasukkan analisis gender dalam menanganikan masalah perburuhan sehingga nafas perempuan tidak nampak dalam program-program Yasanti. Secara internal para aktivis Yasanti tidak pernah melakukan kesepakatan bersama padahal kesepakatan sangat perlu dan harus dipertahankan sejak awal aktivis bergabung apakah ia setuju atau tidak dengan visi dan misi Yasanti. (Membaca Rapat, 20 Desember 1996)

E. Yasanti Pasa Soeharto: Peluang yang Lebih Terbuka

Sejak tahun 1998 Yasanti tidak lagi menggunakan kursus menjahit sebagai *entry-point* untuk melakukan diskusi perburuhan. Amin Mufitiyasah menjelaskan bahwa peningkatan pendidikan buruh menjadikan mereka lebih berani mendiskusikan hak-hak buruh.

Kalau dulu buruh itu lulusan SD, SMP, sekarang mereka lulusan SMA. Mereka lebih berani diajak diskusi tanpa perlu lagi kursus-kursus *umum*, jadi langsung diskusi (Amin Mufitiyasah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Factor penting lain yang membuka peluang Yasanti melakukan diskusi perburuhan secara terbuka adalah jatuhnya Soeharto, sehingga Yasanti lebih bebas untuk mengajak buruh berkumpul mendiskusikan hak-hak mereka.

Lengsernya Soeharto membuat kita agak takut lagi diskusi. Mungkin kalau Soeharto agak jatuh kita disampingnya agak langsung, kita *nyam-nyam* (Amin Mufitiyasah, Wawancara tanggal 11 Mei 2004)

Yasanti melihat jatuhnya Soeharto memberikan peluang yang terbuka bagi perempuan untuk berkoprak lebih jauh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar mendapatkan hak dan kewajiban yang setara dan adil dengan laki-laki. Yasanti memperjuangkan kepentingan politik perempuan melalui pendidikan politik bagi buruh perempuan untuk meningkatkan kesadaran politik serta meningkatkan kemampuan buruh perempuan agar mampu memperjuangkan hak-hak politiknya. Pendidikan politik dilakukan melalui media dialog interaktif di radio. Dalam setiap diskusi Yasanti mengundang sekitar 20 orang peserta yang mayoritas terdiri dari perempuan untuk mengikuti dialog interaktif. Mereka adalah para buruh, aktivis buruh, dan ormas di kawasan industri Jawa Tengah

seperti Ungaran, Bawen, Kemuning, Sukatiga, Semarang. Sebagai narasumber Yessati mengadirkan beberapa aktivis perempuan dan pakar hukum yang membahas topik diskusi yang berbeda, antara lain kesadaran politik perempuan, hubungan perempuan dalam politik, perempuan dan politik hukum di Indonesia dan peran perempuan dalam politik.

Selama melakukan pendidikan politik untuk buruh perempuan Yessati mendapati bahwa kesadaran politik buruh perempuan maupun masyarakat pada umumnya masih kurang. Hal itu terlihat dari berbagai komentar yang muncul sebagai berikut: "Kita tidak perlu sahar politik, yang penting apa? Berhik baik, berak sejahtera, politik hantar, politik jaker", "tegas perempuan adalah mendidik anak", "anak mau karena anak perempuan mendidik anak".

Selama melakukan pendidikan politik melalui pelipihan penyadaran dan dialog interaktif di radio Yessati juga menerbitkan kartu pos sebagai media untuk melakukan penyadaran politik bagi masyarakat yang lebih luas. Kartu pos-kartu pos tersebut bertuliskan "keperluan perempuan adalah keperluan politik", "perempuan berhak memikulakan anak memulai nafkah dan perempuan berhak memikulakan anak aktif berorganisasi". Kartu pos tersebut disebarluaskan di kalangan buruh, aktivis buruh dan ormas di Semarang, Yogyakarta, Bandung, Jakarta, Tangerang, Bekasi dan Surabaya.¹²

Yessati juga melihat bahwa beramaan waktu dengan jatuhnya Soeharto, keceruntuhan ekonomi yang dialami Indonesia akibat krisis ekonomi tahun 1998

¹² Lihat Yessati, Laporan Program Pemberdayaan Buruh Perempuan melalui Pendidikan Politik Periode Oktober-Desember 1999 dan Yessati, Dialog Interaktif Kerjasama Radio Raska Dengan Utusan Lapangan dengan Yayasan Aman Swani, November-Desember 1999

telah menyebabkan kondisi kehidupan ekonomi buruh sangat memprihatinkan. Kasus PHK karena perusahaan tidak mampu lagi mempekerjakan banyak buruh dan meningkatnya harga-harga kebutuhan hidup membuat sebagian buruh menghadapi imbas krisis ekonomi dengan merosotnya kualitas dan kuantitas pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Menyikapi fenomena imbas krisis ekonomi dalam kehidupan buruh, maka sejak tahun 2002 Yayasan kembali melakukan pemberdayaan ekonomi, sebuah agenda yang pernah menjadi fokus Yayasan pada dekade 1980-an. Pengujian ekonomi tidak lagi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan keterampilan, namun dengan membentuk Usaha Bersama (UB) yang mengelola wali.

Sebagai kesimpulan singkat, pergeseran strategi gerakan Yayasan ke arah politik sejak awal dekade 1990-an menggantikan strategi ekonomis pada dekade 1980-an sebagaimana ditunjukkan pada bagian awal Bab V ini memperlembatkan pengaruh pembingkai isu global, yaitu HAM, bagi strategi yang diambil oleh Yayasan. Pergeseran strategi ini juga berkaitan dengan peluang untuk mendapatkan dana dari lembaga donor bagi agenda kegiatan omop yang mendapat minat pada isu HAM.

Ketika Yayasan melakukan pergeseran strategi gerakan sebagai respon penyebaran isu global, konteks politik nasional yang diwarnai oleh konflik etnis dan kebangkitan gerakan-gerakan oposisi memberi kemungkinan bagi kelangsungan gerakan Yayasan. Konteks nasional tersebut menjadi peluang atau kesempatan politik bagi Yayasan untuk melakukan mobilisasi dukungan dari para aktivis mahasiswa dan aktivis omop dalam mempersiapkan dan melakukan aksi

mogok buruh yang merupakan agenda politik utama sejak Yasanti menggeser strategi gerakan ke arah politik.

Namun demikian konteks politik nasional yang tidak memberi peluang bagi Yasanti untuk memobilisasi aksi mogok buruh mendorong Yasanti harus melaksanakan kegiatan-kegiatan kamouflage untuk menutupi aksi mobilisasi buruh. Kegiatan-kegiatan kamouflage tersebut dilakukan dalam bentuk kursus-kursus keterampilan dan kegiatan kesenian. Fenomena ini menunjukkan bahwa kesempatan politik mempengaruhi strategi yang harus diambil untuk mengatasi kelangkaan gerakan.



BAB VI

YASANTI DALAM PERSPEKTIF GERAKAN SOSIAL

Pada bab VI berikut ketelahan dan dinamika gerakan Yasanti akan dianalisis dan direkonstruksi perjalan sosial. Analisis gerakan Yasanti tentunya akan dipandu dengan teori struktur kesempulan politik (*political opportunity structure*), struktur mobilisasi (*mobilization structure*) dan pembungkaman (*repression*) perjalan sosial dari McAdam, McCarthy dan Zald. Namun demikian untuk memberikan gambaran lebih utuh tentang sosok Yasanti sebagai tokoh sebuah gerakan perempuan dalam analisis tentang Yasanti juga akan diperhatikan berbagai temuan dari para pengkaji gerakan sosial yang lain.

A. Pendukung Kelahiran Gerakan

Kelahiran sebuah gerakan berkaitan dengan rasa ketidakpuasan seseorang atau sekelompok orang atas suatu keadaan, sehingga menimbulkan keinginan untuk menumbun perubahan. Faktor ketidakpuasan merupakan kunci untuk menjelaskan gerakan sosial karena rasa ketidakpuasan dapat mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan mobilisasi. Tanpa didahului oleh timbulnya rasa ketidakpuasan atau kekecewaan, orang tidak akan memobilisasi gerakan, sekalipun ada kesempatan untuk melakukannya. (McAdam, McCarthy dan Zald, 2004: 5)

Seperti dengan argumentasi McAdam, McCarthy dan Zald dalam studi tentang gerakan perempuan di Perancis, Louise Tilly (1981) mengemukakan

bahwa masalahnya gerakan perempuan di Perancis pada abad ke-19 juga didorong oleh ketidakpuasan kaum perempuan akibat ketidakadilan kepentingan serta hak-hak perempuan. Secara bergeser-mesri kaum perempuan yang dipinpin oleh kelompok perempuan kelas borjuis menyerukan bantuan agar pemerintah memperhatikan kepentingan perempuan.

Kelahiran Yasanti mengaitkan argumen-argumen tentang faktor ketidakpuasan atau kekecewaan sebagai pendorong kelahiran gerakan. Sebagaimana telah ditunjukkan pada bab III, konteks ketidakadilan global dan nasional mendorong kelahiran gerakan-gerakan sosial untuk menentang ketidakadilan, termasuk salah satu di antaranya adalah Yasanti. Fenomena ketidakadilan terhadap perempuan dalam bentuk marginalisasi perempuan dalam pembangkitan yang tidak saja terjadi di Indonesia, namun juga negara-negara berkembang yang lain melahirkan kesadaran dan keprihatinan sekelompok perempuan di Yogyakarta, dan kemudian mendorong keinginan mereka untuk mendirikan Yasanti sebagai organisasi pembela kepentingan perempuan, terutama kelas bawah.

Berbeda dengan kebanyakan organisasi perempuan feminis, kelahiran Yasanti tidak didorong oleh pengalihan kepentingan perempuan yang dialokasikan sendiri oleh para aktivisnya. Hal ini mengakibatkan aspek emosional ketidakpuasan para aktivis Yasanti lebih berwujud keprihatinan atas kondisi yang menimpa kelompok lain (perempuan kelas bawah), bukan ekspresi-ekspresi emosional kemarahan, ketiduran pada laki-laki sebagaimana sering

ditunjukkan oleh para feminis yang mengalami sendiri penindasan atau kekerasan terhadap perempuan.

Meskipun McAdam, McCarthy dan Zald (2004) meyakini bahwa kelahiran gerakan didukung oleh rasa kekecewaan, namun faktor kekecewaan atau ketidakpuasan semata-mata tidaklah cukup untuk melahirkan gerakan. Gerakan lahir jika tersedia kesempatan politik untuk melakukan gerakan. Faktor kekecewaan atau ketidakpuasan tidaklah cukup untuk mendukung kelahiran gerakan jika tidak didukung oleh tersedianya kesempatan politik untuk melakukan gerakan. Struktur kesempatan politik (*Political Opportunity Structure*) yang dihadapi oleh gerakan akan menentukan apakah sebuah gerakan akan berhasil dibangun karena mendapatkan peluang untuk lahir ataukah mengalami hambatan karena kesempatan politik tidak memungkinkan kelahiran gerakan. Ini adalah aspek yang penting, kesempatan politik juga kelahiran gerakan.

Munculnya gerakan-gerakan perempuan di berbagai negara dapat dipelajari dari argumen McAdam dan kawan-kawan tersebut. Gerakan feminis di Palestina yang lahir dan berkembang pada dekade 1990-an bukan semata-mata dilandasi oleh rasa kekecewaan perempuan Palestina akibat kondisi sosial budaya yang telah sekian lama meninggikan mereka, namun juga terkait konteks politik nasional dan global yang membuka peluang bagi perkembangan gerakan dan gerakan feminis (Abdulhadi, 1998). Demikian pula masalahnya gerakan perempuan di Perancis pada abad ke-19. Louise Tilly (1981) mengemukakan bahwa gerakan perempuan pada saat itu berkembang

akibat ketidakpuasan atas pengabdian kepemimpinan perempuan, sementara kesempatan bagi kaum perempuan untuk menuntai pemecahan kepemimpinan mereka telah mulai terbuka akibat pesangulatan kemakmuran ekonomi dan jumlah perempuan terpelajar. Dengan demikian ketabiran gerakan tidak hanya didorong oleh faktor ketidakpuasan, namun juga harus ada kesempatan politik untuk melakukan gerakan.

Ketabiran Yasanti juga dilatubelakangi oleh adanya kesempatan politik yang memberi peluang bagi ketabiran gerakan perempuan, baik di level global maupun nasional. Berkaitan dunia pada isu perempuan dan pemerintahan di negara berkembang memiliki peran penting dalam perincian gagasan bedanya Yasanti. Maraknya literatur-literatur studi perempuan dan diskusi-diskusi tentang marginalisasi perempuan dalam pembangunan di kalangan feminis telah mengilhami dan mendorong lahirnya keinginan untuk mendirikan organisasi perempuan yang dapat membela kepentingan perempuan kelas bawah sebagai kelompok masyarakat yang paling terpinggirkan dalam proses pembangunan. Di sini konsep-konsep antar feminis berperan penting dalam menyebarkan ideologi feminisme ke Indonesia, terutama dalam bentuk penyebaran wacana feminisme melalui diskusi-diskusi. Kesempatan politik yang mendukung ketabiran Yasanti tersebut menyangkut bentuk kesempatan politik yang bersifat non insiniasi politik. Sejalan dengan argumen Ferre dan Mueller (2007) fenomena yang ditunjukkan Yasanti merupakan ciri khas gerakan perempuan. Ferre dan Mueller mengemukakan bahwa kesempatan politik dan dukungan bagi gerakan perempuan telah

banyak ditemukan pada wilayah-wilayah insidional yang bersifat "politik", yaitu masyarakat, organisasi-organisasi di level grassroots, dan sektor-sektor pelayanan sosial. Kelompok masyarakat inilah yang juga memberikan kesempatan dan dukungan bagi kelahiran Yasanti. Dukungan dari sebagian aktivis ormas senior yang mendominasi gagasan pembesaran organisasi perempuan yang memihak kaum perempuan kelas bawah menjadi sumbu yang sangat berharga dalam merintis pembentukan Yasanti. Terlihat juga di tengah-tengah unit-unit berbagai lembaga, dukungan tersebut berperan penting dalam membentuk semangat bagi Yasanti. Fenomena ini menunjukkan kelahiran Yasanti pada tahun 1982 lebih diilhami serta didorong oleh isu-isu global dan nasional, serta dukungan dari kelompok-kelompok di masyarakat, dan tidak dikarenakan ada sekelompok diri yang mendukung kelahiran gerakan (lihat tabel 6.1.).

Tabel 6.1.
Kesempatan Politik Pendorong Kelahiran Yasanti

Areas	Kesempatan Politik
Nasional	Peluang pertumbuhan ormas developmentalis (tidak ada represi negara) Dukungan kaum feminis dan aktivis ormas
Internasional	Perhatian dunia pada isu marginalisasi perempuan

Sumber: Diolah dari data penelitian

Meskipun demikian, kelahiran Yasanti juga berkait dengan konteks politik nasional Indonesia pada awal dekade 1980-an yang membuka peluang

bagi kelahirannya. Pertumbuhan organisasi-organisasi non-pemerintah (nonop) developmentalis yang dihangun oleh para mantan aktivis nasionalis pada dekade 1970-an dan 1980-an (masa penerapan kebijakan NKK) turut mendorong kelahiran Yasanti. Terlebih lagi keberadaan orop-orop developmentalis yang tumbuh mengapur pada dekade 1980-an tidak mendapatkan hambatan atau represi dari rezim penguasa. Aktivitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan orop-butuhlah aktivitas yang dianggap pembaharuan eksistensi rezim Ornop justru dipandang sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan. Ornop-orop developmentalis semacam LSP (Lembaga Studi Pembangunan), Bina Desa, LPTES, YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), Walhi (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) adalah sederetan orop yang dipandang moderat dan memiliki hubungan baik dengan pemerintah.⁸ Kontak-kontak yang dibangun para aktivis Yasanti dengan para aktivis orop yang lebih senior, terutama dengan aktivis LSP menyebabkan Yasanti terpengaruh oleh model pemberdayaan masyarakat seperti dilakukan orop-orop developmentalis dan tentu saja tidak mendapatkan hambatan dari negara. Sebagaimana pengalaman Yasanti, kegiatan-kegiatan pemberdayaan perempuan kelas bawah melalui program *women-generating* di Kuloaprogo justru mendapat dukungan dari negara dalam bentuk fasilitas untuk memajukan kegiatan kelompok. Ketidadaan represi negara ini sebagaimana dikemukakan McAdams (2004) merupakan syarat

⁸ Sebagian di antara orop developmentalis yang moderat pada dekade 1970-an dan 1980-an ini kemudian mengikuti proses radikalisasi pada dekade 1990-an dengan menggeser perhatian pada isu-isu hak asasi manusia dan demokrasi.

utama untuk mendukung ketertarikan dan kelengkapan sebuah gerakan karena dukungan dari berbagai kelompok bagi gerakan tidak akan ada artinya jika negara menerapkan represi pada gerakan.

B. Pembangkitan Isa dan Mobilisasi Gerakan

Agenda gerakan Yasanti sepanjang dekade 1980-an dan 1990-an sangat dipengaruhi oleh pembangkitan isa global. Ketika pendekatan *Women in Development* (WID) sedang mengemuka pada dekade 1980-an, Yasanti ikut berpengaruh sehingga memulih mekanisme agenda pemberdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat *women-generated*. Namun di tengah-tengah program *women-generated* Yasanti melakukan penyadaran hak-hak perempuan dan kritik terhadap politik gender Orde Baru secara tersembunyi yang disisipkan ketika berlangsung kegiatan keumpanan dan UB. Agenda penyadaran hak-hak perempuan inilah yang membedakan Yasanti dengan organisasi-organisasi perempuan berbentuk Orde Baru (PKK, Dharma Wanita) dan organisasi-organisasi perempuan yang terhegemoni oleh politik gender Orde Baru. Organisasi-organisasi perempuan ini semata-mata melibatkan program-program yang identik dengan peran perempuan dalam rumah tangga (termasuk di antaranya adalah bahan-bahan ketunpilan) tanpa kesadaran kritis akan kondisi ketidakadilan yang dialami perempuan Yasanti, sebaliknya lahir dan mengembangkan aktivitasnya dengan semangat untuk melawan (setara Julius dan Tersebut) ketidakadilan yang dialami perempuan kelas bawah, meskipun solusi politik yang dilakukan untuk mengangkat posisi bawah

perempuan berkesinambing dengan agenda kegiatan organisasi-organisasi perempuan bertukar Orde Baru akibat pengaruh pendekatan WID

Dalam pelaksanaan gerakan, pengeseran isu global berfokus pada penentuan agenda penhdayaan perempuan. Ketika pendekatan WID dipertanyakan oleh pendekatan *Gender and Development* (GAD) pada dekade 1990-an, Yasanti turut terpengaruh oleh pengeseran isu global dengan memperkaya agenda perjuangannya dalam bentuk kampanye dan sosialisasi kesadaran gender secara eksplisit dan terprogram (tidak lagi terdribung). Demikian pula penguatan isu HAM pada awal dekade 1990-an yang mempengaruhi Yasanti untuk menggeser strategi geraknya dan strategi ekonomi ke politik melalui kegiatan diskusi, pembiasaan, mobilisasi aksi buruh dan pembelaan kasus menunjukkan bahwa kecenderungan global sangat mempengaruhi visi dan misi gerakan Yasanti. Pengeseran agenda gerakan mengikuti arus global tersebut memperlihatkan bahwa Yasanti senantiasa menanggapi isu-isu global untuk menemukan agenda pembudayaan perempuan yang akan dilakukan. Pengeseran-pengeseran tersebut juga merupakan gambaran berlangsungnya proses pembingkaihan isu global secara terus-menerus oleh sebuah organisasi gerakan. Sebagaimana dikemukakan McAdams (2004) proses pembingkaihan akan terus berlangsung sepanjang perjalanan organisasi gerakan. Melalui proses pembingkaihan, isu-isu global secara terus-menerus dipahami dan dimaknai oleh Yasanti yang pada akhirnya mempengaruhi berlangsungnya pengeseran agenda dan strategi gerakan.

Janggi sebuah konsep kemampuan membingkai isu global yang sedang berkembang amatlah penting, terutama untuk memobilisasi dukungan Sundaram mencontohkan keberhasilan orisop-orisop perempuan dalam melakukan aksi kampanye anti kekerasan terhadap perempuan sejak pertengahan 1990-an tidak terlepas dari realita bahwa isu kekerasan terhadap perempuan merupakan isu perempuan yang mendapat perhatian internasional pada pertengahan 1990-an.² Perhatian internasional di sini meliputi dukungan masyarakat dalam kampanye gerakan perempuan dan dukungan dana dari lembaga donor untuk membiayai kampanye gerakan.

Pengalaman Yasanti membuktikan bahwa pembingkaiian isu global untuk menumbuhkan agenda gerakan telah membuktikan keberhasilan dalam memobilisasi dana dari lembaga-lembaga donor. Tidaklah mengherankan jika Yasanti sepenuhnya memperhatikan isu global karena sangat berkali dengan kesempatan untuk mendapatkan dana dari lembaga donor. Penyuarjamasuan kelompok dampaknya dengan berbagai aktivitasnya dan pemertukaran jaringan kerjasama antar orisop yang memiliki konsentrisasi isu yang sama juga membutuhkan dana yang besar. Peran lembaga donor menjadi penting karena Yasanti tidak mungkin hanya mengandalkan sumber dana untuk melakukan agenda kegiatan dan anggota kelompok dampaknya atau masyarakat.

Perhatian pada isu global juga penting mengingat jaringan kerjasama jaringan akan berkembang dengan aktif jika gerakan senantiasa merespon isu

² Lisa McIntosh Sundstrom, "Foreign Assistance, Transnational Networks, and NGO Development Leaders: From the Russian Campaign" dalam *Journal of International Studies* (London: Routledge, 2005), diakses 2 September 2005.

global. Hal ini bisa dilihat dan perkembangan pertumbuhan jaringan antar negara yang melibatkan Yasanti manakala isu baru muncul. Bertolak dari sini semakin banyak terlihat dalam kerjasama jaringan, maka gerakan akan semakin kuat. Yasanti selalu mengikuti isu global agar tidak ditunggalikan oleh sesama aktor gerakan perempuan dan gerakan buruh. Bagaimanapun kekuatan jaringan sangat berguna bagi Yasanti untuk mendapatkan dukungan atas kekuatan yang difasilitasi dan sehalinya Yasanti juga aktif mendukung kegiatan yang dilakukan antar lain atau mengkampanyekan isu yang menjadi perhatian bersama. Di sisi pertemuan-pertemuan antar sesama feminis, terutama di forum internasional menjadi media yang penting untuk melakukan kampanye isu-isu feminis dan mencari dukungan atas aktivitas-aktivitas yang dilakukan Yasanti. Ferrer dan Mueller (2002) menyimpulkan bahwa kompetensi-kompetensi internasional sangat berguna bagi gerakan perempuan dalam menggalang sumberdaya guna membangun jaringan advokasi antar negara maupun interpersonal akasis serta menjadi media untuk memusatkan hak-hak perempuan. Pertemuan berskala pada isu-isu feminis pada kompetensi-kompetensi internasional telah memperkuat jaringan kerjasama Yasanti dengan kelompok-kelompok feminis di berbagai negara. Sebagian program yang dilakukan Yasanti didukung oleh feminis dan luar negeri. Demikian pula jaringan kerjasama antar feminis telah memperkaya pengetahuan dan pengalaman Yasanti dalam mengkampanyekan isu kesetaraan gender.

Konsentrasi Yasanti pada strategi kampanye maupun politik melibatkan proses pembelajaran diproses (pengidentifikasian masalah dan prioritas)

(pemyelesaian masalah). Dalam pembinaan diwujudkan gagasan tentang pengalihan hak-hak buruh, terutama buruh perempuan dan ketimpangan gender yang diungkap Yasanti berperan penting dalam mengkonsolidasi rasa ketidakpuasan para anggota kelompok dampingan (terutama buruh perempuan) atas kondisi yang mereka alami dan yang telah lama mereka anggap sebagai sesuatu yang wajar. Yasanti telah menyadari tempo di mana para perempuan anggota kelompok dampingan dapat berbagi pengalaman, mendiskusikan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan dan rumah tangga, maupun pengalaman reproduksi dan ketidulayan sesuai mereka suatu topik yang sebelumnya dianggap tabu untuk dibicarakan.

Tuntutan pemenuhan hak-hak buruh dan pembagian peran yang adil dalam rumah tangga kemudian dilakukan sebagai solusi untuk mengenukkan buruh perempuan dan ketidakadilan di dalam rumah tangga (domestik) dan di tempat kerja (publik). Di dalam proses pembangunan prognostik ini kampanye ideologi kesetaraan gender yang dilakukan Yasanti secara mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain diharapkan mampu menunjukkan bagaimana relasi yang adil antara laki-laki dan perempuan dapat dicapai. Aktivitas tersebut mampu menarik perhatian masyarakat dan media massa sehingga menarik minat pada isu gender. Media massa, terutama stasiun radio ikut terpengaruh, sehingga tidak lagi hanya menyajikan berita dan siaran "program-program perempuan tradisional", seperti memasak, tata busana dan uia kecantikan, tetapi juga menampilkan wawancara dengan perempuan-perempuan feminis dengan tema-tema pembicaraan yang sebelumnya hampir

tidak pernah dibicarakan seperti hak-hak politik perempuan, seksualitas, kekerasan dan sebagainya.

C. Konteks Politik dan Strategi Gerakan

Yasami lahir dalam konteks politik gender Orde Baru yang sebenarnya tidak memberi peluang bagi kelahiran organisasi perempuan feminis (karena bertentangan dengan politik gender Orde Baru). Kebijakan Keam Soeharto membatasi peran perempuan di sektor domestik dengan mewajibkan kaum perempuan di seluruh pelosok Indonesia menjadi anggota PKK, sementara para perempuan ahli pegawai negeri diwajibkan menjadi anggota Dharma Wanita di kantor tempat suami bekerja. Organisasi-organisasi perempuan hentikan rezim menyuarakan kegunaannya pada para-peran domestik perempuan sebagai ibu yang harus mengurus rumah tangga, suami dan anak-anak, seperti kursus memasak, tata busana, keseimbangan hayati (psykanalis) dan Keluarga Berencana. Memahami kritik Maxine Molyneux (1986), organisasi perempuan hentikan rezim Soeharto hanya memperjuangkan kepentingan praktis perempuan, sementara kepentingan strategis perempuan diabaikan. Bahkan, organisasi-organisasi perempuan yang dikenal kritis memperjuangkan kepentingan strategis perempuan pada masa Orde Lama seperti Cierwani dan Perwari telah dihancurkan atau diabaikan oleh politik gender Orde Baru.

Dalam konteks politik gender Orde Baru, perjuangan Yasami yang secara kritis melihat posisi marginal perempuan kelas bawah sebagai kelompok yang terpinggirkan oleh pembangunan Orde Baru tidaklah mudah dilakukan

Pemilihan Yayasan juga media sosial (masyarakat dan negara patriarkis) membuat Yayasan harus mengambil strategi untuk melaksanakan gerakan feminis dalam rerum dan masyarakat yang patriarkis. Proses penyadaran hak-hak perempuan ditemus dalam wadah PKK dengan kegiatan ketampilan menjahit, sehingga menantik minat kaum perempuan untuk mengikuti kegiatan Yayasan dan tidak mengundang kecungahan masyarakat maupun aparat desa. Melalui organisasi PKK Yayasan melakukan proses pembingkajian isu tentang pelaksanaan hak asasi laki-laki dan perempuan Yayasan berupaya menggeser asumsi yang sudah diyakini sebagai kebenaran oleh masyarakat dengan menyebarkan persamaan hak asasi laki-laki dan perempuan dan latihan menjahit PKK.

Yasanti menyadari bahwa sebagai organisasi perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender, bertawan dengan masyarakat yang masih menganut nilai-nilai patriarkis pasti akan dihadapi oleh karena itu bentuk pendekatan Gender and Development (GAD) mengemuka sehingga membuka kesempatan untuk menyebarkan kesetaraan gender secara eksplisit. Yasanti tidak serta merta mengakhiri aktivitas *macone genderway*. Kegiatan kursus ketampilan tetap dilakukan karena menjadi media yang efektif untuk menantik kaum perempuan hadir dalam pertemuan. Selain itu pemahaman tentang kesetaraan gender tidak begitu saja dengan mudah diterima oleh kelompok danpingan. Yayasan tidak cukup menyartipukannya dalam bentuk pelatihan gender semata-mata. Namun secara terus-menerus menyisipkan penyadaran kesetaraan gender dalam berbagai forum pertemuan dengan buruh. Kualitas

disebut memperlihatkan bahwa kondisi lapangan komunitas harus yang partikular yang tidak memungkinkan untuk melakukan kampanye kewacanaan jender secara langsung. Yasanis harus menggunakan media kerempukan perempuan agar lebih mudah diterima oleh komunitas dampunannya

Pengalaman Yasanis menunjukkan bahwa faktor-faktor struktural dan kultural yang berpede turut membentuk dan mempengaruhi proses pembelajaran taktik gerakan Pilihan untuk menggunakan PKK sebagai jalan masuk agar Yasanis dapat diterima oleh komunitas perempuan dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat dan aparat negara memertemukan pilihan taktik yang dipengaruhi oleh faktor sosial budaya (kultural) masyarakat yang telah menerima bentuk-bentuk kegiatan perempuan sesuai dengan tugas kodrat perempuan sebagaimana dikawatirkan oleh masyarakat dan negara (patriarkis). Demikian pula bentuk-bentuk latihan kesenian seperti barayutan dan menan yang digunakan Yasanis sebagai taktik untuk menaruh agenda mobilisasi aksi harian. Penggunaan tradisi huta masyarakat lokal merupakan taktik Yasanis agar terhindar dari kecurigaan masyarakat dan aparat. Memanfaatkan PKK sebagai wadah untuk melakukan pengorganisasian perempuan dan penggunaan bentuk-bentuk kesenian yang digunakan masyarakat lokal merupakan bukti bahwa Yasanis memanfaatkan organisasi atau media yang bisa diterima oleh masyarakat untuk menjaga kelangsungan gerakan Pilihan Yasanis untuk memanfaatkan organisasi PKK serta melakukan kegiatan-kegiatan ketampalan dan kesenian daerah memperlihatkan bahwa

teknik yang diambil sebuah gerakan bergantung pada kesempatan politik yang tersedia, serta tempat di mana organisasi perempuan melakukan gerakan

Fenomena sebagaimana diunjukkan oleh Yasanti tersebut juga memperlihatkan bahwa konteks politik negara otoriter menyebabkan gerakan perempuan harus mengadopsi strategi untuk mempertahankan kelangsungan gerakan. Ferré dan Mueller (2002) mengamalkannya di negara-negara otoriter kelangsungan gerakan perempuan tidak terlepas dari strategi menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan perempuan bersifat apolitik, antara lain dengan mengambil bentuk mobilisasi yang berbeda dengan aksi yang dilakukan laki-laki. Oleh karena peran tradisional perempuan diidentikkan dengan tanggung jawab untuk memelihara keluarga, maka bentuk-bentuk mobilisasi yang juga identik dengan peran perempuan dalam rumah tangga seperti berjualan kaki, mengkilifing plastik, anambokot bus, perahu membawa pot dan paku atau rekabukukan seni tradisional lebih dipilih oleh para aktivis gerakan perempuan dalam menyuarakan tuntutan perempuan. Strategi melawan penguasa tersebut merefleksikan sumberdaya dan taktik yang kreatif dan gerakan perempuan. Berikut pilihan taktik yang kreatif kelompok-kelompok perempuan relatif dianggap kurang berbahaya dan mengancam eksistensi rezim dibandingkan kelompok laki-laki. Heronima (1994: 434) mengemukakan alasan tersebut menganggap aksi-aksi kelompok perempuan, terutama ketika intelektualisme menuntut perlindungan keluarga, pemenuhan kebutuhan hidup, pelaksanaan HAM dan sebagainya tidaklah bersifat politik, sehingga tidak mengancam eksistensi rezim dibandingkan aksi yang dilakukan laki-laki

Penguasa militer yang cenderung lebih memburuk-burukkan pada kelompok-kelompok perempuan dibandingkan kelompok-kelompok laki yang militan, mahasiswa atau organisasi buruh.

Pandangan rezim bahwa apa yang dilakukan perempuan bersifat apolitik pula yang telah menyelamatkan Yasanti dari kemiskinan aparat kemiliteran dan aparat desa ketika mengorganisir aksi demonstrasi huruh Tuluik dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat apolitik, seperti kursus menjahit, kursus bahasa Inggris dan kursus-kursus keterampilan yang lain untuk para buruh dampungan menjadi strategi yang sangat berguna dalam menyelamatkan Yasanti ketika diinterogasi aparat keamanan atau aparat desa tempat Yasanti melangsungkan kegiatan dan sekaligus menjadi kamudise untuk menutupi agenda advokasi perburuhan, termasuk pengorganisasian aksi mogok huruh. Kegiatan-kegiatan tersebut telah efektif menyelamatkan kelangsungan gerakan Yasanti dalam memobilisasi buruh.

Meskipun kegiatan Yasanti sangat diawasi oleh program-program ketertinggalan, tidaklah tepat menyebut Yasanti sebagai gerakan non politik. Kegiatan-kegiatan ketertinggalan yang dilakukan Yasanti merupakan langkah politik untuk memperbaiki kehidupan perempuan. Terlebih lagi agenda penyadaran hak-hak buruh yang dilakukan untuk para buruh industri di Cinguran adalah upaya politik untuk meningkatkan posisi tawar buruh terhadap-hadapan dengan perusahaan. West dan Blumberg (1990) pernah menggunakan bahwa selama ini aktivisme perempuan seringkali dimaknai bersifat apolitik akibat definisi politik yang sempit (membatasi kekuasaan

separat. Selama politik dikonseptualisasikan secara sempit sebagai hubungan formal dengan kekuasaan negara (kekusasaan dan asas), maka keterlibatan perempuan dalam gerakan-gerakan sosial dan partisipasinya sosial atau "kekusasaan dan hawa" atas semua berahankan. Bagaimana pun, aksi-aksi perempuan "dari bawah" adalah aksi politik. Karena itulah para pengkaji gerakan perempuan melalui lensasi struktur kesempatan politik dan McAdam, McCarthy dan Zald kurang memusatkan untuk menjelaskan gerakan perempuan karena tidak semua perempuan memiliki akses yang sama ke struktur politik. Teori struktur kesempatan politik kurang menaruh perhatian pada siapa aktor yang terlibat dalam aktivitas gerakan atau dengan kata lain terlalu menoveragamkan aktor gerakan.

Langkah taktis yang dilakukan Yasanti membuktikan argumen McAdam, McCarthy dan Zald (2004) bahwa ketangguhan hulu dan keberhasilan gerakan tidak lepas dari taktik yang diambil oleh organisasi gerakan. Sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan buruh, Yasanti sebenarnya sangat rawan menghadapi represi rezim Suharto yang dikenal sangat keras menindak aktor-aktor di balik aksi demonstrasi buruh. Namun hingga Suharto berhenti dari jabatannya pada tahun 1998 belum pernah seorang pun aktivis Yasanti yang ditangkap atau dihukum karena menggerakkan aksi demonstrasi hirut taktik yang dilakukan Yasanti, yaitu menunjukkan diri sebagai organisasi perempuan yang melakukan kegiatan-kegiatan kurus-ketrampilan, namun di balik kegiatan kegiatan ketrampilan tersebut melakukan diskusi perubahan dan pengorganisasian. Aksi mereka buruh telah terbukti

berhasil menyelamatkan Yasanti dari kecurigaan aparat dan mempertahankan kelangsungan gerakan. Pengalihan Yasanti membuktikan bahwa meskipun kalahnya dan kelangsungan gerakan sangat berkaitan dengan kesempatan politik, namun nasib suatu gerakan awal ditentukan oleh aksinya sendiri untuk mempertahankan kelangsungan gerakan.

Kelangsungan gerakan Yasanti juga tidak lepas dari kondisi politik nasional. Sebagaimana dikemukakan McAdam, McCarthy dan Zald (2004: 10) lingkungan politik dimana gerakan berlangsung senantiasa menjadi barometer atau kesempatan yang dapat mempengaruhi perkembangan gerakan, termasuk menciptakan bentuk (*form*) yang diambil oleh suatu gerakan. Namun kesempatan politik juga dapat diciptakan oleh sekelompok aktor yang berorganisasi dengan memarkatkan perubahan politik sebagai kesempatan untuk melakukan gerakan. Konteks politik nasional yang sedang berubah yang ditandai oleh melemahnya kekuatan rezim dan menguatnya kelompok-kelompok oposisi, terutama gerakan mahasiswa dimanfaatkan oleh Yasanti sebagai kesempatan untuk mendapatkan dukungan dalam memobilisasi aksi mogok buruh. Yasanti berhasil menggabung dukungan dan aktivis gerakan mahasiswa. Kekuatan aliansi juga dijalin dengan kalangan orasip, terutama dalam mempromosikan aksi demonstrasi buruh dan melakukan pembelaan luas perburuhan. Di sinilah terjadi proses pembingkasan kesempatan politik yang dilakukan Yasanti untuk mengembangkan gerakannya. Mobilisasi aksi mogok buruh yang diorganisasi Yasanti sejak tahun 1992 sangat terkait

dengan upaya Yasanti melihat peluang dalam konteks politik nasional untuk mendapatkan dukungan bagi gerakan yang dilakukan.

Dukungan kalangan aktivis mahasiswa bagi gerakan Yasanti semakin buktikan bahwa Yasanti berhasil melakukan pembingkaihan strategi isu perjuangannya (KAM) yang dikemas Yasanti dalam bentuk pembelaan buruh dan mobilisasi aksi mogok buruh selaras dengan semangat mahasiswa untuk melakukan perlawanan rakyat miskin dan menentang Orde Baru. Dengan strategi baru yang merupakan respon atas isu global Yasanti berhasil menarik perhatian kalangan aktivis mahasiswa dan utuk pada perlawanan Yasanti.

Konteks politik nasional juga sangat menentukan apakah Yasanti dapat melungsurkan kekuatan dengan aman atau tidak. Keputusan Yasanti untuk memunda aktivitasnya di Sukoharjo pada tahun 1996 akibat kondisi lapangan tidak aman untuk mengadakan diskusi perburuhan misalnya, memperlihatkan bahwa struktur kesempatan politik memainkan peran penting dalam menentukan keberlangsungan gerakan Yasanti. Formulasi kurdis politik yang sedang dihadapi menentukan benak atau tidaknya agenda gerakan Yasanti. Faktanya ini memperlihatkan bahwa kesempatan politik mempengaruhi pasang surut aktivitas gerakan.

Pada saat Yasanti mengubah strategi gerakan ke arah politik identitas Yasanti sebagai aktivis gerakan perempuan mulai memudar. Yasanti disubstitusikan dengan agenda diskusi perburuhan, aksi mogok buruh dan pembelaan kasus buruh. Langkah ini sebenarnya sangat strategis untuk memfokuskan

kepentingan huruh perempuan, namun sudah di lapangan menunjukkan keseriusan yang cukup besar. Masyarakat baru yang mengikuti diskusi perburuhan dan aksi demonstrasi huruh sudah mulai-laki, karena huruh perempuan sudah diajak ke dalam diskusi perburuhan dengan alasan rapat tidak punya waktu atau tidak keahuan oleh perusahaan. Kondisi ini mengakibatkan implementasi Rancangan kesetaraan gender yang seharusnya menjadi bagian penting yang harus diperhatikan oleh Yayasan sebagai aksi gerakan perempuan menjadi sulit dilakukan di lapangan.

D. Peluang Dana dan Kelangsungan Gerakan

Keberhasilan gerakan perempuan dalam mengkampanyekan hak-hak perempuan tidak terlepas dari iklim yang mendukung perkembangan ideologi feminis. Dukungan-dukungan dalam bentuk publisitas, dukungan finansial dan keterlibatan masyarakat luas dalam mengkampanyekan dan menyukseskan hak-hak perempuan sangat menunjang kelangsungan dan keberhasilan gerakan feminis di berbagai negara (Layton, 1978: 298). Demikian pula kelangsungan gerakan Yayasan sangat didukung oleh keseriusan politik di tingkat internasional, terutama penyelenggaraan konferensi perempuan sedunia sejak Nanika hingga Beijing yang memungkinkan Yayasan berhasil memobilisasi sumber dana. Keberhasilan Yayasan dalam memobilisasi dana dan lembaga donor merupakan program sosialisasi kesetaraan gender yang dilakukan Yayasan, karena program-program menjadi lebih terstruktur, bahkan Yayasan berhasil membentuk tabung sebagai wahana untuk memvaripakan sumber

buah dan memsosialisasikan kesadaran gender. Sementara itu peluang dana dan lembaga donor untuk mengembangkan program-program kegiatan berbasis isu HAM sejak dekade 1990-an telah pula dimanfaatkan Yasanti untuk mengembangkan pengorganisasian baru melalui mobilisasi aksi massa, bentuk dan kegiatan-kegiatan advokasi perempuan. Peluang untuk mendapatkan dana dan lembaga-lembaga donor tersebut merupakan kesempatan politik bagi Yasanti untuk mengembangkan diri sebagai sebuah organisasi gerakan.

Karena bahwa kompetensi internasional dan penyelarasan isu global yang dikuasai dengan peluang dana dan lembaga donor telah mempengaruhi bentuk-bentuk kegiatan Yasanti menjadi bukti bahwa aspek internasional perlu diperhatikan dalam memahami perkembangan gerakan. Sebagaimana dikemukakan Stammes (1999) pengertian struktur kesempatan politik harus dimaknai secara luas dan dinamis. Artinya kesempatan politik bukan hanya berdimensi nasional sebagaimana dikemukakan McAdam, McCaughy dan Zald, namun juga berdimensi internasional.

Atau penting dukungan dana dan lembaga-lembaga internasional bagi perkembangan gerakan juga dikemukakan Kim D. Reinhart (2004) ketika menjelaskan bagaimana struktur politik dan konteks internasional sangat mempengaruhi pertumbuhan orang. Menurut Reinhart ketahanan dan perluasan Organisasi Antarpemerintah (*Intergovernmental Organizations (IGO)*) sejak Pasca Perang Dunia II telah mendorong aktor-aktor di masyarakat mengorganisir diri di lingkup global dan menjadikan sasaran-sasaran internasional sebagai lokasi aksinya. Evaluasi dan perkembangan IGO-NGO

dan rezim-rezim internasional juga berperan penting dalam membuka peluang kesempatan politik di level internasional (KRI-HKI) dan partisipasi internasional, seperti PHD, Tim Eropa H.CI, Yayasan-Yayasan semi-pemerintah dan Yayasan-Yayasan pribadi di luar negeri, serta Group Internasional *International Asia Consortium Agency* atau IACA berperan penting dalam memberikan sumber sumber manan seperti bulgah, subsidi atau kontrak-kontrak untuk umup-umup yang tersebar di berbagai negara bentuk bentuk sambungan ini telah membantu pertumbuhan dan perkembangan umup

Itagi Yayasan dari dan lembaga donor sangat mendukung perkembangan gerakan Dana yang diperoleh dan berbagai lembaga donor memiliki peran penting dalam mempromosikan program Yayasan di lapangan, meningkatkan kemampuan aktivis Yayasan dalam menganalisis dan memecahkan persoalan yang dihadapi kelompok dampangan, serta memperluas jaringan antar umup yang memiliki konsentrasi kegiatan yang sama dengan Yayasan Pada mobilisasi level mikro pengembangan kemampuan aktivis Yayasan melalui pelatihan-pelatihan pengembangan dan maupun pengorganisasian kelompok-kelompok dampangan sangat dirangsang oleh dana dan lembaga donor. Sementara mobilisasi level makro yang dilakukan dalam bentuk kontak-kontak antar jaringan umup di dalam dan di luar negeri melalui forum seminar, konferensi maupun pertemuan bersama juga dirangsang berkat dukungan dana dan lembaga donor. Dengan demikian perlu untuk menjelaskan dana berpengaruh pada mobilisasi organisasi Yayasan baik pada level mikro pengembangan kemampuan aktivis dan penguatan organisasi

maupun mobilisasi level mikro: pengisian jaringan dan kemampuan untuk memobilisir dukungan dan kelompok-kelompok yang bersedia mendukung gerakan Yasanti.

Dana yang diberikan oleh lembaga-lembaga donor pada gerakan omop seringkali memiliki keterkaitan dengan agenda yang dipromosikan oleh lembaga donor. Sundstrom menyebutkan bahwa omop yang mampu merumuskan tujuan selaras dengan norma-norma universal yang dipromosikan lembaga donor akan lebih mudah mencapai kesuksesan karena mendapat limpahan dukungan dana. Di sinilah peran dukungan dana sebagai alat untuk memobilisasikan norma-norma yang dipromosikan oleh lembaga donor terlihat. Namun demikian Sundstrom menambahkan bahwa keberhasilan mobilisasi omop tidak semata-mata disebabkan oleh dukungan dana, karena omop juga memerlukan dukungan dan masyarakat (domestik). Meskipun omop memiliki sumberdaya material yang melimpah, namun jika masyarakat domestik tidak mau mendukung maka omop tidak akan berhasil mencapai tujuan.¹

Selaras dengan pendapat Sundstrom, keberhasilan Yasanti dalam memobilisasi dana dari lembaga donor sangat terkait dengan kemampuan Yasanti dalam menangkap isu global yang sedang dipromosikan oleh lembaga donor. Kesengajaan Yasanti untuk selalu merespon isu global dan kemudian mencari lembaga donor mana yang memiliki perhatian pada isu tersebut

¹ Lisa Miriamah Sundstrom, "Foreign Assistance, International Norms, and NGO Development Success from the Human Campaign" *Asian Journal of Communication* (Singapore) 16(4): 107-127, July-September 2006. Diakses 7 September 2015.

mempertahankan peran yang besar dari lembaga donor bagi ketahanan gerakan Yasanti. Peranyaan yang kemudian muncul adalah agenda apa yang melatibekukung pemberian dana dari lembaga donor. Semua lembaga donor yang pernah membonkua dana untuk Yasanti (*Asia Foundation, Nuffield, Oxfam, Canada Fund, Bread for the World, Ford Foundation*) berasal dari negara-negara kapitalis Barat. Bisa jadi dukungan dana dari lembaga donor untuk program-program pemberdayaan perempuan kelas bawah sebagaimana dilakukan Yasanti memiliki agenda tersembunyi yang mengumungkan kapitalisme Barat.

II. Yasanti dalam Perspektif Gerakan Feminis

Sebagaimana kelahiran gerakan-gerakan feminis di negara lain, kelahiran Yasanti tidak terlepas dari keberhasilan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh rezim penguasa. Munculnya gerakan-gerakan feminis di berbagai negara sering dikandung dengan kemajuan pembangunan ekonomi yang telah membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Kaum perempuan berpendidikan tinggi inilah yang kemudian menjadi motor kelahiran gerakan feminis. Karena itulah feminisme sering diidentikkan dengan perempuan-perempuan kelas menengah terpelajar (Rasu, 1995: 2). Dalam konteks Orde Baru kaum perempuan pendidik inilah yang kemudian menggapas dan menyebarkan ide-ide feminis, sebagaimana ditunjukkan oleh para pendiri Yasanti dan juga organisasi-organisasi perempuan feminis sesudahnya, seperti Kalyanamitra, Solidaritas

Perempuan, Perempuan Merdeka, dan sebagainya. Para pendiri Yessati yang terdiri dari para mahasiswa menyalakan sumbu perjuangan kaum perempuan untuk menentang sebagai penggerak gerakan feminis di Indonesia.

Perjuangan gerakan feminis dapat dibedakan dengan perjuangan gerakan perempuan lainnya dalam hal isu-isu yang menjadi perjuangannya. Mengutip istilah Masrine Molymoux, isu-isu yang diusulkan gerakan feminis meniadakan kepemimpinan perempuan yang bernilai strategis, misalnya menuntut perlakuan yang adil bagi perempuan dalam lapangan kerja dan rumah tangga, menentang kekerasan terhadap perempuan, atau menuntut kesempatan bagi perempuan untuk masuk ke dalam lembaga-lembaga politik dan lembaga pembuat keputusan. Isu-isu tersebut menyuarakan kesetaraan gender di dalam berbagai aspek kehidupan. Debat hal ini upaya Yessati dalam mengorganisir kaum perempuan agar memiliki kesadaran dan keberanian untuk menuntut perlakuan yang adil di tempat kerja (upah yang layak, pembagian hak cuti, fasilitas kerja yang baik) dan rumah tangga (pembagian kerja dalam rumah tangga yang adil antara suami isteri) selaras dengan perjuangan kaum feminis. Agenda-agenda yang diadukan Yessati dalam melakukan pemberdayaan perempuan melalui LDKW, diskusi, pengajian semuanya menitikberatkan strategi Yessati untuk membuat kaum perempuan memiliki kesadaran akan hak-hak mereka sebagai perempuan dan sekaligus memiliki keberanian untuk berpesta dan menuntut pemenuhan hak di ruang publik. Namun demikian sebagai gerakan feminis target Yessati dalam memberdayakan perempuan baru nampak keberhasilannya dalam bentuk kemandirian ekonomi, sementara relasi

yang adil dalam rumah tangga dan perjuangan hak perempuan di sektor publik rumah yang adil hak cuti hamil, cuti hamil, lingkungan kerja yang sehat masih terus diperjuangkan

Aktivitas atau program penyadaran hak-hak perempuan yang dilakukan Yayasan menjadi alternatif bagi kaum perempuan yang sebelumnya hanya mengenal kegiatan perempuan lewat PKK (meskipun ketika berdirinya Yayasan mensosialisasikan forum PKK sebagai strategi masuk ke dalam komunitas) Wacana yang ditawarkan Yayasan berbeda dengan pandangan dan perilaku tentang peran perempuan dalam masyarakat (negara Orde Baru)¹ Yayasan membuka wacana bahwa perempuan tidak hanya berperan sebatas kapasitasnya sebagai ibu yang melahirkan anak dan kemudian membesarkan serta mengasuh anak-anak mereka lebih daripada itu. Yayasan berperan besar dalam membuka wacana bahwa perempuan adalah warga negara yang memiliki ruang sosial budaya politik dan ekonomi yang sama dengan laki-laki, sehingga mereka harus diberi kesempatan sebagaimana dimiliki laki-laki. Wacana inilah yang tidak pernah disuarakan oleh organisasi PKK atau organisasi-organisasi perempuan bertepatan Orde Baru lainnya.

Yayasan merupakan representasi bentuk reaksi terhadap marginalisasi perempuan miskin yang kemudian melahirkan gerakan untuk memperbaiki kondisi perempuan melalui pemberdayaan ekonomi Tahun 1980-an dan

¹ Susa Yulita Djaja dan Ellya Anahar (1989: 3-10) mengemukakan hubungan perempuan dengan negara dapat dilihat dari lima bentuk: (1) sebagai perempuan sebagai pemenuh ketertarikan kelompok-kelompok etnis; (2) sebagai pemenuh harapan kelompok etnis; (3) sebagai aktor dalam reproduksi ideologi dan budaya di dalam masyarakat; (4) sebagai penerima kebijakan etnis dan (5) sebagai aktor dalam perjuangan ekonomi politik dan militer di tingkat nasional.

pemberdayaan politik (1990-an). Oleh karenanya Elindge (1984: 44) menggolongkan model gerakan Yasumi dalam hubungannya dengan negara sebagai model pemberdayaan di level grassroots. Untuk melihat lebih jauh keragaman model hubungan gerakan umum dengan negara Elindge membuat tipologi seperti terlihat pada tabel 5.2

Tabel 5.2
Model Hubungan Ornop dan Negara

ORIENTASI	MODEL ORNOP		
	1 Ya	2 Terbatas	3 Tidak
Kejasama dengan Program Program Pemerintah			
Pembangunan atau Mobilisasi	Pembangunan	Mobilisasi	Mobilisasi
Partisipasi Struktur Negara	Sedang	Tinggi	Rendah
Hubungan antara Kelompok-Kelompok Masyarakat dan Gerakan Ornop	Semi terpusat	Sangat terpusat	tersebar
Orientasi ke Struktur Negara	Antagonis	menyuarakan	menyuarakan

Sumber: Philip Elindge "NGO and the State in Indonesia" dalam *Prisma* (No. 47 Desember 1989) Hal. 47

Yasumi, dari kata-kata upolagi gerakan umum versi Elindge dapat dikelompokkan ke dalam model ketiga dengan ciri fokus kegiatan lebih bersifat lokal, dampak regional. Konsep mobilisasi yang dilakukan lebih menekankan pada aspek pencapaian kesadaran dan penyadaran baik dibandingkan melakukan kampanye-kampanye untuk mengubah kebijakan

Yasanti melihat perubahan sosial tidak terletak pada perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah, namun pada keberhasilan pembentukan kelompok-kelompok mandiri, dengan keyakinan bahwa dari kelompok-kelompok semacam itu gerakan massa yang kuat akan muncul.

Melalui gerakan Yasanti yang dilakukan pada level grassroots menyebarkan Yasanti harus berhadapan dengan realita kekuasaan negara otoritarian dan fenomena masyarakat patriarkis. Langkah Yasanti mengorganisir perempuan melalui kegiatan-kegiatan ketangkulan memanfaatkan forum PKK dan pengajian menunjukkan kehati-hatian Yasanti dalam menyebarkan ide-ide feminis di masyarakat. Cara ini terbukti efektif untuk mengumpulkan dan mengorganisir perempuan, karena banyak perempuan yang tertarik untuk mengikuti kegiatan Yasanti. Sayang sekali ideologi kesetaraan gender yang diusulkan Yasanti sebagai gerakan feminis belum secara efektif menyentuh kesadaran anggota dampungan. Ketertarikan kaum perempuan pada Yasanti lebih dikarenakan Yasanti memberikan program-program keterampilan yang bermanfaat sebagai bentuk tambahan penghasilan. Sementara anggota dampungan laki-laki tertarik mengikuti kegiatan Yasanti dikarenakan mendapatkan pengetahuan tentang hak-hak buruh dan advokasi perburuhan ketika mereka (buruh laki-laki) harus berhadapan dengan ketidakadilan dari pihak perusahaan. Di sini keberhasilan Yasanti dalam sosialisasi anggota dampungan lebih terlihat dalam kapasitas Yasanti sebagai organisasi pembela buruh. Sementara sebagai organisasi perempuan feminis pemertahan ideologi kesetaraan gender masih kurang

menyentuh kesetaraan anggota kelompok disamping, terbukti sehingga kelas anggota kelompok disamping masih mengenyaji tanggung jawab urusan rumah tangga terleak di tangan perempuan dan buruh laki-laki masih enggan jika hak mereka disamakan dengan hak satu atau huruf perempuan. Kemudian kesetaraan para anggota kelompok disamping untuk meneruskan aktivitas kelompok (dengan atau tanpa Yayasan) hingga saat ini membuktikan keberhasilan Yayasan dalam melakukan pengorganisasian kelompok. Upaya mengoptimal dan memelihara ideologi kesetaraan gender telah terlihat keberhasilannya di tingkat kerjasama antar jaringan umum perempuan, terbukti dengan berbagai kampanye kesetaraan gender melalui seminar, media massa, dan sosialisasi langsung yang dilakukan secara bersama-sama.

Sebagai penutup Bab VI, gambaran kelahiran dan dinamika gerakan Yayasan selama masa Orde Baru dan dimensi kesetaraan antara struktur kesempatan politik mobilisasi gerakan dan pembungkaman dapat dipetakan pada tabel 6.1. Seperti ditunjukkan pada analisis terdahulu, aspek yang dimaksudkan dalam analisis ini mencakup isu-isu global sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an, sementara kesempatan politik yang dihadapi Yayasan diabdikan menjadi kesempatan politik dan global. Mobilisasi yang dilakukan Yayasan bisa dilihat dari sifat agenda gerakan yang dilakukan, yaitu apa temuan, media apa yang digunakan untuk melakukan pemberdayaan perempuan, dan dimana Yayasan merencanakan dukungan gerakan.

Tabel 6.3.
Bingkai, Keempatan Politik
dan Mobilisasi Gerakan Yasanti

BINGKAI (Wacana dan isu Global)	KESEMPATAN POLITIK		MOBILISASI			
	Nasional	Global	Agenda Terbuka	Agenda Tertutup	Media	Dukung an
Women in Development (WID)	Dukung an negeri	Partisipasi internasional pejuang dewa	Income generasi ling	Kritik terhadap PROL Perempuan in hulk	PROL kolom pok perempuan putih	Aparat dewa, Jaringan ototot, smpaga dewa
Gender and Development (GAD)		Partisipasi internasional pejuang dewa	Sosial sasi dan kampa nye kewala an gender		Kolom pok perempuan dan laka- laka bulatn	Jaringan ototot, lambaga dewa
Kesehatan reproduksi		Partisipasi internasional pejuang dewa	Kampa nye kesehat an repro- diksi		Kolom pok perempuan dan laka- laka bulatn	Jaringan ototot, lambaga dewa
High Speed Mahasiswa	Konflik elit, ke bing kapan kolom pok oprotot	Partisipasi internasional pejuang dewa	Dukung perburu- an, mobilisasi elit buruh, perempuan in laka- bulatn		Kolom pok perempuan dan laka- laka bulatn	Jaringan ototot, elitotot mahasiswa, lambaga dewa

Sumber: data dan data penelitian

Tabel 6.3. menunjukkan bahwa dinamika gerakan Yasanti sangat berkaitan dengan wacana atau isu global yang sedang berkembang sebagai bagian yang mengilhami dan mendorong Yasanti untuk menentukan agenda

yang akan ditimbulkan di lapangan keragaman wacana atau isu global masing-masing berimplikasi pada kesempatan politik yang tersedia untuk melakukan agenda gerakan, baik di level global maupun nasional. Saat ini peluang dalam bentuk ketersediaan dana dari lembaga donor. Bentuk kesempatan politik yang dihadapi gerakan selanjutnya mempengaruhi kesadaran dalam menentukan bentuk-bentuk mobilisasi yang digunakan atau dilakukan dalam membentuk iklim opini perempuan



BAB VII

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

A. Kesimpulan

Konteks global dan nasional mendukung kelahiran Yayasan melalui proses pembingkasan isu global dan tersedianya kesempatan politik di level global dan nasional yang mendorong kelahiran gerakan. Isu global tentang marginalisasi perempuan dalam pembangunan telah melambungkan kepedulian terhadap kondisi hidup perempuan kelas bawah. Sementara itu perhatian dunia pada persoalan perempuan dan dorongan dorongan dari kaum feminis Indonesia telah menimbulkan kesempuran kepada sekelompok perempuan di Yogyakarta membentuk organisasi non-pemerintah (otonom) perempuan untuk membantu perempuan kelas bawah kelas dan ketertinggalan. Fenomena tersebut melahirkan organisasi sebagai berikut:

Gerakan perempuan kelas ketertinggalan yang bergerak memajukan melalui berbagai marginalisasi terhadap perempuan yang kemudian melahirkan kesadaran untuk mengorganisir perempuan dan kondisi marginal, sementara pada saat yang bersamaan konteks global dan nasional memberi peluang bagi kelahiran gerakan.

Pembungkasan konteks politik dan struktur masyarakat patriarkis menentukan taktik yang diambil oleh gerakan perempuan. Konteks sosial politik Indonesia yang diwarnai oleh kuatnya ideologi gender Uda Hara yang men subordinasikan perempuan (patriarkis) mengindikasikan Yayasan harus

melakukan pendekatan pada masyarakat dan aparat sebagai bagian dan mobilisasi untuk mendapatkan dukungan bagi aksi yang dilakukan. Penyadaran baik-huk perempuan yang dilakukan Yasanti sebagai sebuah organisasi feminis disisipkan di tengah-tengah kegiatan kursus ketumpan dalam forum PKK, sehingga tidak mengundang kecurigaan masyarakat dan aparat desa. Pilihan menggunakan organisasi PKK, sebagai organisasi perempuan berlatar resmi Orde Baru untuk dijadikan pintu masuk ke dalam komunitas perempuan merupakan taktik yang ditempuh Yasanti melalui proses pembingkaihan strategis kesempatan politik yang berlangsung pada saat itu.

Konteks global dan nasional selanjutnya mempengaruhi dinamika gerakan Yasanti melalui proses pembingkaihan isu atau wacana global dan kesempatan politik global dan nasional. Pembingkaihan isu atau wacana yang sedang mengemuka di lingkup global berimplikasi pada penentuan agenda gerakan Yasanti. Sementara itu keberadaan dana dan lembaga donor menjadi kesempatan politik untuk memperkaya agenda gerakan perempuan dan memperkuat jaringan dalam mengkampanyekan isu-isu feminis. Pembingkaihan isu global juga berpengaruh pada pergeseran strategi gerakan Yasanti. Penguatan isu HAM pada awal dekade 1990-an membawa implikasi pada perubahan strategi gerakan Yasanti dari ekonomi ke politik dengan melakukan diskusi perburuhan, mobilisasi aksi buruh dan penitipan kasus perburuhan. Seiring dengan penguatan isu HAM di tingkat global, konteks politik nasional yang diwarnai oleh konflik elit membuka kesempatan bagi kebangkitan gerakan oposisi dan penyebutan wacana HAM di Indonesia. Yasanti memanfaatkan peluang politik

tersebut untuk memobilisasi dukungan gerakan melalui jaringan aliansi dengan para aktivis orang dan mahasiswa dalam mengorganisir pembenahan kelompok-kelompok buruh, melakukan diskusi pemerintahan, mobilisasi aksi buruh, dan melakukan pembelian lagi buruh yang di-PHK oleh perusahaan. Proposer yang bisa ditilik dari fenomena tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

Penggerakan agenda gerakan perempuan diproyeksikan oleh pemahamannya bahwa masalahnya adalah isu atau isu-isu global dan kerangka politik yang terwujud di lingkungan global akan nasional untuk memunculkan agenda gerakan.

Penggerakan agenda gerakan Yasanti mengikuti kecenderungan global, dimulai dari perdebatan WID vs CIAI, isu FIRM, hingga kesetaraan reproduksi. Menekankan pengaruh yang kuat dari *trans* global bagi arah gerakan perempuan. Terlebih lagi *trans* global selalu diiringi dengan konsentrasi lembaga donor untuk mendanai program-program yang selaras dengan isu global yang sedang mengemuka. Akibatnya, agenda gerakan Yasanti dan juga gerakan-gerakan perempuan bertemu orang yang lain sangat dipengaruhi oleh isu atau wacana global karena ketergantungan gerakan pada dana dari lembaga donor. Fenomena tersebut melahirkan proporsi sebagai berikut:

Dirumuskan perempuan berkolaborasi dengan lembaga melalui mengorganisasi gerakan untuk keberagaman dan dari lembaga donor, sehingga isu atau agenda gerakan yang diwujudkan cenderung mengikuti agenda global yang sedang mengemuka pemerintah lembaga donor.

Kelangsungan gerakan sangat ditentukan oleh cara bagaimana sebuah gerakan mengambil teknik dalam berhadapan-hadapan dengan rezim penguasa. Meskipun konteks politik nasional Indonesia pada awal dekade 1990-an memberi peluang bagi kelahiran dan perkembangan gerakan-gerakan spesifik, namun

kelangsungan gerakan sangat ditentukan oleh taktik gerakan dalam menjaga keausahan gerakan. Yasanti menjaga kelangsungan gerakannya dalam rezim Soeharto yang otoriter dan patriarkis dengan menampilkan diri sebagai organisasi perempuan yang melatih kegiatan-kegiatan keterampilan khas perempuan, namun di dalamnya melakukan penyadaran hak-hak perempuan, mengkritik kebijakan Orde Baru yang merugikan kaum perempuan dan buruh, serta menggerakkan aksi demonstrasi buruh. Taktik yang dilakukan Yasanti untuk menjaga kelangsungan hidup gerakan melahirkan proposisi sebagai berikut.

Kelangsungan hidup gerakan perempuan dalam rezim otoriter patriarkis dianggap oleh perempuan untuk menyuarakan diri sebagai organisasi perempuan yang menuliskan program-program rezim untuk kaum perempuan, namun di dalam program-program yang arif dan cerdas kebijakan rezim tersebut gerakan perempuan melakukan kritik terhadap kebijakan rezim.

Ketika Yasanti menggeser strategi gerakan ke arah politik dengan konsentrasi pada isu perubahan telah terjadi persinggungan antara kapitalisme dan patriarki sebagai akar marginalisasi perempuan. Perlawanan yang dilakukan Yasanti dalam memitigasi dampak negatif kapitalisme yang menyingkirkan buruh menunjukkan bahwa persoalan yang dihadapi perempuan di era kapitalis bukan sekedar persoalan patriarki, yaitu gender laki-laki versus gender perempuan, namun juga eksploitasi akibat kapitalisme sebagai persoalan khas yang dihadapi perempuan. Fenomena ini membenarkan argumen Ira Livingston bahwa era modern telah melahirkan perbedaan kategori tubuh laki-laki dan perempuan yang sebelumnya tidak dikenal di era pra-modern. Maria Mies, mengutip Fredene Engels, juga mengemukakan bahwa di era pra-sejarah sistem pembagian kerja

seksual dan sistem patriarki belum dikenal. Perkembangan kapitalisme telah menimbulkan "kolonisasi" terhadap perempuan yang melahirkan fenomena diskriminasi gender. Penjelasan Maria Mies bahwa kelahiran patriarki dimulai sejak kelahiran kapitalisme merupakan penjelasan yang jaring radikal dan revolusioner tentang sumber terjadinya sistem pembagian kerja seksual yang diskriminatif terhadap kaum perempuan. Menurut Mies dalam sistem kapitalisme kelahiran sistem pembagian kerja seksual yang patriarkis merupakan konsekuensi dan kecenderungan kapitalisme untuk memisahkan perempuan tidak berbeda dan perlakuan terhadap alam, yang oleh karenanya dapat diperlakukan sebagai "ketanahan produksi" atau "faktor produksi" yang sah untuk dikolonisasi dan dieksploitasi.¹ Pertinggungan antara patriarki dan kapitalisme dalam proses marginalisasi terhadap perempuan melahirkan proporsi sebagai berikut:

Gerakan perempuan memiliki peluang untuk menanggapi keberkahan (sumbu) dalam masyarakat dengan kritisitas perempuan jika mereka menentang hegemoni patriarki dan dampak negatif kapitalisme bagi perempuan

Gerakan Yasanti tidak sepenuhnya dapat dilihat dari inspirasi McAdams, McCarthy dan Zald, meskipun memuat definisi Wieringa maupun Raravi. Yasanti adalah representasi gerakan perempuan kecenderungan mengukuli *runal* global menyebabkan elemen-elemen kultural yang sebenarnya sangat berguna untuk membuat gerakan perempuan mendapatkan pengakuan dan pemertaan dari anggota gerakan dan masyarakat luas kurang dimanfaatkan oleh Yasanti. Pemertaan kultural (*runal* / *runong*) tidak nampak dilakukan oleh Yasanti.

Penjelasan lebih lanjut tentang asal mula sistem patriarki lihat Srikuti, *Komodifikasi dan Industrialisasi (Lubuk) Perempuan, Supu Takut* (Lahan Dukung Bedah Buku Penghambatan Komunitas Buntaran Yogyakarta 18 Mei 2016).

dan gerakan-gerakan perempuan yang lain. Gerakan perempuan telah banyak menggunakan kultur global dan bukan kultur lokal, akibat kecenderungan gerakan untuk selalu mengikuti trend global. Terlebih lagi perempuan di Indonesia kurang memiliki tradisi perlawanan akibat kultur masyarakat dan faktor religius yang sangat kental dengan nilai-nilai patriarkes yang meminggirkan perempuan. Selain itu mobilisasi gerakan Yasanti lebih banyak terpusat pada mobilisasi makro melalui donor untuk membiayai program-program Yasanti dan pembentukan jaringan dengan berbagai macam perempuan dan kaum buruh, bukan aliansi dengan elite politik. Demikian pula mobilisasi mikro dalam bentuk pola-pola rekrutmen untuk merekrutis anggota dan simpatisan gerakan tidak cukup sistematis dilakukan Yasanti. Hal ini menimbulkan kesulitan untuk melihat sejauhmana gerakan Yasanti berhasil meluas di kalangan anggota. Ketidakefektifan sebagian penulis McAdam, McCarthy dan Zald untuk membahas gerakan Yasanti tidak bisa diartikan bahwa Yasanti bukanlah bentuk sebuah gerakan sosial. Gerakan perempuan sebagai salah satu bentuk gerakan sosial mempunyai bentuk mobilisasi dan pergerakannya yang berbeda dengan ketidakefektifan gerakan sosial pada umumnya. Yasanti memiliki kecenderungan ini.

4. Implikasi Teoritik

Kelahiran dan dinamika gerakan Yasanti sebagai bentuk gerakan perempuan di Indonesia berperspektif feminis mengustakan sebagian argumen McAdam, McCarthy dan Zald (2004) tentang sintesis antara teori struktur kesempatan politik, struktur mobilisasi dan pembungkaran. Proses pembungkaran

(*framing*), yaitu kesadaran bahwa perempuan termarginalisasi dalam proses pembangunan mendorong pembentukan gerakan perempuan ketika kesempatan politik memberi peluang bagi kelahiran gerakan. Kondisi ini menggambarkan keterluasan ruang faktor kesempatan politik, mobilisasi gerakan dan proses pembangkitan sebagai suatu rangkaian konseptual dalam mengualisasi fenomena gerakan sosial sebagaimana diasumsikan oleh McAdam, McCarthy dan Zald.

Pembangkitan berlangsung terus-menerus sejak sebelum Yasanti lahir hingga setelah organisasi berdiri dan berkembang. Fenomena ini juga membandingkan argumen McAdam, McCarthy dan Zald bahwa proses pembangkitan akan berlangsung terus-menerus dalam organisasi gerakan. Proses pembangkitan dalam bentuk kesadaran atas kondisi marginal perempuan telah berlangsung sejak Yasanti belum berdiri, bahkan menjadi pendorong utama pembentukan organisasi gerakan. Kesadaran terhadap marginalisasi perempuan semakin menguat setelah Yasanti berdiri karena para aktivisnya secara terus-menerus menyaksikan realitas kehidupan buruh perempuan yang sangat menyedihkan. Proses penyadaran yang berlangsung terus-menerus ini semakin mendorong para aktivis Yasanti membantu perempuan kelas bawah keluar dan keterpurukan mereka.

Taktik yang dilakukan Yasanti dengan menunjukkan diri sebagai organisasi perempuan yang melakukan kegiatan-kegiatan ketarungtaran, dan bahkan menggunakan forum PKK sebagai pintu masuk ke dalam komunitas juga mendukung argumen McAdam (2004) bahwa bentuk mobilisasi yang efektif sebuah gerakan sangat dipengaruhi oleh macam kesempatan politik yang

dihadapi gerakan Yasanti menyadari bahwa keberagaman gerakan feminis dalam rezim dan masyarakat yang patriarkis akan dihadapkan dengan penolakan oleh negara dan masyarakat. Dalam konteks negara dan masyarakat patriarkis semacam ini Yasanti sebagai gerakan feminis melakukan strategi masuk ke dalam organisasi perempuan hindukan rezim, yaitu PKK dan melakukan kegiatan-kegiatan ketrampilan perempuan sebagai kegiatan yang bisa diterima oleh masyarakat dan rezim, namun sambil menyiapkan penyadaran hak-hak perempuan. Kegiatan-kegiatan ketrampilan terus dipertahankan hingga akhir masa kekuasaan Soeharto sebagai kamufase untuk menyukses agenda-agenda politik Yasanti, meskipun Yasanti tidak lagi memanfaatkan organisasi PKK sebagai pintu masuk ke dalam komunitas perempuan. Di sini pengalihan Yasanti selaras pula dengan argumen West dan Blumberg (1990) bahwa gerakan perempuan cenderung memanfaatkan sarana-sarana non politik agar dapat bertahan di tengah-tengah rezim yang otoriter.

Kelahiran dan dinamika gerakan Yasanti juga menyangkut argumen McAdam, McCarthy, dan Zald bahwa lingkungan politik sangat mempengaruhi perkembangan gerakan. Namun McAdams dan kawan-kawan berdalil memusatkan perhatian pada dukungan-dukungan yang diberikan oleh sekelompok elit (akibat perpecahan elit) kepada gerakan, sehingga menyumbangkan keberhasilan gerakan. Berbeda dengan argumen McAdam dan kawan-kawan, bagi Yasanti kelompok elit penguasa tidak berimplikasi pada lahirnya dukungan sekelompok elit kepada gerakan Yasanti. Akan tetapi perpecahan elit memberi keuntungan bagi Yasanti dalam bentuk terbukanya peluang bagi kebangkitan kelompok oposisi. Kondisi

ini dijadikan Yasanti sebagai kesempatan untuk memobilisasi dukungan dari kelompok oposisi termis terutama para aktivis mahasiswa dan aktivis umum. Fenomena ini pula yang membedakan kasus Yasanti dengan argumen McAdam dan kawan-kawan yang melihat faktor kesempatan politik pendukung kelangsungan gerakan dan keberadaan kelompok elit dan kelompok-kelompok politik yang mendukung gerakan. Keberadaan kelompok-kelompok pendukung gerakan yang lahir dari konteks politik yang berubah sebagaimana dialami oleh Yasanti lupa dan perhatian McAdam dan kawan-kawan.

Pemaknaan kesempatan politik yang difokuskan pada konteks politik dalam suatu negara seperti argumen McAdam, McCarthy dan Zald tidak cukup memadai untuk menjelaskan kelahiran dan dinamika gerakan perempuan. Dimensi kesempatan politik dalam negeri, yaitu tidak adanya repressi termis membatasi, membuka peluang bagi kelahiran gerakan-gerakan sosial, termasuk kelompok perempuan. Namun di beberapa negara kelahiran gerakan perempuan, termasuk kelahiran Yasanti tidak cukup dijelaskan hanya dengan melihat konteks politik dalam negeri semata-mata, karena kesempatan politik di tingkat internasional dalam bentuk perhatian dunia pada isu atau masalah perempuan menjadi kondisi yang turut mendorong kelahiran gerakan dan mendukung perkembangan gerakan. Pengaruh penyebaran wacana internasional bagi Yasanti sangat nyata terlihat setelah gerakan berkembang, yaitu dalam bentuk pengakuan bagi keragaman agenda gerakan dan jaringan kerjasama dengan sesama feminis di dalam dan di luar negeri. Apa yang terlupakan oleh penemuan McAdam, McCarthy dan Zald adalah melihat aspek penyebaran isu atau wacana

internasional sebagai *lingkai (frame)* gerakan yang diikuti oleh kesempurnaan politik untuk melakukan gerakan dan mengembangkan gerakan

Kritik atas konseptualisasi McAdam, McCarthy dan Zald tentang struktur kesempurnaan politik pernah dikemukakan oleh Abdulhadi (1998). Menurut Abdulhadi kelahiran dan perkembangan gerakan feminis tidak saja didorong oleh struktur kesempurnaan politik dalam negeri yang memungkinkan kelahiran gerakan, namun juga harus ada kesadaran aktivis akan kondisi ketidakadilan yang mereka alami sebagai perempuan berpadu dengan masuknya wawasan internasional tentang feminisme dan demokratisasi yang terbangun lewat kontak dengan feminis di luar negeri, sehingga mendorong perempuan melakukan gerakan. Abdulhadi melihat struktur kesempurnaan politik internasional sebagai faktor yang dapat mendorong kelahiran gerakan, bukan semata-mata struktur kesempurnaan politik di dalam negeri.

Pertumbuhan dan perkembangan gerakan-gerakan perempuan kontemporer dalam bentuk *omni-perempuan* sebagai didorong oleh peristiwa-peristiwa internasional dan penyebaran wawasan feminisme di lingkup internasional. Sebagaimana dikemukakan Abdulhadi (1998) perkembangan gerakan perempuan tidak lepas dari pengaruh peristiwa-peristiwa internasional dan regional. Peristiwa-peristiwa internasional menjadi kondisi pendukung kebangkitan gerakan perempuan ketika kesempurnaan politik terbuka lebar bagi perempuan untuk menentang konstruksi keperempuanan yang telah diciptakan oleh negara patriarkis. Kontak internasional, terutama jaringan yang dihenyak oleh aktivis perempuan dengan kelompok-kelompok perempuan di

negara lain pada pertemuan-pertemuan internasional memperlihatkan kesadaran akan ketidakadilan dan membuat mereka untuk melakukan aksi protes atas pengalangan hidup yang mereka alami.

Kelahiran dan Perkembangan gerakan perempuan di Indonesia dalam bentuk ormas perempuan pada dekade 1980 dan 1990 juga hanya mendapat pengaruh internasional. Yanto Mulyono (2000) mengidentifikasi ada tiga peristiwa internasional penting yang mempengaruhi perempuan Indonesia dan gerakan-gerakan upuasi memperhatikan isu-isu perempuan, yaitu konferensi hak asasi manusia di Wina (1993), konferensi kependudukan di Kairo (1994) dan konferensi perempuan sedunia di Beijing (1995). Peristiwa-peristiwa internasional ini membangkitkan kesadaran feminis di kalangan aktivis perempuan Indonesia dan mendorong mereka mendirikan organisasi perempuan atau jaringan perempuan. Konferensi Beijing (1995) misalnya, telah mengilhami para aktivis perempuan membentuk jaringan yang memusatkan perhatian pada 12 area kritis yang tercantum dalam Deklarasi Beijing yang di antaranya mencakup persoalan anak-anak perempuan, perempuan pekerja migran dan kekerasan terhadap perempuan. Sementara itu konferensi kependudukan di Kairo (1994) mengilhami aktivis perempuan untuk membentuk jaringan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Eksistensi jaringan ini akan lebih menarik jika ada penelitian lebih lanjut tentang jaringan feminis Indonesia dan feminis di luar negeri siapa aktor-aktor di dalamnya, dengan siapa kontak-kontak mereka lakukan, dan mana yang diperoleh untuk membangun jaringan dan wacana apa yang dibangun.

Agak berbeda dengan analisis Abdulhadi maupun Yanti Machjar yang melihat keterkaitan langsung antara peristiwa internasional dengan kelahiran dan perkembangan gerakan perempuan, peristiwa internasional tidak secara langsung mendorong kelahiran YASANTI Peristiwa internasional, yaitu Konferensi Perempuan Sedunia yang pertama di Mexico City tahun 1975 dan pencahangan "Dasawarsa Perempuan" oleh PBB pada tahun 1976 tidak serta merta mengilhami kelahiran Yasanti. Namun implikasi dari dua peristiwa internasional tersebut yaitu maraknya studi-studi feminis dan diskusi-diskusi tentang marginalisasi perempuan telah mengilhami kelahiran Yasanti. Dengan demikian kelahiran Yasanti merupakan implikasi tidak langsung dari peristiwa-peristiwa internasional tersebut.

McAdam (2004) menjelaskan mengenai bahwa kesempatan politik di tingkat internasional merupakan bagian dari struktur kesempatan politik yang harus menjadi perhatian para pengkaji gerakan sosial politik. Namun McAdam lebih melihat aspek kesempatan politik internasional pada perubahan-perubahan politik dan ekonomi di tingkat internasional yang memberi peluang bagi gerakan-gerakan sosial untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan suatu negara. Sementara bagi Yasanti kesempatan politik global yang membawa pengaruh bagi gerakannya berwujud peluang dana dan lembaga donor sebagai respon atas penyebaran isu atau wacana internasional dan konferensi-konferensi internasional. Bagi Yasanti perubahan-perubahan politik dan ekonomi di tingkat internasional sebagaimana diasumsikan oleh McAdam tidak membawa pengaruh yang berarti bagi kelangsungan gerakan. Akan tetapi peristiwa

internasional dan penyebaran wacana internasional yang diikuti oleh peluang untuk mendapatkan dana dan lembaga-lembaga donor telah memengaruhi pengaruh yang sangat besar bagi keragaman agenda gerakan Yasanti dan perubahan strategi gerakan. Aspek penyebaran isu atau wacana internasional sebagai hal yang diikuti oleh kecenderungan politik untuk membiayai agenda gerakan perempuan ini terlewatkan dan pemikiran Mawdan, Mufanti dan Zula Auli penting lembaga donor bagi kelangsungan gerakan perempuan memisahkan ruang percobaan yang yang menarik untuk dikaji lebih mendalam, yaitu sejauhmana pengaruh lembaga donor bagi kelangsungan gerakan perempuan.

Latar belakang yang memengaruhi kelahiran Yasanti berbeda dengan argumen Tilly (1981) dan Sada (1980) yang melihat gerakan perempuan lahir sebagai reaksi sistem perempuan atas subordinasi dan represi sosial yang mereka alami sendiri. Meskipun ada kesamaan mendasar yang mendasari perempuan melakukan gerakan, yaitu subordinasi dan pengabaian hak perempuan, kelahiran Yasanti sebagai gerakan perempuan dalam bentuk orisip perempuan berbeda dengan analisis yang dikemukakan oleh kedua penkaji gerakan perempuan tersebut. Pengalaman hidup sebagai perempuan mendorong perempuan melakukan gerakan. Namun gerakan perempuan juga bisa lahir dari kalangan perempuan yang merasa terpinggirkan untuk melakukan sesuatu bagi kaum perempuan setelah melihat realita peminggiran kaum perempuan, meskipun hal itu tidak mereka alami sendiri. Mereka adalah kalangan perempuan kelas menengah yang lahir sebagai hasil proses pembangunan yang telah melahirkan kalangan perempuan yang terdidik dan terpelajar namun tidak akses yang mereka

militer dengan rekan-rekan mereka di luar negeri (Ikhsani) memungkinkan ideologi feminisme tumbuh subur di kalangan perempuan kelas menengah di dalam kasus Yasanti. Kelahirannya sebagai gerakan feminis tidak didasarkan oleh pengalaman penderitaan hidup para aktivisnya sebagai perempuan, namun lebih didasari oleh keprihatinan melihat kondisi hidup perempuan kelas bawah. Kesadaran ini dipupuk oleh kontak yang dijalin oleh pendiri Yasanti dengan para feminis di Jakarta yang memiliki akses dengan para feminis di luar negeri.

Kenyataan Yasanti menggunakan PKK sebagai pintu masuk ke dalam komunitas perempuan dan brosur-brosur ketidampilan perempuan sebagai *entry point* untuk melakukan pengorganisasian buruh perempuan sejalan dengan argumen Morris (1997) bahwa kesadaran dan ketidakpuasan aktivis perempuan akibat dominasi dan ketidakadilan yang dialami oleh kelompok perempuan seringkali harus berhadapan dengan budaya hegemonik yang lebih berkuasa di masyarakat (patriarki), sehingga aktivis perempuan perlu melakukan kompromi dengan budaya yang hegemonik itu.

Faktor keprihatinan karena melihat marginalisasi terhadap perempuan membedakan kelahiran Yasanti dengan kelahiran Vera Taylor (1999) dan Whigg (1999) yang mengartikan faktor emosi dengan kelahiran gerakan perempuan. Taylor mengemukakan bahwa aktivitas dalam gerakan perempuan diawali oleh faktor emosi (rasa malu, rasa takut dan depresi) akibat praktik-praktik sosial budaya yang tidak adil dan kemudian menimbulkan kemarahan. Perasaan adanya upaya memotivasi perempuan melakukan gerakan. Sementara Whigg (1999) mengemukakan bahwa pemahaman atas kondisi ketidakadilan yang dialami

perempuan melalukan ekspresi kerahatan atas sumber beridakadiban itu, sehingga mendorong perempuan melakukan gerakan Menurut Taylor dan White kerahatan dan ekspresi kerahatan sangat penting dalam aktivisme feminis. Anggapan ini berbeda dengan pengetahuan aktivis Yasanti yang berangkal dan rasa keprihatinan terhadap nasib perempuan yang tersubordinasi (bukan mereka sendiri yang mengalami subordinasi), sehingga ekspresi-ekspresi kerahatan tidak nampak nyata ditunjukkan oleh mereka.

Satu hal yang menarik dari gerakan Yasanti adalah waktu (*timing*) kelahirannya yang sebenarnya tidak mendukung bagi kehadiran sebuah gerakan feminis. Gerakan pemerdayaan perempuan kelas bawah yang dilakukan Yasanti dengan suang gerak yang disengaja berada pada level akar rumput (*grassroots*) memiliki corangan yang sangat berbeda dengan gerakan feminis yang lahir sesudah Yasanti, misalnya Kalyanasaini (1984) yang memilih bergerak di level wacana. Sementara itu organisasi-organisasi perempuan feminis yang lum di Indonesia lahir pada dekade 1990-an, sebuah periode waktu yang sangat memberi peluang bagi kelahiran gerakan feminis karena wacana feminisme telah masuk secara luas ke Indonesia dan konteks politik lebih memberi peluang bagi kehadiran gerakan feminis. Oleh karena itulah pada masa-masa awal hendir Yasanti melakukan pemerdayaan perempuan melalui kegiatan-kegiatan ketrampilan dalam forum PKK. Namun demikian pada dekade 1990-an, ketika konteks politik berubah dan terbuka peluang bagi gerakan untuk merubah orientasi ke arah politik, bentuk-bentuk kegiatan ketrampilan tetap dilakukan Yasanti karena berfungsi efektif sebagai kumulasi politik untuk

mengamankan kelangsungan gerakan. Di sini terlihat bahwa kelangsungan gerakan ditentukan oleh cara langgamnya gerakan harus mengambil strategi agar tidak direpress oleh negara.

Yasanti merupakan pirinet organisasi perempuan yang dalam kategorisasi Yanti Muchtar (2000) masuk dalam tipe organisasi wanita. Yanti Muchtar membedakan *women's movement* di Indonesia menjadi dua kelompok, yaitu organisasi wanita dan organisasi perempuan. Organisasi wanita berkemungkinan sangat dipengaruhi perkembangan *developmentalis* pada akhir 1970-an dan adopsi pendekatan WID oleh rezim Orde Baru pada tahun 1980-an menyetujui perencanaan dekade Dekade untuk Perempuan 1975-1985 oleh PHU. Menurut Yanti Muchtar organisasi wanita terpengaruh oleh wacana gender Orde Baru dan menggunakan pendekatan WID dalam program-program mereka. Sementara itu organisasi perempuan adalah organisasi-organisasi yang tumbuh sejak dekade 1990-an dan menggunakan pendekatan GAD. Namun demikian menempatkan Yasanti ke dalam kelompok organisasi wanita tidaklah tepat meskipun di lapangan Yasanti mengadopsi pendekatan WID dalam program-programnya, ada agenda kesesamannya yang dilakukan di belakang program-program *gender equality*, yaitu penguasaan hak-hak perempuan dan secara luas mengutip politik gender Orde Baru. Terlebih lagi kelahiran Yasanti dibarengbelakangi oleh kesadaran feminis bahwa perempuan mengalami subordinasi terorganisasikan sehingga menimbulkan keinginan untuk menentang kaum perempuan agar terlepas dari subordinasi.

Strategi-strategi politik yang dijunjukkan oleh Yasanti sebagai gerakan pemela kepemimpinan buruh perempuan agar bisa bertahap dan aman dan kecukupan aparat negara memperlihatkan bahwa Yasanti merupakan organisasi perempuan yang memiliki kekuatan politik berhadapan-hadapan dengan Orde Baru. Kondisi ini berbeda dengan argumen yang dikemukakan Hlini (1995) dan Jung (2001) bahwa Yasanti adalah omip yang mewakili kecenderungan generasi omip senior dengan ciri kegiatan advokasi dan profil politik yang rendah, meskipun berfokus pada masalah-masalah perempuan kelas bawah yang sebenarnya berpotensi menjadi masalah nasional. Walaupun harus diakui bahwa di permukaan kegiatan yang dilakukan Yasanti selama masa Orde Baru bersifat apolitik, namun kegiatan-kegiatan utama di belakangnya upaya pembelaan perempuan yang terlihat apolitik tersebut Yasanti perlu melakukan langkah politik melawan Orde Baru dengan jalan menggerakkan kelompok buruh, terutama pada awal hingga pertengahan dekade 1990-an.

4. Refleksi Kritis

Selama patrol sebuah gerakan feminis, keragaman wacana feminisme yang diadopsi Yasanti menunjukkan bahwa Yasanti tidak mengikuti dengan ketat atau kaku salah satu perspektif feminisme. Kelahiran Yasanti bahkan tidak disadari oleh para politiknya bahwa langkah mereka untuk membantu perempuan kelas bawah merupakan representasi gerakan feminis. Namun demikian, kesadaran yang melasari Kuyumari dan kawan-kawan mendirikan Yasanti omip dengan kesadaran kaum feminis sendiri yang melihat kapitalisme dan

masyarakat patriarhal sebagai akar penyebab peninggiran dan subordinasi perempuan. Akan tetapi perspektif feminis liberal terlihat lebih menawarkan solusi yang ditawarkan Yasanti untuk mengatasi marginalisasi dan subordinasi perempuan. Hal itu terlihat pada aktivitas Yasanti yang difokuskan pada perjuangan hak ekonomi dan politik bagi perempuan agar perempuan dihargai, serta melakukan proses penyadaran bagi kaum perempuan bahwa mereka memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki. Dalam perkembangannya, seiring dengan penyebaran wacana *Gender and Development* dan isu kesehatan reproduksi seruan-seruan yang dikampanyekan Yasanti tentang perlunya kesetaraan gender, hak reproduksi dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan mirip dengan isu yang diperjuangkan oleh kaum feminis sosialis dan feminis radikal. Akan tetapi pandangan Yasanti berbeda dengan kaum feminis radikal dalam yang menuntut pembebasan perempuan dari tugas-tugas kepemenuhan sebagaimana kaum dikondisikan masyarakat, among lain kesehatan untuk tidak menaruh hak untuk melakukan abortus, hak untuk tidak mau melahirkan karena dianggap menjadi sumber pemenuhan terhadap perempuan, atau hak untuk hidup bersama dengan sesama jenis. Yasanti lebih menyetujui tanggung jawab bersama perempuan dan laki-laki dalam pekerjaan rumah tangga.

Gerakan feminis dengan keragaman perspektif feminis sebagaimana dilakukan Yasanti merupakan peran umum gerakan feminis di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Malayu (1994) gerakan feminis Indonesia tidak menjadi pengikut salah satu perspektif feminisme. Meskipun kalangan minor

perempuan di Indonesia mengadopsi pemikiran feminisme Barat, mereka tidak menjadi pengikut yang patuh dengan alasan bahwa kaum perempuan Indonesia memiliki kompleksitas persoalan yang tidak bisa diwakili oleh satu pandangan dalam feminisme.

Keragaman agenda gerakan Yasanti yang terlihat sermentata mengikuti kecenderungan global menunjukkan kepoandisan (jika tidak ingin menyebutnya sebagai ketidakjelasan) agenda yang diperjuangkan. Paling tidak hal tersebut terlihat pada adopsi berbagai isu global yang mengemuka sebagai acuan agenda gerakan. Realita ini merupakan gambaran bahwa gerakan perempuan di Indonesia cenderung mengikuti *trend* global dibandingkan merumuskan sendiri agenda perjuangan perempuan yang digali dari persoalan hidup dan kebutuhan perempuan Indonesia. Pengaruh *trend* global tidak terlepas dari jaringan kontak antar omop yang berperan dalam menyebarkan isu-isu perempuan ke seluruh penjuru dunia, terutama isu-isu perempuan yang berkembang di negara-negara Barat seperti aborsi, kekerasan dalam rumah tangga dan pelekahan seksual. Sangat disayangkan perhatian terhadap isu yang sedang mendunia sering tidak berpindah lama. Begitu isu baru muncul, maka isu lama akan terhapuskan dan gerakan perempuan akan sibuk dengan agenda kegiatan menyebarkan isu global yang sedang berkembang. Bisa jadi (sebagaimana dibenarkan Wardah Hafidz) kondisi ini disebabkan oleh kurangnya keangguhan dalam menanggapi isu yang sedang berkembang atau mungkin juga karena isu-isu tersebut tidak mengakar dalam kehidupan perempuan Indonesia, sehingga gerakan perempuan gagal memberikan sumbangn bagi transformasi masyarakat yang adil

Kemandirian gerakan perempuan di Indonesia pun perlu dipertanyakan, terutama gerakan perempuan herbentuk smop akibat ketengantunan smop pada dukungan dana dari lembaga-lembaga donor. Pengalaman Yasanti menunjukkan bahwa keberadaan dana dari lembaga donor memiliki andri besar dalam membesarkan gerakan Yasanti. Demikian pula halnya dengan kecenderungan Yasanti untuk senantiasa mengambil peluang dana dari program-program yang menjadi agenda lembaga donor atau menyesuaikan agenda gerakan dengan agenda lembaga donor. Sudah sahnya smop perempuan memiliki keberanian melakukan penawaran agenda gerakan yang digali dari persoalan hidup perempuan Indonesia pada lembaga donor dan menjaga independensi gerakan.

Ekstensi dukungan dana dari lembaga donor yang mendorong Yasanti dan juga gerakan perempuan yang lain mengambil langkah pemberdayaan perempuan sesuai dengan wacana atau isu global menyebabkan ketidakjelasan ideologi alternatif macam apa yang hendak ditawarkan oleh gerakan perempuan. Jika ideologi patriarki dianggap sebagai musuh besar gerakan feminis, lalu ideologi alternatif apa yang hendak ditawarkan untuk mengikis ideologi patriarki tersebut, ideologi mazmarki atau apa? Ketidakjelasan ini kembali berkait dengan kekuatan isu perempuan global dan dukungan dana dari lembaga donor, sehingga menyebabkan gerakan perempuan feminis di Indonesia tidak memiliki agenda dan ideologi alternatif yang jelas untuk mengartikan ideologi patriarki yang dilawan oleh gerakan feminis.

Ketidakjelasan agenda yang hendak diperjuangkan semakin nampak ketika Yasanti menggeser strategi gerakan ke arah politik sejak dekade 1990-an

yang sebenarnya mengindikasikan tampaknya Yasanti sebagai aktor politik yang menentang kebijakan reform terhadap buruh perempuan. Namun disayangkan justru semenjak Yasanti menggeser strategi gerakan dan ekonomi ke politik wiyah Yasanti sebagai gerakan penuntut buruh perempuan mulai memudar. Jika menengok kembali Aktor Pergerakan Yasanti, di dalamnya secara jelas disebutkan bahwa tujuan Yasanti adalah untuk melakukan pemberdayaan perempuan. Namun ketika Yasanti menggeser strategi ke arah politik telah terjadi pergeseran visi dan misi Yasanti pada masalah perburuhan sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Strategis tahun 1992-1994. Dua misi yang berbeda tersebut menyehatkan ketidakjelasan apa yang sebenarnya hendak diperjuangkan oleh Yasanti. Walaupun Yasanti mengklaim diri sebagai organisasi yang menungging atau memperjuangkan buruh perempuan, hal itu layak dipertanyakan karena program-program Yasanti belum menguraikan secara spesifik pada isu pemberdayaan buruh perempuan.

Kelemahan lainnya adalah ketiadaan simbolisme musuh yang dilawan sebagaimana buruh digunakan oleh gerakan-gerakan sosial (misalnya simbolisme hujah seenak desa yang digunakan oleh PKI atau nuklir oleh Sirempawan untuk menggambarakan musuhnya). Simbolisme musuh tidak digunakan oleh Yasanti dan gerakan-gerakan perempuan di Indonesia pada umumnya. Di satu pihak hal itu mungkin dikarenakan musuh gerakan feminis adalah ideologi patriarki yang tidak kasat mata, sehingga sulit dilukiskan melalui simbolisme. Namun di lain pihak mungkin juga karena gerakan perempuan tidak mampu merumuskan secara jelas dan konkret musuh mereka. Sedangkan gerakan perempuan feminis di

Indonesia mampu mengeksposisikan musuh yang dilawan melalui simbol-simbol atau lambang mulai kekuatan gerakan akan bertambah besar karena ada perlawanan menjadi lebih jelas sehingga sampai serta dukungan dari anggota perlawanan dan masyarakat pada gerakan perempuan bisa dipastikan akan bertambah luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhadi, Rahah, "The Palesman Women's Autonomous Movement Emergence, Dynamics and Challenges" dalam *Gender and Society*, (Volume 17, Nomor 6, Desember 1998)
- Adijondra, George "Legitimasi Konsep oleh LSM" dalam *Sawas Anakota*, 4 Januari 1993
- Ali, Denny Januar "Understanding the Indonesian Student Movement in the 1980's" dalam *Prisma* No 47 September 1989
- Ali, Lachry, *Melakukan Sistem Politik di Indonesia dan Negara*, Jakarta: Eris Sarana Aksara 1985
- Alvarez, E, *Cultivating Politics in Brazil Women's Movements in Transition Culture* (Princeton: Princeton University Press, 1991)
- Anderson, Ben, "Current Data on The Indonesian Military Elite" dalam *Jepang*, (No 45 April, 1988)
- Barrons, Carmen, "The Women's Movement, the State and Health Policy in Brazil" dalam Geertje Lycklama & Nyholt, *Towards Women's Strategies in the 1990s*, London: Macmillan Ltd, 1991
- Basu, Amrita, *The Challenge of Local Activism: Women's Movements in Global Perspective*, Boulder: Westview Press, 1995
- Blackburn, Susan, "Gender Interest and Indonesia Democracy" dalam David Hirschman dan John Legge (eds), *Democracy in Indonesia 1966 and 1998*, Columbia Centre of Southeast Asian Studies, Monash University, 1994
- Bloch, Anne, "Pembangunan, ketertinggalan dan kekurangan" dalam Donald K. Emmertson, *Indonesia Beyond Sukarno: Negara, Ekonomi, Masyarakat, Proses* Jakarta: Transkripsi Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2001
- Beston, John, *Ujungjari Indonesia*, (New York: Columbia University Press, 1991)
- Budiman, Anel, "From Lower to Middle Class: Political Activities before and after 1988" dalam David Bourchier dan John Legge (eds), *Democracy in*

- Indonesia 1950s and 1960s*, (Claxton Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994)
- Chhachhi, Amrita, "The State, Religious Fundamentalism and Women in South Asia" dalam *Gender, Education & Society, Research Women's Strategies in the 1990s*, (London: Macmillan, Ltd, 1991)
- Fimmerson, Donald K, *Indonesian Women's Struggle: Sejarah, Gerakan, Akseptasi*, (Bandung: Jakarta Gramedia Pustaka Utama, 2001)
- Hakoh, Mansour, *Keorganisasian Sipil untuk Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Falk, Richard "Sovereignty and Human Rights: The Search for Reconciliation" dalam *HR Journals*, diakses 8 Januari 2025
- Ferre, Mera Marx, Carol Mueller, "Communism and the Women's Movement: A Global Perspective", paper dipersempikan sebagai naskah dalam David A. Snow, Sarah A. Soale, Hanspeter Kriesi (eds), *The Women's Contribution to Social Movement*, 2002
- Gamson, William, David S. Meyer, "Framing Political Opportunity" dalam Doug McAdam, John H. McCarthy dan Mayer N. Zald, eds., *Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunities, Mobilizing Structures and Cultural Framing*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)
- Gelinas, Jacques B, *Juggernaut Politics: Understanding Indonesia's Globalization*, (London & New York: Zed Books, 2015)
- Hadad, "Development and Community Self-Help in Indonesia" dalam *Prosa*, (No 28 Juni 1983)
- Hadad, Vedi K, "Challenging State Corporatism on the Labor Front: Working Class Politics in the 1990s" dalam David Bourchier dan John Leggy, *Peasants in Indonesia 1950s and 1990s*, (Claxton Centre of Southeast Asian Studies Monash University, 1994)
- Hadid, Wardah "Sumbangan Gerakan Perempuan dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia" dalam Fauzi Ridal, Lusi Margiyani dan Agus Fahri Husein, *Demokrasi Gerakan Perempuan di Indonesia*, (Yogyakarta: Lora Warana, 1993)
- "Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang, dan Sumbhngannya kepada Transformasi Bangsa, dalam Fauzi Ridal, Lusi Margiyani dan

- Agus Fahn Huscin. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995)
- Haryadhi, *Perspektif Gerakan Anak-anak 1975 dalam Gerakan Politik Nasional*. (Jakarta: Golden Terasa Press, 1994)
- Herman, Chris, "Anti-Capitalism Theory and Practice" dalam *International Socialist*, (No. 36, 2000)
- Harsono, Retika, "Mesejasi Persepsi Antara Kepentingan Perempuan dan Politik Gender" dalam Irwan Abdullah, *Sejaklah Perempuan Bergerak*. (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1997)
- Hendrawati, Lukas, "Bureaucracy, Participation and Distribution in Indonesia Development" dalam *Prisma*, (No. 38, Juni 1983)
- Hikam, Muhammad A N, *Politik Kewarganegaraan Indonesia Republikatara di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1999)
- Jocelyn, "Re-viewing Mainstream Theories: Political Opportunity Structure" dalam <http://www.socsci.uci.edu/~jocelyn/01.html> 24 Desember 22 April 2003
- Jung, Eunsook, *Indonesian Women NGOs in Transition: The Role and Limits of Women NGOs in Indonesia*. Thesis. (Seoul: Seoul National University, 2011)
- Kumar, Radha, "From Chipko to Sarb: The Contemporary Indian Women's Movement" dalam Aruna Basu, *The Challenge of Local Feminist Women's Movements in Global Perspective*. (Havard: Westview Press, 1995)
- Liddle, R. Williams, "Razia Uda: Paru" dalam Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Sukarno: Negara, Gerakan, Islam, dan Politik Transisi*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2001)
- Miles, Matthew B., & Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*. (Thousand Oaks: Sage Publications, 1994)
- McAdam, Doug, *Conceptual Origins, Current Problems, Future Directions* dalam Doug McAdam, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, *Comparative Perspectives on Social Movements*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004)
- McAdam, Doug, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, McAdam, Doug, John D. McCarthy, Mayer N. Zald, "Social Movements" dalam Neil J. Smelser (ed.), *Handbook of Sociology*. (Newbury Park: Sage Publications, 1986)

-, *Comparative Perspectives on Social Movements*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004).
- McCarthy, John D, Mayer K. Zald "Resource Mobilization and Social Movements: A Partial Theory" dalam *American Journal of Sociology*, (Volume 82) Nomor 6, Mei 1977).
- Malyens, Masing, "Mobilization without Emancipation? Women's Interests, State and Revolution" dalam R.R. Jagan, C.D. Dacin dan J.L. Curaggio (eds.), *Transition and Development: Problems of Third World Societies* (New York: New York Monthly Review Press, 1986).
- Mosse, Julia Clever, *Gender dan Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Rika Anna's Women's Crisis Center dan Pustaka Pelajar, 2013).
- Muchtar, Yanti, *The Genesis of the Women's Movement in the New Order State and Its Gender Interest*, Makalah dalam Konferensi WIVS - Indonesia: Women and Crises: Past and Present, Opportunities and Threats, 9-13 Desember 2001, KITLV, Leiden.
- Murnani, Nurik, *Cerahan dan Ketawanan Terhadap Perempuan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Nasrudin, "Penanggulangan Kemiskinan Kebijakan dalam Perspektif Gerakan Sosial" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* (Vol. 6, No. 1), Juli 2002.
- "Komodifikasi dan Industrialisasi (Fubuh) Perempuan: Siapa Takut", Bahan Diskusi Uedah Buku Pengantar, komunitas Perempuan Yogyakarta, 18 Mei 2006.
- Narasopra, Husein Egan, "Mahasiswa Indonesia dalam Panggung Politik" dalam *Prosa*, (Nomor 7) Tahun XXV Juli 1969).
- Notosusanto, Amud, *Indonesian Women: A History of Struggle in Politics*, (Jakarta: Program Studi Kajian Wanita Universitas Indonesia, 1992).
- Nusantara, Anikmah A, Marni Saib Patta dan Y.B. Sudarmanio, *Uda: Mahasiswa sebagai Gerakan Reformasi*, (Jakarta, Grafindo, 1998).
- Olson, Virginia "Feminism and Models of Qualitative Research" dalam Norman K. Denzin, *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks: Sage Publications, Inc. 1994).

- Benzinger, Jane C., Helen A. Moore, *Statistik Wanita*, Terjemahan oleh Hedi Sucahyono dan Van Sunaryana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)
- Bernhardsson, Sudjandari, *Gender Governance dalam Perspektif Administrasi Keperempuanan*, Masalah Ceramah pada Peserta Program Pelihan KRA XXXVII LEMHANNAS Kelompok Departemen Luar Negeri, Jakarta, 5 Oktober 2004
- Berman, Jan Jindy, "Gender Issues" dalam John Baylis dan Steve Smith, *The Globalization of World Politics*, (New York: Oxford University Press, 2001)
- Finney, Andrew, "Partners in Development? The Government and Non-Government Organization in Indonesia" dalam *Prisma*, (No. 28, Juni 1983)
- Purwardani, H. Kristi, "Organisasi Wanita Kristen di Indonesia: Dari Politik ke Kerja Sosial" dalam *Mayling Day-Gardiner, Mildred Wagemana, Evelyn Suleman, Sulastri. Perempuan Indonesia: Dunia dan Kita*, (Jakarta: PT Gramedia, 1987)
- Poster, Winifred R., "The Challenges and Promises of Class and Racial Diversity in the Women's Movement: A Study of Two Women's Organizations" dalam *Gender and Society*, (Volume 9 Nomor 6, Desember 1995)
- Rahayu, Ruth Inayah, "Politik Gender Tiga Hari: Urusan Organisasi Perempuan sejak 1980 an" dalam *Prisma* (Nomor 5 Mei, 1996)
- Raharjo, Daryam, *Indonesia di Tengah-Tengah Peradaban dan Dunia Persewa etc.*, Ceramah pada Ulang Tahun XXX Universitas Tugu Belah Agustus (INTAC) Jakarta, 7 Agustus 1982
- Russo, Shafrachop, Carol Miller, *From BFO to GLO: Conceptual Shift in the Women and Development Discourse*, (Geneva: UNRISD, 1995)
- Kaese, Ellen, "Maternalism and Political Mobilization: How California's Postwar Child Care Campaign was Won" dalam *Gender and Society*, (Volume 10, Nomor 5, 1996)
- Reimann, Kun D., "Politik, Norma-Norma dan Pertumbuhan MKG (SGO) Selama" dalam *Prisma*, (XVI/2004)
- Robinson Kathryn, "Wanita Ekstrem Versus Keragaman" dalam Donald K. Emmerson, *Indonesia Beyond Sukarno*, (Singapore: Percetakan Mergasari,

- Pranata. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan The Asia Foundation, 2001)
- Rosenfeld, Rachel A., Kathryn B. Ward. *The Contemporary U.S. Women's Movement: An Anomalous Year of Contemporary History*. (Paper pada Pertemuan Tahunan Asosiasi Sosiologi Amerika, September 1986)
- Rumansara, Agustinus. "Pengalaman INFID dalam Advokasi dan Kegiatan Internasional" dalam *Kustum Ibrahim, Agenda 2011 Menyongsong Tahun 2000*, Jakarta: CESIDA-J.P31.S, 1997
- Safa, H., "Women's Social Movements in Latin America" dalam *Gender and Society*, 4 Volume 4, Nomor 3, 1990
- Setuwan, Bonnie. "Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil" dalam *Praxis*, (Nomor 7, 1996)
- Shiva, Vandana. "Globalization and Poverty" dalam Verónica Henkel-Held-Thomson, Nicholas Barabas, Gunda von Werthel, *There is an Alternative: Sustainability and Globalization to Corporate Globalization*, (London, New York: Zed Books, 2001)
- Smith, Ines. "A Critical Look at the Indonesia Government's Policies for Women" dalam Jan-Paul Driekse, Frans Huisken dan Mario Ruben (eds.), *Development and Social Welfare: Indonesia's Experience under the New Order*, (London: KITLV Press, 1995).
- Snow, David A., Robert D. Benford. "Ideology, Frame Resonance and Participatory Mobilization." dalam *International Social Movement Research* (1, 1988)
- Stake, Robert E. "Case Studies" dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln, eds., *Handbook of Qualitative Research*, (Thousand Oaks: SAGE Publications, 1994)
- Summers, Neil. "Social Movement and the Social Construction of Human Right" dalam *Human Rights Quarterly* 21 (4, 1999)
- Stanley, Liz, Sue Wise. "Method, Methodology and Epistemology in Feminist Research Processes" dalam Liz Stanley, *Feminist Praxis: Research Theory and Epistemology in Feminist Sociology*, (London: Routledge, 1990)
- Stanley, Liz. "Feminist Praxis and the Academic Mode of Production" dalam Liz Stanley, *Feminist Praxis: Research Theory and Epistemology in Feminist Sociology*, (London: Routledge, 1990)

- Sundstrom, Lisa Melinosh, "Foreign Assistance, International Norms, and NGO Development: Lessons from the Russian Campaign" dalam *Journal.cambridge.org* in *www.diplomacylib.org* *Journal of Global Issues* Volume 3781320 Diakses 7 September 2005
- Supriyanto, Endik, *Perjuangan Para Mahasiswa: Peristiwa Sepuluh Nopember 1948*, (Jakarta: Pustaka Senai Harapan, 1998)
- Suryakusuma, Julia J., "Seksualitas dalam Pengaturan negara", *Prisma*, (tomus 7, Juli 1993)
- Tarrow, Sidney, *Power in Movement: Social Movements, Collective Action and Politics*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994)
- Taylor, Vera, "Gender and Social Movements: Gender Processes in Women's Self-Help Movements" dalam *Gender and Society*, (Volume 13, Nomor 1, Februari 1999)
- Taylor, Vera, Nancy E. Whetter, "Collective Identity in Social Movement Communities: Lesbian Feminist Mobilization" dalam Alison J. Morris, Carol Mc Clurg-Muehler, *Frontiers in Social Movement Theory*, (New Haven: Yale University Press, 1992)
- Thomas, Jan J., "Everything about Us is Feminist: The Significance of Ideology in Organizational Change" dalam *Gender and Society*, (Volume 14, Nomor 1, Februari 1999)
- Tilly, Louise A, "Women's Collective Action and Feminism in France 1870-1914" dalam Louise A. Tilly dan Charles Tilly, *Women, Movements and Collective Action*, (Berkeley Hills: SAGE Publications, 1981)
- Triwipati, Endah, "15M Perempuan Transformasi Gerakan Alternatif Pemberdayaan Perempuan dalam Marling Oey-Gardiner, Militerial Wagermann, Evelyn Suleman Sulastri *Perempuan Indonesia: Jindu dan Kini*, (Jakarta: PT Gramedia, 1995)
- Ulmer, Anders, *Democracy and Difference: Transcultural Education among Postcolonial Post-Americanity Actors*, (Lund: Lund University, 1998)
- Warren, Georgia, "Women and Democratization" dalam Patrick Dunleavy dan Jeffrey Starmer, *Contemporary Political Science 1994* (Volume 40), (Helfest: The Political Studies Association of The United Kingdom, 1994)

- West, Giada, Rhoda Lois Blumberg. "Reconstructing Social Protest from a Feminist Perspective" dalam Giada West dan Rhoda Lois Blumberg *Women and Social Protest*, (New York: Oxford University Press, 1990)
- White, Annette M. "Talking Feminist, Talking Black: Migration/Immigration Process in a Collective Protest against Rape" dalam *Gender and Society*, (Volume 11, Nomor 1, Februari 1997)
- Wicarya, Saskia Eleonora. "Aborted Feminism in Indonesia: A History of Indonesian Socialist Feminism" dalam Saskia Wicarya, *Women's Struggles and Strategies*, (Aldershot: Aveer, 1988)
- , *Penghambatan Gerakan Perempuan di Indonesia*, diterjemahkan oleh Heri Setiawan, Jakarta: Garis Budaya, 1994
- Woll, Leslie, Leslie R. dan Jennifer Lueker (1995) "Feminism Lives: Holding a Multicultural Women's Movement in the United States" dalam Armita Basu, *The Challenge of Local Feminism: Women's Movements in Global Perspective*, Westview Press Boulder
- Yasanti. "Yasanti dan Periode ke Periode" dalam Dadang Juhanara, Amin Muflihanah, Istyanun, *Pengalaman Hidup Buruh Perempuan: Refleksi Perjuangan Kerasula dalam Menaklukkan Harah*, (Yogyakarta: Yasanti & IPMS (USAID), 1998)
- , "Komentar Buruh Perempuan (Kumpulan Yasanti)" dalam Dadang Juhanara Amin Muflihanah, Istyanun, *Pengalaman Hidup Buruh Perempuan: Refleksi Perjuangan Kerasula dalam Menaklukkan Harah*, (Yogyakarta: Yasanti & IPMS (USAID), 1998)
- Yuyal-Davis, Neta, Flava Anthias. "Introduction" dalam Flava Anthias dan Nira Yuyal-Davis, *Women-Minority-Women*, (London: Macmillan, Press Ltd, 1989)

Surat Kabar dan Majalah

- Kompas, 6 Agustus 1989. "Parah Sekali LSM yang Menjelakkan Bangsa Sendiri"
- , 30 September 1994. "Menbankam Menusutair Ada LSM Menpemas Isu untuk Merokan Negara"
- Kompas, 8 Juli 1989. "De Kuning dan Bantuan Swasta"

-----, 8 Desember 1979, "Mengapa Mereka Tidak Setuju"

-----, 21 Maret 1978, "Mereka Ziarah, Lalu Mengerek Spanduk Merah"

-----, 22 April 1978, "Mencari Cara ke Suasana Normal"

Dokumen dan Laporan

Akte Kelahiran Yayasan Annisa Swasti, 1982

Jurnal, (No 6, 1997)

Kebijakan dan Strategi Dasar Arah Pengembangan Program Yayasan Annisa Swasti 1992-1994

Laporan kepada Ibu Arsu Wiprawitna, Proyek Peningkatan Petanng Buruh Wanita melalui Gerakan Koperasi Produsen di Kawasan Industri Ungaran Jawa Tengah, Janpa Tahun

Laporan Program Ungaran, Kulu Progo dan Kota Tahun 1990

Laporan Perumahan Ungaran 1992

Laporan Akta Tahun Kegiatan Lapangan di Ungaran Tahun 1993

Laporan Kegiatan Lapangan Aksi Aksi dan Advokasi di Ungaran Tahun 1993

Laporan Divisi Pendidikan, Penelitian dan Dokumentasi Tahun 1994

Laporan Kegiatan Divisi Pendidikan dan Latihan Tahun 1994

Laporan Kegiatan Divisi Aksi dan Advokasi Tahun 1994

Laporan Aksi dan Advokasi di Ungaran Tahun 1994

Laporan Divisi Aksi dan Advokasi Sukoharjo Tahun 1994

Laporan Kegiatan Aksi Advokasi Ungaran Tahun 1994

Laporan Kegiatan Aksi Advokasi Sukoharjo Tahun 1995

Laporan Kegiatan Pramunajati Yogyakarta Tahun 1995

- Laporan Perkembangan Kelompok Remaja Putus Sekolah (RIPS) Tahun 1995
- Laporan Kegiatan Himpun Cendek Pasar Heninghargo Yogyakarta Tahun 1996
- Laporan Kegiatan Pengorganisasian Unysan Tahun 1996
- Laporan Kegiatan Pengorganisasian Sukoharjo Tahun 1996
- Laporan Kegiatan Perempuan Usia Produktif (PU.P) Tahun 1996
- Laporan Pengorganisasian Buruh Cendek Pasar Heninghargo Tahun 1996
- Laporan Semester I Tahun 1996 Divisi Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
- Laporan Perjakaran Staf Yayasan Tahun 1996
- Laporan Divisi Penguatan Kelompok Yayasan Tahun 1996
- Laporan Kegiatan Pengorganisasian Buruh Unysan Tahun 1996
- Laporan Pertemuan UNICOP Perempuan Indonesia Penerapan Konferensi Perempuan Sedunia di Beijing di Jakarta 4-7 Juni 1995
- Laporan *The First Asia Women 5000 Conference* di Bangkok Thailand 17-19 Februari 1996
- Laporan *Women's Human Rights on Trafficking Women oleh GIAATW (The Global Alliance Against Trafficking in Women)* di Bangkok 10-20 Juni 1996
- Laporan Kegiatan *The Second International of Trafficking, Prostitution and Child Marriage* di Jakarta 2-4 September 1996
- Laporan *Working Advokasi Hukum Perspektif Perempuan* di Bandung 25-28 September 1996
- Laporan Pertemuan Cieralan Perempuan Tahun 1996
- Laporan Manajemen Pengembangan Masyarakat bagi Motivator Wanita Angkatan Kedua Tahun 1987
- Notulen Yayasan
- Notulensi Evaluasi Akhir Tahun 1995 Yayasan Annisa Swasti
- Notulensi Rapat Yayasan Annisa Swasti Tahun 1996

Notulensi Evaluasi Akhir Yayasan Tahun 1995

Notulensi Rapat Yayasan Annisa Swasti Tahun 1996

Notulensi Evaluasi Akhir Tahun 1996 Yayasan Annisa Swasti di Paramgritis 20-23 Desember 1996.

Kumpulan Hasil-Hasil Semiloka tentang Hasil Konferensi Beijing yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi LSM/Ormas untuk Perempuan, 13-14 Desember 1995

Senoso, (No 1, 1996), "Lelaki Juga Wajah Mimong Anak

-----, (No IV/1, 1998), "Berhenti Pekerjaan Rumah Tangga"

-----, (No X/11, 1998), "Pemantauan Gizi selama Masa Reproduksi"

-----, "Bunuh dan Keselamatan Kerja I"

Daftar Wawancara

Wawancara dengan Budi Wahyuni, 30 Januari 2004

-----, 18 Juni 2004

Wawancara dengan Nuordyanah Djodjantini, 31 Maret 2003

Wawancara dengan Siti Muslimah Wijayanti, 19 Maret 2003

Wawancara dengan Sri Kusyuniati, 12 Juli 2003

-----, 23 Januari 2004

Wawancara dengan Amin Mufriyanti, 28 Januari 2003

-----, 18 Februari 2003

-----, 3 Maret 2004

-----, 11 Mei 2004

Wawancara dengan Ulmi Asti, 3 Maret 2004

Wawancara dengan Nuzhroh Aswadah, 11 Juni 2003

Wawancara dengan Thu. Sutarno, 4 Juli 2003

Wawancara dengan Kubyah, 4 Juli 2003

Wawancara dengan Elahub Chirum, 12 Juli 2003





YASANTI
yayasan anaba swasti



THE ESTABLISHMENT OF YAYASAN ANABA SWASTI (FOUNDATION FOR INDEPENDENT WOMEN)

Many social practices place women in positions where they are subordinate to, discriminated against, marginalized to, harassed and subjected to violence. These practices are deeply affecting women in both the private 'domestic' reproductive domains and the public productive domains as well as socio-cultural and cultural spheres. Cultural norms and practices coupled with the historically patriarchal interpretations of religious teachings, which direct daily social behaviour, render women to be powerless victims of rape control.

Such practices will stop at present society. Women are seen, present and active in the public sphere in which they inevitably earn privilege and status and create the institutions which hold the society together and motivated to fighting for the same. Despite women's participation in the public sphere, women are not being full of the rewards (control) of influence and manipulation. Women are considered and unequal to men in giving significant contributions and contributions in both spheres.

Concerned women interested to change the discrimination are focusing on analyzing the causal factors of maintaining the status quo. The process of analysis is through with the opposition being gathered from the current socio and cultural norms which dictate the behaviour of society, the order of which is frequented by the presence of groups.

Before the process of analysis could begin, the most appropriate approach needed to be understood. Yayasan Anaba Swasti was established to formulate this approach, conduct the above analysis and address the causal factors found through their creative efforts.

YASANTI is a non-government organization working at a community level with marginalized lower class women. The goal of our assumed strategy is to empower the most powerless in

the rapid process of industrialization through state. Considering the poor performance of women, as previously explained, target groups were chosen to participate in YASANTI's activities.

The target groups in which YASANTI is involved include women workers from the industrial sector (factory workers), the trade sector (shop assistants), the informal sector (porters, women) and school leavers in dealing with each target group YASANTI uses different approaches.

YASANTI began working with women workers in Guben, Klaten, Pige, Yogyakarta, Jember and Sukoharjo. These locations were chosen as within these geographical boundaries YASANTI has a human resources and capabilities concentrated.

AIMS AND OBJECTIVES

Based on the background information above, YASANTI's main objective is to carry out empowering activities for women. Empowering in this case, means improving women's quality of life both economically and socially.

ACTIVITIES

YASANTI's activities involve support of women worker groups, research, publication, education and training. The technical implementation of all activities are handled by three divisions, namely the Action and Advocacy, the Research, Publication and Documentation, and the Education and Training Division. In addition the Finance and Administration Division facilitates office administration. The following services were detailed information on the responsibilities of each division.

Action and Advocacy Division

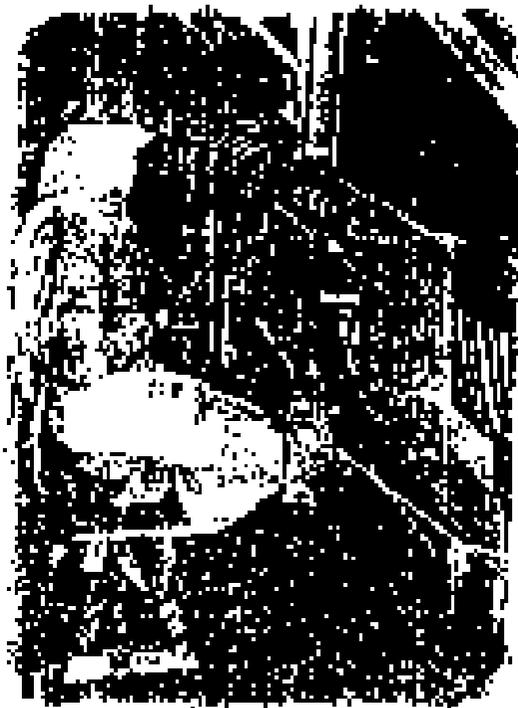
The division works in direct contact with the target groups. In general, the activities come under the heading 'group support' and take the form of education and/or training.

Educational activities involve a number of methods for different group categories, formal education, training and regular meetings.

Jember, 2019
Disertasi



Yayasan Annisa Swasti



Jl. Pamufarsih No 35b,
Palangpuluhon
Yogyakarta, 55251
Indonesia

Telephone/Fax: +62-274-576014

E-mail: yasasti@yogyk.wa.gov.id

Disertasi

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Organisasi Yayasan terdiri dari dua, yaitu
Badan Pengurus dan Pengurus Harian.

BADAN PENGURUS

Badan Pengurus adalah pondus Yayasan (dapat dimungkinkan untuk ditambah personalnya) adalah menyusun garis besar kebijakan program tahunan Yayasan. Badan ini tidak terlibat dalam kegiatan harian.

PENGURUS HARIAN

Pengurus Harian adalah para pengelola Yayasan Annisa Swasti yang terlibat secara penuh dalam seluruh kegiatan harian yayasan. Struktur Pengurus Harian terdiri dari Direktur Eksekutif yang dibantu oleh staf yang bekerja dalam divisi. Pengurus harian terdiri dari para praktisi dan tenaga ahli yang berhasil dan berbagai latar belakang dan disiplin ilmu seperti pengembang, masyarakat, hukum, pendidikan, ekonomi, kesehatan, agama.

PERSEKUTUAN BUNUH PEREMPUAN PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP PEREMPUAN?

Pikiran, semangat dan perasaan yang bertenggang dalam benak kami mirip yang terlakur dan dipikir oleh Kami, yang berbeda adalah waktu. Saat ini Kami ada pada alam perhijabahan dan kami dalam alam kemerdekaan. Namun adakah kemerdekaan bagi perempuan Indonesia dalam arti sesungguhnya dimasa kemerdekaan ini yang telah berusia lebih dari 50 tahun? Betapa rasanya mengungkap-mengapa ini terjadi, namun mi lami yang hampir setiap hari menjadi saksi.

Karena kasus perkosaan, pelecehan sebagai pembunuhan dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk bunuh perempuan hampir setiap saat menghisasi berita di mass media. Belum lagi perempuan yang terindia semakin hari semakin bertambah, sedang jumlah perempuan yang terlibat dalam kegiatan organisasi banyak perempuan yang sudah mapan.

Kondisi di atas menyebabkan kegiatan Yayasan mengutamakan untuk mendampingi dan mengembangkan kemampuan perempuan yang berada di situasi dan kondisi sulit secara ekonomi, politik maupun tingkat sosialnya. Kelompok perempuan yang selama ini telah menjadi miris Yayasan adalah kelompok bunuh ndusin, pramariaga, petani, buruh gendong dan perempuan usia produktif. Machya Astuti Dewi



Jl. Kemulorek 118 40135

Petangpalaan
Jagakarna 55251
INDONESIA

PO Box 1052

Telepon/Fax :
+82-274-376184

E-mail:

masrudi@yayasanannisa.org.id

Pada prinsipnya pembangunan manusia dan masyarakat tidak boleh membedakan jenis kelamin, kelas sosial, ekonomi dan budaya. Igama bahkan aliran politik tertentu. Tetapi faktanya, banyak praktik kehidupan sosial menempatkan perempuan dalam kondisi subordinasi, sandiwiningga, memanfaatkan bahkan menjadi objek pelekatan dan ketergantungan.

Perempuan selalu mendapatkan peran di sektor domestik, dan jika mendapat kesempatan di sektor publikpun (buruh) masih menanggung beban ganda (double burden). Hal ini menyudutkan perempuan pada guru dan kondisi yang tidak baik.

Persewaan - persewaan tersebut memunculkan keprihatinan bagi sesama perempuan. Berangsur dan keprihatinan itulah muncul keinginan untuk memulainya dan menanganinya persoalan tersebut. baik praktik hasil ketidakadilan maupun sumber penyebabnya. Walaupun demikian, untuk mewujudkan keinginan itu tentu tidak akan mudah karena harus berhadapan dengan lapisan sosial budaya dalam masyarakat.

Untuk itulah YASANTI (Yayasan Annisa Swadhidhar) dengan tujuan dapat melakukan perjuangan menuju kemandirian perempuan. Perjuangan dalam arti dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan baik secara ekonomi, sosial maupun politik.

Yai YASANTI adalah perwujudannya kehidupan masyarakat yang demokratis, bebas dari ketidakadilan gender, mempunyai kecakapan dan kemampuan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.

MHYASANTI adalah:

- 1) Mendukung usaha-usaha mewujudkan kehidupan berorganisasi buruh yang independen dan demokratis.
- 2) Menumbuhkan kesadaran kelas dan kelas buruh khususnya buruh perantara melalui pengorganisasian, pendidikan dan advokasi.

Isu Strategis

1. Bagaimana membantu/menh-fasilitasi pemberanian organisasi buruh lokal yang independen dan demokratis.
2. Bagaimana menawarkan program-program yang memenuhi/menjawab tanggung jawab-pertanyaan masyarakat kelas pekerja dan KHR, pelaksanaan perburuhan, penyelesaian konflik horizontal antara buruh.
3. Bagaimana bekerjasama dengan organisasi yang bisa membantu/bantuan di kelas (no 1 dan 2.)
4. Bagaimana meningkatkan jumlah dan kualitas pelaksanaan program dan sistem pendukungnya.



A K T E.

KANTOR

Tgl. 28 Januari 1982

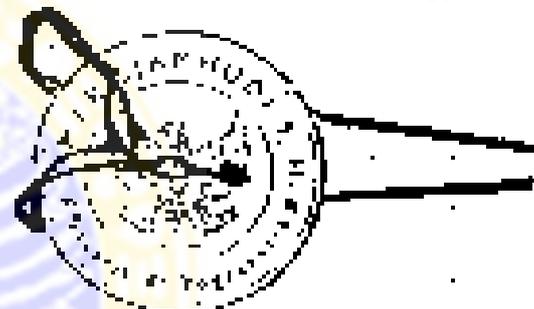
UMAR SJAMHUDI, SH.

NOTARIS

No. 157 -

Penjabat Pembuat Akte Tanah

DI



YATSIAN " ANGGITA " SUASTI
(" YASASTI ")

YOGYAKARTA

SIKSA KOPY ISI SERTA DISERIKAN
TETAP SAMA DENGAN ASLINYA.
YOGYAKARTA, 28 Januari 1982.

Alamat Kantor:
Jl. III Widyadarmas No. 42
Duyusipayan
Telp. 432 Yogyakarta



YAYASAN " ANNISA " SWASTI "

(" YASANTI ")

Nomor : 52.

Pada hari ini, hari Jumat, tanggal dua puluh dua Okto-
ber tahun seribu sembilan ratus delapan puluh dua.
Menghadap kepada saya, UJAH SJAMHURI SARIJANA HUKUM,
Notaris di Yogyakarta, dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya, notaris kenal dan yang nama-nama-
nya akan disebut pada akhir akta ini :

1. Nama DOGDEGRANDA LILISE HARYATI, Guru, bertempat
tinggal di desa Nologaten, Anbarukmo, Yogyakarta.
2. Nama ERI KUSYINIARI, Mahasiswa, bertempat ting-
gal di Estanggungan Ng.VII/87 Yogyakarta.
3. Nama I'IM INSIYAH FAQIH, Mahasiswa, bertempat
tinggal di desa Nologaten, Anbarukmo, Yogyakarta.
4. Nama HADI WANDANI, Mahasiswa, bertempat tinggal
di Jalan Solo No.157 A Yogyakarta.
5. Nama SITI MUSLIMAH SIDYASTUTI, Mahasiswa, ber-
tempat tinggal di Jalan H.T. Haryono Nomor 54
Yogyakarta.
6. Nama SITI NURJANNAH IGELANTINI, Mahasiswa, ber-
tempat tinggal di Kemoran RT.96/10 Yogyakarta.
7. Nama KUMARI DEWI, Mahasiswa, bertempat tinggal
di Jalan Bayungkaru Nomor 49 Yogyakarta.
8. Nama SUSILASATI, Mahasiswa, bertempat tinggal
di Jalan Kemuning No.19 Suroyo Yogyakarta.

Pada penghadap masing-masing diperkenalkan kepada
saya, notaris oleh para teman penghadap yang lain
saya.

— Para pangsadap terlobih dakuu maberitahu-
kan dan mameritakan, bahwa dala surat alda
ini talah ngyendirikan dan ngyisibkan uang
kekayaan maraha cobrayak Rp.50.000,00 (limang
lun ribu rupiah) yang diperantukana dan digor
pantaha buat bantu Yayasan jema' para pangsadap
dap mamerangjani dajalen surat alda ini nandi
rikannya, denikian dengan aturmentara atda
Yayasan Jema' sebagai terlobih dajalen ini :

..... Pasal 1.
.....
Yayasan ini bernama Yayasan " Al-Ma' ' Alati " atau
atau dajalen " Al-Ma' ' Alati " dan berkedudukan
di Jalan P. O. Mangrove 54 Selig. 3023 Yogyakarta.
Ditanggap-terang lain dajalen alda Rp. 700-
kita Indonesia dapat dajalen nida Rp. 100-
bilang-bilangnya, per. alda-pantukanya ,
atda kantarmentar pantukanya

..... Pasal 2.
.....

Yayasan ini didirikan untuk waktu yang tidak
ditentukan lamanya, dan telah berdiri sejak
tanggal sepuluh beliblah beliblah pantukanya
dan hijrah (10-umuhijrah-1403-21) atau tanggal
dapat dajalen dajalen September tahun per-
ta mabelanratus delapaspuluh dua (22 -
September 1972).

..... Pasal 3.
.....

Winar Spambudi S. M.
Karya di Tolak

Yayasan ini ber-ambisi Pancasila dan Da-
ng-Undang Dasar seribu sembilanatus
empatpuluh lima (U.U.D.1945).

_____ Pasal 4. _____

_____ Maksud dan Tujuan _____

Maksud dan tujuan Yayasan ini, ialah : -

1. Mengembangkan aspirasi dan potensi kaum
wanita dan mengembangkan nilai-nilai lu-
hur bagi kemajuan dan kesejahteraan
Bangsa dan Negara Republik Indonesia. ...
2. Mengembangkan sumber daya manusia dan
masyarakat Indonesia, khususnya dikala-
ngan wanita agar mampu menjawab tantan-
gan Sosial dan Ekonomi di masa mendatang. ...
3. Bekerja sama dengan Lembaga atau Organi-
sasi lain yang mempunyai maksud dan tu-
juan yang sama dan sejalan dengan Yaya-
sai ini.

_____ Pasal 5. _____

Dalam mencapai maksud dan tujuan tersebut
dalam pasal 4 (empat) Yayasan ini tidak
mencari keuntungan.

_____ Pasal 6. _____

_____ U S A B I _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut
dalam pasal 4 (empat), Yayasan ini selaku-
kan kegiatan sebagai berikut :

1. Pendidikan, latihan serta segala upaya
dalam arti yang seluas-luasnya demi pe-
ngembangan swadaya dan swakarya wanita,

terutama di bidang Pendidikan, Sosial

Ekonomi, Kebudayaan, Kesehatan, Ling

kungsa dan lain sebagainya.

2. Didalam batas-batas kesempukannya, Ya

yuanan bekerja sama dengan pihak-pihak

lain yang dapat menajukan maksud dan

tujuan seperti yang termaktub dalam

pasal 4 (empat) di atas.

3. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan

maksud dan tujuan Yayasan.

_____ Pasal 7.

K E A N G G A U T A A N

1. Keanggotaan Yayasan ini terdiri dari:

a. Anggota-anggota pendiri yang tidak

memiliki tanggung jawab dimuka tadi atau

para penghadap tersebut diatas.

b. semua wanita yang bersedia dan mampu

menajukan maksud dan tujuan serta ke

giatan Yayasan.

2. Untuk menjadi anggota Yayasan, calon

anggota harus disetujui oleh semua

anggota.

3. Keanggotaan Yayasan berakhir, bila:

a. meninggal dunia;

b. batas perintahan sendiri;

c. diberhentikan oleh Rapat Umum Angga

uta Yayasan.

_____ Pasal 8.

K E P E N G U R U S A N

1. Yayasan ini dipimpin oleh suatu Dewan

Pengurus yang terdiri dari sekurang-

perubahan harus disetujui oleh Rapat _____

untuk para anggota. _____

3. Pengurus berhak untuk dan atas nama Ya- _____

yanan melakukan perubahan Huruf baik _____

yang mengenai penilikan dengan pemba- _____

taan/batas-batas sebagai berikut : _____

a. mendapat atau memindahtangankan ke _____

kayam Yayasan baik yang berupa ba. _____

rang bergerak maupun tidak bergerak. _____

b. meminjam atau meminjamkan untuk dan _____

atas nama Yayasan. _____

c. mengadakan atau mempertanggungjawab _____

kekayaan Yayasan dengan cara lain, _____

atau _____

d. mengikat Yayasan sebagai penjamin _____

(borg atau avalista). _____

untuk a, b, c dan d diperlukan/mendapat _____

persetujuan Rapat Pengurus terlebih _____

dahulu. _____

5. Tiap-tiap ahli tahun baru, pengurus _____

melakukan perhitungan mengenai segala _____

pendapatan dan pengeluaran yang telah _____

telah disahkan oleh Rapat Pengurus, _____

dan harus disampaikan dengan selengkap- _____

_____ Pasal 10. _____

----- RAPAT, RAPAT DAN KEPENGUSAHA _____

1. Rapat Umum anggota harus diadakan se _____

kurang-kurangnya setahun sekali. _____

2. Rapat pengurus diadakan setiap kali _____

bila dianggap perlu oleh Ketua, atau _____

atau persintara sekurang-kurangnya _____

Tiap ahli tahun Pengurus-
wajib memberikan laporan -
pelaksanaan program-program
nya.
Appr. _____

- dan orang pengurus lainnya. _____
3. Tiap rapat pengurus dipimpin oleh salah _____
seseorang pengurus. _____
4. Keputusan rapat dianggap sah bila dihadiri _____
oleh sekurang-kurangnya separuh lebih atau _____
dari jumlah anggotanya, kecuali kalau da _____
lam Anggaran Dasar ini ditentukan cara _____
lain. _____
5. Semua keputusan diambil dengan prinsip _____
gugusmahan untuk manfaat atau muna ter _____
banyak. _____

Fasal 11. _____

Setiap tiga tahun sekali diadakan rapat ker- _____
ja yang diikuti oleh pengurus Pusat dan Per _____
wakilan, dan pada saat itu juga diadakan mu _____
syawarah untuk memilih pengurus baru. _____

Fasal 12. _____

K E K A Y A A N

Harta kekayaan Yayasan ini terdiri dari : _____

- a. Kekayaan pertama berupa uang tunai seha _____
nyak Rp. 50.000,00 (lispuluh ribu rupiah). _____
tersebut. _____
- b. pendapatan-pendapatan yang sah yang di _____
peroleh dari : _____
 1. sublangka dalam bentuk barang-barang _____
tetap maupun barang bergerak ataupun _____
dalam bentuk tunai baik yang bersifat _____
tetap maupun tidak tetap, yang keguna _____
nya diberikan tanpa ikatan yang ber _____
tentangan dengan asas dan tujuan Yayasan
 2. hasil usaha Yayasan sendiri; _____

Dear Jambodi, S. M
Karya & Karyanya

3. hasil tahun sebagai imbalan bagi pe-
manfaat harta kekayaan Yayasan oleh
pihak lain sebagaimana yang disangkakan
oleh pasal 9 di atas. _____

_____ Pasal 13. _____

_____ O R G A N I S A S I _____

1. Yayasan ini mempunyai kelengkapan Orga-
nisasi berupa Pengurus Harian, Depar-
temen-Departemen dan perwakilan-per
wakilan bila diperlukan. _____

2. Macam serta kelengkapan Organisasi
yang diatur lebih lanjut oleh Ang-
garan Rumah Tangga. _____

_____ Pasal 14. _____

_____ LAIN LAIN. _____

Rapat Pengurus akan menyetujui Anggaran
Rumah Tangga dan membuat Peraturan Pe-
laksanaan dari Anggaran Dasar ini yang
disebutkan sebagai norma untuk menga-
tur hal-hal yang belum diatur dalam
Anggaran Dasar ini dan tidak boleh ber-
tentangan dengan Anggaran Dasar ini. _____

_____ Pasal 15. _____

_____ ATURAN PERALIHAN _____

Sebagai pengubahan dari apa yang di-
tetapkan dalam pasal 8 (delapan) ayat
dua dan empat di atas, maka diangkat
Pengurus yang bertugas mempersiapkan
dan menetapkan jalannya Yayasan untuk _____

masa jabatan tiga tahun, yang susunannya
sebagai berikut :

- Ketua : SRI KUSYUMATI;
- Wakil Ketua : SITI MUSLIMAH WIDI
KASYATI;
- Sekretaris : BUDI WAKYUNI;
- Wakil Sekretaris : KUMARA DEWI;
- Bendahara : SITI NURJANTAH JOHAN
TINI;
- Wakil Bendahara : I'IN INSIAH FAQIH;
- Departemen Lit -
Bang : DOCTORANDA LELISE
KASYATI;
- Departemen Gasha : SUSILAWATI;

yang kepercayaannya tersebut di atas tadi.

Pasal 16.

TAMBAH DIBAWA

1. Tahun buku dari Yayasan ini dimulai dari
tanggal satu Januari sampai dengan pertengahan
bulan Desember dari tiap-tiap tahun.
2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk
pertama kalinya pada bulan Desember tahun
sebelumnya seribu sembilan ratus delapan puluh dua,
dan selanjutnya, maka buku-buku itu di
tutup dan dari buku-buku itu dibuat oleh
Pengurus Majelis suatu Neraca dan perhitungannya
dari kekayaan, pendapatan, dan pengeluaran
dari Yayasan ini.

Pasal 17.

PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN

1. Anggaran Dasar ini dapat diubah dan Yaya-

LATAR BELAKANG

Pendokumentasian data kelompok dilakukan secara reguler di kemudian waktu berupa laporan kelompok. Yang mengawali kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh YANASRI meliputi kelompok DECAJAN, SUKOHARJO, & YOGYA.

Pendokumentasian data kelompok kelompok dimulai dari tahun 1987. Dengan data kelompok ini diharapkan bisa memberikan informasi yang berkaitan kegiatan-kegiatan dan dilakukan oleh reguler. Jenis kegiatan apa saja yang bisa dilakukan banyak anggota terutama yang dimungkinkan kebanyakan perempuan, sesuai dengan misi YANASRI. Hal ini juga membantu keefektifan yang dapat menginformasikan di dalam kelompok. YANASRI juga bisa dengan melihat data kelompok yang ada akan diketahui bahwa pendataan yang dilakukan benar-benar ada kegiatan yang banyak jumlahnya. Dengan data dan perkembangan di dalam data kelompok adalah memberikan untuk menjalan kegiatan dengan reguler yang akan ada kursus atau masih dibarengkan untuk suatu kepentingan.

Sebagai contoh data kelompok ini dapat menjadi salah satu kegiatan dan untuk bisa melakukan kegiatan YANASRI.

A. BUKTI KEGIATAN & JUMLAH KELOMPOK

Lokasi kegiatan mulai masing-masing wilayah kabupaten/kabupaten dan kecamatan sebagai berikut:

I. JUNGTAJAN

- TH 1987 - 1988, Jumlah kelompok 17 dengan anggota rata-rata tiap kelompok antara 14 - 25 orang. Jenis kegiatan yang ada Menjahit, UJH simpul panyam, keperluan konsumsi.
- TH 1989, Jumlah kelompok 10 dengan anggota rata-rata 17 - 25 orang. Jenis kegiatannya Menjahit, UJH simpul panyam.
- TH 1991, Jumlah kelompok 14 dengan keanggotaan antara lain 15 - 20 orang. Jenis kegiatan Menjahit, UJH simpul panyam, Diskusi Perbaikan.
- TH 1992, Jumlah kelompok 9 dengan keanggotaan kelompok rata-rata 9 - 11 orang. Jenis kegiatan Menjahit, Diskusi, Anjangsana.
- TH 1993, Jumlah kelompok 14 dengan keanggotaan masing-masing 14 - 11 orang. Jenis kegiatan Menjahit, Kursus Tas, Diskusi, Anjangsana.
- TH 1994, Jumlah kelompok 8 anggota kelompok rata-rata 18 - 25 orang. Jenis kegiatan Menjahit, Kursus Tas, Anjangsana, Dekorasi, Diskusi.
- TH 1995, Jumlah kelompok 6 keanggotaan kelompok rata-rata 12 - 20 orang. Jenis kegiatan Menjahit, Kursus Tas, Anjangsana, Dekorasi, diskusi perbaikan.

II. SUKOHARJO

- TH 1989, Jumlah kelompok 3 keanggotaan masing-masing kelompok 12 - 20 orang. Jenis kegiatan Diskusi, Advokasi.

- TH 1991. Jumlah kelompok 6 jumlah anggota rata-rata 10 - 40 orang Jenis Kegiatan Diskusi, Anjingsana, Tari, Karawitan.
- TH 1991. Jumlah kelompok 7 Keanggotaan kelompok berkisar 3 - 25 orang Jenis kegiatan Diskusi, Karawitan, Anjingsana.
- TH 1995. Jumlah kelompok 3 dengan anggota rata-rata 13 - 23 orang Jenis kegiatan Diskusi, Anjingsana.

III. YOGYA

- TH 1987 - 1994. Kebon Rejo jumlah kelompoknya 7 dengan keanggotaan rata-rata 25-30 orang. Jenis kegiatan UB simpan pinjam, Koperasi kesehatan.
- TH 1987. Jumlah kelompok TOKO jumlah kelompok 10. Keanggotaan rata-rata 19 - 33 orang Jenis kegiatan Menjahit, Mengetik, Bhs Inggris, UH. Jumlah kelompok RPS jumlah kelompok 8 Jumlah keanggotaan 17 - 36 orang Jenis kegiatan Menjahit, UB.
- TH 1988. Kelompok TOKO jumlah kelompok 6. Rata-rata anggota tiap kelompok 20 - 30 orang Kegiatan Menjahit, Mengetik, Bhs Inggris, UB. Kelompok RPS jumlah kelompok 3. Rata-rata anggota 15 - 35 orang Jenis kegiatan Menjahit, UH.
- TH 1989. Kelompok TOKO jumlah kelompok 3 Keanggotaan rata-rata 20 orang Jenis kegiatan Menjahit, Mengetik, Bhs Inggris. Kelompok RPS jumlah kelompok 3 Keanggotaan rata-rata 15 - 35 orang Jenis kegiatan Menjahit, UH.
- TH 1990. Kelompok TOKO jumlah kelompok 4 Keanggotaan rata-rata 21 - 31 orang Jenis kegiatan Mengetik, Menjahit, Bhs Inggris. Kelompok RPS jumlah kelompok 2 Keanggotaan rata-rata 24 - 30 orang. Jenis kegiatan Menjahit, UH.
- TH 1991. Kelompok TOKO jumlah kelompok 8 Keanggotaan rata-rata 13 - 19 orang Jenis kegiatan Menjahit, Mengetik, Bhs Inggris. Kelompok RPS jumlah 4. Keanggotaan rata-rata 17 orang Jenis kegiatan Menjahit, Mengetik, UH.
- TH 1992. Kelompok TOKO jumlah kelompok 4. Keanggotaan rata-rata 16 - 30 orang. Jenis kegiatan Menjahit. Kelompok RPS jumlah kelompok 4. Keanggotaan rata-rata 21 - 40 orang. Jenis kegiatan Bhs Inggris, Menjahit.
- TH 1993. Kelompok TOKO jumlah kelompok 3. Keanggotaan rata-rata 21 - 14 orang. Jenis kegiatan Menjahit, Bhs Inggris. Kelompok RPS jumlah kelompok 4 Keanggotaan kelompok rata-rata 16 - 20 orang. Jenis kegiatan Menjahit, UH.
- TH 1994. Kelompok TOKO jumlah kelompok 7 Keanggotaan kelompok rata-rata 9 - 34 orang Jenis kegiatan Menjahit, Diskusi. Kelompok RPS jumlah kelompok 4 Keanggotaan kelompok rata-rata 21 orang Jenis kegiatan Menjahit, UH.
- TH 1995. Kelompok TOKO jumlah kelompok 9. Keanggotaan kelompok rata-rata 10 - 13 orang. Jenis kegiatan Menjahit, Bhs Inggris, Diskusi. Kelompok RPS jumlah kelompok 6. Keanggotaan kelompok rata-rata 10 - 20 orang. Jenis kegiatan Menjahit, Kursus Tas, UB. Kelompok BG jumlah kelompok 6 Keanggotaan kelompok rata-rata 5 - 6 orang. Jenis kegiatan UB, Pengajaran, Belajar Instruktur.
- Tidak diketahui namanya? Kelompok TOKO jumlah kelompok 3 Keanggotaan kelompok rata-rata 10 - 16 orang. Jenis kegiatan Mengetik, Bhs Inggris. Tidak diketahui identitas keaktifan kelompok pada tahun tersebut. 1 Kursus didikan atau

Laporan Tahunan juga bisa ditertakan karena Model Laporan yang sudah dibuat oleh pihak kebetulan.

2) PERIBANDINGAN LARI & PEREMPUAN

- TPI 1991 - 1995 Untuk wilayah Ungaran mulai membuat persentase yang perbandingan laki & perempuan
- TPI 1992 - 1995 Untuk Sukoharjo, perbandingan yang ada 25 - 1000 perempuan
- TPI 1997 - 1998 Untuk Yogya Mayesitas masih banyak Perempuannya dan kesetaraan baik untuk Ungaran, Sukoharjo, Yogya masih masih ada yang ketertinggalannya adalah Perempuannya Sesuai dengan Visi & Misi YASABAN II

REKOMENDASI:

- Kesulitan pendokumentasian data pada kelompok Yogya, banyak yang ada baik manfaat, akan tetapi kesulitannya

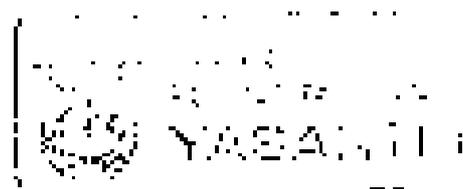
PENUTUP

Demiikian laporan pertanggung jawaban dari kerja kami terhitung mulai Agustus 1998. Apabila ada kekurangan atau kendala puseran dalam masalah laporan ini. Dan kami juga akan memberikan kritik yang membangun guna penyempurnaan lebih lanjut. Kami juga berharap semoga bisa lebih baik input dari kesalahannya dan tentunya juga banyak kekurangan pada diri kami. Data kelompok lebih detail terdapat pada lampiran yang tidak sempat kami lampirkan ini.

Terimakasih dan menunggu Anda kembali. Terima

Yogyakarta

Kuy, p



SWASTI

Masa pekerja 2010/11



..... **KETENAGAKERJAAN**
Memumbuhkkan Kekuatan Ekonomi Buruh

..... **KEADILAN GENDER**
Pembagian Kerja Dalam Rumah Tangga

..... **KESEHATAN**
Mengenal Sistem Seksual

..... **LINGKUNGAN**
Kebersihan Lingkungan



SWASTI 2010/11

Kondisi perekonomian Indonesia yang kian sempit. Yang telah kita rasakan sejak pertengahan tahun lalu, semakin banyak masyarakat seluruh tanah Indonesia. Kondisi ini tentu saja tak menawarkan kompromi seujung kepun. Tak pelak, perbedaan buruhpun berada dalam posisi yang semakin sulit. Seperti kita tahu bersama, di awal awal bencana krisis sampai sekarang, puluhan ribu buruh kehilangan mata pencaharian. Praktik ini sangat menyulitkan.

Itu buruh yang kebendaan tidak terkena gelombang PHK, tentu tidak bisa dikatakan kondisinya lebih baik. Betapapun, krisis ekonomi yang kita rasakan ini telah memusnahkan mata mata setiap mata Indonesia untuk meraih kehidupan yang lebih baik lagi. Incomong perantara politik dan sisi terpa semakin diturunkan.

Tanya bernilai melalui kelebihan persentase, bahwa perekonomian Indonesia 2022 ini benar benar telah memasuki kehancuran. Jangkanya, ketika perekonomian kembali tumbuh sama pula dengan kehidupan ini. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat tentu sangat semangat dibantu oleh pemerintah, kreatifitas dan kejiwaan untuk menciptakan peluang peluang yang bisa dilakukan demi memunculkan kekuatan ekonomi dalam skala kecil adalah ekonomi keluarga.

Jadi setiap keluarga yang adalah bagian terkecil dari bangsa ini telah menjadi korban, tentu bangsa ini pun akan menjadi korban pula. "Menumbuhkan Kekuatan ekonomi buruh" yang menjadi topik utama pada SWASTI edisi kali ini, tentu harus banyak melibatkan buruh ini sendiri. Dan yang terpenting lagi adanya ketidaktahuan tentang masalah dalam hal ini buruh, untuk mengungkap perbedaan dan kualitas hidup mereka.

Memperbaiki perekonomian itu bukan hanya mencari sulap yang dalam tempo sedikit dapat terwujud. Pengalaman ini membuktikan kesadaran, motivasi dan keinginan yang paling mendasar adalah mau untuk memperbaiki kualitas hidup baik secara fisik, psikis dan tentu saja secara moral. Topik utama yang SWASTI angkat kali ini, bisa dimulai pada tingkat berikutnya. Selamat membaca.

Menumbuhkan Kekuatan Ekonomi Buruh

Sejauh ini sampai pada kondisi yang semakin memprihatinkan karena kondisi ekonomi Indonesia yang kian terhempas, pemerintah berusaha mencari solusi untuk beroleh dan jika dikatakan sudah semakin membaik. Tentu saja bukan dalam konteks kualitas seperti sekarang ini. Kesimpulan ini dikemukakan bukan lantas mengesampingkan bahwa segala sesuatu akan mencapai kesempurnaan melalui sebuah proses. Tetapi yang perlu dikritisi adalah, apakah proses dalam mencapai kesempurnaan tersebut telah berjalan dengan baik, atau justru sebaliknya diciptakannya sebuah irama pembodohan dan pihak pihak tertentu yang mata bener ingin meraup keuntungan.

Mungkin kesimpulan kedua dari apa yang tersampaikan diatas merupakan sebuah jawaban ketika berjalannya sebuah kepemimpinan se-

panjang 12 tahun yang masih belum lagi mencapai tiga bulan. Tulisan ini memang terkesan mengupas persoalan persoalan di pemerintahan mata mata, tapi ini teramat penting sebagai sebuah pelajaran yang harus diajarkan untuk menalar dan kebijakan kebijakan baru nantinya dipemerintahan yang akan datang. Ada mata rantai yang terputus ketika kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi buruh. Apa yang perlu dibicarakan jika buruh sebagai motor penggerak ekonomi perusahaan tak memiliki posisi tawar yang seimbang? Buruh dianggap sebagai kelompok marginal, bodoh (karena dibodohkan) yang tidak punya hak apa-apa. Kalau tak pun

KOTAK POS

ada perusahaan yang memem-
palkan buruh sebagai partner
bagi perusahaan, mungkin
hanya bisa dibantu dengan jari
saja.

Seperti yang pernah ter-
ungkap dalam SWASTI edisi
yang lalu yang menyebutkan
bawa perusahaan takkan
berjalan tanpa keberadaan
buruh. Itu berarti buruh sebe-
narnya punya posisi tawar
yang seimbang dengan peru-
sahaan itu sendiri. Kedua belah
pihak punya hak dan kewajiban
yang sama. Sayangnya, hal ini
seringkali tidak dipalumi oleh
banyak orang. Tragisnya,
ketidaktahuan ini khususnya
dikalangan buruh justru semar-
kin dikondisikan.

Namun dari lain, meski
belum bisa mewakili jika
disebut 'sebagian besar', tak
sedikit buruh yang mengerti
akan hak-haknya. Kekuatan
ekonomi buruh akan tercipta
sepanjang buruh memiliki
posisi tawar yang seimbang
dengan perusahaan tempat
mereka bekerja. Nah pada ba-
gian ini perlu adanya instru-
men-instrumen untuk menca-
pai tujuan tersebut.

Penyadaran tentang
undang-undang perburuhan,
misalnya, ini akan sangat
membantu eksistensi buruh.
Dengan memahami aturan
main yang ada, praktis buruh
tak bisa lagi dipertimbangkan.
Artinya buruh bisa bernego-
siasi dengan pihak perusaha-
an dan terjadilah relasi yang
seimbang diantara keduanya.
Dengan begitu, tak perlu di-
ragukan bahwa ekonomi
buruh akan semakin mem-
baik karena posisi buruh tak
lagi dianggap sebagai golo-
ngan marginal yang cende-
rung, diperlakukan dengan
gaya feodal oleh atasan
(perusahaan).

Tempaknya kita me-
nunggalkan pernah terlepas
dari sebuah proses, betapapun
untuk mencapai posisi tawar
yang seimbang seperti yang
telah terungkap diatas, tidak
bisa tidak, bahwa buruh ditun-
tut untuk terus belajar. Hal ini
akan melahirkan persoalan
baru. Kemudian ada pertanya-
an, bisakah orang melampaui
ruas proses belajar sementara
harus juga berpikir tentang ba-
sic needs (kebutuhan dasar)?

Lagi-lagi, hal ini memang
bukan persoalan sederhana.
Kalau kita lihat secara lebih
mendasar, hal ini menyangkut
individu masing-masing yang
tak terlepas dari persoalan mo-
tivasi dan semangat belajar yang
berorientasi bagi peningkatan
kualitas hidup. Terlepas dari
mana memenuhi basic need,
perlu kita kaji bersama, sebe-
rapa besar semangat masya-
rakat Indonesia pada umumnya
memiliki semangat untuk
belajar? Benarkah kita telah
memiliki budaya belajar yang
mendalam?

Persoalan ini memang
menjadi sangat kompleks dan
teran seluruhnya memang sa-
ling terkait, memelaah komplek-
nya persoalan ini, tentu bukan
berarti kita sudah tak bisa
berbuat apa-apa lagi. Ada dua
hal yang bisa dilakukan bagi
tumbuhnya kekuatan ekonomi
buruh. Selain menciptakan ke-
kuatan posisi tawar dengan ber-
bagai strategi yang diterapkan
terhadap bursa itu sendiri,
pemberdayaan buruh pada ke-
lai yang mengarah pada ter-
bukanya minat buruh untuk
bertwista swasta sesuai dengan

minat dan kondisinya.

Dalam realitas yang ada,
tak sedikit buruh yang meno-
pang perekonomian keluar-
ganya dengan berdagang. Hal
ini memang pemenuhan kebutu-
han ekonomi secara praktis
tapi harus mungamping-
kan prospek yang ideal yaitu
penumbuhan kekuatan eko-
nomi buruh melalui mekanis-
me posisi tawar yang se-
imbang itu.

Jelas, untuk alternatif ke-
dua dalam menumbuhkan
kekuatan ekonomi buruh
secara praktis, setiap individu-
buruh membutuhkan ketampi-
lan khusus. Itu tentu bisa
didapat dengan mengikuti
kursus-kursus yang sudah
seringkali dilakukan pihak-
pihak tertentu termasuk LSM.
Dengan tercapainya hal ter-
sebut, rasanya tak perlu lagi
muncul alasan untuk tidak
melakukan proses belajar
untuk tidak melakukan proses
belajar untuk mengukuhkan
eksistensi buruh yang juga
merupakan bagian dari
masyarakat Indonesia.

Pembagian kerja dalam rumah tangga

Sarah bekerja di pabrik hari ini sudah mulai merasa kerja lagi setelah melirai dalam diri melalarkan selama 3 bulan. Syukurlah dia diberi staf normal (non shift) sehingga waktu sore dan malam hari bisa bersama keluarga, suami dan dua anaknya.

Dua jam kerja, Sarah segera keluar dari pabrik. Dia berniat belanja ke pasar yang memang tidak terlalu jauh. Sarah berjalan kaki saja daripada naik

angkutan berdesakan bila jam pulang kerja seperti ini. Kebetulan Gini, temannya satu bagian juga akan ke pasar sehingga mereka jalan bersama sambil cerita kesana-kemari tentang diri masing-masing.

"Kalau mbak Sarah kerja, siapa yang memong anak-anak?" tanya Gini

"Dulu anakku yang pertama aku titipkan pada tetangga yang biasa memong dengan ongkos Rp 1000,- tapi sekarang yang memong suamiku... Justru dia masih libur panjang" jawab Sarah.

"Suami mbak Sarah? apa bisa memong dua anak, apalagi yang kecil masih bayi" Tanya Gini penasaran.

"Apa yang wajib dan bisa memong itu perempuan saja? Sarah balik bertanya pada Gini. Gini tidak menjawab, Sarah malah semakin banyak cerita." Suamiku saat ini baru dinamatkan atau nganggur tidak kerja lagi akibat krisis moneter. Kita-kita sudah berangsur 3 bulan.... tepatnya sehabis Lebaran sampai sekarang. Karena belum

dapat kerja lagi dicumahi memong anak dari pada tak titipkan ke orang, lebih baik kan sama Bapakny... Lagi pula tidak usah kehilangan Rp 1000,- sehari. Ada cerita yang lucu lagi yaitu ketika aku pulang kerja, sampai belum sempat masuk rumah suamiku sudah cerita macam-macam tentang anak-anak. katanya sang bayi berak dua kali, nanges terus, ngempol terus ds. Malah dia kemarin ke Pasar beli pisang dan anak-anak dititipkan tetangga

"Wah enak mbak kalau punya suami bisa diajak kerjasama urusan rumah tangga" timpal Gini

"Lho, kalau nggak bisa diajak kerjasama terus bagaimana, apa urusan rumah tangga itu urusan perempuan? yang bangun rumah tangga kan berdua ya dimusabekama to" tambah Sarah

"Denar juga karanu mbak, semoga dia besok dapat suami yang baik, bisa diajak kerjasama" Gini Berkomentar.

"Apa memang kamu sudah ada calon, dari sekampung harus diciptakan komunikasi yang jelas, biar selanjutnya nanti juga enak, jangan hanya sebagai pihak pendesala saja... tidak ada pekerjaan laki-laki atau perempuan, tapi siapa yang mengerjakan." Nasihat Sarah

Gini nampak paham dengan omongan Sarah dan perjalanan yang singkat itu bermula bagi dirinya. Tak terasa mereka sudah sampai pasar

"Mbak mbak kasih ya... atas nasihatnya, kalau nggak bareng tadi kita pasti nggak sempat nginoret, aku kesana dulu... membeli sayuran" kata Gini

"Aku mau beli susu untuk anakku, kamu duluan saja.....besok kapan-kapan kita bisa barengan lagi, sampai ketemu besok ditempat kerja" balas Sarah.

Mereka kemudian berpisah untuk berbelanja keperluan masing-masing.



Diterbitkan oleh Yayasan Annisa Swasti
 Penanggung Jawab: Amin Muhtiyantih
 Pengeloh Sajjan: Team Yayasan Annisa Swasti
 Redaksi: Korak Poo 1032 Yogyakarta 55123 Indonesia
 Layout & Peredaran: (pono) LENTERA KOMUNIKA YK
 (tidak diluar tanggung jawab peredaran)

Mengenal Sistem Seksualitas

Kita perlu mengenal sistem dan tubuh kita sendiri, dan seperti halnya bagian-bagian tubuh yang lain (misalnya sistem pernafasan), seksualitas juga mempunyai sistem yang tertentu. Adapun komponen-komponen sistem seksualitas adalah:

1. *Identitas seksual*, yaitu penghayatan maskulin dan penghayatan feminin, identitas seksual ini merupakan kesadaran seseorang akan kepriaan atau kewanitaannya tubuhnya. Hal ini bergantung pada ciri-ciri seksual biologisnya, yaitu kromosom, genitalia eksternal dan internal serta ciri-ciri sekundernya. Dalam perkembangan yang normal, maka pada usia berumur 2-3 tahun seseorang sudah mengenal jenis seksnya sendiri.
2. *Identitas jenis seksual*, yaitu lingkup rasa/penghayatan tentang maskulin dan feminin seseorang. Kesadaran kepribadian akan jenis kelaminnya, merupakan hasil isyarat dan petunjuk yang tak terhingga banyaknya dan pengalaman-pengalaman dengan anggota keluarga, guru, kawan, teman sekerja dan dari fenomena kebudayaan. Identitas seksual dibentuk oleh ciri-ciri fisik yang diperoleh dari seks biologik yang selang seling berhubungan dengan

sistem rangsangan yang kompleks, termasuk pemberian hadiah dan hukuman yang berkenaan dengan hal seks serta sebutan dan petunjuk orang tua mengenai jenis kelamin.

3. *Perilaku peran jenis seksual*, yaitu perilaku yang menunjukkan maskulin atau feminin, dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu perilaku seksual dan perilaku peran jenis seksual. Perilaku seks berarti perilaku seks secara fisik, sedangkan peran jenis seksual mengaruh pada perilaku seseorang sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Perilaku peran jenis seksual adalah semua yang dikakukan dan dilakukan seseorang yang menyatakan bahwa dirinya yaitu seorang laki-laki atau perempuan. Faktor biologik merupakan faktor yang penting dalam menegakkan peran yang sesuai dengan jenis seksual seseorang. Namun faktor belajar merupakan faktor utama.

Misalnya pengaruh kromosom dan hormon seks dapat dikuasai oleh pekerjaan yang ditugaskan oleh orang tua, yang berlawanan dengan jenis seksualnya.

Masalah lain yang biasanya berhubungan dengan hal tersebut diatas adalah masalah penyimpangan seksual, homoseksualitas dan lain-lain yang akan dibahas pada saat yang akan datang.



KEBERSIHAN LINGKUNGAN

Sudah dua hari Indah tidak masuk kerja karena anaknya yang paling kecil (berusia 6 tahun) masuk rumah sakit karena demam berdarah. Teman-temannya satu bagian saling menenangkan dan mendengar kabar itu berencana untuk menengok. Mereka mencari waktu yang tepat di luar jam kerja pabrik, akhirnya direpakasi hari minggu depan kerumah Indah.

Pada hari yang sudah ditentukan, lima orang teman Indah datang ke rumah, mereka adalah Tutik, Rani, Asma, Puji dan Ana. Kedatangan mereka disambut oleh Indah dan orang tuanya (Rudih (tangan bercahaya orang tua)). Kebetulan anak Indah sudah pulang dan main kesekeliling tetapi masih harus istirahat penuh, mereka masuk kamar untuk menengok si sakit. Kesambutan dilanjutkan dengan ngobrol di ruang tamu.

"Berapa hari anakmu dirumah sakit Indah? dan darimana asal mulanya gampang kena demam berdarah?" Tanya Asma.

"Di rumah sakit lima hari" jawab Indah, sambil melanjutkan ceritanya, asal mulanya tidak kelihatan jelas, tetapi anaku beberapa hari demam... ..badannya panas terus dan lemas sekali" jawab Indah.

"Kalau kena demam berdarah katanya muncul bintik-bintik merah di lengan" tanya Tuti.

"Memang setelah panasnya nggak turun-turun, aka



periksakan anakku ke Puskesmas, dan dicurigai gejala demam berdarah. Setelah diperiksa secara teliti ternyata sudah mulai timbul bintik-bintik merah di lengan. Anakku harus opname, karena takut aku langsung bawa anakku ke rumah sakit" jelas Indah.

"Kata dokter penyebabnya apa mbak?" tanya Rara.

"Yang jelas nyamuk... namanya lupa saya Aedes apa ya... tapi sumbernya bisa macam-macam. misalnya lingkungan yang tidak bersih seperti got yang tidak mengalir, air yang menggenang, sampah/ kaleng bekas yang menumpuk, atau kebun yang tidak terawat sehingga menjadi sarang nyamuk", kata Indah.

Mereka terlihat pemeliharaan hangat, tak terasa hari sudah semakin siang mereka kemudian berpamitan pulang. Dalam perjalanan dirumah Indah tadi.

"Kok bisa ya terserang demam berdarah, padahal rumahnya juga bagus.... lembek, tidak seperti rumahku" kata Ana.

"Namanya penyakit kan tidak pilih-pilih, tapi walaupun rumahnya bagus tapi kalau tidak menjaga kebersihan kan sama saja, coba tadi Nini dikamarnya banyak baju yang bergantung telak karung, itu juga bisa jadi sarang nyamuk" balas Tuli.

"Belul juga, makanya kita harus selalu menjaga kebersihan, walaupun rumah jelek yang penting bersih keadaannya, lingkungannya" kata perisambil berpamitan sama teman-temannya kalau dia akan ke pertemuan diskusi kelompoknya. Keempat temannya pulang ke rumah masing-masing. Ana sempat berpikir apa yang yang didapatkan puji dalam pertemuan kelompoknya kalau boleh besok saya akan ikutan biar tambah pengalaman.

**kebersihan
adalah
pangkal
kesehatan**